



BAGIAN ANGGARAN 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

Jl.H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

LAPORAN KEUANGAN **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM** **TAHUN ANGGARAN 2018**



AUDITED



**Bagian Anggaran 013
Kementerian Hukum Dan HAM RI**



Laporan Keuangan

**Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

**Semester II
Tahun Anggaran 2018
*(Audited)***

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan
Jakarta Selatan



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

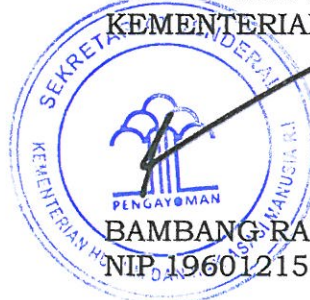
Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, 22 April 2019

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG RANTAM SARIWANTO

NIP. 196012151988021001



DAFTAR ISI



	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	xi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
II. NERACA	3
III. LAPORAN OPERASIONAL	4
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	5
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6
A. PENJELASAN UMUM	6
A.1. DASAR HUKUM	6
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6
A.2.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6
A.2.2. VISI, MISI, NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7
A.2.3. ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9
A.2.4. RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	10
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	12
A.4. BASIS AKUNTANSI	12
A.5. DASAR PENGUKURAN	13
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
B.1. PENDAPATAN	20
B.2. BELANJA	29
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	31
B.2.2. BELANJA BARANG	33
B.2.3. BELANJA MODAL	37
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	41
C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	47
C.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	50
C.3. BELANJA DIBAYAR DI MUKA	52
C.4. UANG MUKA BELANJA	55
C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	56
C.6. PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	57
C.7. BAGIAN LANCAR TP/TGR	58
C.8. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH – PIUTANG LANCAR	60
C.9. PERSEDIAAN	61
C.10. TAGIHAN TP/TGR	64
C.11. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA	66

	Hal
C.12. PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA	67
C.13. TANAH	67
C.14. PERALATAN DAN MESIN	73
C.15. GEDUNG DAN BANGUNAN	79
C.16. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	88
C.17. ASET TETAP LAINNYA	92
C.18. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)	97
C.19. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	104
C.20. ASET TAK BERWUJUD	104
C.21. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	108
C.22. ASET LAIN-LAIN	108
C.22.1 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN	109
C.22.2 ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN	113
C.23. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA	114
C.24. UANG MUKA DARI KPPN	115
C.25. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	117
C.26. HIBAH YANG BELUM DISAHKAN	118
C.27. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	119
C.28. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	120
C.29. EKUITAS	124
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	125
D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	125
D.2. BEBAN PEGAWAI	132
D.3. BEBAN PERSEDIAAN	136
D.4. BEBAN BARANG DAN JASA	139
D.5. BEBAN PEMELIHARAAN	146
D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS	150
D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	152
D.9. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	154
D.10. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	156
D.12. KEGIATAN NON OPERASIONAL	157
D.12.1. PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	157
D.12.2. BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	159
D.12.3. PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	159
D.12.4. BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	162
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	164
E.1. EKUITAS AWAL	164
E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO	164
E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	164
E.3.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	164
E.3.2. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	165
E.3.3. KOREKSI LAIN-LAIN	165
E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	166

	Hal
E.4.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	166
E.4.2. TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK	166
E.4.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	167
E.4.4. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAHUN ANGGARAN YANG LALU (TAYL)	167
E.5. EKUITAS AKHIR	168
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.	169
F.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	169
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN PERMASALAHAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	169
F.3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018	170
F.4 RANGKUMAN PENGUNGKAPAN PADA ESELON I	177



DAFTAR TABEL



		Hal
Tabel 1	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia T.A. 2018	11
Tabel 2	Perhitungan Penyisihan Piutang	15
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 4	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel 5	Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2018	20
Tabel 6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018	21
Tabel 7	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2017	22
Tabel 8	Perbandingan Realisasi PNPB per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018	23
Tabel 9	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	23
Tabel 10	Rincian Satuan Kerja yang Masih Terdapat Estimasi Pendapatan Akun 423141 – Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	23
Tabel 11	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	24
Tabel 12	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	25
Tabel 13	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	26
Tabel 14	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta	27
Tabel 15	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	27
Tabel 16	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya	27
Tabel 17	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	28
Tabel 18	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda	28
Tabel 19	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain	29
Tabel 20	Perbandingan Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2017 dan 2018	30
Tabel 21	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	30
Tabel 22	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I	30
Tabel 23	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2018	31
Tabel 24	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017	32
Tabel 25	Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 2017	33
Tabel 26	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2018	33
Tabel 27	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2018	34
Tabel 28	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2018	34
Tabel 29	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2018	34
Tabel 30	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa per 31 Desember 2018	35
Tabel 31	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2018	36
Tabel 32	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2018	37
Tabel 33	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2018	37
Tabel 34	Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018	38
Tabel 35	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018	38
Tabel 36	Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018	38
Tabel 37	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018	39



		Hal
Tabel 38	Rincian Penjelasan Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018	40
Tabel 39	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018	42
Tabel 40	Rincian Penjelasan Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018	42
Tabel 41	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018	44
Tabel 42	Rincian Penjelasan Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018	44
Tabel 43	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018	45
Tabel 44	Rincian Penjelasan Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018	45
Tabel 45	Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan 2017	47
Tabel 46	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	47
Tabel 47	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018	48
Tabel 48	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran yang Disetor di Awal Tahun 2019	49
Tabel 49	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	50
Tabel 50	Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	50
Tabel 51	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018	51
Tabel 52	Perbandingan Rincian Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	52
Tabel 53	Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 2017	53
Tabel 54	Rincian Kas Belanja Dibayar Dimuka berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2018	53
Tabel 55	Perbandingan Rincian Uang Muka Belanja per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	55
Tabel 56	Perbandingan Uang Muka Belanja Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	55
Tabel 57	Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	56
Tabel 58	Perbandingan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	56
Tabel 59	Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018	56
Tabel 60	Perbandingan Rincian Piutang PNBPN 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	57
Tabel 61	Perbandingan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	57
Tabel 62	Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	58
Tabel 63	Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	58
Tabel 64	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2018	59



		Hal
Tabel 65	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar 31 Desember 2018	60
Tabel 66	Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	61
Tabel 67	Perbandingan Nilai Persediaan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	62
Tabel 68	Rincian Koreksi Persediaan Per Satker Tahun 2018	63
Tabel 69	Rincian Koreksi Persediaan Per Kelompok Persediaan Tahun 2018	64
Tabel 70	Perbandingan Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	64
Tabel 71	Rincian Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2018	65
Tabel 72	Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	66
Tabel 73	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2018	67
Tabel 74	Perbandingan Nilai Tanah Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	68
Tabel 75	Rincian Mutasi Tanah	68
Tabel 76	Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	73
Tabel 77	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018	73
Tabel 78	Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	80
Tabel 79	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	80
Tabel 80	Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	88
Tabel 81	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	88
Tabel 82	Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya per Eselon I	92
Tabel 83	Rincian Transaksi Mutasi Aset Tetap Lainnya	92
Tabel 84	Rincian Nilai KDP Per Eselon I	97
Tabel 85	Rincian Mutasi KDP	97
Tabel 86	Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap	104
Tabel 87	Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018	104
Tabel 88	Rincian Aset Tak Berwujud Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018	104
Tabel 89	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018	105
Tabel 90	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Berdasarkan Unit Eselon I	108
Tabel 91	Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Unit Eselon I	108
Tabel 92	Rincian Aset Lain-Lain Per Jenis Aset	109
Tabel 93	Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Unit Eselon I	109
Tabel 94	Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	110
Tabel 95	Rincian Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Per Unit Eselon I	113
Tabel 96	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	113
Tabel 97	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	114
Tabel 98	Perbandingan Uang Muka dari KPPN Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	115
Tabel 99	Rincian Uang Muka KPPN Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2018	115



	Hal
Tabel 100 Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga 31 Desember 2018	117
Tabel 101 Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga berdasarkan Eselon I 31 Desember 2018	117
Tabel 102 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing Eselon I	118
Tabel 103 Perbandingan Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	119
Tabel 104 Rincian Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2018	119
Tabel 105 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	120
Tabel 106 Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2018	120
Tabel 107 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	121
Tabel 108 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2018	121
Tabel 109 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	125
Tabel 110 Perbandingan Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	128
Tabel 111 Rincian Selisih PNB-LO dan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017	128
Tabel 112 Penjelasan Selisih Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	130
Tabel 113 Rekapitulasi Selisih Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018	132
Tabel 114 Perbandingan Beban Pegawai-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	133
Tabel 115 Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	133
Tabel 116 Rincian Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	134
Tabel 117 Penjelasan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	134
Tabel 118 Perhitungan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	136
Tabel 119 Perbandingan Beban Persediaan-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	137
Tabel 120 Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	137
Tabel 121 Rincian Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	137
Tabel 122 Perhitungan Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	138
Tabel 123 Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2018	139
Tabel 124 Perbandingan Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	140



	Hal
Tabel 125 Rincian Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	140
Tabel 126 Penjelasan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	142
Tabel 127 Perhitungan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	145
Tabel 128 Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	147
Tabel 129 Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	147
Tabel 130 Rincian Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	148
Tabel 131 Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	149
Tabel 132 Perhitungan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	149
Tabel 133 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	150
Tabel 134 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	151
Tabel 135 Rincian Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	151
Tabel 136 Penjelasan Selisih Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	151
Tabel 137 Perhitungan Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	152
Tabel 138 Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	152
Tabel 139 Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	153
Tabel 140 Rincian Selisih Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	153
Tabel 141 Penjelasan Selisih Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	153
Tabel 142 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	154
Tabel 143 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	155
Tabel 144 Rincian Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	155



		Hal
Tabel 145	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	156
Tabel 146	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	156
Tabel 147	Rincian Selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	157
Tabel 148	Penjelasan Selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	157
Tabel 149	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	158
Tabel 150	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	158
Tabel 151	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	159
Tabel 152	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	159
Tabel 153	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	160
Tabel 154	Rincian Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	160
Tabel 155	Penjelasan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	161
Tabel 156	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	162
Tabel 157	Penjelasan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018	163
Tabel 158	Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2018	165
Tabel 159	Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi per 31 Desember 2018	165
Tabel 160	Perhitungan Transaksi Antar Entitas LPE 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	166



**PERNYATAAN
TELAH DIREVIU**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan
Telepon (021) 5252975, 5253004 Psw.226. Faksimili (021) 5252975
JAKARTA SELATAN 12940

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tahun anggaran 2018 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Hukum dan HAM RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 22 April 2019

Inspektur Jenderal,



Ihoni Ginting

Nip. 19610612 198903 1 003



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semester II Tahun Anggaran 2018 *Audited* yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 22 April 2019
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia



Yasonna H. Laoly



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (Bruto) sebesar **Rp3.563.687.410.263,00** dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Neto) sebesar **Rp3.563.546.496.086,00** atau mencapai **109,64%** dari estimasi Pendapatan sebesar **Rp3.250.308.730.000,00**

Realisasi Belanja Negara (Bruto) per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp12.670.792.949.598,00** dan Realisasi Belanja Negara (Neto) sebesar **Rp12.641.689.503.527,00** atau mencapai **96,49%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp13.101.216.922.000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar **Rp24.629.319.542.899,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp496.941.338.316,00**; Aset Tetap (Neto) sebesar **Rp23.843.409.775.812,00**; Piutang Jangka Panjang (Neto) sebesar **Rp10.413.618.366,00**; dan Aset Lainnya (Neto) sebesar **Rp278.554.810.405,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp404.827.332.901,00** dan **Rp24.224.492.209.998,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp3.528.582.438.941,00**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp12.025.101.892.920,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp8.496.519.453.979,00)**. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp98.653.896.221,00** dan **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(Rp8.397.865.557.758,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar **Rp24.482.912.484.963,00** ditambah Defisit-LO sebesar **(Rp8.397.865.557.758,00)** ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar **(Rp988.246.429.629,00)** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp9.127.691.712.422,00** sehingga Ekuitas entitas per 31 Desember 2018 adalah senilai **Rp24.224.492.209.998,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



**FACE
LAPORAN
REALISASI ANGGARAN**



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018		% Thd Angg	31 Desember 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1.				
Penerimaan Perpajakan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak		3.250.308.730.000,00	3.563.546.496.086,00	109,64	3.222.827.045.677,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.250.308.730.000,00	3.563.546.496.086,00	109,64	3.222.827.045.677,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1.	6.424.058.555.000,00	6.306.574.297.290,00	98,22	4.892.271.875.697,00
Belanja Barang	B.2.2.	4.761.221.741.000,00	4.489.360.521.766,00	94,84	3.910.053.634.074,00
Bunga		0,00	0,00	0	0,00
Subsidi		0,00	0,00	0	0,00
Hibah		0,00	0,00	0	0,00
Bantuan Sosial		0,00	0,00	0	0,00
Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		11.185.280.296.000,00	10.795.934.819.056,00	96,78	8.802.325.509.771,00
Belanja Modal	B.3.				
Belanja Tanah		66.000.000,00	53.488.000,00	81,04	100.178.690,00
Belanja Peralatan dan Mesin		952.672.946.000,00	930.412.376.308,00	97,66	981.819.978.485,00
Belanja Gedung dan Bangunan		885.426.503.000,00	851.124.623.588,00	96,13	599.635.123.948,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		3.089.186.000,00	2.983.175.102,00	96,57	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya		74.681.991.000,00	61.181.021.473,00	81,92	34.145.552.958,00
JUMLAH BELANJA MODAL		1.915.936.626.000,00	1.845.754.684.471,00	96,35	1.615.700.834.081,00
JUMLAH BELANJA		13.101.216.922.000,00	12.641.689.503.527,00	96,71	10.418.026.343.852,00



FACE NERACA



II. NERACA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	2.473.362.985,00	1.294.724.415,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.	32.906.472.664,00	36.289.582.072,00
Belanja Dibayar Dimuka	C.3.	11.586.621.509,00	14.616.502.667,00
Uang Muka Belanja	C.4.	0,00	75.516.187.188,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5.	6.258.866,00	24.546.979,00
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	C.6.	386.127.641.921,00	389.792.042.282,00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.7.	337.616.858,00	594.027.312,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar	C.8.	(347.985.003.319,00)	(359.846.235.742,00)
Persediaan	C.9.	411.488.366.832,00	547.645.750.308,00
JUMLAH ASET LANCAR		496.941.338.316,00	705.927.127.481,00
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10.	1.097.460.531,00	901.155.492,00
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.11.	9.449.000.000,00	11.151.900.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.12.	(132.842.165,00)	(71.927.775,00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		10.413.618.366,00	11.981.127.717,00
ASET TETAP			
Tanah	C.13.	12.625.444.631.053,00	12.672.489.520.638,00
Peralatan dan Mesin	C.14.	6.680.447.076.850,00	5.714.938.492.900,00
Gedung dan Bangunan	C.15.	10.457.963.798.623,00	11.135.467.855.672,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.16.	74.628.773.346,00	75.128.078.754,00
Aset Tetap Lainnya	C.17.	68.218.739.768,00	70.832.527.797,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.18.	722.754.577.352,00	288.538.742.791,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19.	(6.786.047.821.180,00)	(5.869.138.308.659,00)
JUMLAH ASET TETAP		23.843.409.775.812,00	24.088.256.909.893,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20.	526.019.128.257,00	486.690.695.488,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21.	14.478.828.000,00	0,00
Aset Lain-lain	C.22.	349.586.548.982,00	271.241.635.576,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23.	(611.529.694.834,00)	(563.362.646.686,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		278.554.810.405,00	194.569.684.378,00
JUMLAH ASET		24.629.319.542.899,00	25.000.734.849.469,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24.	2.473.362.985,00	1.294.724.415,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25.	105.218.621.484,00	222.697.385.108,00
Hibah Yang Belum Disahkan	C.26.	57.545.454,00	220.849.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27.	893.850,00	41.628.677,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.28.	297.076.909.128,00	293.567.777.306,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		404.827.332.901,00	517.822.364.506,00
JUMLAH KEWAJIBAN		404.827.332.901,00	517.822.364.506,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.29.	24.224.492.209.998,00	24.482.912.484.963,00
JUMLAH EKUITAS		24.224.492.209.998,00	24.482.912.484.963,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.629.319.542.899,00	25.000.734.849.469,00



FACE

LAPORAN OPERASIONAL



III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan		0,00	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.	3.528.582.438.941,00	3.109.727.638.461,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.528.582.438.941,00	3.109.727.638.461,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	6.304.961.550.122,00	4.899.079.271.131,00
Beban Persediaan	D.3.	636.996.764.306,00	162.533.989.438,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.929.889.611.316,00	2.525.821.583.416,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	410.670.100.817,00	370.981.577.432,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	625.199.086.404,00	554.089.018.108,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	1.629.306.089,00	307.668.046.124,00
Beban Penyusutan dan amortisasi	D.8.	1.126.350.293.138,00	1.008.619.969.690,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	(10.594.819.272,00)	(10.803.663.474,00)
JUMLAH BEBAN		12.025.101.892.920,00	9.817.989.791.865,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.496.519.453.979,00)	(6.708.262.153.404,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	D.10.	(10.507.866.148,00)	(20.397.881.863,00)
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya	D.11.	109.161.762.369,00	63.678.249.015,00
Defisit Selisih Kurs		0,00	0,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		98.653.896.221,00	43.280.367.152,00
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.397.865.557.758,00)	(6.664.981.786.252,00)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(8.397.865.557.758,00)	(6.664.981.786.252,00)



FACE
LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1.	24.482.912.484.963,00	23.088.519.377.924,00
SURPLUS (DEFISIT) LO	E.2.	(8.397.865.557.758,00)	(6.664.981.786.252,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	(988.246.429.629,00)	859.122.012.324,00
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	21.090.031.820,00	32.556.943.218,00
Selisih Revaluasi Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2.	(1.021.157.279.315,00)	824.349.720.214,00
Koreksi Lain-Lain	E.3.3.	11.820.817.866,00	2.215.348.892,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	9.127.691.712.422,00	7.200.252.880.967,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	24.224.492.209.998,00	24.482.912.484.963,00



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN UMUM**



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Profil dan Rencana Strategis

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A.2.2. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Visi

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum, dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

b. Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



yang profesional dan berintegritas.

c. Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Ada pun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika, dan integritas profesi.

2. Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh kementerian adalah:

- a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana;
- b. Terwujudnya layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang keimigrasian, kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan



- negara lain, pembinaan pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;
 - f. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

A.2.3. Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan dalam kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Sekretariat Jenderal membawahi tujuh unit Eselon II, yaitu 6 (enam) biro dan satu pusat, yaitu:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama;
- f. Biro Umum; dan
- g. Pusat Data dan Informasi yang merupakan unsur penunjang dalam Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

2. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawasan dalam Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

3. Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian yang bersifat teknis serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- e. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- f. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

4. Badan

Badan merupakan unsur penunjang dalam Kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang Hukum dan HAM); dan



- c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Hukum dan HAM).

5. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah membawahkan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungannya dalam hal pengawasan dan jalur koordinasi.

6. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah unit pelaksana pelayanan di bidang masing-masing dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Tahun Anggaran 2018 Kantor Wilayah mengalami pemekaran entitas akuntansi. UPT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Rumah Detensi Imigrasi;
- c. Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Balai Pemasyarakatan;
- e. Rumah Tahanan Negara;
- f. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- g. Balai Harta Peninggalan (di lima Kantor Wilayah); dan
- h. Balai Pendidikan dan Latihan Hukum dan HAM (di tiga Kantor Wilayah).

A.2.4. Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Restrukturisasi Program dan Kegiatan (RPK). RPK merupakan implementasi dari upaya penataan kembali Program dan Kegiatan sebagaimana rekomendasi dari Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.

Penataan kembali Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada seluruh Unit Eselon I selaku pemangku Program untuk dapat memiliki Satuan Kerja di tingkat Wilayah *in line* secara penganggaran. Dampaknya adalah:

1. Setiap Unit Eselon I memiliki Satuan Kerja di tingkat Wilayah berupa satker Kantor Wilayah;
2. Satuan Kerja di daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang semula bernaung di bawah Sekretariat Jenderal berpindah menjadi Satuan Kerja Unit Eselon I terkait.

Dalam proses penganggarannya maka Satuan Kerja Kantor Wilayah mengalami pemekaran entitas keuangan dan akuntansi, sehingga Kantor



Wilayah menjadi 10 (sepuluh) entitas yaitu pemangku anggaran:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Ditjen Administrasi Hukum Umum;
3. Ditjen Pemasarakatan;
4. Ditjen Imigrasi;
5. Ditjen Kekayaan Intelektual;
6. Ditjen Peraturan Perundang-Undangan;
7. Ditjen Hak Asasi Manusia;
8. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Balitbang Hukum dan HAM;
10. BPSDM.

Pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terhadap entitas Kantor Wilayah pemangku anggaran Sekretariat Jenderal tidak mengalami perubahan kode Satuan Kerja, sedangkan sembilan entitas baru memiliki kode Satuan Kerja baru.

Untuk 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) Unit Pelaksana Teknis daerah dan 18 (delapan belas) Perwakilan Luar Negeri seluruhnya mengalami perubahan kode Satuan Kerja karena berpindah program dari semula bernaung di bawah Sekretariat Jenderal menjadi bernaung di bawah Unit Eselon I terkait. Perubahan kode Eselon I dan kode satuan kerja tersebut memenuhi syarat sebagai UPT yang harus dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.05/2012 tentang Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Kementerian/Lembaga. Proses likuidasi dilaksanakan dengan menyusun Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Keuangan Likuidasi menggunakan Aplikasi SAIBA.

Ada pun jumlah Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia T.A. 2018

Unit Eselon I	Satker Pusat	Satker Kanwil	Satker LN	Satker UPT	TOTAL
Sekretariat Jenderal	2	33	0	0	35
Inspektorat Jenderal	1	0	0	0	1
Ditjen AHU	1	33	0	5	39
Ditjen Pemasarakatan	1	33	0	659	693
Ditjen Imigrasi	1	33	18	138	190
Ditjen Kekayaan Intelektual	1	33	0	0	34
Ditjen PP	1	33	0	0	34
Ditjen HAM	1	33	0	0	34
BPHN	1	33	0	0	34
Balitbang	1	33	0	0	34



BPSDM	3	33	0	3	39
TOTAL	14	330	18	805	1.167

Terdapat penambahan 5 (lima) satuan kerja baru di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yang berjumlah 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) satuan kerja. Penambahan 2 (dua) satuan kerja baru merupakan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 3 (tiga) satuan kerja baru di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

*Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktur di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti Eselon I, Kantor Wilayah, serta Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca, Laporan Operasional, dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tingkat Kementerian, satuan kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan Kementerian adalah Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan BMN.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang



mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:



- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan pada neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 2
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:



- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya

nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jauh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.



Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam



waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

**Implementasi Akuntansi
Pemerintah Berbasis
Akrual Pertama Kali**

8. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai 31 Desember 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada 31 Desember 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja prioritas dalam rangka pelaksanaan rencana kerja nyata pemerintahan, adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan serta dengan diterimanya Hibah Langsung berupa uang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2018

Uraian	2018	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	3,250,189,005,000,00	3.250.308.730.000,00
Jumlah Pendapatan	3,250,189,005,000,00	3.250.308.730.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	4.653.429.068.000,00	6.424.058.555.000,00
Belanja Barang	4.383.813.907.000,00	4.761.221.741.000,00
Belanja Modal	1.619.775.264.000,00	1.915.936.626.000,00
Jumlah Belanja	10.657.018.239.000,00	13.101.216.922.000,00

Dari tabel di atas dapat diinformasikan bahwa estimasi PNB awal TA 2018 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM masih disusun dengan menggunakan akun pendapatan lama (akun 423xxx). Hal ini terlambat diantisipasi dengan minimnya pengetahuan operator mengenai cara melakukan revisi estimasi PNB pada halaman III DIPA, walau sampai dengan akhir tahun 2018 telah diberikan perpanjangan waktu pengurusan revisi estimasi DIPA berdasarkan surat Direktur Jenderal Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-156/PB/2019 tanggal 7 Februari 2019.

Realisasi Pendapatan
(Netto)
Rp3.563.546.496.086,00

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan (netto) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.563.546.496.086,00 atau mencapai 109,64% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.250.308.730.000,00.



Keseluruhan Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jenis pendapatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain:

- a. Pendapatan jasa berasal dari penerimaan Jasa Keimigrasian yaitu penerbitan paspor WNI dan Visa/ijin tinggal Warga Negara Asing (Ditjen Imigrasi), perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual (Ditjen Kekayaan Intelektual), dan penerimaan jasa administrasi hukum (Ditjen Administrasi Hukum Umum);
- b. Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pendapatan sewa rumah dinas yang ditinggali oleh PNS;
- c. Pendapatan lain-lain berasal dari penggantian paspor rusak yang disebabkan oleh kelalaian manusia (Ditjen Imigrasi);
- d. Pendapatan dari hasil karya napi ataupun atas penjualan pemanfaatan sumber daya yang ada pada satker yang melibatkan narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dananya bersumber dari DIPA satker seperti penjualan hasil budidaya lele, ikan nila, hasil perkebunan dsb;
- e. Pendapatan penjualan atas hasil bongkahan/bongkaran bangunan sesuai arahan KPKNL setempat;
- f. Pendapatan bunga lainnya merupakan pendapatan giro bank.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	34.230.000,00	0,00	0,00
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	7.649.999.000,00	18.039.944.726,00	235,82
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	3.240.030.325.000,00	3.508.128.693.239,00	108,27
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	0,00	476.390.288,00	0,00
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	2.251.500.000,00	2.251.500.000,00	100,00

4256	Pendapatan Jasa Lainnya	223.655.000,00	333.748.656,00	149,22
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	25.831.000,00	1.662.987.694,00	6.437,95
4258	Pendapatan Denda	0,00	9.692.162.107,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-lain	93.190.000,00	22.961.069.376,00	24.638,98
Jumlah Pendapatan		3.250.308.730.000,00	3.563.546.496.086,00	109,64

Adapun estimasi dan realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2017

MAP	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	6.126.223.005,00	27.980.070.429,00	456,73
4232	Pendapatan Jasa	2.869.519.910.996,00	3.156.211.345.971,00	109,99
4233	Pendapatan Bunga	0,00	752.895,00	0,00
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan	0,00	2.000.000,00	0,00
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	0,00	5.533.434.464,00	0,00
4239	Pendapatan Lain-Lain	63.600.000,00	33.099.441.918,00	52.043,15
Jumlah		2.875.709.734.001,00	3.222.827.045.677,00	112,07

Dari tabel di atas dapat diinformasikan bahwa estimasi PNB awal TA 2018 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM masih disusun dengan menggunakan akun pendapatan lama (akun 423xxx). Sampai dengan laporan audited ini disusun masih terdapat satuan kerja yang terlambat melakukan revisi estimasi PNB, walau telah diberikannya perpanjangan waktu pengurusan revisi estimasi DIPA berdasarkan surat Direktur Jenderal Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-156/PB/2019 tanggal 7 Februari 2019.

pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan *Audited* Kementerian Hukum dan HAM TA 2018 masih terdapat estimasi PNB dengan akun pendapatan lama (akun 423141 – Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan).

Berikut adalah perbandingan Realisasi PNB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 :

Tabel 8
Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018

31 Desember 2017	31 Desember 2018	Kenaikan/Penurunan	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3.222.827.045.677,00	3.563.546.496.086,00	340.719.450.409,00	10,57

Berdasarkan Tabel 8 di atas, realisasi PNBPN per 31 Desember 2018 lebih tinggi sebesar Rp340.719.450.409,00 atau 10,57% dibandingkan per 31 Desember 2017.

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	34.230.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	34.230.000,00	0,00	0,00

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2018 masih terdapat estimasi PNBPN dengan akun pendapatan lama (akun 423141 – Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan) sebesar Rp34.230.000,00 pada satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Satuan Kerja yang Masih Terdapat Estimasi Pendapatan Akun 423141 – Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan

No	Nama Satker	Jumlah
1	Rutan Kelas II B Tanjung Pura	2.038.000,00
2	Rutan Kelas II B Pekanbaru	10.508.000,00
3	Lapas Kelas II A Tembilahan	15.984.000,00
4	Rumah Tahanan Negara Bantaeng	5.700.000,00
TOTAL		34.230.000,00

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	650.000,00	0,00	0,00
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	18.050.000,00	290.545.536,00	1.609,67
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	37.766.000,00	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	36.880.000,00	793.888.793,00	2.152,63
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.377.321.000,00	3.512.918.543,00	147,77
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.131.859.000,00	12.828.145.072,00	310,47
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	219.969.000,00	8.160.000,00	3,71
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)	2.800.000,00	0,00	0,00
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	862.470.000,00	554.120.782,00	64,25
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya	0,00	14.400.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan		7.649.999.000,00	18.039.944.726,00	235,82

- a. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119) merupakan pendapatan atas penjualan hasil karya narapidana ataupun atas penjualan pemanfaatan sumber daya yang ada pada satker yang melibatkan narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dananya bersumber dari DIPA satker seperti penjualan hasil budidaya lele, ikan nila, hasil perkebunan dsb..
- b. Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan (akun 425121) sebesar Rp.37.766.000,- merupakan penjualan atas hasil bongkahan/bongkaran bangunan sesuai arahan KPKNL setempat.
- c. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (akun 425122), Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (akun 425129) dan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya (Akun 425139)

merupakan hasil penjualan / lelang atas aset – aset yang telah rusak berat dan dihapuskan dan pendapatan atas pemanfaatan aset lainnya.

- d. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (akun 425131) merupakan pendapatan atas sewa rumah dinas, bangunan koperasi, kantin dan pendapatan sewa dari pemanfaatan gedung bangunan milik satker tersebut.
- e. Pendapatan sewa Peralatan dan Mesin (Akun 425132) pada Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok, Surabaya atas pendapatan sewa mesin pemotong kayu milik satker kepada pihak luar satker.
- f. Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya (akun 425149) pada satker Lapas Wanita Bandar Lampung sebenarnya merupakan pendapatan sewa gedung untuk kegiatan koperasi (akun 423131) yang disetorkan dengan akun yang keliru.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425211	Pendapatan Paspor	1.908.097.000.000,00	1.097.623.900.000,00	57,52
425212	Pendapatan Visa	0,00	222.629.046.105,00	0,00
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali	0,00	521.131.100.000,00	0,00
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0,00	284.913.445.000,00	0,00
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	497.388.650.000,00	740.179.950.000,00	148,81
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	193.531.550.000,00	116.545.148.967,00	60,22
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	179.340.525.000,00	26.693.152.424,00	14,88
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	461.654.000.000,00	498.294.215.005,00	107,94
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	18.600.000,00	118.735.738,00	638,36
Jumlah Pendapatan		3.240.030.325.000,00	3.508.128.693.239,00	108,27

- a. Realisasi Pendapatan Akun 425212, 425213 dan 425214 merupakan pendapatan jasa yang berasal dari penerimaan Jasa Keimigrasian yaitu penerbitan paspor WNI dan Visa/ijin tinggal Warga Negara
- b. Realisasi Pendapatan Akun 425218 merupakan pendapatan dari Ditjen Kekayaan Intelektual dalam proses perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual berupa perlindungan Merek, Paten, dan Hak Cipta
- c. Realisasi Pendapatan Akun 425215, 425216 dan 425217 merupakan pendapatan dari penerimaan jasa administrasi hukum berupa layanan fidusia dan badan hukum lainnya
- d. Realisasi Pendapatan Akun 425219 merupakan pendapatan dari kegiatan kemandirian, bimbingan kerja dan kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dibiayai oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama
- e. Terdapat pengembalian pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp124.055.000,00 yang terjadi karena kelebihan pembayaran , kesalahan pembayaran atau pembayaran ganda.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	0,00	436.659.488,00	0,00
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0,00	39.730.800,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	476.390.288,00	0,00

Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan terdiri atas pendapatan yang diperoleh atas jasa pelayanan kesehatan pada RS Pengayoman (akun 425313) dan pendapatan atas dana kapitasi BPJS (akun 425311) yang diperoleh oleh satker - satker di lingkungan kanwil DKI Jakarta yang memiliki fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yaitu pada:

Tabel 14
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

No.	Satuan Kerja	Jumlah Dana Kapitasi TA. 2018	Keterangan
1	Lapas Cipinang	49.940.000,00	Telah Disetorkan ke Kas Negara
2	Rutan Jakarta Timur	25.880.000,00	Telah Disetorkan ke Kas Negara
3	Rutan Jakarta Pusat	249.144.413,00	Telah Disetorkan ke Kas Negara
4	Rutan Cipinang	28.713.000,00	Telah Disetorkan ke Kas Negara
5	Lapas Salemba	8.185.923,00	Telah Disetorkan ke Kas Negara
6	Lapas Narkotika Jakarta	74.796.152,00	Telah Disetorkan ke Kas Negara
JUMLAH		436.659.488,00	

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.251.500.000,00	2.251.500.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan		2.251.500.000,00	2.251.500.000,00	100,00

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan pendapatan yang diperoleh BPSDM atas PNBP Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Perancang Perundang-undangan dll.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	70.700.000,00	0,00	0,00
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	152.955.000,00	333.748.656,00	0,00
Jumlah Pendapatan		223.655.000,00	333.748.656,00	149,22

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya (Akun 425699) merupakan pendapatan atas pemanfaatan jasa narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan, seperti jasa laundry, salon, cuci mobil/motor, dll yang dibiayai oleh DIPA satker.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.831.000,00	1.222.364.589,00	69.759,40
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	24.000.000,00	321.460.405,00	1.339,42
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,00	114.537.252,00	0,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	0,00	4.625.448,00	0,00
Jumlah Pendapatan		25.831.000,00	1.662.987.694,00	6.437,95

- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (akun 425764) merupakan pendapatan bunga rekening pemerintah diantaranya pada satker BHP Jakarta dan BHP Semarang atas rekening giro untuk menyimpan uang kepailitan dan pendapatan bunga rekening pemerintah pada satker yang diberikan oleh Bank lokal daerah, walaupun ketentuannya atas rekening pemerintah tidak diberikan bunga, tapi hal ini belum berlaku pada beberapa bank lokal daerah.
- Pendapatan penyelesaian Ganti Rugi Negara (akun 425791, 425792 dan 425793) merupakan penerimaan pembayaran angrusan TGR.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	9.128.709.007,00	0,00



425839	Pendapatan Denda Lainnya	0,00	563.453.100,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	9.692.162.107,00	0,00

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	56.001.000,00	5.867.432.869,00	10.477,37
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	36.000.000,00	3.890.682.321,00	10.807,45
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.180.493.658,00	0,00
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	89.000,00	0,00	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	603.242.347,00	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	119.984.831,00	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.100.000,00	299.233.350,00	27.203,03
Jumlah Pendapatan		93.190.000,00	22.961.069.376,00	24.638,98

Realisasi Belanja
Rp12.641.689.503.527,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.641.689.503.527,00 atau 96,49% dari anggaran belanja sebesar Rp13.101.216.922.000,00.

Realisasi Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per

31 Desember 2017 adalah sebesar Rp10.418.026.343.852,00 atau mencapai 89,68% dari anggaran sebesar Rp11.616.745.649.000,00.

Penurunan Pagu Anggaran Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan dampak dari APBN-P, tercermin dari penurunan pagu. Sepanjang Tahun Anggaran setiap Satuan Kerja dapat melakukan proses revisi sesuai ketentuan. Revisi dilakukan karena perubahan kegiatan sesuai kebutuhan Satuan Kerja maupun karena peraturan terkait Penghematan dan lain-lain.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2018 lebih tinggi sebesar Rp2.223.663.159.675,00 atau sebesar 21,34% dibandingkan 31 Desember 2017. Perbandingan Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018

31 Desember 2017	31 Desember 2018	Kenaikan / (Penurunan)	
(Rp)	(Rp)	Rp	%
10.418.026.343.852,00	12.641.689.503.527,00	2.223.663.159.675,00	21,34

Berikut adalah Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018 menurut jenis belanja:

Tabel 21
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.424.058.552.000,00	6.306.574.297.290,00	98,17
Belanja Barang	4.761.221.744.000,00	4.489.360.521.766,00	94,29
Belanja Modal	1.915.936.626.000,00	1.845.754.684.471,00	96,34
Total	13.101.216.922.000,00	12.641.689.503.527,00	96,49

Berikut Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja DIPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018 menurut Organisasi (Unit Eselon I):

Tabel 22
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I

No.	Unit	Anggaran	Realisasi
1	Sekretariat Jenderal	3.978.065.288.000,00	3.893.273.649.050,00
2	Inspektorat Jenderal	32.866.907.000,00	31.831.955.741,00
3	Ditjen AHU	683.271.257.000,00	552.032.321.649,00
4	Ditjen Pemasarakatan	5.195.564.329.000,00	5.133.427.433.164,00
5	Ditjen Imigrasi	2.366.728.137.000,00	2.240.373.881.940,00
6	Ditjen KI	261.845.006.000,00	235.068.949.520,00



7	Ditjen PP	43.501.071.000,00	41.263.277.669,00
8	Ditjen HAM	37.663.698.000,00	36.380.485.571,00
9	BPHN	108.570.670.000,00	103.047.234.230,00
10	Balitbang HAM	29.900.158.000,00	29.316.653.709,00
11	BPSDM	363.240.401.000,00	345.673.661.284,00
Jumlah		13.101.216.922.000,00	12.641.689.503.527,00

Realisasi Belanja Pegawai **B.2.1. Belanja Pegawai**
Rp6.306.574.297.290,00

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.306.574.297.290,00 atau 98,17% dari pagu sebesar Rp6.424.058.552.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.892.271.875.697,00 atau 99,81% dari pagu sebesar Rp4.901.745.114.000,00

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berikut adalah Tabel Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2018 menurut jenis belanja pegawai :

Tabel 23
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.229.659.875.857,00	2.161.201.857.478,00	699.215.074,00	2.160.502.642.404,00	96,90
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.437.678,00	39.910.871,00	842.485,00	39.068.386,00	87,92
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	140.893.308.870,00	139.147.167.069,00	41.773.501,00	139.105.393.568,00	98,73
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	40.651.489.310,00	39.901.726.500,00	6.324.716,00	39.895.401.784,00	98,14
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	72.456.409.000,00	71.046.510.728,00	62.907.666,00	70.983.603.062,00	97,97
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	103.143.701.000,00	101.545.743.000,00	112.306.312,00	101.433.436.688,00	98,34
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4.880.854.225,00	2.680.188.537,00	530.000,00	2.679.658.537,00	54,90
511126	Belanja Tunj. Beras	120.659.506.560,00	118.719.879.480,00	34.592.616,00	118.685.286.864,00	98,36
511129	Belanja Uang Makan PNS	517.769.728.000,00	500.646.815.412,00	148.484.940,00	500.498.330.472,00	96,66
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil PNS	444.505.000,00	422.375.000,00	125.000,00	422.250.000,00	94,99



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa	70.000.000,00	-	-	-	-
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	6.747.758.000,00	6.681.795.000,00	9.455.000,00	6.672.340.000,00	98,88
511145	Belanja Tunj. Penghidupan LN utk Home Staf PNS	1.032.024.000,00	1.032.024.000,00	-	1.032.024.000,00	100,00
511147	Belanja Tunj. Lain-Lain termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	8.425.000,00	-	-	-	-
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	63.671.680.000,00	62.170.052.760,00	267.938.955,00	61.902.113.805,00	97,22
511153	Belanja Tunj. Profesi Dosen	11.930.000,00	-	-	-	-
511192	Belanja Tunj. Lain-Lain termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	105.630.000,00	-	-	-	-
512211	Belanja Uang Lembur	28.294.904.500,00	25.624.952.350	-	25.624.952.350,00	90,56
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.093.512.385.000,00	3.078.622.913.294	1.525.117.924,00	3.077.097.795.370,00	99,47
Jumlah		6.424.058.552.000,00	6.309.483.911.479,00	2.909.614.189,00	6.306.574.297.290,00	98,17

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

30 Desember 2017	31 Desember 2018	Kenaikan / (Penurunan)	
(Rp)	(Rp)	Rp	%
4.892.271.875.697,00	6.306.574.297.290,00	1.414.302.421.593,00	28,91

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 lebih tinggi sebesar Rp1.414.302.421.593,00 atau sebesar 28,91% dibandingkan 31 Desember 2017.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai yang berakhir sampai 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 28,91 persen dibandingkan realisasi belanja pada periode 31 Desember 2017. Kenaikan ini terjadi antara lain karena adanya kenaikan belanja pegawai disebabkan adanya kenaikan jumlah pegawai baru melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pada laporan realisasi anggaran 2018 yang berakhir per 31 Desember 2018 masih terdapat 4 satker yang mengalami pagu minus pada belanja pegawai terdiri dari Lapas Purwakarta, Cabang Rumah Tahanan Negara Pulau Telo, Rupbasan Bengkulu dan Rupbasan Bengkalis yang disebabkan tidak dilakukannya pembulatan ke atas pada proses pengajuan revisi pagu minus Belanja Pegawai (51) dan salah perhitungan saat pengajuan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran. Proses revisi di Kanwil DJPB dan di Direktorat



Jenderal Anggaran (DJA) telah dilakukan secara maksimal, namun perpanjangan waktu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan proses revisi bagi seluruh satker Pemasarakatan yang mengalami pagu minus.

Realisasi Belanja Barang **B.2.2. Belanja Barang**
Rp4.489.360.521.766,00

Realisasi Belanja Barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.489.360.521.766,00 atau 94,29% dari pagu sebesar Rp4.761.221.744.000,00. Realisasi belanja barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.910.053.634.074,00 atau mencapai 94,49% dari anggarannya sebesar Rp4.138.013.336.785,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

31 Desember 2017	31 Desember 2018	Kenaikan / (Penurunan)	
(Rp)	(Rp)	Rp	%
3.910.053.634.074,00	4.489.360.521.766,00	579.306.887.692,00	14,82

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 lebih tinggi sebesar Rp579.306.887.692,00 atau sebesar 14,82% dibandingkan 31 Desember 2017.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 26
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1.769.623.935.008,00	1.743.963.945.276,00	431.115.478,00	1.743.532.829.798,00	98,53
5212	Belanja Barang Non Operasional	594.902.517.400,00	547.588.114.222,00	616.981.436,00	546.971.132.786,00	91,94
5218	Belanja Barang Persediaan	477.223.213.000,00	463.085.190.060,00	41.729.000,00	463.043.461.060,00	97,03
5221	Belanja Jasa	791.797.245.992,00	719.898.534.402,00	848.139.669,00	719.050.394.733,00	90,81
5231	Belanja Pemeliharaan	402.408.524.000,00	384.142.242.536,00	33.776.446,00	384.108.466.090,00	95,45
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	621.884.328.600,00	575.468.962.756,00	14.189.243.229,00	561.279.719.527,00	90,25
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	103.381.980.000,00	81.243.708.729,00	9.869.190.957,00	71.374.517.772,00	69,05
Jumlah		4.761.221.744.000,00	4.515.390.697.981,00	26.030.176.215,00	4.489.360.521.766,00	94,29

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Operasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 27
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	193.207.167.008,00	190.019.219.585,00	18.741.700,00	190.000.477.885,00	98,34
521112	Belanja Pengadaan BaMa	1.384.417.059.000,00	1.369.642.333.361,00	376.566.838,00	1.369.265.766.523,00	98,91
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	31.370.741.000,00	30.444.866.667,00	0,00	30.444.866.667,00	97,05
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.568.038.000,00	6.355.025.750,00	1.045.000,00	6.353.980.750,00	83,96
521115	Belanja Honor Operasional Satker	83.977.600.000,00	82.213.302.531,00	23.797.000,00	82.189.505.531,00	97,87
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	69.083.330.000,00	65.289.197.382,00	10.964.940,00	65.278.232.442,00	94,49
Jumlah		1.769.623.935.008,00	1.743.963.945.276,00	431.115.478,00	1.743.532.829.798,00	98,53

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 28
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521211	Belanja Bahan	252.682.249.400,00	230.909.464.492,00	144.894.305,00	230.764.570.187,00	91,33
521213	Belanja Honor Output	54.176.832.000,00	48.786.362.928,00	80.198.250,00	48.706.164.678,00	89,90
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan LN	208.527.000,00	141.214.293,00	0,00	141.214.293,00	67,72
521219	Belanja Barang Non Operasional	287.834.909.000,00	267.751.072.509,00	391.888.881,00	267.359.183.628,00	92,89
Jumlah		594.902.517.400,00	547.588.114.222,00	616.981.436,00	546.971.132.786,00	91,94

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Persediaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 29
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	435.233.348.000,00	421.639.299.115,00	6.804.000,00	421.632.495.115,00	96,88
521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi	60.000.000,00	58.380.500,00	0,00	58.380.500,00	97,30
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	337.071.000,00	313.381.000,00	0,00	313.381.000,00	92,97



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	15.000.000,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00	66,20
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	113.904.000,00	111.770.500,00	0,00	111.770.500,00	98,13
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	41.463.890.000,00	40.952.428.945,00	34.925.000,00	40.917.503.945,00	98,68
Jumlah		477.223.213.000,00	463.085.190.060,00	41.729.000,00	463.043.461.060,00	97,03

Pada tabel di atas masih terdapat salah penggunaan pembebanan akun belanja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yaitu akun 521813 (Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges). Namun demikian, sampai dengan tanggal pelaporan, persediaan atas akun belanja tersebut telah direklasifikasi menjadi persediaan Barang Konsumsi.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
522111	Belanja Langganan Listrik	157.410.577.992,00	152.340.357.720,00	63.289.379,00	152.277.068.341,00	96,74
522112	Belanja Langganan Telepon	8.742.138.000,00	6.660.577.784,00	0,00	6.660.577.784,00	76,19
522113	Belanja Langganan Air	15.872.473.000,00	14.474.450.814,00	0,00	14.474.450.814,00	91,19
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	76.239.909.000,00	73.210.347.133,00	1.840.000,00	73.208.507.133,00	96,02
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	289.057.000,00	171.206.486,00	0,00	171.206.486,00	59,23
522131	Belanja Jasa Konsultan	48.158.400.000,00	37.717.545.693,00	0,00	37.717.545.693,00	78,32
522141	Belanja Sewa	293.277.340.000,00	277.704.698.993,00	514.372.790,00	277.190.326.203,00	94,51
522151	Belanja Jasa Profesi	88.372.564.000,00	80.150.700.093,00	268.637.500,00	79.882.062.593,00	90,39
522191	Belanja Jasa Lainnya	103.434.787.000,00	77.468.649.686,00	0,00	77.468.649.686,00	74,90
Jumlah		791.797.245.992,00	719.898.534.402,00	848.139.669,00	719.050.394.733,00	90,81

Pada tabel di atas masih terdapat salah penggunaan pembebanan akun belanja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yaitu akun 522121 (Belanja Jasa Pos dan Giro).

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Biro Keuangan telah mengeluarkan surat terkait hal tersebut, yaitu Surat Kepala Biro Keuangan Nomor: SEK.3.KU.01.04-83 Tanggal 31 Mei 2018 Hal: Revisi Akun 522121 (Belanja Jasa Pos dan Giro) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dingatkan kembali melalui Surat Kepala Biro Keuangan Nomor: SEK.3.KU.05.02-42 Tanggal 14 November 2018 Hal: Evaluasi Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Triwulan III TA 2018, akan tetapi beberapa satuan kerja dengan suatu alasan tertentu tidak melakukan revisi dan ralat SPM.

Pada laporan realisasi anggaran 2018 yang berakhir per 31 Desember 2018 masih terdapat 1 satker yang mengalami pagu minus pada belanja barang yaitu Bapas Madiun yang disebabkan karena terlambat dalam proses revisi POK antar output atas akun belanja yang telah memiliki realisasi.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 31
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	166.528.903.000,00	164.455.565.075,00	29.614.446,00	164.425.950.629,00	98,74
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.562.202.000,00	1.480.260.402,00	0,00	1.480.260.402,00	94,75
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.874.122.000,00	1.811.630.643,00	0,00	1.811.630.643,00	96,67
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225.543.538.000,00	210.219.830.880,00	4.162.000,00	210.215.668.880,00	93,20
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)	522.943.000,00	501.882.535,00	0,00	501.882.535,00	95,97
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.458.732.000,00	2.158.365.675,00	0,00	2.158.365.675,00	87,78
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.378.741.000,00	1.355.693.796,00	0,00	1.355.693.796,00	98,33
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.251.000.000,00	1.220.645.700,00	0,00	1.220.645.700,00	97,57
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	227.058.000,00	226.707.650,00	0,00	226.707.650,00	99,85
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	5.614.000,00	5.613.800,00	0,00	5.613.800,00	100,00
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.054.671.000,00	705.046.380,00	0,00	705.046.380,00	66,85
Jumlah		402.408.524.000,00	384.142.242.536,00	33.776.446,00	384.108.466.090,00	95,45

Pada tabel di atas masih terdapat salah penggunaan pembebanan akun belanja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yaitu akun 523122 (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina).

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 32
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	361.949.098.000,00	338.276.868.712,00	9.760.317.441,00	328.516.551.271,00	93,46
524112	Belanja Perjalanan Tetap	683.700.000,00	676.300.000,00	0,00	676.300.000,00	98,92
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.339.981.000,00	61.192.535.831,00	203.507.140,00	60.989.028.691,00	88,25
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	86.073.446.600,00	78.393.256.383,00	648.386.392,00	77.744.869.991,00	91,08
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	103.838.103.000,00	96.930.001.830,00	3.577.032.256,00	93.352.969.574,00	93,35
Jumlah		621.884.328.600,00	575.468.962.756,00	14.189.243.229,00	561.279.719.527,00	90,25

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	78.301.289.000,00	58.135.340.078,00	9.399.825.650,00	48.735.514.428,00	74,25
524212	Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri	2.000.532.000,00	1.999.450.480,00	20.756.046,00	1.978.694.434,00	99,95
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	23.080.159.000,00	21.108.918.171,00	448.609.261,00	20.660.308.910,00	91,46
Jumlah		103.381.980.000,00	81.243.708.729,00	9.869.190.957,00	71.374.517.772,00	69,04

Pada tabel di atas, terlihat jumlah pengembalian Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri sebesar Rp9.399.825.650,00 yang disebabkan pejabat/pegawai yang bersangkutan batal melaksanakan perjalanan dinas luar negeri karena adanya perintah untuk melaksanakan tugas lain yang tidak dapat diwakilkan.

Belanja Modal
Rp1.845.754.684.471,00

B.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.845.754.684.471,00 atau 96,34% dari pagu Rp1.915.936.626.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.615.700.834.081,00 atau 62,70% dari pagu Rp2.576.987.198.215,00.

Tabel 34
Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	66.000.000,00	53.488.000,00	0,00	53.488.000,00	81,04
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	952.672.946.000,00	930.413.376.308,00	1.000.000,00	930.412.376.308,00	97,66
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	885.426.503.000,00	851.278.698.255,00	154.074.667,00	851.124.623.588,00	96,14
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.089.186.000,00	2.983.175.102,00	0,00	2.983.175.102,00	96,57
5361	Belanja Modal Lainnya	74.681.991.000,00	61.189.602.473,00	8.581.000,00	61.181.021.473,00	81,93
Jumlah		1.915.936.626.000,00	1.845.918.340.138,00	163.655.667,00	1.845.754.684.471,00	96,35

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 35
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
531111	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	42.174.000,00	0,00	42.174.000,00	84,35
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	10.000.000,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	56,50
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	6.000.000,00	5.664.000,00	0,00	5.664.000,00	94,40
Jumlah		66.000.000,00	53.488.000,00	0,00	53.488.000,00	81,04

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 36
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Tanah	53.488.000,00	
Rincian :		
Pengembangan Nilai Aset	53.488.000,00	Pengembangan nilai Aset yang menambah nilai aset Tanah pada satuan kerja pusat Direktorat Jenderal Imigrasi Rp47.838.000,00 dan Kanim Kelas III Pamekasan Rp5.650.000,00
Total Rincian :	53.488.000,00	
Pengembalian Belanja Modal Tanah	0,00	
Selisih	0,00	

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	919.356.740.000,00	897.209.131.708,00	1.000.000,00	897.208.131.708,00	97,59
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	766.346.000,00	746.643.000,00	0,00	746.643.000,00	97,43
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	105.910.000,00	44.150.000,00	0,00	44.150.000,00	41,69
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	7.680.000,00	7.670.000,00	0,00	7.670.000,00	99,87
532121	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	32.436.270.000,00	32.405.781.600,00	0,00	32.405.781.600,00	99,91
Jumlah		952.672.946.000,00	930.413.376.308,00	1.000.000,00	930.412.376.308,00	97,66

Pada tabel di atas terlihat realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp897.208.131.708,00. Namun demikian, pada Satuan Kerja Unit Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp19.695.500.000,00 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan infrastruktur jaringan *high availability* oleh PT Nusantara Compnet Integrator dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp13.889.700.000,00 dengan NTPN: B310C01ON33D5FV8 tanggal 10 Januari 2019;
- 2) Pekerjaan *server database* oleh PT Mitra Inti Bersama dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp3.152.600.000,00 dengan NTPN: C1868114P9R8V1V8 tanggal 10 Januari 2019;
- 3) Pekerjaan perangkat jaringan *data center* Ditjen AHU oleh PT Sugi Jaya Teknologi dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp2.653.200.000,00 dengan NTPN: AE6E6011HCU9Q6V8 tanggal 10 Januari 2019.



Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 38
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	930.413.376.308,00	
Rincian :		
Pembelian	680.651.396.146,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset Peralatan dan Mesin pada Eselon I Sekretariat Jenderal Rp119.550.832.581,00, Itjen sebesar Rp78.250.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp66.728.014.037,00, Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp11.703.637.080,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp439.810.119.058,00, Ditjen KI sebesar Rp34.723.660.526,00, Ditjen PP sebesar Rp284.082.000,00, Ditjen HAM sebesar Rp146.640.000,00, BPHN sebesar Rp621.906.720,00, Balitbangham sebesar Rp249.871.854,00 dan BPSDM sebesar Rp6.754.382.290,00.
Pengembangan Nilai Aset	101.048.044.402,00	Pengembangan Nilai Aset yang menambah nilai aset Peralatan dan Mesin pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp98.397.148.600,00 LPKA Samarinda sebesar Rp7.670.000.000,00, Kanim Jayapura Sebesar Rp5.836.500,00, Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp198.000.000,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.409.900.348,00, Rudenim Semarang sebesar Rp20.138.954,00 dan Ditjen KI sebesar Rp9.350.000,00.
Pengembangan Nilai Aset berasal dari Hibah	(20.138.954,00)	Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang perolehannya berasal dari Hibah terdapat pada satker Rudenim Semarang
Perolehan/Penambahan KDP	1.514.125.377,00	Perolehan/ Penambahan KDP yang menambah nilai KDP aset Peralatan dan Mesin pada satker Kanim Semarang sebesar Rp148.312.500,00, Perwakilan Imigrasi di Davao sebesar Rp9.281.062,00, Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp1.529.000,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.224.672.450,00, dan Kanim Gorontalo sebesar Rp130.330.365,00.
Pengembangan KDP	114.674.487.543,00	Pengembangan KDP yang menambah nilai KDP aset Peralatan dan Mesin pada satker Kanim Semarang sebesar Rp49.437.500,00, Perwakilan Imigrasi di Davao sebesar Rp9.600.081,00, Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp112.431.097.777,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.863.932.550,00, dan Kanim Gorontalo sebesar Rp320.419.635,00.
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang membentuk Beban Ekstra Peralatan dan Mesin	2.403.836.242,00	Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi Peralatan dan Mesin (Rp1.000.000,00) sehingga membentuk beban ekstra komptable Peralatan dan Mesin yaitu pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Rp377.662.540,00, Ditjen AHU sebesar Rp74.347.275,00, Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp625.138.054,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp651.386.023,00, Ditjen KI sebesar Rp156.261.600,00, BPHN sebesar Rp8.514.000,00 dan BPSDM sebesar Rp510.526.750,00.
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang membentuk Beban Ekstra Aset Tetap Lainnya	21.900.000,00	Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi Peralatan dan Mesin (Rp1.000.000,00) sehingga membentuk beban ekstra komptable Aset Tetap Lainnya yaitu pada Kanim Kelas III Ketapang



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang membentuk Piutang atas pekerjaan yang tidak selesai	23.139.556.660,00	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang pekerjaannya tidak dapat terselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2018 dan telah disetorkan ke Kas Negara Januari 2019 yaitu terdapat pada Ditjen AHU dengan rincian : Pekerjaan infrastruktur jaringan high availability oleh PT Nusantara Compnet Integrator dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp13.889.700.000,00 dengan NTPN: B310C01ON33D5FV8 tanggal 10 Januari 2019, Pekerjaan server database oleh PT Mitra Inti Bersama dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp3.152.600.000,00 dengan NTPN: C1868114P9R8V1V8 tanggal 10 Januari 2019, Pekerjaan perangkat jaringan data center Ditjen AHU oleh PT Sugi Jaya Teknologi dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp2.653.200.000,00 dengan NTPN: AE6E6011HCU9Q6V8 tanggal 10 Januari 2019 dan pada Ditjen KI atas Pekerjaan Roll O Pact (lemari arsip) sebesar Rp3.444.056.660,00.
Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Belanja Persediaan	116.282.750,00	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk aset persediaan yang seharusnya menggunakan akun belanja persediaan pada Ditjen Pemasarakatan.
Kesalahan Penggunaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.230.500.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal Peralatan dan Mesin membentuk Aset gedung dan Bangunan yang seharusnya menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan pada Satker Ditjen AHU sebesar Rp7.979.950.000,00, dan Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp749.450.000,00.
Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin	(565.369.574,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Jaringan membentuk aset Peralatan dan Mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin pada satker Ditjen KI.
Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Belanja Modal Lainnya	189.935.910,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin membentuk Aset Lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal lainnya pada Satker Ditjen AHU Sebesar Rp80.784.660,00, Ditjen PAS Sebesar Rp33.780.000,00, dan Ditjen KI Sebesar Rp142.931.250.000,00.
Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Barang Keperluan Perkantoran yang membentuk Aset Peralatan dan Mesin	(12.400.000,00)	Kesalahan Penggunaan akun Belanja Barang Keperluan Perkantoran yang membentuk Aset Peralatan dan Mesin pada Rupbasan Wonosari.
Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang membentuk Aset Peralatan dan Mesin	(16.775.000,00)	Kesalahan Penggunaan akun Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang membentuk Aset Peralatan dan Mesin pada Rutan Batang.
Pendapatan Selisih Kurs	(1,00)	Pendapatan selisih kurs atas pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Perwakilan Imigrasi di Sidney
Beban Selisih Kurs	36.994.807,00	Beban selisih kurs atas pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Perwakilan Imigrasi di Hongkong sebesar Rp875.000,00 , Perwakilan Imigrasi di Tokyo sebesar Rp4.015.373,00, Perwakilan Imigrasi di Kuching sebesar Rp1.050.946,00 dan Perwakilan Imigrasi di Jeddah sebesar Rp31.053.488,00
Total Rincian :	930.412.376.308,00	
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	
Selisih	0,00	

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 39
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	804.996.304.000,00	793.708.742.914,00	108.401.667,00	793.600.341.247,00	98,60
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	66.940.000,00	52.098.200,00	0,00	52.098.200,00	77,83
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	1.680.734.000,00	1.470.733.440,00	0,00	1.470.733.440,00	87,51
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	8.219.943.000,00	8.120.595.717,00	45.673.000,00	8.074.922.717,00	98,79
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	70.462.582.000,00	47.926.527.984,00	0,00	47.926.527.984,00	68,02
Jumlah		885.426.503.000,00	851.278.698.255,00	154.074.667,00	851.124.623.588,00	96,14

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 40
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	851.278.698.255,00	
Rincian :		
Pembelian	242.075.733,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset Gedung dan Bangunan pada Kanim Jakarta Selatan sebesar Rp49.958.425,00, Kanim Banjarmasin Sebesar Rp29.797.000,00, Kanwil Bali DIPA AHU Sebesar Rp50.182.308,00 dan Ditjen Imigrasi Sebesar Rp112.138.000,00.
Pengembangan Nilai Aset	31.639.765.585,00	Pengembangan Nilai Aset yang menambah nilai aset Gedung dan Bangunan pada Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.422.396.500,00, Ditjen AHU Sebesar Rp10.248.473.617,00, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp509.857.318,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp5.615.271.150,00, dan Ditjen KI sebesar Rp10.843.767.000,00.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perolehan/Penambahan KDP	63.649.119.303,00	Perolehan/ Penambahan KDP yang menambah nilai KDP aset Gedung dan Bangunan pada Eselon I Ditjen AHU sebesar Rp2.100.000,00, Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp10.484.288.792,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.631.205.411,00, Ditjen KI Sebesar Rp187.874.500,00, BPHN sebesar Rp48.675.000,00 dan BPSDM sebesar Rp51.294.975.600,00.
Pengembangan KDP	752.756.156.724,00	Pengembangan KDP yang menambah nilai KDP aset Gedung dan Bangunan pada Eselon I Ditjen AHU sebesar Rp196.635.000,00, Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp694.023.264.920,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp56.201.023.112,00, dan BPHN sebesar Rp2.335.233.692,00.
Penyelesaian Pembangunan Langsung	229.211.000,00	Penyelesaian Pembangunan Langsung yang menambah nilai dan kuantitas aset Gedung dan Bangunan pada Kanim Kupang sebesar Rp199.800.000,00, dan Kanim Bengkulu sebesar Rp29.411.000,00.
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang membentuk Beban Ekstra Gedung dan Bangunan	25.974.900,00	Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi gedung dan bangunan (Rp25.000.000,00) sehingga membentuk beban ekstra komptable gedung dan bangunan yaitu pada Satuan Kerja Bapas Jakarta Timur/Jakarta Utara Rp7.425.000,00, Kanim Mataram sebesar Rp6.000.000,00 dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp12.549.900,00.
Kesalahan Penggunaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(7.230.500.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal Peralatan dan Mesin membentuk Aset gedung dan Bangunan yang seharusnya menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan pada Satker Ditjen AHU sebesar Rp7.979.950.000,00, dan Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp749.450.000,00.
Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Belanja modal lainnya	3.454.797.196,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal gedung dan bangunan membentuk Aset Gedung dan Bangunan yang seharusnya menggunakan akun belanja modal lainnya pada Satker Setjen Sebesar Rp1.092.580.000,00, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Sebesar Rp63.843.253,00, Ditjen AHU Sebesar Rp1.836.914.300,00, Ditjen PAS Sebesar Rp294.630.926,00, dan Ditjen KI Sebesar Rp166.828.717,00.
Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Belanja Jasa Konsultan	95.832.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal gedung dan bangunan yang seharusnya belanja jasa konsultan pada Ditjen KI sebesar Rp95.832.000,00.
Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Belanja Sewa	1.470.733.440,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal gedung dan bangunan yang digunakan untuk pembayaran sewa gedung dan bangunan Kanwil Maluku di Gedung Islamic Center Ambon selama 24 bulan.
Kesalahan Penggunaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang membentuk Aset Gedung dan Bangunan	(775.862.000,00)	Kesalahan Penggunaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang menambah pengembangan nilai Aset Gedung dan Bangunan pada Kanwil Makassar DIPA Setjen.



Koreksi atas pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(153.064.667,00)	Koreksi lainnya atas pengembalian belanja modal gedung dan bangunan pada Satker LPKA Samarinda sebesar Rp45.673.000,00, Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda sebesar Rp43.000.000,00, Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak sebesar Rp5.998.500,00, Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu sebesar Rp2.400.000,00, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo sebesar Rp51.219.167,00 dan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju sebesar Rp4.774.000,00.
Pembayaran Hutang Belanja Modal Gedung dan bangunan	5.720.384.374,00	Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk pembayaran hutang belanja modal gedung dan bangunan atas Pekerjaan Pembangunan Rutan Padang TA 2014 dan LPKN Sawahlunto TA 2014
Total Rincian :	851.124.623.588,00	
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.074.667,00	
Selisih	0,00	

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 41
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	767.483.000,00	741.840.910,00	0,00	741.840.910,00	96,66
534131	Belanja Modal Jaringan	2.321.703.000,00	2.241.334.192,00	0,00	2.241.334.192,00	96,54
Jumlah		3.089.186.000,00	2.983.175.102,00	0,00	2.983.175.102,00	96,57

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 42
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2018

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.983.175.102,00	
Rincian :		
Pembelian	1.675.964.618,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset JIJ pada Lapas Banyuwangi sebesar Rp17.432.000,00 dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.658.532.618,00
Perolehan/Penambahan KDP	41.167.000,00	Perolehan/ Penambahan KDP yang menambah nilai KDP JIJ pada Kanim Kelas III Ketapang
Pengembangan KDP	700.673.910,00	Pengembangan KDP yang menambah nilai KDP JIJ pada Kanim Kelas III Ketapang



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin	565.369.574,00	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Jaringan membentuk aset Peralatan dan Mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin pada satker Ditjen KI.
Total Rincian :	2.983.175.102,00	
Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	
Selisih	0,00	

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 43
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
536111	Belanja Modal Lainnya	55.810.175.000,00	44.917.066.591,00	8.581.000,00	44.908.485.591,00	80,48
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	18.871.816.000,00	16.272.535.882,00	0,00	16.272.535.882,00	86,23
Jumlah		74.681.991.000,00	61.189.602.473,00	8.581.000,00	61.181.021.473,00	81,93

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 44
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Lainnya	61.189.602.473,00	
Rincian :		
Pembelian	63.902.464.556,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset lainnya pada Eselon I Setjen sebesar Rp1.150.580.000,00, Itjen Sebesar Rp95.700.000,00, Ditjen AHU Sebesar Rp17.769.923.250,00, Ditjen Pemasarakatan Sebesar Rp439.040.926,00, Dijen Imigrasi Sebesar Rp35.666.299.040,00, Ditjen KI Sebesar Rp8.150.212.801,00, Ditjen HAM Sebesar Rp39.600.000,00, BPHN Sebesar Rp283.718.539,00, Balitbang Sebesar Rp10.350.000,00 dan BPSDM Sebesar Rp297.040.000,00
Perolehan/Penambahan KDP	830.200,00	Perolehan/ Penambahan KDP yang menambah nilai KDP aset lainnya pada Satker Pusat Ditjen Imigrasi.
Pengembangan Nilai Aset	670.116.470,00	Pengembangan Nilai Aset yang menambah nilai aset lainnya pada Satker Pusat Inspektorat Jenderal Sebesar Rp29.999.970,00, Ditjen AHU Sebesar Rp48.851.000,00, BPHN Sebesar Rp394.442.500,00, dan Ditjen KI Sebesar Rp196.823.000,00.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengembangan KDP	197.081.100,00	Pengembangan KDP yang menambah nilai KDP aset lainnya pada Ditjen Pemasyarakatan.
Penyelesaian Pembangunan Langsung	63.843.253,00	Penyelesaian Pembangunan Langsung yang menambah nilai dan kuantitas aset lainnya pada Kanwil Jawa Tengah DIPA Imigrasi.
Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Belanja Modal Lainnya	(189.935.910,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin membentuk Aset Lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal lainnya pada Satker Ditjen AHU Sebesar Rp80.784.660,00, Ditjen PAS Sebesar Rp33.780.000,00, dan Ditjen KI Sebesar Rp142.931.250.000,00.
Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Belanja modal lainnya	(3.454.797.196,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal gedung dan bangunan membentuk Aset Gedung dan Bangunan yang seharusnya menggunakan akun belanja modal lainnya pada Satker Setjen Sebesar Rp1.092.580.000,00, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Sebesar Rp63.843.253,00, Ditjen AHU Sebesar Rp1.836.914.300,00, Ditjen PAS Sebesar Rp294.630.926,00, dan Ditjen KI Sebesar Rp166.828.717,00.
Koreksi atas pengembalian belanja modal lainnya	(8.581.000,00)	Koreksi lainnya atas pengembalian belanja modal lainnya pada Satker Ditjen KI Sebesar Rp8.581.000,00.
Total Rincian :	61.181.021.473,00	
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	8.581.000,00	
Selisih	0,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

**Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp2.473.362.985,00**

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.473.362.985,00 dan Rp1.294.724.415,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2018 dan 2017

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2017
Uang Tunai	521.394.086,00	73.534.929,00
Rekening Bank	1.951.968.899,00	1.221.189.486,00
	2.473.362.985,00	1.294.724.415,00

Tabel 46
Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Kas di Bendahara Pengeluaran	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	928.500,00	23.493.900,00
Ditjen Pemasarakatan	215.540.500,00	31.991.241,00
Ditjen Imigrasi	2.210.726.514,00	1.221.368.274,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	46.167.471,00	17.871.000,00
TOTAL	2.473.362.985,00	1.294.724.415,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47
Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
	Ditjen AHU		
1	Balai Harta Peninggalan Semarang	928.500,00	Sisa UP TA 2018
	SUBTOTAL	928.500,00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
2	Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang	1.800.000,00	Sisa UP TA 2018
3	Rumah Tahanan Negara Praya	200.000,00	Sisa UP TA 2018
4	Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat	57.330.000,00	Sisa TUP TA 2018
5	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura	55.853.000,00	Sisa TUP TA 2018
6	Rutan Kelas II B Depok	79.912.000,00	Sisa TUP TA 2018
7	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Manado	20.445.500,00	Sisa UP TA 2018
	SUBTOTAL	215.540.500,00	
	Ditjen Imigrasi		
7	Perwakilan Imigrasi di Singapura	89.091.082,00	Sisa UP TA 2018
		460.000,00	Sisa TUP TA 2018
8	Perwakilan Imigrasi di Kualalumpur	242.300.726,00	Sisa UP TA 2018
9	Perwakilan Imigrasi di Penang	131.646.625,00	Sisa UP TA 2018
10	Perwakilan Imigrasi di Bangkok	78.023.049,00	Sisa UP TA 2018
11	Perwakilan Imigrasi di Hongkong	122.762.242,00	Sisa UP TA 2018
12	Perwakilan Imigrasi di Tokyo	85.845.865,00	Sisa UP TA 2018
		57.020,00	Sisa TUP TA 2018
13	Perwakilan Imigrasi di Davao	78.636.608,00	Sisa UP TA 2018
14	Perwakilan Imigrasi di Den Haag	44.931.359,00	Sisa UP TA 2018
15	Perwakilan Imigrasi di Berlin	168.115.153,00	Sisa UP TA 2018
		308.000,00	Sisa TUP TA 2018
16	Perwakilan Imigrasi di Sidney	55.027.366,00	Sisa UP TA 2018
17	Perwakilan Imigrasi di Kuching	122.480.906,00	Sisa UP TA 2018
		7.156.482,00	Sisa TUP TA 2018
18	Perwakilan Imigrasi di Tawao	111.422.277,00	Sisa UP TA 2018
		758.409,00	Sisa TUP TA 2018
19	Perwakilan Imigrasi di Los Angeles	295.525.062,00	Sisa UP TA 2018

20	Perwakilan Imigrasi di Jeddah	2.938.502,00	Sisa UP TA 2018
		168.755.765,00	Sisa TUP TA 2018
21	Perwakilan Imigrasi di Beijing	74.377.024,00	Sisa UP TA 2018
22	Perwakilan Imigrasi di Johor Bahru	7.674,00	Sisa UP TA 2018
23	Kantor Perwakilan Imigrasi Pada Kantor Urusan Kepentingan RI di Dili Timor	289.096.800,00	Sisa UP TA 2018
24	Perwakilan Imigrasi Guangzhou di RRC	41.002.518,00	Sisa UP TA 2018
	SUBTOTAL	2.210.726.514,00	
	BPSDM		
25	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Dan HAM Jawa Tengah	29.418.150,00	Sisa UP TA 2018
		16.749.321,00	Sisa TUP TA 2018
	SUBTOTAL	46.167.471,00	
	TOTAL	2.473.362.985,00	

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disetorkan seluruhnya pada awal tahun 2019 dengan rekap setoran sebagai berikut :

Tabel 48
Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran yang Disetor di Awal Tahun 2019

Nama Satker	Sisa Kas	Tanggal Setor	NTPN
Ditjen AHU			
Balai Harta Peninggalan Semarang	928.500,00	08 Januari 2019	B90FE4P90G5I9RE8
SUBTOTAL	928.500,00		
Ditjen Pemasyarakatan			
Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang	1.800.000,00	16 Januari 2019	96D837MGN3KE6SV0
Rutan Praya	200.000,00	07 Januari 2019	3DC3454CMDPPULLI
Kanwil Kemenkumham Manado	20.445.500,00	03 Januari 2019	34B584L5QI6IRIJP
Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat	57.330.000,00	04 Januari 2019	C67B26DVAP9IHH
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura	55.853.000,00	15 Januari 2019	BABF41UF0CJ10JP0
Rumah Tahanan Negara IIB Depok	79.912.000,00	04 Januari 2019	9EF074HJ767U8BC2
SUBTOTAL	215.540.500,00		
BPSDM			
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan HAM Jawa Tengah	21.736.171,00	07 Januari 2019	OFA7158KUMROFLI

	23.710.300,00	07 Januari 2019	O8EE75F9HFSI094
	721.000,00	08 Januari 2019	EOB2F5VP8VQ4RKEO
SUBTOTAL	46.167.471,00		
TOTAL	262.636.471,00		-

Sedangkan untuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp2.210.726.514,00 akan menjadi potongan UP awal pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan PMK Nomor:160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp32.906.472.664,00*

C.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp32.906.472.664,00 dan Rp36.289.582.072,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	323.577.765,00	25.387.110.032,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	32.570.194.899,00	10.810.398.443,00
Kas Lainnya dari Hibah	12.700.000,00	92.073.597,00
Jumlah	32.906.472.664,00	36.289.582.072,00

Tabel 50
**Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Eselon I	Kas Lainnya dan Setara Kas	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	26.362.567,00	5.877.600.247,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen A HU	14.406.595.599,00	10.810.578.443,00
Ditjen Pemasyarakatan	152.250.967,00	12.929.330.210,00
Ditjen Imigrasi	157.664.231,00	6.672.073.172,00

Ditjen Kekayaan Intelektual	18.163.599.300,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	000
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	32.906.472.664,00	36.289.582.072,00

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 pada satuan kerja dapat disajikan pada Tabel berikut

Tabel 51
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	26.362.567,00	Sisa Tunker Desember 2018 yang belum disetorkan ke Negara Rp26.247.181,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran Setjen sebesar Rp4.136.850; b. Lapas Kelas I Bandar Lampung sebesar Rp882.869,00; c. Kanwil Aceh sebesar Rp16.510.203,00; d. Cabrutan Singkil sebesar Rp1.000.000,00; e. Lapas Kelas IIA Banda Aceh sebesar Rp3.717.259,00; Bunga giro yang belum di setor Rp115.386,00
	SUBTOTAL	26.362.567,00	
	Ditjen AHU		
1	Balai Harta Peninggalan Jakarta	6.118.271.791,00	Dana pihak ketiga dari pengelolaan harta kepailitan
2	Balai Harta Peninggalan Semarang	2.960.523.073,00	
3	Balai Harta Peninggalan Surabaya	3.735.859.902,00	
4	Balai Harta Peninggalan Medan	1.591.940.833,00	
	SUBTOTAL	14.406.595.599,00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
1	Lembaga Pemasyarakatan Pangkalan Bun	12.700.000,00	Sisa hibah uang yang belum disetokan s.d 31 Desember 2018 dan telah disetorkan ke kas negara dengan tanggal buku 7 Januari 2019 dengan NTPN AD61D4TB4V3S6R4I
2	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang	40.469.600,00	Sisa Tunker Desember 2018 yang belum disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Setjen

3	Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung	882.869,00	Sisa Tunker Desember 2018 yang belum disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Setjen
4	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Mataram	893.850,00	Pajak atas uang makan yang belum disetorkan ke Kas Negara
5	Balai Pemasyarakatan Lahat	97.264.000,00	Sisa Tunker Desember 2018 yang belum disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Setjen
6	Lapas Kelas III Banjar Propinsi Jawa Barat	40.648,00	Bunga giro atas rekening Hibah yang belum di setor
	SUBTOTAL	152.250.967,00	
	Ditjen Imigrasi		
1	Kantor Imigrasi Lhok Seumawe	157.664.231,00	Sisa Tunker Desember 2018 yang belum disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Setjen
	SUBTOTAL	157.664.231,00	
	Ditjen Kekayaan Intelektual		
1	Satker Pusat Ditjen KI	18.163.599.300,00	Pembayaran permohonan merek melalui WIPO yang belum dapat dimasukkan ke dalam Kas Negara dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai tarif permohonan merek melalui WIPO
	SUBTOTAL	18.163.599.300,00	
	TOTAL	32.906.472.664,00	

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp11.586.621.509,00

C.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp11.586.621.509,00 dan Rp14.616.502.667,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52
Perbandingan Rincian Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Jenis	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	1.979.815.709,00	4.462.038.464,00
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	9.228.728.072,00	10.154.464.203,00
Pembayaran beban langganan daya dan jasa listrik	378.077.728,00	0.00
Jumlah	11.586.621.509,00	14.616.502.667,00

Tabel 53
Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Belanja Dibayar Dimuka	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	1.431.427.676,00	219.094.335,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	2.622.699.601,00	4.186.468.167,00
Ditjen Pemasarakatan	956.420.484,00	658.795.882,00
Ditjen Imigrasi	6.576.073.748,00	9.552.144.283,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	11.586.621.509,00	14.616.502.667,00

Rincian atas Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 pada satuan kerja dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 54
Rincian Kas Belanja Dibayar Dimuka berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2018

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		
1	Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Ambon	1.348.172.320,00	Sewa Gedung Kantor
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Kendari	26.449.500,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Propinsi Bangka Belitung	53.577.573,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Propinsi Gorontalo	3.228.283,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
	SUBTOTAL	1.431.427.676,00	
	Ditjen AHU		
5	Balai Harta Peninggalan Jakarta	49.500.000,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
6	Balai Harta Peninggalan Surabaya	17.160.000,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
7	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jakarta Raya	1.150.286.500,00	a. Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4 Rp17.572.500,00 b. Sewa Gedung Sekretariat MPD Rp778.140.000,00 c. Sewa Laptop dan Peralatan Komputer Rp64.020.000,00 d. Sewa AC 2 PK Rp38.500.000,00

			e. Sewa Meubelair Rp30.587.333,00 f. Sewa Gudang Arsip MPD Rp221.466.667,00
8	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bandung	21.109.000,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
9	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Surabaya	54.022.732,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
10	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Ujung Pandang	6.719.762,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
11	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Palembang	77.275.733,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
12	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Tanjung Karang	214.841.733,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
13	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jayapura	10.972.720,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
14	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kendari	37.174.620,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
15	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	346.562.267,00	a. Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4 Rp77.190.667,00 b. Sewa gedung CIKS sebesar Rp266.041.600,00 dan bandwidth Rp3.330.000,00
16	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Propinsi Bangka Belitung	207.350.756,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
17	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Propinsi Gorontalo	109.595.667,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
18	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	320.128.111,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
	SUBTOTAL	2.622.699.601,00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
19	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	653.518.665,00	Double Bayar atas Tagihan Listrik UPT PAS Tahun 2018 pada PT.PLN sebesar RP378.077.728 dan Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II pada PT. Tracindo Utama sebesar Rp275.440.937
20	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Selatan	302.901.819,00	Sewa Kantor Rupbasan Klas I Jakarta Selatan sampai dengan Oktober 2019
	SUBTOTAL	956.420.484,00	
	Ditjen Imigrasi		
21	Kantor Imigrasi Jakarta Selatan	215.039.000,00	Sewa Gedung ULP (Unit Pelayanan Paspor)
22	Kantor Imigrasi Yogyakarta	496.666.664,00	Sewa Gedung Bangunan
23	Kantor Imigrasi Balikpapan	262.500.000,00	Sewa Gedung Kantor
24	Kantor Imigrasi Tarakan	3.333.333,00	Sewa Rumah untuk Mess Karyawan di Kerayan
25	Kantor Imigrasi Merauke	28.050.000,00	Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah Rp18.000.000,00 dan sewa kendaraan operasional pimpinan Rp10.050.000,00
26	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Ujung Pandang	25.002.082,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
27	Kantor Imigrasi Surakarta	522.666.669,00	Sewa Gedung Bangunan
28	Kantor Imigrasi Sibolga	82.500.000,00	Sewa Gedung Bangunan

29	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kendari	15.257.000,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4 Rp11.957.000,00 dan sewa rumah dinas Rp3.300.000,00
30	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Propinsi Gorontalo	11.779.000,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
31	Kantor Imigrasi Jakarta Utara	4.708.000.000,00	Sewa Gedung ULP (Unit Pelayanan Paspor)
32	Rumah Detensi Imigrasi Semarang	2.000.000,00	Sewa rumah dinas untuk pejabat
33	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	203.280.000,00	Belanja sewa kendaraan dinas operasional roda 4
SUBTOTAL		6.576.073.748,00	
TOTAL		11.586.621.509,00	

Uang Muka Belanja
Rp0,00

C.4. UANG MUKA BELANJA

Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp75.516.187.188,00. Uang muka belanja merupakan pemberian uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban atas dasar suatu kontrak atau kesepakatan tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55
Perbandingan Rincian Uang Muka Belanja Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Jenis	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Uang Muka Belanja Modal	0,00	75.516.187.188,00

Tabel 56
Perbandingan Uang Muka Belanja Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Uang Muka Belanja	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	0,00	75.516.187.188,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	0,00	75.516.187.188,00

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp6.258.866,00

C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp6.258.866,00 dan Rp24.546.979,00. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Tabel 57
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Jenis	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	6.258.866,00	23.066.666,00
Pendapatan Jasa	0,00	1.480.313,00
Jumlah	6.258.866,00	24.546.979,00

Tabel 58
Perbandingan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen A HU	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	133.866,00	5.380.313,00
Ditjen Imigrasi	0,00	5.416.666,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	6.125.000,00	13.750.000,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	6.258.866,00	24.546.979,00

Rincian atas Transaksi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 59
Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2018

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
	Ditjen Pemasyarakatan		
1	Lembaga Pemasyarakatan Ciamis	133.866,00	Pendapatan yang masih harus diterima berupa sewa gedung kantin
	SUBTOTAL	133.866,00	

	Ditjen Imigrasi		
2	Kantor Imigrasi Cengkareng	6.125.000,00	Pendapatan yang masih harus diterima berupa sewa gedung
	SUBTOTAL	6.125.000,00	
	TOTAL	6.258.866,00	

Piutang PNPB
Rp386.127.641.921,00

C.6. PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp386.127.641.921,00 dan Rp389.792.042.282,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60
Perbandingan Rincian Piutang PNPB 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Jenis	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang PNPB	362.189.910.210,00	389.665.823.477,00
Piutang Lainnya	23.937.731.711,00	126.218.805,00
Jumlah	386.127.641.921,00	389.792.042.282,00

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNPB pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain berasal dari :

1. Pengakuan PNPB lainnya dari hasil temuan BPK atau Inspektorat Jenderal atas kerugian negara pada transaksi pengadaan barang dan pekerjaan;
2. Piutang PNPB dari hasil temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen;
3. Piutang PNPB atas pencairan garansi bank dari pekerjaan yang belum selesai;
4. Piutang atas layanan hukum Ditjen KI berupa Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH), Piutang Pembatalan Paten atas Permintaan Sendiri (PAPS) dan Piutang Paten Keterlambatan; atau
5. Piutang PNPB atas sewa tanah, gedung dan bangunan yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga.

Tabel 61
Perbandingan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	3.872.462.565,00	3.742.169.665,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	20.042.727.258,00	365.904.518,00

Ditjen Pemasyarakatan	3.230.146.109,00	4.453.192.823,00
Ditjen Imigrasi	7.900.531.590,00	22.811.586.390,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	350.991.550.984,00	358.320.790.814,00
Ditjen PP	33.223.415,00	43.398.072,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	2.000.000,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	55.000.000,00	55.000.000,00
TOTAL	386.127.641.921,00	389.792.042.282,00

Rincian atas Transaksi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran.

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp337.616.858,00

C.7. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp337.616.858,00 dan Rp594.027.312,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62
Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Nama	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Bagian Lancar TP	81.925.008,00	100.129.169,00
2	Bagian Lancar TGR	255.691.850,00	493.898.143,00
Jumlah		337.616.858,00	594.027.312,00

Tabel 63
Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	18.000.000,00	232.490.944,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	51.925.008,00	51.924.996,00
Ditjen Pemasyarakatan	97.997.882,00	153.490.727,00
Ditjen Imigrasi	116.600.000,00	100.526.677,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	30.749.968,00	33.249.968,00
Ditjen HAM	22.344.000,00	22.344.000,00
BPHN	0,00	0,00

Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	337.616.858,00	594.027.312,00

Rincian atas Transaksi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 64
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2018

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	18.000.000,00	Amirullah (TGR berupa hilangnya kendaraan roda empat)
	SUBTOTAL	18.000.000,00	
	Ditjen AHU		
2	Balai Harta Peninggalan Medan	31.525.008,00	Hj. Teti (TGR berupa tindak lanjut temuan Itjen)
3	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	20.400.000,00	Nurjaman (TGR berupa hilangnya kendaraan roda empat)
	SUBTOTAL	51.925.008,00	
	Ditjen Pemasarakatan		
4	Balai Pemasarakatan Kendari	2.125.012,00	TGR atas kehilangan kendaraan dinas roda 2 an LD.Haeruni Sag, SH
5	Lapas Indramayu	3.094.000,00	TGR an Dadang Ruskandar
6	Lapas Mojokerto	6.183.000,00	TGR an Disri Wulan A.Md.IP, SH atas kelebihan pembayaran uang kegiatan pembinaan kemandirian
7	Lembaga Pemasarakatan Ambon	24.000.000,00	TGR atas kelebihan belanja rutin selaku KPA an Ronald Tuasun
8	Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	18.000.000,00	TGR an Sugiarto Basir
9	Lembaga Pemasarakatan Waikabubak	500.000,00	TGR atas kehilangan kendaraan dinas roda 2 an Hermanus Sadhu
10	Lembaga Pemasarakatan Curup	6.000.000,00	TGR an Lukman Effendi atas kelebihan pembayaran BAMA dan obat - obatan
11	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	14.170.000,00	TGR atas kehilangan kendaraan dinas roda 4 an Woro Sri Wulan
12	Balai Pemasarakatan Jakarta Selatan	587.500,00	TGR atas kehilangan kendaraan dinas roda 2 an Dwi elyana
13	Balai Pemasarakatan Ternate, Maluku Utara	22.438.370,00	TGR an. Husein Sepa, merupakan kelebihan pembayaran ATK. TGR ini telah diajukan untuk penghapusan karena yang terhutang telah meninggal dan ahli waris sudah menyatakan tidak mampu dan TGR beberapa pegawai atas perjalanan fiktif

14	Balai Pemasyarakatan Sibolga	900.000,00	TGR temuan Itjen atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas an. Sugeng Sukarja
	SUBTOTAL	97.997.882,00	
	Ditjen Imigrasi		
15	Kantor Imigrasi Jakarta Selatan	1.360.000,00	Rully Irfan (TGR berupa hilangnya kendaraan roda dua)
16	Kantor Imigrasi Jakarta Pusat	8.400.000,00	Maryanto (TGR berupa hilangnya kendaraan roda dua)
17	Kantor Imigrasi Jakarta Timur	1.240.000,00	Iskandar Zulkarnaen (TGR berupa kehilangan kendaraan roda dua)
18	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat	75.600.000,00	Muhammad Akmal (TGR berupa hilangnya kendaraan roda empat)
19	Kantor Imigrasi Ternate	24.000.000,00	Aisa Arsad (TGR hilangnya kendaraan dinas)
20	Kantor Imigrasi Tangerang	6.000.000,00	Saraswati (TGR berupa penggunaan dana PNBP)
	SUBTOTAL	116.600.000,00	
	Ditjen PP		
21	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	30.749.968,00	Teguh Ariyono 3.632.000,00 (TGR atas hilangnya kendaraan dinas 2004), Kelebihan pembayaran kendaraan dinas yang telah dihentikan penggunaannya 13.571.000,00 dan Kekurangan pemotongan PPH Pasal 21 Belanja Honorarium narasumber 6.046.468,00
	SUBTOTAL	30.749.968,00	
	Ditjen HAM		
22	Direktorat Jenderal HAM	22.344.000,00	Tarwo (TGR berupa hilangnya kendaraan roda empat)
	SUBTOTAL	22.344.000,00	
	Grand Total	337.616.858,00	

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar
(Rp347.985.003.319,00)

C.8. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG LANCAR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp347.985.003.319,00) dan (Rp359.846.235.742,00). Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 65
Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	36.688.337.941,00	0,50%	183.441.688,00
Kurang Lancar	1.807.811.590,00	10%	180.781.159,00

Diragukan	24.800.000,00	50%	12.400.000,00
Macet	347.606.692.390,00	100%	347.606.692.390,00
Jumlah	386.127.641.921,00		347.983.315.237,00
Bagian Lancar TP/ TGR			
Lancar	337.616.858,00	0,50%	1.688.082,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00
Jumlah	337.616.858,00		1.688.082,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	386.465.258.779,00		347.985.003.319,00

Penyisihan Piutang kategori macet di antaranya terdapat pada satker milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupa Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH) dan Pembatalan atas Permintaan Sendiri (PAPS). Piutang yang macet ini kemudian diserahkan kepada KPKNL guna diterbitkan PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-85/PB/2011 sebagai dasar penyerahan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar untuk masing-masing satuan kerja dapat dilihat pada lampiran.

Persediaan
Rp411.488.366.832,00

C.9. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp411.488.366.832,00 dan Rp547.645.750.308,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66
Perbandingan Rincian Persediaan TA 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	364.667.077.931,00	83.593.052.279,00
Amunisi	34.570.912.054,00	22.875.548.823,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	2.936.457.724,00	89.828.901.429,00
Suku Cadang	359.369.392,00	467.039.191,00
Pita Cukai, Materai dan Leges	0,00	112.096.782,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual	911.500.000,00	2.312.750.000,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual	0,00	400.000,00

Aset Tetap Lainnya untuk dijual	41.584.625,00	764.119.473,00
Aset Lain-lain untuk diserahkan	0,00	46.045.750,00
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	742.218.657,00	320.954.065.589,00
Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat - Dalam Proses	0,00	3.772.250.000,00
Bahan Baku	562.444.277,00	1.281.079.113,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis	1.690.402.429,00	16.834.428.564,00
Persediaan Lainnya	5.006.399.743,00	4.803.973.315,00
Jumlah	411.488.366.832,00	547.645.750.308,00

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 67
Perbandingan Nilai Persediaan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Persediaan	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	5.569.676.562,00	5.919.751.913,00
Inspektorat Jenderal	152.949.675,00	185.709.290,00
Ditjen AHU	938.273.385,00	2.649.223.880,00
Ditjen Pemasarakatan	78.024.627.046,00	143.143.665.977,00
Ditjen Imigrasi	319.043.025.967,00	387.887.598.472,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	6.148.464.073,00	6.172.146.459,00
Ditjen PP	802.468.294,00	968.470.752,00
Ditjen HAM	206.439.400,00	303.166.490,00
BPHN	380.015.466,00	165.471.241,00
Balitbang Hukum dan HAM	61.113.105,00	58.685.550,00
BPSDM Hukum dan HAM	161.313.859,00	191.860.284,00
TOTAL	411.488.366.832,00	547.645.750.308,00

Dalam Laporan Keuangan TA 2018 *Audited* terdapat koreksi nilai persediaan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koreksi persediaan lebih/kurang catat tersebut terdapat pada 38 satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Koreksi Persediaan Per Satker Tahun 2018

No	Satker	Nilai Persediaan			
		Unaudited	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Rutan Sumenep	0,00	38.970.454,00	0,00	38.970.454,00
2	Rutan Tapaktuan	67.356.600,00	13.000.000,00	13.000.000,00	67.356.600,00
3	Lapas Purwakarta	44.629.634,00	290.400,00	335.200,00	44.584.834,00
4	Kanim Tanjung Pandan	282.591.342,00	0,00	1.521.750,00	281.069.592,00
5	Kanim Bagan Siapi-api	308.449.904,00	0,00	3.146,00	308.446.758,00
6	Kanim Bengkulu	197.662.792,00	0,00	2.381.786,00	195.281.006,00
7	Kanim Muara Enim	154.576.105,00	0,00	303.391,00	154.272.714,00
8	Kanim Padang	602.417.410,00	0,00	5.086.052,00	597.331.358,00
9	Kanim Polonia	1.070.822.105,00	0,00	31.569.794,00	1.039.252.311,00
10	Kanim Pematang Siantar	669.362.628,00	0,00	25.839.087,00	643.523.541,00
11	Kanim Tanjung Balai	181.867.740,00	0,00	26.842.000,00	155.025.740,00
12	Kanim Belawan	889.474.999,00	0,00	7.338.717,00	882.136.282,00
13	Kanim Sibolga	393.473.373,00	0,00	106.262,00	393.367.111,00
14	Kanim Pekanbaru	895.269.780,00	0,00	33.244.820,00	862.024.960,00
15	Kanim Kerinci	136.008.861,00	0,00	315.084,00	135.693.777,00
16	Kanim Kotabumi	265.856.810,00	0,00	367.600,00	265.489.210,00
17	Kanim Kalianda	301.373.938,00	0,00	2.486.425,00	298.887.513,00
18	Kanim Tasikmalaya	941.787.637,00	0,00	6.930,00	941.780.707,00
19	Kanim Semarang	1.512.059.388,00	0,00	7.502.000,00	1.504.557.388,00
20	Kanim Soekarno Hatta	3.674.337.541,00	0,00	1.644.555,00	3.672.692.986,00
21	Kanim Jakarta Selatan	3.122.772.744,00	14.795.930,00	21.856.790,00	3.115.711.884,00
22	Kanim Tanjung Priok	2.781.532.855,00	0,00	3.513.273,00	2.778.019.582,00
23	Kanim Cilegon	792.719.066,00	0,00	335.049,00	792.384.017,00
24	Kanim Gorontalo	228.142.178,00	0,00	2.269.058,00	225.873.120,00
25	Kanim Samarinda	295.022.363,00	0,00	9.739.865,00	285.282.498,00
26	Kanim Mataram	1.446.066.660,00	448.500,00	0,00	1.446.515.160,00
27	Kanim Maumere	335.693.597,00	0,00	4.648.841,00	331.044.756,00
28	Kanim Labuan Bajo	333.960.394,00	0,00	495.578,00	333.464.816,00
29	Kanim Palu	519.940.961,00	0,00	1.908.217,00	518.032.744,00
30	Kanim Banggai	80.494.214,00	0,00	1.870.781,00	78.623.433,00
31	Kanim Bitung	151.537.490,00	0,00	7.615.515,00	143.921.975,00
32	Kanim Polewali Mandar	401.392.186,00	0,00	2.628.884,00	398.763.302,00
33	Kanim Palopo	347.243.295,00	0,00	134.000,00	347.109.295,00
34	Kanim Tobelo	31.870.976,00	0,00	42.635,00	31.828.341,00
35	Kanim Ambon	389.517.605,00	0,00	1.341.209,00	388.176.396,00
36	Kanim Banjarmasin	690.631.191,00	0,00	0,00	690.631.191,00

37	Kanim Batulicin	76.258.356,00	0,00	0,00	76.258.356,00
38	Satker Ditjen Imigrasi	222.766.139.529,00	0,00	4.394.525.490,00	218.371.614.039,00
Jumlah		247.380.314.247,00	67.505.284,00	4.612.819.784,00	242.834.999.747,00

Koreksi terdapat pada kelompok barang persediaan barang konsumsi, suku cadang, persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat – dalam proses, dan persediaan tujuan strategis berjaga-jaga.

Tabel 69
Rincian Koreksi Persediaan Per Kelompok Persediaan Tahun 2018

No	Kelompok Persediaan	Unaudited	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Barang Konsumsi	365.054.807.231,00	67.505.284,00	455.234.584,00	364.667.077.931,00
2	Suku Cadang	359.414.192,00	0,00	44.800,00	359.369.392,00
3	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	4.157.250.000,00	0,00	4.157.250.000,00	0,00
4	Persediaan Tujuan Strategis Berjaga-jaga	1.690.692.829,00	0,00	290.400,00	1.690.402.429,00
Jumlah		371.262.164.252,00	67.505.284,00	4.612.819.784,00	366.716.849.752,00

Tagihan TP/TGR
Rp1.097.460.531,00

C.10. TAGIHAN TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Tagihan TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.097.460.531,00 dan Rp901.155.492,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tabel 70
Perbandingan Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit	Tagihan TP/TGR	
Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	319.702.424,00	185.865.142,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	48.835.396,00	102.460.416,00
Ditjen Pemasarakatan	175.123.951,00	239.649.681,00
Ditjen Imigrasi	535.584.240,00	332.621.733,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00

Ditjen PP	8.936.520,00	8.936.520,00
Ditjen HAM	9.278.000,00	31.622.000,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	1.097.460.531,00	901.155.492,00

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing satuan kerja eselon I disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 71
Rincian Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2018

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
Sekretariat Jenderal			
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	319.702.424,00	TGR atas nama: a) Denny Ardiyanto b) Fengki Rekli Kampong c) Gusti Ika Purnama d) Handy nurjaman e) Jaya Rafikal f) Kusno g) Musyarofah Noor Rohmah h) Zamrony i) Amirullah j) Agus Suratna k) Solihin l) Nuras
	SUBTOTAL	319.702.424,00	
Ditjen AHU			
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	35.700.000,00	Nurjaman (TGR atas hilangnya mobil)
2	Balai Harta Peningalan Medan	13.135.396,00	Teti Winarti (TGR atas tindak lanjut temuan Itjen)
	SUBTOTAL	48.835.396,00	
Ditjen Pemasyarakatan			
1	Lembaga Pemasyarakatan Ambon	144.713.032,00	TGR an Ronald Tuasuun
2	Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	18.228.119,00	TGR an Sugianto Basir
3	Lembaga Pemasyarakatan Curup	12.182.800,00	TGR an Lukman Efendi
	SUBTOTAL	175.123.951,00	
Ditjen Imigrasi			
1	Kantor Imigrasi Ternate	233.209.240,00	Aisa Arsad (TGR hilangnya kendaraan dinas)
2	Kantor Imigrasi Entikong	9.500.000,00	TGR an Marhaen
3	Kantor Imigrasi Tangerang	7.795.000,00	TGR an Saraswati

4	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat	285.080.000,00	SKTJM a.n Muhammad Akmal,S.H Tanggal 24 Mei 2018
	SUBTOTAL	535.584.240,00	
	Ditjen PP		
1	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	8.936.520,00	MA dkk dan merupakan temuan Itjen tahun 2016
	SUBTOTAL	8.936.520,00	
	Ditjen HAM		
1	Direktorat Jenderal HAM	9.278.000,00	TGR hilangnya mobil dinas an Tarwo
	SUBTOTAL	9.278.000,00	
	TOTAL	1.097.460.531,00	

Piutang Jangka Panjang Lainnya
Rp9.449.000.000,00

C.11. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar masing-masing Rp9.449.000.000,00 dan Rp11.151.900.000,00. Piutang Jangka Panjang Lainnya ini atas transaksi perjanjian kontrak sewa lahan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT. Paramita selama 20 Tahun, yang dicatatkan di sini merupakan piutang Tahun 2018 s.d 2024. Perbandingan Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 72
Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Piutang Jangka Panjang Lainnya	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	9.449.000.000,00	11.151.900.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	0,00	0,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	9.449.000.000,00	11.151.900.000,00

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar 9.449.000.000,00 merupakan Piutang atas sewa PT. Paramitha kepada Sekretariat Jenderal.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
(Rp132.842.165,00)

C.12. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp132.842.165,00) dan (Rp71.927.775,00). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 73
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang TP/TGR			
Lancar	1.016.948.107,00	0,05%	5.084.741,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	80.512.424,00	100%	80.512.424,00
Jumlah	1.097.460.531,00		85.597.165,00
Piutang Jangka Panjang Lainnya			
Lancar	9.449.000.000,00	0,05%	47.245.000,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00
Jumlah	9.449.000.000,00		47.245.000,00
TOTAL	10.546.460.531,00		132.842.165,00

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing satuan kerja dapat dilihat pada lampiran.

Tanah
Rp12.625.444.631.053,00

C.13. TANAH

Tanah yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.625.444.631.053,00 dan Rp12.672.489.520.638,00. Rincian perbandingan nilai Aset Tanah berdasarkan Eselon I pada Kementerian

Hukum dan HAM per 31 Desember 2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel 74
Perbandingan Nilai Tanah Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Tanah	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	13.290.731.876.448,00	12.908.816.795.347,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	257.387.463.000,00	257.387.463.000,00
Ditjen Pemasyarakatan	27.070.935.810.923,00	19.591.836.296.933,00
Ditjen Imigrasi	4.460.083.822.507,00	3.868.075.044.746,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	74.534.060.000,00	74.534.060.000,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	737.997.290.000,00	736.358.663.000,00
Konsolidasi Kemenkumham	(33.266.225.691.825,00)	(24.764.518.802.388,00)
TOTAL	12.625.444.631.053,00	12.672.489.520.638,00

Rincian Mutasi Tanah tersebut meliputi :

Tabel 75
Rincian Mutasi Tanah

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2017	12.672.489.520.638,00
Mutasi tambah :	
Koreksi Take In Revaluasi	24.764.518.802.388,00
Penambahan Saldo Awal	5.157.799.420,00
Transfer Masuk	147.973.798.501,00
Hibah Masuk	52.294.587.614,00
Reklasifikasi Masuk	3.394.496.000,00
Perolehan Lainnya	7.438.834.000,00
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	71.840.393.000,00
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	2.970.830.483,00
Pengembangan Nilai Aset	53.488.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	5.615.164.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	8.374.742.706.369,00
Koreksi Kesalahan Input IP	494.414.000,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (take out/satkon)	60.690.545.300,00
Transfer Masuk (take out/satkon)	103.347.260.330,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset (take out/satkon)	54.637.681.800,00

Total Mutasi Tambah :	33.655.170.801.205,00
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	4.664.334.614,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	721.893.205,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	18.990.188.432,00
Transfer Keluar	148.124.048.501,00
Reklasifikasi Keluar	3.394.496.000,00
Koreksi Pencatatan	38.448.720.300,00
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	2.970.830.483,00
Koreksi Revaluasi Aset (take out/satkon)	33.175.403.416.125,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (take out/satkon)	151.512.821.000,00
Transfer Keluar (take out/satkon)	103.347.260.330,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset (take out/satkon)	54.637.681.800,00
Total Mutasi Kurang :	33.702.215.690.790,00
Saldo per 31 Desember 2018	12.625.444.631.053,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	12.625.444.631.053,00

Sebaran Transaksi berdasarkan unit eselon I:

• **Mutasi Tambah**

Penambahan Saldo Awal senilai Rp.5.157.799.420,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	729.000.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	3.742.977.420,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	685.822.000,00
Total			5.157.799.420,00

Transfer Masuk senilai Rp.147.973.798.501,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	144.619.756.501,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	1.715.415.000,00
3	01312	BPSDM	1.638.627.000,00
Total			147.973.798.501,00

Hibah Masuk senilai Rp.52.294.587.614,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	46.149.273.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	4.371.314.614,00

3	01306	Ditjen Imigrasi	1.774.000.000,00
Total			52.294.587.614,00

Reklasifikasi Masuk senilai Rp.3.394.496.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	2.173.848.000,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	1.220.648.000,00
Total			3.394.496.000,00

Perolehan Lainnya senilai Rp.7.438.834.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01306	Ditjen Imigrasi	7.438.834.000,00
Total			7.438.834.000,00

Barang Berlebih Hasil Inventarisasi senilai Rp.71.840.393.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	69.597.387.000,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	2.243.006.000,00
Total			71.840.393.000,00

Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi senilai Rp.2.970.830.483,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	1.588.917.483,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	1.381.913.000,00
Total			2.970.830.483,00

Pengembangan Nilai Aset senilai Rp.53.488.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01306	Ditjen Imigrasi	53.488.000,00
Total			53.488.000,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp.5.615.164.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	774.603.000,00

2	01306	Ditjen Imigrasi	4.840.561.000,00
Total			5.615.164.000,00

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Rp.8.374.742.706.369,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	341.581.990.579,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	7.454.263.753.708,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	578.896.962.082,00
Total			8.374.742.706.369,00

Koreksi Kesalahan Input IP senilai Rp.494.414.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	494.414.000,00
Total			494.414.000,00

- **Mutasi Kurang**

Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp.4.664.334.614,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	162.093.750,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	4.501.540.864,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	700.000,00
Total			4.664.334.614,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp.721.893.205,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	571.643.205,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	150.250.000,00
Total			721.893.205,00

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Rp.18.990.188.432,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	18.990.188.432,00
Total			18.990.188.432,00

Transfer Keluar senilai Rp.148.124.048.501,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	2.104.652.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	144.208.731.501,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	1.810.665.000,00
Total			148.124.048.501,00

Reklasifikasi Keluar senilai Rp.3.394.496.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	2.173.848.000,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	1.220.648.000,00
Total			3.394.496.000,00

Koreksi Pencatatan senilai Rp.38.448.720.300,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	3.706.793.523,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	31.064.231.456,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	3.677.695.321,00
Total			38.448.720.300,00

Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi senilai Rp.2.970.830.483,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	1.588.917.483,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	1.381.913.000,00
Total			2.970.830.483,00

Penjelasan:

➤ Selisih nilai transfer tanah

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
Tanah	148.124.048.501,00	147.973.798.501,00	150.250.000,00

Terdapat selisih nilai transfer tanah sebesar Rp.150.250.000,00 yang disebabkan adanya transfer keluar tanah dari Kanim Entikong yang ditujukan untuk satker Kementerian PUPR Ditjen Bina Marga Wilayah dengan kode 033.04.498634 dengan uraian satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Barat.

Peralatan dan Mesin
Rp6.680.447.076.850,0
0

C.14. PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.680.447.076.850,00 dan Rp5.714.938.492.900,00.

Rincian nilai Peralatan dan Mesin berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

Tabel 76
Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Peralatan dan Mesin	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	800.612.812.505,00	541.952.399.413,00
Inspektorat Jenderal	17.784.008.735,00	18.673.725.687,00
Ditjen AHU	370.717.544.988,00	315.669.257.386,00
Ditjen Pemasyarakatan	2.414.066.729.040,00	2.238.426.233.533,00
Ditjen Imigrasi	2.767.651.215.906,00	2.343.752.429.198,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	180.863.099.036,00	139.908.386.214,00
Ditjen PP	27.073.268.111,00	26.584.435.141,00
Ditjen HAM	16.247.578.855,00	14.111.135.345,00
BPHN	17.722.812.539,00	17.075.273.919,00
Balitbang Hukum dan HAM	12.860.982.105,00	11.851.444.851,00
BPSDM Hukum dan HAM	54.847.025.030,00	46.933.772.213,00
Jumlah	6.680.447.076.850,00	5.714.938.492.900,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin meliputi:

Tabel 77
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2017	5.714.938.492.900,00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	77.710.830.079,00
Pembelian	680.651.396.146,00
Transfer Masuk	741.660.039.070,00
Hibah Masuk	10.427.442.720,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	124.512.887.320,00
Reklasifikasi Masuk	202.274.894.048,00
Perolehan Lainnya	3.139.390.964,00
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	3.732.696.195,00
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	7.239.539.002,00
Pengembangan Nilai Aset	101.048.044.402,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	604.026.000,00
Transaksi Normalisasi BMN	10.260.800,00

Total Mutasi Tambah :	1.953.011.446.746,00
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	68.833.910.839,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	6.858.250,00
Transaksi Normalisasi BMN	6.089.540.832,00
Penghapusan	6.946.491.319,00
Transfer Keluar	741.591.479.600,00
Reklasifikasi Keluar	160.155.520.507,00
Koreksi Pencatatan	3.861.724.636,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	17.336.813,00
Total Mutasi Kurang :	987.502.862.796,00
Saldo per 31 Desember 2018	6.680.447.076.850,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	4.407.498.695.412,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	2.272.948.381.438,00

Sebaran Transaksi berdasarkan unit eselon I :

- Mutasi Tambah**

Penambahan Saldo Awal senilai Rp.77.710.830.079,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	3.613.578.372,00
2	01303	Ditjen AHU	7.810.000,00
3	01305	Ditjen Pemasarakatan	61.575.369.538,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	10.501.503.269,00
5	01309	Ditjen HAM	1.988.912.000,00
6	01311	Balitbang Hukum dan HAM	23.656.900,00
Total			77.710.830.079,00

Pembelian senilai Rp.680.651.396.146,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	119.550.832.581,00
2	01302	Inspektorat Jenderal	78.250.000,00
3	01303	Ditjen AHU	66.728.014.037,00
4	01305	Ditjen Pemasarakatan	11.703.637.080,00
5	01306	Ditjen Imigrasi	439.810.119.058,00
6	01307	Ditjen KI	34.723.660.526,00
7	01308	Ditjen PP	284.082.000,00
8	01309	Ditjen HAM	146.640.000,00
9	01310	BPHN	621.906.720,00

10	01311	Balitbang HAM	249.871.854,00
11	01312	BPSDM	6.754.382.290,00
Total			680.651.396.146,00

Transfer Masuk senilai Rp.741.660.039.070,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	58.075.686.403,00
2	01302	Inspektorat Jenderal	115.707.548,00
3	01303	Ditjen AHU	1.976.576.450,00
4	01305	Ditjen Pemasarakatan	534.115.992.704,00
5	01306	Ditjen Imigrasi	134.729.703.066,00
6	01307	Ditjen KI	10.171.382.362,00
7	01308	Ditjen PP	196.865.000,00
8	01309	Ditjen HAM	178.251.510,00
9	01310	BPHN	60.000.000,00
10	01311	Balitbang HAM	867.503.500,00
11	01312	BPSDM	1.172.370.527,00
Total			741.660.039.070,00

Hibah Masuk senilai Rp.10.427.442.720,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	1.090.639.000,00
2	01305	Ditjen Pemasarakatan	3.483.663.000,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	5.853.140.720,00
Total			10.427.442.720,00

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp.124.512.887.320,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	8.324.274.400,00
2	01305	Ditjen Pemasarakatan	112.432.626.777,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	3.755.986.143,00
Total			124.512.887.320,00

Reklasifikasi Masuk senilai Rp.202.274.894.048,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	538.566.175,00
2	01303	Ditjen AHU	47.693.489.505,00

3	01305	Ditjen Pemasyarakatan	128.784.288.665,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	25.258.549.703,00
Total			202.274.894.048,00

Perolehan Lainnya senilai Rp.3.139.390.964,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	3.139.390.964,00
Total			3.139.390.964,00

Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap senilai Rp.3.732.696.195,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	155.000.000,00
2	01303	Ditjen AHU	197.000,00
3	01305	Ditjen Pemasyarakatan	2.680.871.188,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	658.665.037,00
5	01307	Ditjen KI	105.500.000,00
6	01308	Ditjen PP	27.442.970,00
7	01309	Ditjen HAM	105.020.000,00
Total			3.732.696.195,00

Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi senilai Rp.7.239.539.002,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	401.635.666,00
2	01303	Ditjen AHU	4.455.000,00
3	01305	Ditjen Pemasyarakatan	6.457.423.936,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	374.374.400,00
5	01307	Ditjen KI	1.650.000,00
Total			7.239.539.002,00

Pengembangan Nilai Aset senilai Rp.101.048.044.402,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	98.397.148.600,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	205.670.000,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	2.435.875.802,00
4	01307	Ditjen KI	9.350.000,00
Total			101.048.044.402,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp.604.026.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	58.000.000,00
2	01305	Ditjen Pemasarakatan	434.746.000,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	111.280.000,00
Total			604.026.000,00

Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp.10.260.800,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01306	Ditjen Imigrasi	10.260.800,00
Total			10.260.800,00

- Mutasi Kurang**

Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya senilai Rp.68.833.910.839,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	17.927.648.542,00
2	01303	Ditjen AHU	5.332.844.627,00
3	01305	Ditjen Pemasarakatan	24.819.056.300,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	20.485.124.270,00
5	01308	Ditjen PP	19.557.000,00
6	01309	Ditjen HAM	177.360.000,00
7	01310	BPHN	34.368.100,00
8	01311	Balitbang HAM	37.952.000,00
Total			68.833.910.839,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp.6.858.250,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01306	Ditjen Imigrasi	50.000,00
2	01307	Ditjen KI	6.808.250,00
Total			6.858.250,00

Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp.6.089.540.832,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	91.088.966,00
2	01303	Ditjen AHU	4.455.000,00

3	01305	Ditjen Pemasyarakatan	5.678.591.766,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	313.755.100,00
5	01307	Ditjen KI	1.650.000,00
Total			6.089.540.832,00

Penghapusan senilai Rp.6.946.491.319,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	679.815.247,00
2	01302	Inspektorat Jenderal	212.640.500,00
3	01303	Ditjen AHU	1.497.064.660,00
4	01305	Ditjen Pemasyarakatan	1.414.781.096,00
5	01306	Ditjen Imigrasi	3.048.646.816,00
6	01311	Balitbang HAM	93.543.000,00
Total			6.946.491.319,00

Transfer Keluar senilai Rp.741.591.479.600,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	4.020.969.775,00
2	01302	Inspektorat Jenderal	871.034.000,00
3	01303	Ditjen AHU	56.695.042.402,00
4	01305	Ditjen Pemasyarakatan	528.372.518.294,00
5	01306	Ditjen Imigrasi	147.465.023.313,00
6	01307	Ditjen KI	4.048.371.816,00
7	01309	Ditjen HAM	105.020.000,00
8	01312	BPSDM	13.500.000,00
Total			741.591.479.600,00

Reklasifikasi Keluar senilai Rp.160.155.520.507,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	501.151.175,00
2	01303	Ditjen AHU	6.126.817.101,00
3	01305	Ditjen Pemasyarakatan	128.506.228.878,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	25.021.323.353,00
Total			160.155.520.507,00

Koreksi Pencatatan senilai Rp.3.861.724.636,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	30.305.000,00
2	01305	Ditjen Pemasarakatan	564.671.198,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	3.266.748.438,00
Total			3.861.724.636,00

Usulan Barang Rusak Berat Ke Pengelola senilai Rp.17.336.813,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	17.336.813,00
Total			17.336.813,00

Penjelasan:

➤ Selisih nilai transfer peralatan dan mesin

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
Peralatan dan Mesin	741.595.227.600,00	741.660.039.070,00	64.811.470,00

Nilai transfer keluar pada tabel diatas terdiri dari nilai transfer keluar (BMN aktif) sebesar Rp.741.591.479.600,00 dan nilai transfer keluar (BMN yang dihentikan) sebesar Rp.3.748.000,00. Adapun selisih sebesar Rp.64.811.470,00 karena adanya pencatatan transfer keluar dan transfer masuk yang dilakukan dengan kementerian lain, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengirim	Penerima	Nilai
1	Pusat Komunikasi, Kemenlu	Ditjen Imigrasi	22.715.000,00
2	BNN Prov.DKI Jakarta	Lapas Cipinang, Lapas Salemba, Lapas Narkotika Jakarta	28.076.925,00
3	BNN Prov.Bali	Lapas Tabanan, Lapas Narkotika Bangli	18.717.950,00
4	Perwakilan Imigrasi di Jeddah	Konsulat Jeddah, Kemenlu	(4.698.405,00)
Total			64.811.470,00

Gedung dan Bangunan C.15. GEDUNG DAN BANGUNAN
Rp10.457.963.798.623,00

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp10.457.963.798.623,00 dan Rp11.135.467.855.672,00. Rincian nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 78
Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Eselon I	Gedung dan Bangunan	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	836.429.768.955,00	874.800.876.225,00
Inspektorat Jenderal	895.379.000,00	1.350.182.696,00
Ditjen AHU	123.797.994.406,00	155.473.282.006,00
Ditjen Pemasyarakatan	8.410.217.420.179,00	8.037.870.767.259,00
Ditjen Imigrasi	1.632.472.235.385,00	1.646.055.409.628,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	139.077.924.460,00	128.234.157.460,00
Ditjen PP	26.853.457.000,00	26.853.457.000,00
Ditjen HAM	70.325.976.000,00	70.325.976.000,00
BPHN	48.298.479.692,00	45.914.571.000,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	170.017.010.834,00	169.371.989.053,00
Konsolidasi Kemenkumham	(1.000.421.847.288,00)	(20.782.812.655,00)
TOTAL	10.457.963.798.623,00	11.135.467.855.672,00

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan tersebut meliputi :

Tabel 79
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2017	11.135.467.855.672,00
Mutasi tambah :	
Koreksi Take In Revaluasi	20.782.812.655,00
Penambahan Saldo Awal	3.393.086.301,00
Pembelian	242.075.733,00
Transfer Masuk	135.544.631.118,00
Hibah Masuk	17.856.794.469,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	328.131.645.914,00
Reklasifikasi Masuk	42.443.371.055,00
Perolehan Lainnya	160.000.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	229.211.000,00
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	228.345.388.000,00
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	51.047.750.611,00
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	3.323.176.000,00
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra	4.187.493.440,00
Pengembangan Nilai Aset	35.881.645.498,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	23.236.821.859,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	993.352.593.978,00

Penerimaan Aset Tetap Renovasi	20.368.803.086,00
Pengembangan Melalui KDP	37.006.589.721,00
Koreksi Kesalahan Input IP	19.271.000,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset (take out/satkon)	4.152.771.158,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (take out/satkon)	7.055.036.776,00
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (take out/satkon)	7.855.466.308,00
Transfer Masuk (take out/satkon)	109.784.249.814,00
Koreksi Take Out Revaluasi	12.020.456.275,00
Total Mutasi Tambah :	2.086.421.141.769,00
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	69.647.853.409,00
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	3.121.720,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	46.033.748.768,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	362.233.169.314,00
Transaksi Normalisasi BMN	658.954.523,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	664.695.986.207,00
Penghapusan	12.946.543.096,00
Transfer Keluar	136.898.387.218,00
Reklasifikasi Keluar	44.201.646.586,00
Koreksi Pencatatan	224.441.650.502,00
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	43.238.591.138,00
Penghapusan Semu karena reklas dari Intra ke Ekstra/sebaliknya	17.635.718.718,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (take out/satkon)	1.030.386.956.305,00
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (take out/satkon)	1.118.621.500,00
Transfer Keluar (take out/satkon)	109.784.249.814,00
Total Mutasi Kurang :	2.763.925.198.818,00
Koreksi Take Out Revaluasi	
Koreksi Take Out Revaluasi Tahap 1	(1.004.761.787.196,00)
Koreksi Take Out Revaluasi Tahap 2	4.339.939.908,00
Total Koreksi Take Out Revaluasi	(1.000.421.847.288,00)
Saldo per 31 Desember 2018	10.457.963.798.623,00
Akumulasi Penyusutan sebelum Take Out	678.928.254.313,00
Koreksi Take Out Revaluasi (Penyusutan) Tahap 1	1.705.380.107.541,00
Koreksi Take Out Revaluasi (Penyusutan) Tahap 2	(60.491.814.760,00)
Total Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	2.323.816.547.094,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	8.134.147.251.529,00

Sebaran Transaksi berdasarkan unit eselon I :

- **Mutasi Tambah**

Penambahan Saldo Awal senilai Rp.3.393.086.301,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	1.388.535.001,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	2.004.551.300,00
Total			3.393.086.301,00

Pembelian senilai Rp.242.075.733,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	50.182.308,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	191.893.425,00
Total			242.075.733,00

Transfer Masuk senilai Rp.135.544.631.118,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	1.377.572.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	104.326.441.838,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	27.710.490.280,00
4	01312	BPSDM	2.130.127.000,00
Total			135.544.631.118,00

Hibah Masuk senilai Rp.17.856.794.469,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	1.776.292.000,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	16.080.502.469,00
Total			17.856.794.469,00

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp.328.131.645.914,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	300.233.241.926,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	27.898.403.988,00
Total			328.131.645.914,00

Reklasifikasi Masuk senilai Rp.42.443.371.055,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	8.505.841.000,00
2	01303	Ditjen AHU	3.219.642.760,00
3	01305	Ditjen Pemasarakatan	12.454.205.942,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	18.263.681.353,00
Total			42.443.371.055,00

Perolehan Lainnya senilai Rp.160.000.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	160.000.000,00
Total			160.000.000,00

Penyelesaian Pembangunan Langsung senilai Rp.229.211.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01306	Ditjen Imigrasi	229.211.000,00
Total			229.211.000,00

Barang Berlebih Hasil Inventarisasi senilai Rp.228.345.388.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	3.524.554.000,00
2	01305	Ditjen Pemasarakatan	222.497.624.000,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	2.323.210.000,00
Total			228.345.388.000,00

Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi senilai Rp.51.047.750.611,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	48.856.644.611,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	2.191.106.000,00
Total			51.047.750.611,00

Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap senilai Rp.3.323.176.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	1.344.560.000,00

2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	1.668.706.000,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	309.910.000,00
Total			3.323.176.000,00

Perolehan Reklas Dari Intra Ke Ekstra senilai Rp.4.187.493.440,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	4.187.493.440,00
Total			4.187.493.440,00

Pengembangan Nilai Aset senilai Rp.35.881.645.498,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	4.422.396.500,00
2	01303	Ditjen AHU	10.248.473.617,00
3	01305	Ditjen Pemasyarakatan	509.857.318,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	9.857.151.063,00
5	01307	Ditjen KI	10.843.767.000,00
Total			35.881.645.498,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp.23.236.821.859,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	20.843.428.374,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	2.393.393.485,00
Total			23.236.821.859,00

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset senilai Rp.993.352.593.978,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	28.813.402.197,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	930.256.714.897,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	34.282.476.884,00
Total			993.352.593.978,00

Penerimaan Aset Tetap Renovasi senilai Rp.20.368.803.086,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	4.697.719.884,00
2	01303	Ditjen AHU	10.420.224.956,00

3	01305	Ditjen Pemasyarakatan	5.250.858.246,00
Total			20.368.803.086,00

Pengembangan Melalui KDP senilai Rp.37.006.589.721,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	198.735.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	7.959.994.486,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	24.335.228.043,00
4	01309	BPHN	2.383.908.692,00
5	01312	BPSDM	2.128.723.500,00
Total			37.006.589.721,00

Koreksi Kesalahan Input IP senilai Rp.19.271.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	19.271.000,00
Total			19.271.000,00

- Mutasi Kurang**

Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya senilai Rp.69.647.853.409,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	15.602.038.400,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	43.456.795.541,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	6.975.190.749,00
4	01312	BPSDM	3.613.828.719,00
Total			69.647.853.409,00

Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi senilai Rp.3.121.720,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	3.121.720,00
Total			3.121.720,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp.46.033.748.768,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	1.791.447.372,00
2	01303	Ditjen AHU	43.618.219.285,00

3	01305	Ditjen Pemasyarakatan	624.082.111,00
Total			46.033.748.768,00

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset senilai Rp.362.233.169.314,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	437.675.228,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	315.567.255.055,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	46.228.239.031,00
Total			362.233.169.314,00

Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp.658.954.523,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01306	Ditjen Imigrasi	658.954.523,00
Total			658.954.523,00

Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali senilai Rp.664.695.986.207,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	10.743.858.517,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	593.743.991.319,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	60.208.136.371,00
Total			664.695.986.207,00

Penghapusan senilai Rp.12.946.543.096,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	2.402.509.400,00
2	01302	Inspektorat Jenderal	454.803.696,00
3	01305	Ditjen Pemasyarakatan	9.297.362.000,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	791.868.000,00
Total			12.946.543.096,00

Transfer Keluar senilai Rp.136.898.387.218,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	35.746.511.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	72.087.629.838,00

3	01306	Ditjen Imigrasi	29.064.246.380,00
Total			136.898.387.218,00

Reklasifikasi Keluar senilai Rp.44.201.646.586,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	8.497.591.000,00
2	01303	Ditjen AHU	329.088.000,00
3	01305	Ditjen Pemasarakatan	16.890.736.233,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	18.484.231.353,00
Total			44.201.646.586,00

Koreksi Pencatatan senilai Rp.224.441.650.502,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	10.065.042.172,00
2	01305	Ditjen Pemasarakatan	197.597.974.254,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	16.778.634.076,00
Total			224.441.650.502,00

Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi senilai Rp.43.238.591.138,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	40.773.708.088,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	2.464.883.050,00
Total			43.238.591.138,00

Penghapusan semu karena reklas dari intra ke ekstra senilai Rp.17.635.718.718,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	4.392.907.762,00
2	01303	Ditjen AHU	13.242.810.956,00
Total			17.635.718.718,00

Penjelasan:

➤ Selisih nilai transfer gedung dan bangunan

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
Gedung & Bangunan	136.898.387.218	135.544.631.118	(1.353.756.100,00)

Adapun selisih sebesar Rp1.353.756.100,00 karena adanya pencatatan transfer

keluar dari satker Ditjen Imigrasi yang ditujukan kepada satker Direktorat Bina Penataan Bangunan (033.05.452780), Kementerian PUPR.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp74.628.773.346,00

C.16. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp74.628.773.346,00 dan Rp75.128.078.754,00. Rincian nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan unit Eselon I adalah sebagai berikut :

Tabel 80
Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	10.074.424.977,00	12.039.418.977,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	857.380.960,00	10.074.000,00
Ditjen Pemasyarakatan	33.415.584.354,00	30.334.296.733,00
Ditjen Imigrasi	28.528.018.312,00	26.357.383.026,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	968.500.000,00	968.500.000,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	3.051.171.300,00	3.051.171.300,00
Konsolidasi Kemenkumham	(2.266.306.557,00)	2.367.234.718,00
Total	74.628.773.346,00	75.128.078.754,00

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut meliputi :

Tabel 81
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2017	75.128.078.754,00
Mutasi tambah :	
Pembelian	1.675.964.618,00
Transfer Masuk	43.586.000,00
Hibah Masuk	245.353.668,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	3.679.495.662,00
Reklasifikasi Masuk	857.380.960,00

Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	3.762.405.000,00
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	1.928.011.627,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	4.032.275.466,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (take out/satkon)	257.613.557,00
Koreksi Take Out Revaluasi	6.488.287.686,00
Transfer Keluar (take out/satkon)	43.586.000,00
Total Mutasi Tambah :	23.013.960.244,00
Mutasi Kurang :	
Koreksi Take In Revaluasi	2.367.234.718,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	116.397.733,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	7.917.057.901,00
Penghapusan	10.074.000,00
Transfer Keluar	43.586.000,00
Reklasifikasi Keluar	230.862.000,00
Koreksi Pencatatan	3.772.259.500,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (take out/satkon)	9.012.207.800,00
Transfer Masuk (take out/satkon)	43.586.000,00
Koreksi Take Out Revaluasi	2.266.306.557,00
Total Mutasi Kurang :	23.513.265.652,00
Saldo per 31 Desember 2018	74.628.773.346,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	38.994.267.576,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	35.634.505.770,00

Sebaran Transaksi berdasarkan unit eselon I :

- Mutasi Tambah**

Pembelian senilai Rp.1.675.964.618,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	17.432.000,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	1.658.532.618,00
Total			1.675.964.618,00

Transfer Masuk senilai Rp.43.586.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	43.586.000,00
Total			43.586.000,00

Hibah Masuk senilai Rp.245.353.668,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01306	Ditjen Imigrasi	245.353.668,00
Total			245.353.668,00

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp.3.679.495.662,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	2.937.654.752,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	741.840.910,00
Total			3.679.495.662,00

Reklasifikasi Masuk senilai Rp.857.380.960,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	857.380.960,00
Total			857.380.960,00

Barang Berlebih Hasil Inventarisasi senilai Rp.3.762.405.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	3.631.963.000,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	130.442.000,00
Total			3.762.405.000,00

Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi senilai Rp.1.928.011.627,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	1.509.480.577,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	418.531.050,00
Total			1.928.011.627,00

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset senilai Rp.4.032.275.466,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	3.970.617.991,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	61.657.475,00
Total			4.032.275.466,00

• **Mutasi Kurang**

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset senilai Rp.116.397.733,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	116.397.733,00
Total			116.397.733,00

Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali senilai Rp.7.917.057.901,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	7.707.792.376,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	209.265.525,00
Total			7.917.057.901,00

Penghapusan senilai Rp.10.074.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	10.074.000,00
Total			10.074.000,00

Transfer Keluar senilai Rp.43.586.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	43.586.000,00
Total			43.586.000,00

Reklasifikasi Keluar senilai Rp.230.862.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	37.415.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	156.431.000,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	37.016.000,00
Total			230.862.000,00

Koreksi Pencatatan senilai Rp.3.772.259.500,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	1.927.579.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	1.005.239.590,00

3	01306	Ditjen Imigrasi	839.440.910,00
Total			3.772.259.500,00

Aset Tetap Lainnya
Rp68.218.739.768,00

C.17. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam aset tetap lainnya adalah aset tetap dalam renovasi. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp68.218.739.768,00 dan Rp70.832.527.797,00.

Rincian nilai Aset Tetap Lainnya berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut:

Tabel 82
Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya per Eselon I

Unit Eselon I	Aset Tetap lainnya	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	36.202.560.725,00	36.470.798.111,00
Inspektorat Jenderal	26.057.824,00	26.057.824,00
Ditjen AHU	359.982.711,00	359.982.711,00
Ditjen Pemasyarakatan	11.080.264.953,00	16.678.032.878,00
Ditjen Imigrasi	10.342.907.542,00	11.237.403.766,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	4.564.158.176,00	614.498.325,00
Ditjen PP	413.755.982,00	413.755.982,00
Ditjen HAM	526.914.963,00	526.914.963,00
BPHN	1.516.484.950,00	1.559.861.525,00
Balitbang Hukum dan HAM	213.007.945,00	213.007.945,00
BPSDM Hukum dan HAM	2.972.643.997,00	2.732.213.767,00
Total	68.218.739.768,00	70.832.527.797,00

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi :

Tabel 83
Rincian Transaksi Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2017	70.832.527.797,00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	367.519.540,00
Pembelian	17.705.770.316,00
Transfer Masuk	370.245.641,00
Hibah Masuk	284.091.700,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	3.130.641.803,00

Reklasifikasi Masuk	2.500.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	63.843.253,00
Total Mutasi Tambah :	21.924.612.253,00
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	153.973.778,00
Penghapusan	329.047.522,00
Transfer Keluar	20.739.048.727,00
Koreksi Pencatatan	3.316.330.255,00
Total Mutasi Kurang :	24.538.400.282,00
Saldo per 31 Desember 2018	68.218.739.768,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	6.043.713.717,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	62.175.026.051,00

Sebaran Transaksi berdasarkan unit eselon I :

- Mutasi Tambah**

Penambahan Saldo Awal senilai Rp.367.519.540,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	31.245.500,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	336.274.040,00
Total			367.519.540,00

Pembelian senilai Rp.17.705.770.316,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	1.092.580.000,00
2	01303	Ditjen AHU	11.530.729.000,00
3	01305	Ditjen Pemasarakatan	294.630.926,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	356.912.000,00
5	01307	Ditjen KI	3.949.659.851,00
6	01310	BPHN	283.718.539,00
7	01312	BPSDM	197.540.000,00
Total			17.705.770.316,00

Transfer Masuk senilai Rp.370.245.641,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	312.674.614,00

2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	12.128.047,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	2.552.750,00
4	01312	BPSDM	42.890.230,00
Total			370.245.641,00

Hibah Masuk senilai Rp.284.091.700,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	10.000.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	274.091.700,00
Total			284.091.700,00

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp.3.130.641.803,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	2.490.982.500,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	639.659.303,00
Total			3.130.641.803,00

Reklasifikasi Masuk senilai Rp.2.500.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	2.500.000,00
Total			2.500.000,00

Penyelesaian Pembangunan Langsung senilai Rp.63.843.253,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01306	Ditjen Imigrasi	63.843.253,00
Total			63.843.253,00

- **Mutasi Kurang**

Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya senilai Rp.153.973.778,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	14.429.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	138.044.778,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	1.500.000,00
Total			153.973.778,00

Penghapusan senilai Rp.329.047.522,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasyarakatan	329.047.522,00
Total			329.047.522,00

Transfer Keluar senilai Rp.20.739.048.727,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	11.530.729.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	7.791.584.043,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	1.089.640.570,00
4	01310	BPHN	327.095.114,00
Total			20.739.048.727,00

Koreksi Pencatatan senilai Rp.3.316.330.255,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	1.669.063.000,00
2	01305	Ditjen Pemasyarakatan	444.670.255,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	1.202.597.000,00
Total			3.316.330.255,00

Adapun rincian mutasi tahun berjalan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) adalah sebagai berikut:

No	Satker		Transaksi Mutasi	Nilai
	Kode	Uraian		
1	097102	Satker Ditjen KI	Pembelian	3.906.808.801,00
2	404233	Satker Setjen	Pembelian	1.092.580.000,00
3	405631	Lapas Meulaboh	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.490.982.500,00
			Transfer Keluar	2.490.982.500,00
4	407973	Kanim Semarang	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	639.659.303,00
5	408624	Kanim Batam	Penambahan Saldo Awal	336.274.040,00
6	408745	Kanwil Jawa Tengah	Penyelesaian Pembangunan Langsung	63.843.253,00
			Transfer Keluar	63.843.253,00
7	408825	Kanwil Lampung	Transfer Keluar	199.116.000,00
8	409257	Satker Ditjen	Pembelian	11.530.729.000,00

		AHU	Transfer Keluar	11.530.729.000,00
9	409263	Satker Ditjen PAS	Pembelian	294.630.926,00
			Transfer Keluar	5.300.341.246,00
10	409272	Satker Ditjen Imigrasi	Pembelian	356.912.000,00
			Transfer Keluar	783.791.087,00
			Koreksi Pencatatan	1.202.597.000,00
11	652351	Rupbasan Wonogiri	Koreksi Pencatatan	444.670.255,00
12	683678	Lapas Narkotika Muara Sabak	Penghapusan	311.557.522,00

Penjelasan:

➤ Selisih nilai transfer aset tetap lainnya (termasuk aset tetap renovasi)

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
Aset Tetap Lainnya	370.245.641,00	370.245.641,00	0,00
Aset Tetap Renovasi	20.368.803.086,00	0,00	(20.368.803.086,00)
Total	20.739.048.727,00	370.245.641,00	(20.368.803.086,00)

Adapun selisih (ATR) sebesar Rp20.368.803.086,00 merupakan pencatatan atas realisasi belanja terhadap pengembangan aset gedung dan bangunan yang bukan merupakan aset miliknya (penambahan nilai gedung dan bangunan milik satker lain), dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengirim	Nilai	Penerima	Nilai
1	Satker Ditjen AHU	11.530.729.000,00	BHP Surabaya	7.292.122.268,00
			BHP Semarang	318.813.000,00
			Satker Setjen	1.110.504.044,00
			BHP Medan	2.809.289.688,00
2	Lapas Meulaboh	2.490.982.500,00	Kanwil Aceh (DIPA Setjen)	2.490.982.500,00
3	Satker Ditjen PAS	5.300.341.246,00	Lapas Pekalongan	199.500.000,00
			Satker Setjen	49.483.000,00
			Rutan Gunung Sindur	4.956.227.320,00
			Lapas Serang	95.130.926,00
4	Kanwil Jawa Tengah (DIPA Imigrasi)	63.843.253,00	Kanwil Jawa Tengah (DIPA Setjen)	63.843.253,00
5	Kanwil Lampung (DIPA Imigrasi)	199.116.000,00	Kanwil Lampung (DIPA Setjen)	199.116.000,00
6	Satker Ditjen Imigrasi	783.791.087,00	Satker Setjen	783.791.087,00
Total		20.368.803.086,00		20.368.803.086,00

Konstruksi Dalam C.18. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

Pengerjaan

Rp722.754.577.352,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp722.754.577.352,00 dan Rp288.538.742.791,00.

Rincian nilai KDP berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut :

Tabel 84
Rincian Nilai KDP Per Eselon I

Unit Eselon I	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	22.147.421.075,00	22.147.421.075,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	8.324.274.400,00
Ditjen Pemasarakatan	595.653.263.329,00	205.517.394.481,00
Ditjen Imigrasi	54.703.044.348,00	51.652.930.835,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	187.874.500,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	50.062.974.100,00	896.722.000,00
TOTAL	722.754.577.352,00	288.538.742.791,00

Rincian Mutasi KDP tersebut meliputi :

Tabel 85
Rincian Mutasi KDP

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2017	288.538.742.791,00
Mutasi tambah :	
Perolehan/Penambahan KDP	65.204.411.680,00
Pengembangan KDP	868.131.318.177,00
Total Mutasi Tambah :	933.335.729.857,00
Mutasi Kurang :	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	459.454.670.699,00
Pengembangan Melalui KDP	37.006.589.721,00
Koreksi Nilai KDP	2.301.693.367,00
Penghapusan/Penghentian KDP	356.941.509,00
Total Mutasi Kurang :	499.119.895.296,00
Saldo per 31 Desember 2018	722.754.577.352,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	722.754.577.352,00

Sebaran Transaksi berdasarkan unit satuan kerja (satker) :

- **Mutasi Tambah**

Perolehan/Penambahan KDP senilai Rp.65.204.411.680

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	097102	Satker Ditjen KI	187.874.500,00
2	099298	BHP Semarang	2.100.000,00
3	108266	Satker BPSDM	51.294.975.600,00
4	109115	LPKA Medan	25.360.000,00
5	352607	LPKA Palangkaraya	9.066.400,00
6	352608	LPKA Samarinda	26.889.525,00
7	352609	LPKA Palu	9.479.000,00
8	352613	LPKA Ambon	2.493.787.200,00
9	352616	LPKA Manokwari	9.026.000,00
10	352617	LPKA Mamuju	8.955.000,00
11	404517	Lapas Subang	90.744.800,00
12	405022	Lapas Cilacap	103.228.250,00
13	405528	Lapas Lhokseumawe	131.257.000,00
14	405631	Lapas Meulaboh	122.947.000,00
15	406463	Cabang Rutan Surulangun Rawas	523.159.940,00
16	406472	Rutan Baturaja	124.025.000,00
17	406551	Lapas Anak Kotabumi	133.676.620,00
18	406642	Rutan Sambas	803.283.576,00
19	406721	Lapas Sampit	47.971.000,00
20	406746	LPKA Martapura	2.010.000,00
21	406761	Lapas Kotabaru	75.225.000,00
22	406865	Lapas Tarakan	2.137.306,00
23	406993	Lapas Palu	18.000.000,00
24	407013	Cabang Rutan Parigi	3.104.502.500,00
25	407483	Cabang Rutan Saumlaki	196.000.000,00
26	407613	Lapas Mataram	149.655.000,00
27	407772	Rutan Maumere	42.258.000,00
28	407882	Lapas Fak-Fak	131.900.000,00
29	407973	Kanim Semarang	152.212.500,00
30	408009	Kanim Surabaya	79.931.280,00
31	408165	Kanim Bandar Lampung	7.070.000,00
32	408190	Kanim Singkawang	122.658.500,00
33	408360	Perwakilan Imigrasi di Davao	9.281.062,00
34	408511	Kanim Selat Panjang	66.610.000,00
35	408624	Kanim Batam	41.990.000,00
36	409002	Kanim Kendari	9.500.000,00
37	409020	Kanim Tarempa	8.184.231,00

38	409063	Kanim Bengkulu	41.900.000,00
39	409145	Kanim Sanggau	3.252.800,00
40	409151	LPKA Pekanbaru	21.047.645,00
41	409263	Satker Ditjen Pemasyarakatan	11.841.000,00
42	409272	Satker Ditjen Imigrasi	1.952.121.700,00
43	409288	Satker BPHN	48.675.000,00
44	418332	LPP Palangkaraya	5.245.978,00
45	418333	LPP Samarinda	4.350.000,00
46	418336	LPP Pontianak	17.205.500,00
47	418338	LPP Jambi	1.819.799.600,00
48	418342	LPP Bengkulu	7.871.500,00
49	418348	Lapas Perempuan Palu	10.255.000,00
50	418349	LPP Gorontalo	4.810.000,00
51	418362	LPP Mamuju	20.937.000,00
52	418936	Kanim Ketapang	41.167.000,00
53	419140	LPKA Yogyakarta	44.935.000,00
54	480505	Kanim Ternate	55.500.000,00
55	531891	Rutan Soasui	17.608.000,00
56	539101	Kanim Entikong	144.934.350,00
57	652344	Kanim Pati	126.980.000,00
58	652372	Kanim Blitar	29.299.000,00
59	652429	Kanim Gorontalo	130.330.365,00
60	662967	Kanim Sambas	22.100.000,00
61	664661	Rudenim Manado	76.230.000,00
62	664682	Rudenim Denpasar	21.016.000,00
63	683615	Lapas Bekasi	93.342.452,00
64	683704	LPKA Bandar Lampung	1.500.000,00
65	683999	Lapas Terbuka Rumbai	20.525.000,00
66	686532	Kanim Kotamobagu	42.700.000,00
	Total		65.204.411.680,00

Pengembangan KDP senilai Rp.868.131.318.177

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	099298	BHP Semarang	196.635.000,00
2	109115	LPKA Medan	13.657.488.150,00
3	352607	LPKA Palangkaraya	4.728.780.375,00
4	352608	LPKA Samarinda	9.097.042.944,00
5	352609	LPKA Palu	9.508.830.350,00
6	352613	LPKA Ambon	8.420.752.723,00
7	352616	LPKA Manokwari	6.267.477.000,00
8	352617	LPKA Mamuju	13.051.632.400,00

9	404517	Lapas Subang	2.435.459.700,00
10	405022	Lapas Cilacap	2.505.286.850,00
11	405528	Lapas Lhokseumawe	2.658.097.700,00
12	405631	Lapas Meulaboh	2.368.035.500,00
13	406463	Cabang Rutan Surulangun Rawas	2.429.738.560,00
14	406472	Rutan Baturaja	3.027.193.500,00
15	406551	Lapas Anak Kotabumi	3.119.663.481,00
16	406642	Rutan Sambas	770.039.280,00
17	406721	Lapas Sampit	2.156.554.310,00
18	406746	LPKA Martapura	13.359.747.350,00
19	406761	Lapas Kotabaru	2.159.916.250,00
20	406865	Lapas Tarakan	3.379.820.242,00
21	406993	Lapas Palu	6.994.592.300,00
22	407013	Cabang Rutan Parigi	3.171.812.000,00
23	407483	Cabang Rutan Saumlaki	5.202.952.000,00
24	407613	Lapas Mataram	14.880.743.600,00
25	407882	Lapas Fak-Fak	3.143.070.000,00
26	409151	LPKA Pekanbaru	14.553.882.277,00
27	409263	Ditjen Pemasyarakatan	508.649.359.412,00
28	418332	LPP Palangkaraya	11.751.255.682,00
29	418333	LPP Samarinda	11.004.784.400,00
30	418336	LPP Pontianak	19.583.558.632,00
31	418338	LPP Jambi	8.558.525.984,00
32	418342	LPP Bengkulu	14.433.534.350,00
33	418348	Lapas Perempuan Palu	22.147.960.000,00
34	418349	LPP Gorontalo	10.831.857.183,00
35	418362	LPP Mamuju	19.361.939.500,00
36	419140	LPKA Yogyakarta	6.927.655.100,00
37	531891	Rutan Soasiu	2.537.292.302,00
38	683615	Lapas Bekai	2.297.560.310,00
39	683704	LPKA Bandar Lampung	3.741.299.000,00
40	683999	Lapas Terbuka Rumbai	11.579.172.000,00
41	407973	Kanim Semarang	685.196.803,00
42	408009	Kanim Surabaya	3.088.472.820,00
43	408165	Kanim Bandar Lampung	163.349.000,00
44	408190	Kanim Singkawang	893.652.200,00
45	408196	Kanim Balikpapan	18.227.449.822,00
46	408278	Kanim Sorong	5.310.653.800,00
47	408284	Kanim Merauke	1.649.363.434,00
48	408360	Perwakilan Imigrasi di Davao	9.600.081,00
49	408511	Kanim Selat Panjang	1.388.248.408,00
50	408624	Kanim Batam	1.174.863.000,00
51	409002	Kanim Kendari	190.000.000,00

52	409020	Kanim Tarempa	566.223.000,00
53	409063	Kanim Bengkulu	875.250.000,00
54	409145	Kanim Sanggau	916.746.372,00
55	409272	Satker Ditjen Imigrasi	3.124.206.500,00
56	418936	Kanim Ketapang	700.673.910,00
57	480505	Kanim Ternate	129.500.000,00
58	539101	Kanim Entikong	16.419.399.753,00
59	652344	Kanim Pati	4.000.000,00
60	652372	Kanim Blitar	441.928.000,00
61	652429	Kanim Gorontalo	320.419.635,00
62	662967	Kanim Sambas	287.209.250,00
63	664661	Rudenim Manado	1.611.953.000,00
64	664682	Rudenim Denpasar	260.306.000,00
65	686532	Kanim Kotamobagu	706.422.000,00
66	409288	Satker BPHN	2.335.233.692,00
Total			868.131.318.177,00

- Mutasi Kurang**

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp.459.454.670.699

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	109115	LPKA Medan	13.682.848.150,00
2	109150	Lapas Arga Makmur	7.262.608.049,00
3	352607	LPKA Palangkaraya	4.737.846.775,00
4	352608	LPKA Samarinda	8.931.876.591,00
5	352609	LPKA Palu	9.232.584.345,00
6	352613	LPKA Ambon	10.914.539.923,00
7	352616	LPKA Manokwari	6.276.503.000,00
8	352617	LPKA Mamuju	13.060.587.400,00
9	404517	Lapas Subang	2.526.204.500,00
10	405022	Lapas Cilacap	2.608.515.100,00
11	405631	Lapas Meulaboh	2.490.982.500,00
12	406463	Cabang Rutan Surulangun Rawas	2.952.898.500,00
13	406472	Rutan Baturaja	3.151.218.500,00
14	406551	Lapas Anak Kotabumi	3.253.340.101,00
15	406642	Rutan Sambas	124.519.000,00
16	406721	Lapas Sampit	2.204.525.310,00
17	406746	LPKA Martapura	13.361.757.350,00
18	406761	Lapas Kotabaru	2.235.141.250,00
19	406865	Lapas Tarakan	3.381.957.548,00
20	406993	Lapas Palu	7.012.592.300,00
21	407013	Cabang Rutan Parigi	6.276.314.500,00

22	407483	Cabang Rutan Saumlaki	5.398.952.000,00
23	407613	Lapas Mataram	15.030.398.600,00
24	407772	Rutan Maumere	42.258.000,00
25	407882	Lapas Fak-Fak	3.274.970.000,00
26	407973	Kanim Semarang	837.409.303,00
27	408009	Kanim Surabaya	3.168.404.100,00
28	408278	Kanim Sorong	7.104.202.100,00
29	408360	Perwakilan Imigrasi di Davao	18.881.143,00
30	409063	Kanim Bengkulu	290.174.000,00
31	409145	Kanim Sanggau	300.062.685,00
32	409257	Satker Ditjen AHU	8.324.274.400,00
33	409263	Satker Ditjen Pemasarakatan	112.432.626.777,00
34	409272	Satker Ditjen Imigrasi	3.088.605.000,00
35	418332	LPP Palangkaraya	11.756.501.660,00
36	418333	LPP Samarinda	8.151.381.148,00
37	418336	LPP Pontianak	19.600.764.132,00
38	418342	LPP Bengkulu	14.439.005.850,00
39	418348	Lapas Perempuan Palu	22.158.215.000,00
40	418349	LPP Gorontalo	10.836.667.183,00
41	418362	LPP Mamuju	19.382.876.500,00
42	418936	Kanim Ketapang	741.840.910,00
43	419136	LPKA Banda Aceh	6.688.715.000,00
44	419140	LPKA Yogyakarta	6.972.590.100,00
45	531891	Rutan Soasiu	2.554.900.302,00
46	539101	Kanim Entikong	16.564.334.103,00
47	652372	Kanim Blitar	471.227.000,00
48	652429	Kanim Gorontalo	450.750.000,00
49	652983	Lapas Narkotika Bandung	16.976.631.650,00
50	653051	Lapas Narkotika Jayapura	5.958.655.266,00
51	683615	Lapas Bekai	2.390.902.762,00
52	683704	LPKA Bandar Lampung	3.742.799.000,00
53	683999	Lapas Terbuka Rumbai	4.625.334.333,00
Total			459.454.670.699,00

Pengembangan Melalui KDP senilai Rp.37.006.589.721

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	099298	BHP Semarang	198.735.000,00
2	108266	Satker BPSDM	2.128.723.500,00
3	352608	LPKA Samarinda	146.382.878,00
4	405528	Lapas Lhokseumawe	2.789.354.700,00
5	406642	Rutan Sambas	1.448.803.856,00

6	408165	Kanim Bandar Lampung	170.419.000,00
7	408190	Kanim Singkawang	1.016.310.700,00
8	408284	Kanim Merauke	13.124.327.767,00
9	408511	Kanim Selat Panjang	1.454.858.408,00
10	408624	Kanim Batam	1.216.853.000,00
11	408686	Bapas Padang	760.699.800,00
12	409002	Kanim Kendari	199.500.000,00
13	409020	Kanim Tarempa	574.407.231,00
14	409063	Kanim Bengkulu	626.976.000,00
15	409145	Kanim Sanggau	619.936.487,00
16	409272	Satker Ditjen Imigrasi	1.987.723.200,00
17	409288	Satker BPHN	2.383.908.692,00
18	418333	LPP Samarinda	2.814.753.252,00
19	480505	Kanim Ternate	185.000.000,00
20	652344	Kanim Pati	130.980.000,00
21	662967	Kanim Sambas	309.309.250,00
22	664661	Rudenim Manado	1.688.183.000,00
23	664682	Rudenim Denpasar	281.322.000,00
24	686532	Kanim Kotamobagu	749.122.000,00
Total			37.006.589.721,00

Koreksi Nilai KDP senilai Rp.2.301.693.367

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	408284	Kanim Merauke	1.551.882.167,00
2	409151	LPKA Pekanbaru	658.738.200,00
3	352608	LPKA Samarinda	45.673.000,00
4	418342	LPP Bengkulu	2.400.000,00
5	418333	LPP Samarinda	43.000.000,00
Total			2.301.693.367,00

Penghapusan/Penghentian KDP senilai Rp.356.941.509

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	408624	Kanim Batam	164.216.250,00
2	539101	Kanim Entikong	192.725.259,00
Total			356.941.509,00

Akumulasi Penyusutan C.19. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Aset Tetap

(Rp6.786.047.821.180,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar (Rp6.786.047.821.180,00) dan (Rp5.869.138.308.659,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018.

Tabel 86
Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6.680.447.076.850,00	4.407.498.695.412,00	2.272.948.381.438,00
2	Gedung dan Bangunan	10.457.963.798.623,00	2.323.816.547.094,00	8.134.147.251.529,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.628.773.346,00	48.688.864.957,00	25.939.908.389,00
4	Aset Tetap Lainnya	68.218.739.768,00	6.043.713.717,00	62.175.026.051,00
Jumlah		17.281.258.388.587,00	6.786.047.821.180,00	10.495.210.567.407,00

Aset Tak Berwujud C.20. ASET TAK BERWUJUD

Rp526.019.128.257,00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp526.019.128.257,00 dan Rp486.690.695.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87
Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Nilai
1	Software	365.999.789.149,00
2	Lisensi	69.961.715.122,00
3	Hasil Kajian/Penelitian	92.950.000,00
4	ATB Lainnya	89.964.673.986,00
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2018		526.019.128.257,00

Tabel 88
Rincian Aset Tak Berwujud Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Aset Tak Berwujud	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	3.265.517.295,00	2.429.816.795,00
Inspektorat Jenderal	1.626.917.458,00	1.501.217.488,00
Ditjen AHU	48.732.571.871,00	50.705.885.362,00
Ditjen Pemasarakatan	6.980.749.488,00	6.638.428.188,00
Ditjen Imigrasi	442.258.465.464,00	407.177.728.424,00

Ditjen Kekayaan Intelektual	17.016.042.777,00	12.676.747.827,00
Ditjen PP	1.005.351.500,00	1.005.351.500,00
Ditjen HAM	381.220.000,00	307.520.000,00
BPHN	3.746.995.500,00	3.352.553.000,00
Balitbang Hukum dan HAM	173.720.214,00	163.370.214,00
BPSDM Hukum dan HAM	831.576.690,00	732.076.690,00
Total	526.019.128.257,00	486.690.695.488,00

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Tabel 89
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2017	486.690.695.488,00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	34.100.000,00
Pembelian	46.196.694.240,00
Transfer Masuk	3.132.341.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	197.911.300,00
Reklasifikasi Masuk	448.800.000,00
Pengembangan Nilai Aset	670.116.470,00
Total Mutasi Tambah :	50.679.963.010,00
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.897.588.241,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	8.581.000,00
Transfer Keluar	3.132.341.000,00
Reklasifikasi Keluar	58.000.000,00
Koreksi Pencatatan	1.255.020.000,00
Total Mutasi Kurang :	11.351.530.241,00
Saldo per 31 Desember 2018	526.019.128.257,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	323.704.018.271,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	202.315.109.986,00

Sebaran Transaksi berdasarkan unit eselon I :

- Mutasi Tambah**

Penambahan Saldo Awal senilai Rp.34.100.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01309	Ditjen HAM	34.100.000,00
Total			34.100.000,00

Pembelian senilai Rp.46.196.694.240,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	58.000.000,00
2	01302	Inspektorat Jenderal	95.700.000,00
3	01303	Ditjen AHU	6.239.194.250,00
4	01305	Ditjen Pemasarakatan	144.410.000,00
5	01306	Ditjen Imigrasi	35.309.387.040,00
6	01307	Ditjen KI	4.200.552.950,00
7	01309	Ditjen HAM	39.600.000,00
8	01311	Balitbang Hukum dan HAM	10.350.000,00
9	01312	BPSDM	99.500.000,00
Total			46.196.694.240,00

Transfer Masuk senilai Rp.3.132.341.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	1.616.920.500,00
2	01303	Ditjen AHU	1.515.420.500,00
Total			3.132.341.000,00

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp.197.911.300,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	197.911.300,00
Total			197.911.300,00

Reklasifikasi Masuk senilai Rp.448.800.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	448.800.000,00
Total			448.800.000,00

Pengembangan Nilai Aset senilai Rp.670.116.470,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01302	Inspektorat Jenderal	29.999.970,00
2	01303	Ditjen AHU	48.851.000,00

3	01307	Ditjen KI	196.823.000,00
4	01310	BPHN	394.442.500,00
Total			670.116.470,00

- Mutasi Kurang**

Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya senilai Rp.6.897.588.241,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	6.745.938.241,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	151.650.000,00
Total			6.897.588.241,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp.8.581.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01307	Ditjen KI	8.581.000,00
Total			8.581.000,00

Transfer Keluar senilai Rp.3.132.341.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	3.030.841.000,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	52.000.000,00
3	01307	Ditjen KI	49.500.000,00
Total			3.132.341.000,00

Reklasifikasi Keluar senilai Rp.58.000.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	58.000.000,00
Total			58.000.000,00

Koreksi Pencatatan senilai Rp.1.255.020.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	781.220.000,00
2	01305	Ditjen Pemasarakatan	448.800.000,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	25.000.000,00
Total			1.255.020.000,00

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp14.478.828.000,00*

C.21. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANYA

Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp14.478.828.000,00 dan Rp0,00.

Rincian nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

Tabel 90
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Berdasarkan Unit Eselon I

Unit Eselon I	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	14.478.828.000,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	0,00	0,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
Konsolidasi Kemenkumham	0,00	0,00
Total	14.478.828.000,00	0,00

Dana Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dana tersebut merupakan dana yang ditempatkan di Department of Justice Hongkong terkait dengan kasus Century senilai HKD7.800.000 dengan kurs Rp1.856,26 sesuai KMK No.53 Tahun 2018.

*Aset Lain-Lain
Rp349.586.548.982,00*

C.22. ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp349.586.548.982,00 dan Rp271.241.635.576,00.

Rincian nilai Aset Lain-Lain berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

Tabel 91
Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Unit Eselon I

Unit Eselon I	Aset Lain-lain	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	36.722.413.780,00	11.678.664.192,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00

Ditjen AHU	34.420.015.631,00	26.004.053.228,00
Ditjen Pemasyarakatan	142.176.795.579,00	101.763.516.161,00
Ditjen Imigrasi	119.398.833.388,00	112.171.908.170,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	4.554.301.350,00	4.659.801.350,00
Ditjen PP	2.970.000,00	938.655.189,00
Ditjen HAM	540.861.195,00	1.767.711.735,00
BPHN	1.214.403.600,00	1.528.234.500,00
Balitbang Hukum dan HAM	258.341.000,00	957.698.000,00
BPSDM Hukum dan HAM	17.034.458.267,00	16.502.593.051,00
Konsolidasi Kemenkumham	(6.736.844.808,00)	(6.731.200.000,00)
Total	349.586.548.982,00	271.241.635.576,00

Aset Lain-Lain terdiri dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan. Rincian Aset Lain-Lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 92
Rincian Aset Aset Lain-Lain Per Jenis Aset

Jenis Aset	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	318.379.510.023,00	246.794.929.858,00
Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	31.207.038.959,00	24.446.705.718,00
Total	349.586.548.982,00	271.241.635.576,00

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan
Rp318.379.510.023,00

C.22.1. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN

Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp318.379.510.023,00 dan Rp246.794.929.858,00.

Rincian nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

Tabel 93
Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Unit Eselon I

Unit Eselon I	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	36.612.913.780,00	11.569.164.192,00

Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	27.674.077.390,00	26.004.053.228,00
Ditjen Pemasyarakatan	142.143.480.153,00	101.730.200.735,00
Ditjen Imigrasi	95.080.548.096,00	87.911.017.878,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	4.554.301.350,00	4.659.801.350,00
Ditjen PP	2.970.000,00	938.655.189,00
Ditjen HAM	540.861.195,00	1.724.711.735,00
BPHN	1.214.403.600,00	1.528.234.500,00
Balitbang Hukum dan HAM	258.341.000,00	957.698.000,00
BPSDM Hukum dan HAM	17.034.458.267,00	16.502.593.051,00
Konsolidasi Kemenkumham	(6.736.844.808,00)	(6.731.200.000,00)
Total	318.379.510.023,00	246.794.929.858,00

Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan tersebut meliputi :

Tabel 94
Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2017	253.526.129.858,00
Mutasi tambah :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	143.300.072.640,00
Total Mutasi Tambah :	143.300.072.640,00
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	7.055.872.195,00
Transaksi Normalisasi (BMN Yang dihentikan)	530.968.096,00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	56.463.935.570,00
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	3.748.000,00
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	63.644.705,00
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	6.636.244.524,00
Usulan Barang RB ke pengelola (BMN yang dihentikan)	955.434.577,00
Total Mutasi Kurang :	71.709.847.667,00
Koreksi Take Out Revaluasi	
Koreksi Take Out Revaluasi Tahap 1	(2.938.847.000,00)
Koreksi Take Out Revaluasi Tahap 2	(3.797.997.808,00)
Total Mutasi Koreksi Take Out Revaluasi	(6.736.844.808,00)
Saldo per 31 Desember 2018	318.379.510.023,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	251.039.752.157,00
Koreksi Take Out Revaluasi (Penyusutan) Tahap 1	162.025.226,00

Koreksi Take Out Revaluasi (Penyusutan) Tahap 2	5.475.750.554,00
Koreksi Take Out Revaluasi (Penyusutan)	61.701.982.086,00

Sebaran Transaksi berdasarkan unit eselon I :

- Mutasi Tambah**

Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya senilai Rp.143.300.072.640,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	33.706.209.692,00
2	01303	Ditjen AHU	5.332.844.627,00
3	01305	Ditjen Pemasarakatan	72.915.437.483,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	27.462.515.019,00
5	01308	Ditjen PP	19.557.000,00
6	01309	Ditjen HAM	177.360.000,00
7	01310	BPHN	34.368.100,00
8	01311	Balitbang Hukum dan HAM	37.952.000,00
9	01312	BPSDM	3.613.828.719,00
Total			143.300.072.640,00

- Mutasi Kurang**

Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap senilai Rp.7.055.872.195,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	1.499.560.000,00
2	01303	Ditjen AHU	197.000,00
3	01305	Ditjen Pemasarakatan	4.349.577.188,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	968.575.037,00
5	01307	Ditjen KI	105.500.000,00
6	01308	Ditjen PP	27.442.970,00
7	01309	Ditjen HAM	105.020.000,00
Total			7.055.872.195,00

Transaksi Normalisasi (BMN yang dihentikan) senilai Rp.530.968.096,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	315.166.700,00
2	01305	Ditjen Pemasarakatan	139.313.096,00
3	01306	Ditjen Imigrasi	76.488.300,00
Total			530.968.096,00

Penghapusan (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp.56.463.935.570,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01301	Sekretariat Jenderal	6.847.733.404,00
2	01303	Ditjen AHU	3.662.623.465,00
3	01305	Ditjen Pemasarakatan	20.586.035.519,00
4	01306	Ditjen Imigrasi	19.016.081.920,00
5	01308	Ditjen PP	927.799.219,00
6	01309	Ditjen HAM	1.256.190.540,00
7	01310	BPHN	348.199.000,00
8	01311	Balitbang Hukum dan HAM	737.309.000,00
9	01312	BPSDM	3.081.963.503,00
Total			56.463.935.570,00

Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp.3.748.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	3.748.000,00
Total			3.748.000,00

Reklasifikasi Keluar (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp.63.644.705,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	63.644.705,00
Total			63.644.705,00

Koreksi Pencatatan (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp.6.636.244.524,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	6.636.244.524,00
Total			6.636.244.524,00

Usulan Barang RB Ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp.955.434.577,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01305	Ditjen Pemasarakatan	723.595.033,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	231.839.544,00
Total			955.434.577,00

Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan
Rp31.207.038.959,00

C.22.2.ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN

Nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp31.207.038.959,00 dan Rp24.446.705.718,00.

Rincian nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut :

Tabel 95
Rincian Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Per Unit Eselon I

Unit Eselon I	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	109.500.000,00	109.500.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	6.745.938.241,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	33.315.426,00	33.315.426,00
Ditjen Imigrasi	24.318.285.292,00	24.260.890.292,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	43.000.000,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	31.207.038.959,00	24.446.705.718,00

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan tersebut meliputi :

Tabel 96
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2017	24.446.705.718,00
Mutasi Tambah :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.897.588.241,00
Total Mutasi Tambah :	6.897.588.241,00
Mutasi Kurang :	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	137.255.000,00
Total Mutasi Kurang :	137.255.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	31.207.038.959,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	31.148.148.626,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	58.890.333,00

Sebaran Transaksi berdasarkan unit eselon I :

- Mutasi Tambah**

Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya senilai Rp.6.897.588.241,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01303	Ditjen AHU	6.745.938.241,00
2	01306	Ditjen Imigrasi	151.650.000,00
Total			6.897.588.241,00

- Mutasi Kurang**

Penghapusan (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp.137.255.000,00

No	Unit Eselon 1		Nilai
	Kode	Uraian	
1	01306	Ditjen Imigrasi	94.255.000,00
2	01309	Ditjen HAM	43.000.000,00
Total			137.255.000,00

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp611.529.694.834,00)

C.23. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp611.529.694.834,00) dan 31 Desember 2017 adalah sebesar (Rp563.362.646.686,00). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 97
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku
A Aset Tak Berwujud (ATB)				
1	Software	365.999.789.149,00	299.196.496.040,00	66.803.293.109,00
2	Lisensi	69.961.715.122,00	21.898.296.731,00	48.063.418.391,00
3	Hasil Kajian/Penelitian	92.950.000,00	0,00	92.950.000,00
4	Aset Tak Berwujud Lainnya	89.964.673.986,00	2.609.225.500,00	87.355.448.486,00
Jumlah		526.019.128.257,00	323.704.018.271,00	202.315.109.986,00
B Aset Yang Tidak Digunakan				
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	318.379.510.023,00	256.677.527.937,00	61.701.982.086,00
2	ATB yang Tidak Digunakan	31.207.038.959,00	31.148.148.626,00	58.890.333,00
Jumlah		349.586.548.982,00	287.825.676.563,00	61.760.872.419,00
Total Aset Lainnya		875.605.677.239,00	611.529.694.834,00	264.075.982.405,00

Uang Muka dari
KPPN
Rp2.473.362.985,00

C.24. UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.473.362.985,00 dan Rp1.294.724.415,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka Di KPPN mencerminkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Uang Muka dari KPPN berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 98
Perbandingan Uang Muka dari KPPN Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	Unit	UANG MUKA DARI KPPN	
	Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
3	Ditjen AHU	928.500,00	23.493.900,00
4	Ditjen Pemasarakatan	215.540.500,00	31.991.241,00
5	Ditjen Imigrasi	2.210.726.514,00	1.221.368.274,00
6	Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
7	Ditjen PP	0,00	0,00
8	Ditjen HAM	0,00	0,00
9	BPHN	0,00	0,00
10	Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
11	BPSDM Hukum dan HAM	46.167.471,00	17.871.000,00
TOTAL		2.473.362.985,00	1.294.724.415,00

Sedangkan Rincian Uang Muka dari KPPN berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 99
Rincian Uang Muka KPPN Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2018

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
Ditjen AHU			
1	Balai Harta Peninggalan Semarang	928.500,00	Sisa UP TA 2018
SUBTOTAL		928.500,00	
Ditjen Pemasarakatan			
2	Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Tangerang	1.800.000,00	Sisa UP TA 2018
3	Rumah Tahanan Negara Praya	200.000,00	Sisa UP TA 2018

4	Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat	57.330.000,00	Sisa TUP TA 2018
5	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura	55.853.000,00	Sisa TUP TA 2018
6	Rutan Kelas II B Depok	79.912.000,00	Sisa TUP TA 2018
7	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Manado	20.445.500,00	Sisa UP TA 2018
	SUBTOTAL	215.540.500,00	
	Ditjen Imigrasi		
7	Perwakilan Imigrasi di Singapura	89.091.082,00	Sisa UP TA 2018
		460.000,00	Sisa TUP TA 2018
8	Perwakilan Imigrasi di Kualalumpur	242.300.726,00	Sisa UP TA 2018
9	Perwakilan Imigrasi di Penang	131.646.625,00	Sisa UP TA 2018
10	Perwakilan Imigrasi di Bangkok	78.023.049,00	Sisa UP TA 2018
11	Perwakilan Imigrasi di Hongkong	122.762.242,00	Sisa UP TA 2018
12	Perwakilan Imigrasi di Tokyo	85.845.865,00	Sisa UP TA 2018
		57.020,00	Sisa TUP TA 2018
13	Perwakilan Imigrasi di Davao	78.636.608,00	Sisa UP TA 2018
14	Perwakilan Imigrasi di Den Haag	44.931.359,00	Sisa UP TA 2018
15	Perwakilan Imigrasi di Berlin	168.115.153,00	Sisa UP TA 2018
		308.000,00	Sisa TUP TA 2018
16	Perwakilan Imigrasi di Sidney	55.027.366,00	Sisa UP TA 2018
17	Perwakilan Imigrasi di Kuching	122.480.906,00	Sisa UP TA 2018
		7.156.482,00	Sisa TUP TA 2018
18	Perwakilan Imigrasi di Tawao	111.422.277,00	Sisa UP TA 2018
		758.409,00	Sisa TUP TA 2018
19	Perwakilan Imigrasi di Los Angeles	295.525.062,00	Sisa UP TA 2018
20	Perwakilan Imigrasi di Jeddah	2.938.502,00	Sisa UP TA 2018
		168.755.765,00	Sisa TUP TA 2018
21	Perwakilan Imigrasi di Beijing	74.377.024,00	Sisa UP TA 2018
22	Perwakilan Imigrasi di Johor Bahru	7.674,00	Sisa UP TA 2018
23	Kantor Perwakilan Imigrasi Pada Kantor Urusan Kepentingan RI di Dili Timor	289.096.800,00	Sisa UP TA 2018
24	Perwakilan Imigrasi Guangzhou di RRC	41.002.518,00	Sisa UP TA 2018
	SUBTOTAL	2.210.726.514,00	
	BPSDM		

25	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	29.418.150,00	Sisa UP TA 2018
		16.749.321,00	Sisa TUP TA 2018
	SUBTOTAL	46.167.471,00	
	TOTAL	2.473.362.985,00	

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp105.218.621.484,00

C.25. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp105.218.621.484,00 dan Rp222.697.385.108,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari utang beras 2014 kepada Bulog, biaya perjalanan dinas mutasi pegawai yang belum dibayar, kekurangan gaji dan uang makan pegawai yang belum dibayar, kekurangan belanja bahan makanan narapidana dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi.

Tabel 100
Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga 31 Desember 2018

No	Tipe Utang	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	12.919.440.645,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	77.374.781.805,00
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	379.186.966,00
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	138.616.469,00
5	Dana Pihak Ketiga	14.406.595.599,00
Grand Total		105.218.621.484,00

Tabel 101
Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga berdasarkan Eselon I 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Utang Kepada Pihak Ketiga					TOTAL
	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga	
Sekretariat Jenderal	77.071.000,00	10.624.824.523,00	379.186.966,00	0,00	0,00	11.081.082.489,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	11.563.243,00	0,00	0,00	14.406.595.599,00	14.418.158.842,00
Ditjen PAS	10.639.833.514,00	65.136.091.125,00	0,00	138.616.469,00	0,00	75.914.541.108,00
Ditjen Imigrasi	2.200.353.131,00	1.181.801.607,00	0,00	0,00	0,00	3.382.154.738,00

Ditjen KI	0,00	10.646.000,00	0,00	0,00	0,00	10.646.000,00
Ditjen PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPHN	2.183.000,00	409.855.307,00	0,00	0,00	0,00	412.038.307,00
Balitbang HAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPSDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.919.440.645,00	77.374.781.805,00	379.186.966,00	138.616.469,00	14.406.595.599,00	105.218.621.484,00

Tabel 102
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing Eselon I

Unit Eselon I	Utang Kepada Pihak Ketiga	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	11.081.082.489,00	26.258.945.104,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	14.418.158.842,00	10.836.362.861,00
Ditjen Pemasarakatan	75.914.541.108,00	175.658.594.974,00
Ditjen Imigrasi	3.382.154.738,00	9.162.808.169,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	10.646.000,00	542.791.158,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	412.038.307,00	237.882.842,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	105.218.621.484,00	222.697.385.108,00

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2018 dapat dilihat di lampiran.

Hibah Yang Belum
Disahkan
Rp57.545.454,00

C.26. HIBAH YANG BELUM DISAHKAN

Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji sebesar Rp57.545.454,00 dan Rp220.849.000,00. Hibah yang belum disahkan merupakan aset yang diterima oleh Satuan Kerja dan belum disahkan melalui KPPN, namun telah dicatatkan pada aplikasi SIMAK berdasarkan BAST. Proses pengesahan hibah menunggu adanya dispensasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Perbandingan Nilai Hibah Yang Belum Disahkan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 103
Perbandingan Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Hibah yang Belum Disahkan	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	0,00	151.560.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	57.545.454,00	69.289.000,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	57.545.454,00	220.849.000,00

Sedangkan Rincian Hibah Yang Belum Disahkan berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 104
Rincian Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2018

No	Nama Satker	Saldo	Keterangan
	Ditjen Pemasarakatan		
1	Rumah Tahanan Negara Sumenep	44.545.454,00	Hibah dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan berupa peralatan mesin dan persediaan
2	Rumah Tahanan Negara Tapaktuan	13.000.000,00	Hibah dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan berupa persediaan kain sarung
	TOTAL	57.545.454,00	

Utang Jangka Pendek C.27. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
Lainnya
Rp893.850,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing- masing sebesar Rp893.850,00 dan Rp41.628.677,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut.

Tabel 105
Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit	Utang Jangka Pendek Lainnya	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Eselon I		
Sekretariat Jenderal	0,00	29.019.999,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	0,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	893.850,00	3.461.908,00
Ditjen Imigrasi	0,00	9.146.770,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	0,00	0,00
BPHN	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	893.850,00	41.628.677,00

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2018 sebesar Rp893.850,00 merupakan utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Mataram.

Pendapatan Diterima Dimuka **C.28. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**
Dimuka
Rp297.076.909.128,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp297.076.909.128,00 dan Rp293.567.777.306,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel 106
Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2018

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Perorangan/ Badan lainnya	295.349.213.675,00	Jasa Hukum untuk pengurusan Hak dan Perizinan
Badan Swasta Lainnya	1.727.695.453,00	Sewa gedung dan bangunan
TOTAL	297.076.909.128,00	

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 107
Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Unit Eselon I	Pendapatan Diterima Dimuka	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sekretariat Jenderal	749.004.302,00	87.641.396,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen AHU	11.381.845.675,00	33.367.925.000,00
Ditjen Pemasarakatan	131.240.226,00	155.108.120,00
Ditjen Imigrasi	797.443.358,00	182.092.176,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	284.016.063.067,00	259.768.335.947,00
Ditjen PP	0,00	0,00
Ditjen HAM	1.312.500,00	0,00
BPHN	0,00	6.674.667,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	297.076.909.128,00	293.567.777.306,00

Tabel 108
Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan
Satuan Kerja Per 31 Desember 2018

No	Nama Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	604.590.214,00	a) sewa tanah di jl. TMP taruna Tangerang a/n Abdul Hanny Rp53.545.502,00 b) Sewa menara BTS di gedung Setjen a/n Adi Cipta Rp215.470.000,00 c) Sewa tanah di jl. Jend Sudirman Tangerang a/n Etty Nurbaiti Rp39.142.505,00 d) Sewa bangunan Jl. Rasuna Said Kav 6-7 a/n Bank BNI Rp88.802.368,00 e) Perluasan lahan Bank BNI Rp157.757.000,00 f) sewa tanah di jl. TMP taruna Tangerang Rp49.872.839,00
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jakarta Raya	13.717.921,00	Perpanjangan Sewa Kantor Kas BRI Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah	43.000.000,00	Sewa atm a/n Bank BRI
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Surabaya	76.257.500,00	Sewa a/n PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Surabaya
5	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Ujung Pandang	11.172.000,00	Sewa Sebagian Tanah Untuk ATM BNI

6	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Banda Aceh	266.667,00	Pendapatan atas sewa kantin
	SUBTOTAL	749.004.302,00	
	Ditjen AHU		
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	11.381.845.675,00	Voucher yang belum digunakan atas Pelayanan Ditjen AHU
	SUBTOTAL	11.381.845.675,00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
1	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang	961.675,00	Wartel
2	Rumah Tahanan Negara Wonosobo	450.000,00	WARUNG KOPERASI KPPDK RUTAN WONOSOBO
3	Rumah Tahanan Negara Purworejo	430.649,00	KPRI KPPDK Rutan Purworejo
4	Rumah Tahanan Negara Kebumen	6.166.667,00	KPRI PENGAYOMAN Rutan Kebumen
5	Rumah Tahanan Negara Kudus	1.791.456,00	KPPDK Rutan
6	Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto	5.662.251,00	Sewa kantin
7	Rumah Tahanan Negara Banjarnegara	2.190.015,00	Koperasi dan kantin
8	Lapas Ngawi	14.978.000,00	a) Sewa ATM BRI a/n BRI Cabang Ngawi Rp13.628.000,00 b) Sewa Toko a/n KPPDK Lapas Ngawi Rp1.350.000,00
9	Lembaga Pemasyarakatan Singkawang	1.952.000,00	Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman Lembaga Pemasyarakatan Singkawang
10	Lembaga Pemasyarakatan Palangkaraya	24.766.500,00	Sewa kantin
11	Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas	1.737.170,00	Sewa koperasi
12	Lapas Sampit	7.368.000,00	Sewa kantin
13	Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan	50.196.000,00	Sewa lahan
14	Lembaga Pemasyarakatan Slawi	5.600.000,00	Koperasi Pengayoman Lapas Slawi
15	Rumah Tahanan Negara Serang	5.531.500,00	Sewa kantin
16	Rumah Tahanan Kelas Iib Kota Agung	1.458.343,00	Sewa Koperasi
	SUBTOTAL	131.240.226,00	
	Ditjen Imigrasi		
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	111.048.000,00	Sewa gedung BRI

2	Kantor Imigrasi Jakarta Selatan	277.920.000,00	Pendapatan sewa gedung untuk kantor BRI dan ATM BRI
3	Kantor Imigrasi Jakarta Barat	160.495.356,00	a) Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Galeri Jeera Cofee Rp59.495.348,00
			b) Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Rp26.933.336,00
			c) Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Rp26.933.336,00
			d) Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Rp47.133.336,00
4	Kantor Imigrasi Semarang	4.000.000,00	Sewa ATM BNI
5	Kantor Imigrasi Belakang Padang	612.000,00	Sewa Tanah
6	Kantor Imigrasi Palembang	4.891.333,00	Sewa tanah untuk ATM
7	Kantor Imigrasi Tanjung Karang	32.770.000,00	Sewa Sebagian Bidang Tanah Milik Negara untuk Kantor Kas Beserta ATM Bank Lampung di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
8	Kantor Imigrasi Tarakan	24.047.833,00	Sewa Lahan dan Bangunan Untuk ATM BNI
9	Kantor Imigrasi Ujung Pandang	41.645.333,00	Sewa ATM
10	Kantor Imigrasi Denpasar	32.550.000,00	a) Pendapatan sewa gedung dan bangunan berupa sewa kantin a/n Ni Nyoman Wangi Artini Rp6.750.000,00
			b) Pendapatan sewa gedung dan bangunan berupa sewa kantin a/n I Wayan Sumardika Rp6.300.000,00
			c) Pendapatan sewa gedung dan bangunan berupa sewa kantin a/n I Ketut Sudigama Rp9.750.000,00
			d) Pendapatan sewa gedung dan bangunan berupa sewa kantin a/n I Made Wiranata Rp9.750.000,00
11	Kantor Imigrasi Palangkaraya	1.500.000,00	Sewa Tanah Kanim Palangka Raya
12	Kantor Imigrasi Jakarta Timur	6.007.604,00	KOPIM Jaktim
13	Kantor Imigrasi Cengkareng	41.250.000,00	Sewa kantin a/n Jejen Zainal Abidin, cs.
14	Kantor Imigrasi Pemalang	24.149.233,00	Sewa Sebagian Lahan dan Bangunan pada Kanim Pemalang untuk ATM BRI selama 5 (lima) tahun
15	Kantor Imigrasi Wonosobo	1.350.000,00	Menyewakan tanah seluas 9 meter persegi kepada Kantor Pos Wonosobo
16	Kantor Imigrasi Pati	15.000.000,00	Sewa ATM BNI

17	Kantor Imigrasi Madiun	18.206.666,00	a) Sewa kantin koperasi imigrasi madiun a/n PRI BHUMI PURA SEJAHTERA Rp14.040.000,00
			b) Sewa ATM BNI Rp4.166.666,00
	SUBTOTAL	797.443.358,00	
	Ditjen KI		
1	Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual	284.016.063.067,00	a) Sewa Gedung dan bangunan koperasi Rp29.065.125,00
			b) Pendapatan Pemeliharaan Pemegang Paten Rp283.967.368.000,00
			c) Sewa Gedung dan bangunan Bank BRI Rp19.629.942,00
	SUBTOTAL	284.016.063.067,00	
	Ditjen HAM		
1	Direktorat Jenderal HAM	1.312.500,00	Pembayaran atas TV Lift PT Force Media sampai dengan bulan Januari 2018
	SUBTOTAL	1.312.500,00	
	TOTAL	297.076.909.128,00	

Ekuitas
Rp24.224.492.209.998,
00

C.29 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp24.224.492.209.998,00 dan Rp24.482.912.484.963,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN ATAS
POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB

Rp3.528.582.438.941,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Basis akrual akuntansi Pendapatan-LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa penyebab timbulnya hak atas pendapatan terjadi, tanpa memerhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk tunai atau bentuk penerimaan lain.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berasal dari:

- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Pendapatan Pemanfaatan dan Pengelolaan BMN, mis: Sewa Rumah Dinas, Sewa Lahan untuk ATM, Kantin dan lain-lain;
- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian;
- Pendapatan Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
- Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual;
- Pendapatan Layanan Pendidikan/Pelatihan BPSDM;
- Pendapatan Jasa Lainnya dan Jasa Giro;
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Lainnya;
- Pendapatan Lain-Lain.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.528.582.438.941,00 dan Rp3.109.727.638.461,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0,00	21.107.755,00	(100,00)
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta	0,00	4.899.552.070,00	(100,00)
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0,00	6.221.255.381,00	(100,00)
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	10.109.031.449,00	(100,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	7.120.000,00	(100,00)
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0,00	1.872.109.468,00	(100,00)
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	0,00	15.717.400,00	(100,00)
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor	0,00	1.894.772.873.910,00	(100,00)
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	0,00	1.174.373.276.276,00	(100,00)
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan	0,00	1.482.477.875,00	(100,00)
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	569.704.838,00	(100,00)
423226	Pendapatan Uang Pewanegaraan	0,00	4.121.800.000,00	(100,00)
423227	Pendapatan Bea Lelang	0,00	600.000,00	(100,00)
423272	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	0,00	958.739.170,00	(100,00)
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	523.647.381,00	(100,00)
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	0,00	752.895,00	(100,00)
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0,00	2.000.000,00	(100,00)
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	0,00	5.537.195.325,00	(100,00)
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	27.905.615,00	(100,00)
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	4.210.771.653,00	(100,00)
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	290.545.536,00	0,00	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.291.346.119,00	0,00	0,00
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	8.160.000,00	0,00	0,00
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	562.368.691,00	0,00	0,00
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara	14.400.000,00	0,00	0,00
425211	Pendapatan Paspor	1.097.623.900.000,00	0,00	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

425212	Pendapatan Visa	222.629.046.105,00	0,00	0,00
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali	521.131.100.000,00	0,00	0,00
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	274.963.445.000,00	0,00	0,00
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	740.164.800.000,00	0,00	0,00
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	144.979.996.707,00	0,00	0,00
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	20.240.856.749,00	0,00	0,00
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	481.336.737.398,00	0,00	0,00
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	118.735.738,00	0,00	0,00
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	436.659.488,00	0,00	0,00
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	39.730.800,00	0,00	0,00
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.251.500.000,00	0,00	0,00
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	332.838.093,00	0,00	0,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.222.520.623,00	0,00	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	9.189.934.113,00	0,00	0,00
425839	Pendapatan Denda Lainnya	334.599.600,00	0,00	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	119.984.831,00	0,00	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	299.233.350,00	0,00	0,00
	Total	3.528.582.438.941,00	3.109.727.638.461,00	14,03

Perbedaan/selisih signifikan perbandingan nilai PNB-LO per akun adalah sehubungan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-211/PB/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sehingga mengakibatkan perubahan antara lain:

1. Terdapat restrukturisasi Akun PNB 423xxx menjadi Akun 425xxx;
2. Terdapat perubahan pengelompokan akun baru, penggabungan beberapa akun dalam akun baru, serta pemecahan satu akun menjadi beberapa akun baru.

Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 110
Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan PNBP-LO	Pendapatan PNBP-LRA	Selisih
3.528.582.438.941,00	3.563.546.496.086,00	(34.964.057.145,00)

Rincian selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 111
Rincian Selisih PNBP-LO dan PNBP-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	PNBP-LO	PNBP-LRA	Selisih
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	290.545.536,00	290.545.536,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	37.766.000,00	(37.766.000,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	793.888.793,00	(793.888.793,00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	3.512.918.543,00	(3.512.918.543,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.291.346.119,00	12.828.145.072,00	(2.536.798.953,00)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	562.368.691,00	554.120.782,00	8.247.909,00
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
Pendapatan Paspor	1.097.623.900.000,00	1.097.623.900.000,00	0,00
Pendapatan Visa	222.629.046.105,00	222.629.046.105,00	0,00
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali	521.131.100.000,00	521.131.100.000,00	0,00
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	274.963.445.000,00	284.913.445.000,00	(9.950.000.000,00)
Pendapatan Pelayanan Fidusia	740.164.800.000,00	740.179.950.000,00	(15.150.000,00)
Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	144.979.996.707,00	116.545.148.967,00	28.434.847.740,00
Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	20.240.856.749,00	26.693.152.424,00	(6.452.295.675,00)
Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	481.336.737.398,00	498.294.215.005,00	(16.957.477.607,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	118.735.738,00	118.735.738,00	0,00
Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	436.659.488,00	436.659.488,00	0,00
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	39.730.800,00	39.730.800,00	0,00
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.251.500.000,00	2.251.500.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	332.838.093,00	333.748.656,00	(910.563,00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.222.520.623,00	1.222.364.589,00	156.034,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	321.460.405,00	(321.460.405,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,00	114.537.252,00	(114.537.252,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	0,00	4.625.448,00	(4.625.448,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	9.189.934.113,00	9.128.709.007,00	61.225.106,00
Pendapatan Denda Lainnya	334.599.600,00	563.453.100,00	(228.853.500,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	5.867.432.869,00	(5.867.432.869,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.890.682.321,00	(3.890.682.321,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.180.493.658,00	(12.180.493.658,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0,00	603.242.347,00	(603.242.347,00)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	119.984.831,00	119.984.831,00	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	299.233.350,00	299.233.350,00	0,00
Total	3.528.582.438.941,00	3.563.546.496.086,00	(34.964.057.145,00)

Penjelasan selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 112
Penjelasan Selisih Pendapatan PNPB-LO dan Pendapatan PNPB-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Selisih	Keterangan
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	(37.766.000,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(793.888.793,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	(3.512.918.543,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(2.536.798.953,00)	Pencatatan AkruaL atas: • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar (Rp3.057.800,00) • Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp356.091.082,00 • Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar (Rp4.440.000,00) • Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar (Rp1.702.900.000,00) • Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar (Rp1.288.328.180,00) • Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar Rp105.835.945,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	8.247.909,00	Pencatatan AkruaL atas: • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar (Rp13.750.000,00) • Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar Rp21.997.909,00
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	(9.950.000.000,00)	Pencatatan AkruaL atas: • Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar (Rp9.950.000.000,00)
Pendapatan Pelayanan Fidusia	(15.150.000,00)	Pencatatan AkruaL atas: • Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka (Rp15.150.000,00)
Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	28.434.847.740,00	Pencatatan AkruaL atas: • Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar (Rp18.677.260,00) • Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar Rp33.367.925.000,00 • Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar (Rp4.914.400.000,00)
Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	(6.452.295.675,00)	Pencatatan AkruaL atas: • Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar (Rp6.452.295.675,00)
Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	(16.957.477.607,00)	Pencatatan AkruaL atas: • Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan sebesar Rp18.163.599.300,00 • Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar (Rp10.784.740.086,00)

		Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar (Rp24.336.336.821,00)
Pendapatan Jasa Lainnya	(910.563,00)	Pencatatan AkruaI atas: Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar (Rp910.563,00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	156.034,00	Pencatatan AkruaI atas: Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp156.034,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	(321.460.405,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	(114.537.252,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	(4.625.448,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	61.225.106,00	Pencatatan AkruaI atas: - Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar (Rp569.750,00) - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp66.438.400,00 - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar (Rp4.643.544,00)
Pendapatan Denda Lainnya	(228.853.500,00)	Pencatatan AkruaI atas: - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp334.599.600,00 - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar (Rp563.453.100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(5.867.432.869,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(3.890.682.321,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(12.180.493.658,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	(603.242.347,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Total	(34.964.057.145,00)	

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa selisih antara Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA sebesar (Rp34.964.057.145,00) disebabkan oleh adanya faktor yang menambah Pendapatan PNB-LO tahun berjalan dan faktor yang mengurangi Pendapatan PNB-LO karena secara akuntansi akrual transaksi tersebut merupakan pendapatan operasional tahun anggaran yang lalu.

Rekapitulasi selisih dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113
Rekapitulasi Selisih Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Faktor Yang Menambah Pendapatan PNBP-LO Tahun Berjalan	
Pendapatan PNBP-LO atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18.163.599.300,00
Pendapatan PNBP-LO atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	156.034,00
Pendapatan PNBP-LO Tahun Berjalan atas Transaksi Piutang PNB	757.129.082,00
Pendapatan PNBP-LO Tahun Berjalan atas Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka	33.495.758.854,00
A Sub Total	52.416.643.270,00
Faktor Yang Mengurangi Pendapatan PNBP-LO Tahun Berjalan karena merupakan Pendapatan PNBP-LO Tahun Sebelumnya	
Pendapatan atas Transaksi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Tahun Anggaran sebelumnya	(18.288.113,00)
Pendapatan atas Transaksi Piutang PNB Tahun Anggaran sebelumnya	(21.325.953.990,00)
Pendapatan atas Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran Sebelumnya	(37.006.510.676,00)
Pendapatan atas Transaksi Piutang Jangka Panjang Lainnya Tahun Anggaran Sebelumnya	(1.702.900.000,00)
B Sub Total	(60.053.652.779,00)
C Pendapatan yang membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(4.344.573.336,00)
D Pendapatan Yang Membentuk Pendapatan Kegiatan Non Operasional	(22.982.474.300,00)
TOTAL (A + B + C + D)	(34.964.057.145,00)

Penjelasan Selisih Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA berdasarkan Analisa Hubungan antar Laporan terdapat pada Lampiran CaLK Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Beban Pegawai
Rp6.304.961.550.122,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negara Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.304.961.550.122,00 dan Rp4.899.079.271.131,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114
Perbandingan Beban Pegawai-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.160.206.671.670,00	1.813.021.635.816,00	19,15
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	39.020.033,00	27.131.658,00	43,82
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	139.100.846.054,00	124.933.360.674,00	11,34
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	39.894.342.057,00	36.211.815.838,00	10,17
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	70.951.138.062,00	65.120.549.445,00	8,95
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	101.430.267.472,00	90.732.033.405,00	11,79
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	2.680.587.027,00	3.990.491.362,00	(32,83)
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	118.684.562.664,00	102.803.483.340,00	15,45
511129	Beban Uang Makan PNS	499.340.617.688,00	344.608.515.492,00	44,90
511135	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	422.250.000,00	360.075.000,00	17,27
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	6.672.340.000,00	5.433.145.000,00	22,81
511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	1.032.024.000,00	884.592.000,00	16,67
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	61.901.668.805,00	23.106.868.765,00	167,89
511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	9.640.000,00	(100,00)
511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	198.674.894,00	(100,00)
512211	Beban Uang Lembur	25.624.952.350,00	24.427.388.113,00	4,90
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.076.980.262.240,00	2.263.209.870.329,00	35,96
	Total	6.304.961.550.122,00	4.899.079.271.131,00	28,70

Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 115
Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban Pegawai-LO	Belanja Pegawai-LRA	Selisih
6.304.961.550.122,00	6.306.574.297.290,00	(1.612.747.168,00)

Rincian selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 116
Rincian Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Beban Pegawai-LO	Blj. Pegawai-LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	2.160.206.671.670,00	2.160.502.642.404,00	(295.970.734,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	39.020.033,00	39.068.386,00	(48.353,00)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	139.100.846.054,00	139.105.393.568,00	(4.547.514,00)
Beban Tunjangan Anak PNS	39.894.342.057,00	39.895.401.784,00	(1.059.727,00)
Beban Tunjangan Struktural PNS	70.951.138.062,00	70.983.603.062,00	(32.465.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	101.430.267.472,00	101.433.436.688,00	(3.169.216,00)
Beban Tunjangan PPh PNS	2.680.587.027,00	2.679.658.537,00	928.490,00
Beban Tunjangan Beras PNS	118.684.562.664,00	118.685.286.864,00	(724.200,00)
Beban Uang Makan PNS	499.340.617.688,00	500.498.330.472,00	(1.157.712.784,00)
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	422.250.000,00	422.250.000,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	6.672.340.000,00	6.672.340.000,00	0,00
Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	1.032.024.000,00	1.032.024.000,00	0,00
Beban Tunjangan Umum PNS	61.901.668.805,00	61.902.113.805,00	(445.000,00)
Beban Uang Lembur	25.624.952.350,00	25.624.952.350,00	0,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.076.980.262.240,00	3.077.097.795.370,00	(117.533.130,00)
Total	6.304.961.550.122,00	6.306.574.297.290,00	(1.612.747.168,00)

Selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 117
Penjelasan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Gaji Pokok PNS	(295.970.734,00)	Pencatatan AkruaL atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp543.420.893,00) • Pencatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan Rp247.450.159,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pembulatan Gaji PNS	(48.353,00)	Pencatatan Akruwal atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp49.785,00) • Pencatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan Rp1.432,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	(4.547.514,00)	Pencatatan Akruwal atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp5.608.200,00) • Pencatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan Rp1.060.686,00
Beban Tunjangan Anak PNS	(1.059.727,00)	Pencatatan Akruwal atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp1.496.820,00) • Pencatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan Rp437.093,00
Beban Tunjangan Struktural PNS	(32.465.000,00)	Pencatatan Akruwal atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp36.680.000,00) • Pencatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan Rp4.215.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	(3.169.216,00)	Pencatatan Akruwal atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp6.450.000,00) • Pencatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan Rp3.280.784,00
Beban Tunjangan PPh PNS	928.490,00	Pencatatan Akruwal atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp71.510,00) • Pencatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan Rp1.000.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	(724.200,00)	Pencatatan Akruwal atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp941.460,00) • Pencatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan Rp217.260,00
Beban Uang Makan PNS	(1.157.712.784,00)	Pencatatan Akruwal atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp13.628.061.784,00) • Pencatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan Rp12.470.349.000,00
Beban Tunjangan Umum PNS	(445.000,00)	Pencatatan Akruwal atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp75.000,00) • Pencatatan Piutang atas Beban Belanja Pegawai (Rp370.000,00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	(117.533.130,00)	Pencatatan Akruwal atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp91.285.949,00)

		• Pencatatan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Rp26.247.181,00)
Total	(1.612.747.168,00)	

Perhitungan selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA berdasarkan Analisa Hubungan antar Laporan dapat dijelaskan secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 118
Perhitungan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

A	Beban Pegawai-LO	6.304.961.550.122,00
B	Belanja Pegawai-LRA	6.306.574.297.290,00
C	Selisih Antara LO dan LRA	(1.612.747.168,00)
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
D	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL	(14.314.141.401,00)
E	Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan	12.728.011.414,00
f	Pencatatan Piutang PNBPN atas Pengembalian Belanja Pegawai	(370.000,00)
g	Pencatatan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Kelebihan Tunjangan Kinerja yang belum disetor s.d 31 Desember 2019	(26.247.181,00)
h	TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	(1.612.747.168,00)
	Selisih (c - h)	0,00

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp1.612.747.168,00 disebabkan oleh adanya transaksi pembayaran utang belanja pegawai tahun anggaran yang lalu menggunakan anggaran belanja pegawai tahun berjalan sebesar Rp14.314.141.401,00 Pencatatan Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Rp370.000,00 , Pencatatan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai yang belum disetor ke Kas Negara Rp26.247.181,00 yang mengakibatkan mengurangi Beban Pegawai-LO tahun berjalan, dan adanya pencatatan utang belanja pegawai pada tahun berjalan sebesar Rp12.728.011.414,00, yang mengakibatkan menambah Beban Pegawai-LO tahun berjalan.

Beban Persediaan
Rp636.996.764.306,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp636.996.764.306,00 dan Rp162.533.989.438,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 119
Perbandingan Beban Persediaan-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	605.045.441.811,00	120.928.606.200,00	400,33
593112	Beban Persediaan Amunisi	4.115.457.328,00	2.544.011.186,00	61,77
593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	301.152.624,00	391.710.263,00	(23,12)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	4.960.295.924,00	4.085.506.698,00	21,41
593141	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	5.323.579.795,00	21.360.248.802,00	(75,08)
593149	Beban Persediaan Lainnya	17.250.836.824,00	13.223.906.289,00	30,45
	Total	636.996.764.306,00	162.533.989.438,00	291,92

Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 120
Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban Persediaan-LO	Belanja Persediaan-LRA	Selisih
636.996.764.306,00	463.043.461.060,00	173.953.303.246,00

Rincian selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 121
Rincian Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Beban Persediaan-LO	Belanja Persediaan-LRA	Selisih
Beban Persediaan Konsumsi	605.045.441.811,00	421.632.495.115,00	183.412.946.696,00
Beban Persediaan Amunisi	4.115.457.328,00	58.380.500,00	4.057.076.828,00
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	301.152.624,00	313.381.000,00	(12.228.376,00)
Beban Persediaan Bahan Baku	4.960.295.924,00	9.930.000,00	4.950.365.924,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	5.323.579.795,00	111.770.500,00	5.211.809.295,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Persediaan Lainnya	17.250.836.824,00	40.917.503.945,00	(23.666.667.121,00)
Total	636.996.764.306,00	463.043.461.060,00	173.953.303.246,00

Perhitungan selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 122
Perhitungan Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban Persediaan LO	636.996.764.306,00
Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218xx)	463.043.461.060,00
Selisih Antara LO dan LRA	173.953.303.246,00
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Persediaan Awal	547.645.750.308,00
Persediaan Akhir	411.488.366.832,00
Kenaikan/Penurunan Persediaan	136.157.383.476,00
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	1.480.260.402,00
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	2.158.365.675,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	1.000.000,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	5.613.800,00
Belanja Barang Persediaan Akun 523xxx	3.645.239.877,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	(28.020.186.707,00)
Beban Persediaan Suku Cadang	(1.984.034.947,00)
Beban Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO	(30.004.221.654,00)
Beban Peralatan dan Mesin Utk Diserahkan Kpd Masy.	(5.145.000,00)
Beban Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	(700.616.061,00)
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masy.	(923.545.028,00)
Beban Yang Membentuk Beban untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO	(1.629.306.089,00)
FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan	500.132.376,00
Transfer Keluar Barang Persediaan	(744.980.041.135,00)
Transfer Masuk Barang Persediaan	707.901.857.349,00
Koreksi Nilai Persediaan (Tambah)	21.090.031.820,00
Pendapatan Penyesuain Nilai Persediaan	770.392.672.043,00
Beban Penyesuain Nilai Persediaan	(685.280.365.506,00)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(2.615.188.918,00)
Jurnal Manual Koreksi Nilai Persediaan (Karena Selisih Kurs)	(2.421.160,00)
Hibah Barang Persediaan	205.689.554,00
Persediaan yang didapat dari Perolehan Lainnya	81.265.294,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(1.625.706.831,00)



Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan (53)	116.282.750,00
Total Beban Persediaan	636.996.764.306,00
Selisih	0,00

Beban Barang dan Jasa
Rp2.929.889.611.316,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.929.889.611.316,00 dan Rp2.525.821.583.416,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123
Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
521111	Beban Keperluan Kantor	190.013.709.934,00	173.716.182.488,00	9,38
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	1.281.459.329.893,00	1.138.936.205.874,00	12,51
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	30.444.866.667,00	29.751.406.156,00	2,33
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.339.441.811,00	6.148.544.067,00	3,10
521115	Beban Honor Opr. Satuan Kerja	82.189.505.531,00	76.718.228.728,00	7,13
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	65.278.712.442,00	53.608.090.946,00	21,77
521211	Beban Bahan	230.214.364.455,00	179.975.227.435,00	27,91
521212	Beban Barang Transito	0,00	14.040.000,00	(100,00)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	48.706.164.678,00	45.511.942.175,00	7,02
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	267.410.701.268,00	210.415.869.722,00	27,09
522111	Beban Langganan Listrik	152.297.446.946,00	142.817.354.078,00	6,64
522112	Beban Langganan Telpo	6.643.564.706,00	7.224.736.758,00	(8,04)
522113	Beban Langganan Air	15.929.235.600,00	14.860.886.932,00	7,19
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	73.250.696.692,00	53.437.706.592,00	37,08
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	172.171.592,00	4.242.220.212,00	(95,94)
522131	Beban Jasa Konsultan	37.813.377.693,00	35.736.743.745,00	5,81
522141	Beban Sewa	281.659.011.056,00	233.272.647.269,00	20,74
522151	Beban Jasa Profesi	79.882.062.593,00	54.914.367.071,00	45,47
522191	Beban Jasa Lainnya	77.598.047.267,00	64.455.817.268,00	20,39
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.565.300.492,00	63.365.900,00	3.948,39



595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	21.900.000,	0,00	0,00
Total		2.929.889.611.316,00	2.525.821.583.416,00	16,00

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 124
Perbandingan Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban Barang Jasa - LO	Belanja Barang – LRA	Selisih
2.929.889.611.316,00	4.489.360.521.766,00	(1.559.470.910.450,00)

Rincian selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 125
Rincian Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Beban Barang dan Jasa-LO	Belanja Barang LRA	Selisih
Beban Keperluan Kantor	190.013.709.934,00	190.000.477.885,00	13.232.049,00
Beban Pengadaan Bahan Makanan	1.281.459.329.893,00	1.369.265.766.523,00	(87.806.436.630,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	30.444.866.667,00	30.444.866.667,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.339.441.811,00	6.353.980.750,00	(14.538.939,00)
Beban Honor Opr. Satuan Kerja	82.189.505.531,00	82.189.505.531,00	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	65.278.712.442,00	65.278.232.442,00	480.000,00
Beban Bahan	230.214.364.455,00	230.764.570.187,00	(550.205.732,00)
Beban Honor Output Kegiatan	48.706.164.678,00	48.706.164.678,00	0,00
Beban Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan	0,00	141.214.293,00	(141.214.293,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	267.410.701.268,00	267.359.183.628,00	51.517.640,00
Beban Persediaan Barang Konsumsi	0,00	421.632.495.115,00	(421.632.495.115,00)
Beban Barang Persediaan Amunisi	0,00	58.380.500,00	(58.380.500,00)
Beban Barang Persediaan Pita Cukai, Materai, Leges	0,00	313.381.000,00	(313.381.000,00)
Beban Barang Persediaan Bahan Baku	0,00	9.930.000,00	(9.930.000,00)
Beban Barang Persediaan Untuk Tujuan Strategis	0,00	111.770.500,00	(111.770.500,00)
Beban Barang Persediaan Lainnya	0,00	40.917.503.945,00	(40.917.503.945,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Langganan Listrik	152.297.446.946,00	152.277.068.341,00	20.378.605,00
Beban Langganan Telpn	6.643.564.706,00	6.660.577.784,00	(17.013.078,00)
Beban Langganan Air	15.929.235.600,00	14.474.450.814,00	1.454.784.786,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	73.250.696.692,00	73.208.507.133,00	42.189.559,00
Beban Jasa Pos dan Giro	172.171.592,00	171.206.486,00	965.106,00
Beban Jasa Konsultan	37.813.377.693,00	37.717.545.693,00	95.832.000,00
Beban Sewa	281.659.011.056,00	277.190.326.203,00	4.468.684.853,00
Beban Jasa Profesi	79.882.062.593,00	79.882.062.593,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	77.598.047.267,00	77.468.649.686,00	129.397.581,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	164.425.950.629,00	(164.425.950.629,00)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	1.480.260.402,00	(1.480.260.402,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	1.811.630.643,00	(1.811.630.643,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	210.215.668.880,00	(210.215.668.880,00)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	0,00	501.882.535,00	(501.882.535,00)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	2.158.365.675,00	(2.158.365.675,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	1.355.693.796,00	(1.355.693.796,00)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	1.220.645.700,00	(1.220.645.700,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0,00	226.707.650,00	(226.707.650,00)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0,00	5.613.800,00	(5.613.800,00)
Beban Pemeliharaan Lainnya	0,00	705.046.380,00	(705.046.380,00)
Beban Perjalanan Biasa	0,00	328.516.551.271,00	(328.516.551.271,00)
Beban Perjalanan Tetap	0,00	676.300.000,00	(676.300.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	60.989.028.691,00	(60.989.028.691,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	77.744.869.991,00	(77.744.869.991,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	93.352.969.574,00	(93.352.969.574,00)

Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0,00	48.735.514.428,00	(48.735.514.428,00)
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	0,00	1.978.694.434,00	(1.978.694.434,00)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0,00	20.660.308.910,00	(20.660.308.910,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.565.300.492,00	0,00	2.565.300.492,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00
Total	2.929.889.611.316,00	4.489.360.521.766,00	(1.559.470.910.450,00)

Penjelasan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 126
Penjelasan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Keperluan Kantor	13.232.049,00	Pencatatan Akrua atas Transaksi: - Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp72.850.589,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp79.978.880,00 - Salah Pembebanan Belanja Keperluan Kantor yang dipakai untuk Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar (Rp600.000,00) - Belanja Barang Yang Membentuk Aset sebesar (Rp12.400.000,00) - Hibah Barang Keperluan Kantor sebesar Rp19.103.758,00
Beban Pengadaan Bahan Makanan	(87.806.436.630,00)	Pencatatan Akrua atas Transaksi: - Pencatatan Piutang Lebih Bayar Pengadaan Bahan Makanan sebesar (Rp667.588.066,00) - Pembayaran Utang Belanja Bahan Makanan Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp87.138.848.564,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	(14.538.939,00)	Pencatatan Akrua atas Transaksi: - Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp31.365.732,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp16.826.793,00
Beban Barang Operasional Lainnya	480.000,00	Pencatatan Akrua atas Transaksi: Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp480.000,00
Beban Bahan	(550.205.732,00)	Pencatatan Akrua atas Transaksi: Pencatatan atas Belanja Barang Persediaan menggunakan Akun



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Belanja Bahan sebesar (Rp549.632.376,00) • Pembayaran Utang Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp600.856,00) • Pencatatan Utang Belanja Tahun Berjalan sebesar Rp27.500,00
Beban Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan	(141.214.293,00)	Beban ini membentuk Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Beban Barang Non Operasional Lainnya	51.517.640,00	Pencatatan Akrua atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp308.145.995,00) • Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp361.663.635,00 • Pencatatan Piutang atas Pengembalian Belanja sebesar (Rp2.000.000,00)
Beban Persediaan Barang Konsumsi	(421.632.495.115,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Barang Persediaan Amunisi	(58.380.500,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Barang Persediaan Pita Cukai, Materai, Leges	(313.381.000,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Barang Persediaan Bahan Baku	(9.930.000,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Barang Persediaan Untuk Tujuan Strategis	(111.770.500,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Barang Persediaan Lainnya	(40.917.503.945,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Langganan Listrik	20.378.605,00	Pencatatan Akrua atas Transaksi: • Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar (Rp47.141.459,00) • Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp15.819.010.138,00) • Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp15.886.530.236,00 • Koreksi Lainnya atas Beban Listrik sebesar (Rp34,00)
Beban Langganan Telpn	(17.013.078,00)	Pencatatan Akrua atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp159.457.516,00) • Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp142.449.438,00 • Koreksi Lainnya atas Beban Telpn sebesar (Rp5.000,00)
Beban Langganan Air	1.454.784.786,00	Pencatatan Akrua atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp1.099.682.431,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp2.554.467.217,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	42.189.559,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: - Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp190.326.585,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp231.916.144,00 - Salah Pembebanan Belanja Keperluan Kantor yang dipakai untuk Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp600.000,00
Beban Jasa Pos dan Giro	965.106,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp965.106,00
Beban Jasa Konsultan	95.832.000,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: Honor Jasa Konsultan sebesar Rp95.832.000,00
Beban Sewa	4.468.684.853,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: - Pencatatan Utang Belanja Sewa Tahun Berjalan sebesar Rp22.058.25,00 - Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp2.975.893.163,00 - Belanja Sewa menggunakan Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp1.470.733.440,00
Beban Jasa Lainnya	129.397.581,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: - Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp3.075.260,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp1.703.000,00 - Belanja Barang Persediaan menggunakan Akun Non Persediaan Rp49.500.000,00 - Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp81.269.841,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(164.425.950.629,00)	Beban ini membentuk Beban Pemeliharaan-LO
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(1.480.260.402,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	(1.811.630.643,00)	Beban ini membentuk Beban Pemeliharaan-LO
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(210.215.668.880,00)	Beban ini membentuk Beban Pemeliharaan-LO
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	(501.882.535,00)	Beban ini membentuk Beban Pemeliharaan-LO
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(2.158.365.675,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(1.355.693.796,00)	Beban ini membentuk Beban Pemeliharaan-LO
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	(1.220.645.700,00)	Beban ini membentuk Beban Pemeliharaan-LO
Beban Pemeliharaan Jaringan	(226.707.650,00)	Beban ini membentuk Beban Pemeliharaan-LO
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	(1.000.000,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	(5.613.800,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Pemeliharaan Lainnya	(705.046.380,00)	Beban ini membentuk Beban Pemeliharaan-LO
Beban Perjalanan Biasa	(328.516.551.271,00)	Beban ini membentuk Beban Perjalanan Dinas-LO
Beban Perjalanan Tetap	(676.300.000,00)	Beban ini membentuk Beban Perjalanan Dinas-LO
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(60.989.028.691,00)	Beban ini membentuk Beban Perjalanan Dinas-LO
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(77.744.869.991,00)	Beban ini membentuk Beban Perjalanan Dinas-LO
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(93.352.969.574,00)	Beban ini membentuk Beban Perjalanan Dinas-LO
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(48.735.514.428,00)	Beban ini membentuk Beban Perjalanan Dinas-LO
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	(1.978.694.434,00)	Beban ini membentuk Beban Perjalanan Dinas-LO
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	(20.660.308.910,00)	Beban ini membentuk Beban Perjalanan Dinas-LO
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.565.300.492,00	Beban ini terbentuk dari Pembelian Aset Peralatan dan Mesin dibawah nilai Kapitalisasi
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	21.900.000,00	Beban ini terbentuk dari Pembelian Aset Peralatan dan Mesin dibawah nilai Kapitalisasi
Total	(1.559.470.910.450,00)	

Perhitungan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 127
Perhitungan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban Barang dan Jasa LO	2.929.889.611.316,00
Belanja Barang dan Jasa LRA	3.009.554.357.317,00
Selisih Antara LO dan LRA	(79.664.746.001,00)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL	(104.823.363.666,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan	19.299.066.199,00



FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis	(141.214.293,00)
Beban yang membentuk Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO	(141.214.293,00)
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun menggunakan Akun Non Persediaan	(500.132.376,00)
Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang membentuk Aset	1.554.165.440,00
Jurnal Manual Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	3.010.021.545,00
Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	(5.034,00)
Beban Ekstrakomptable	2.587.200.492,00
Jurnal Pencatatan Piutang PNBPN atas Transaksi Kelebihan Pembayaran Belanja BAMA (52xxxx)	(667.588.066,00)
Jurnal Pencatatan Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang	(2.000.000,00)
Hibah Barang Persediaan	19.103.758,00
Total Beban Barang dan Jasa	2.929.889.611.316,00
Selisih	0,00

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang khusus pembentuk Belanja Barang dan Jasa-LRA sebesar **(Rp79.664.746.001,00)** karena ada faktor-faktor yang mengurangi Beban Tahun Anggaran Berjalan karena merupakan Beban Operasional Tahun Anggaran Yang Lalu yaitu: Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL sebesar Rp104.823.363.666,00 , Beban Selisih Kurs UP Satker Perwakilan sebesar Rp141.214.293,00 , Salah Pembebanan Belanja Persediaan menggunakan Belanja Barang sebesar Rp500.132.376,00 , Jurnal Koreksi Lainnya sebesar Rp5.034,00 , Pencatatan Piutang atas Pengembalian Belanja BAMA sebesar Rp667.588.066,00 dan Pencatatan Piutang atas Pengembalian Belanja Barang sebesar Rp2.000.000,00.

Sedangkan faktor- faktor yang menambah beban Tahun Anggaran Berjalan yaitu: Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Berjalan sebesar Rp19.299.066.199,00 , Belanja Barang Yang Membentuk Aset sebesar Rp1.554.165.440,00 , Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp3.010.021.545,00 , Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp2.587.200.492,00 , dan Hibah Barang sebesar Rp19.103.758,00.

**Beban Pemeliharaan
Rp410.670.100.817,00**

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp410.670.100.817,00 dan Rp370.981.577.432,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	164.534.403.679,00	155.499.886.306,00	5,81
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.811.630.643,00	1.169.797.415,00	54,87
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.198.893.880,00	190.099.177.525,00	10,57
523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	501.882.535,00	1.000.951.763,00	(49,86)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.355.693.796,00	3.969.807.832,00	(65,85)
523132	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.220.645.700,	0,00	0,00
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	226.707.650,00	590.670.943,00	(61,62)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	705.046.380,00	707.348.036,00	(0,33)
593113	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	28.020.186.707,00	14.871.192.187,00	88,42
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	1.984.034.947,00	3.072.745.425,00	(35,43)
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	110.974.900,00	0,00	0,00
	Total	410.670.100.817,00	370.981.577.432,00	10,70

Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 129
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
410.670.100.817,00	384.108.466.090,00	26.561.634.727,00

Rincian selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 130
Rincian Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	164.534.403.679,00	164.425.950.629,00	108.453.050,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	1.480.260.402,00	(1.480.260.402,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.811.630.643,00	1.811.630.643,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.198.893.880,00	210.215.668.880,00	(16.775.000,00)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	501.882.535,00	501.882.535,00	0,00
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	2.158.365.675,00	(2.158.365.675,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.355.693.796,00	1.355.693.796,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.220.645.700,00	1.220.645.700,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	226.707.650,00	226.707.650,00	0,00
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0,00	5.613.800,00	(5.613.800,00)
Beban Pemeliharaan Lainnya	705.046.380,00	705.046.380,00	0,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	28.020.186.707,00	0,00	28.020.186.707,00
Beban Persediaan Suku Cadang	1.984.034.947,00	0,00	1.984.034.947,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	110.974.900,00	0,00	110.974.900,00
Total	410.670.100.817,00	384.108.466.090,00	26.561.634.727,00

Penjelasan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 131
Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	108.453.050,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Belanja Pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan sebesar (Rp775.862.000,00) • Hibah atas barang-barang persediaan pemeliharaan sebesar Rp884.315.050,00
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(1.480.260.402,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(16.775.000,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Belanja Pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan sebesar (Rp16.775.000,00)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(2.158.365.675,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	(1.000.000,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	(5.613.800,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	28.020.186.707,00	Beban yang terbentuk dari pemakaian barang persediaan yang ditujukan untuk pemeliharaan
Beban Persediaan Suku Cadang	1.984.034.947,00	Beban yang terbentuk dari pemakaian barang persediaan yang ditujukan untuk pemeliharaan
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	110.974.900,00	Beban yang terbentuk dari Belanja Aset Gedung dan Bangunan yang dibawah nilai batas kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan
Total	26.561.634.727,00	

Perhitungan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 132
Perhitungan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

a	Beban Pemeliharaan-LO	410.670.100.817,00
b	Belanja Pemeliharaan-LRA (Akun 523xxx)	384.108.466.090,00
c	Selisih LO dengan LRA	26.561.634.727,00
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
d	Hibah Barang Pemeliharaan	884.315.050,00
e	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	28.020.186.707,00
f	Beban Persediaan Suku Cadang	1.984.034.947,00
g	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	110.974.900,00

h	Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan-LO (e + f + g)	30.115.151.754,00
i	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	(1.480.260.402,00)
j	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	(2.158.365.675,00)
k	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jaringan	(1.000.000,00)
l	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	(5.613.800,00)
m	Belanja Akun Pemeliharaan yang membentuk Beban Persediaan-LO	(3.645.239.877,00)
n	Transaksi Belanja Pemeliharaan yang membentuk Aset karena memenuhi nilai kapitalisasi aset.	(792.637.000,00)
o	TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (d + h + m + n)	26.561.634.727,00
	Selisih (c – o)	0,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp26.561.634.727,00 disebabkan adanya faktor yang menambah Beban Pemeliharaan-LO tahun berjalan yaitu Hibah atas barang-barang pemeliharaan sebesar Rp884.315.050,00 , Beban Barang Persediaan yang atas pemakaiannya membentuk Beban Pemeliharaan sebesar Rp30.004.221.654,00 dan Beban Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp110.974.000,00.

Sedangkan factor yang mengurangi Beban Pemeliharaan-LO tahun berjalan yaitu Transaksi Belanja Akun Pemeliharaan yang membentuk Beban Persediaan-LO sebesar Rp3.645.239.877,00 dan Belanja Pemeliharaan yang membentuk Aset karena memenuhi nilai kapitalisasi Aset sebesar Rp792.637.000,00.

Beban Perjalanan Dinas D.6 Beban Perjalanan Dinas

Rp625.199.086.404,00

Beban Perjalanan Dinas-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp625.199.086.404,00 dan Rp554.089.018.108,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
524111	Beban Perjalanan Biasa	321.039.530.376,00	290.638.295.251,00	10,46
524112	Beban Perjalanan Tetap	676.300.000,00	408.950.000,00	65,37
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.010.898.691,00	52.130.382.529,00	17,04
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	77.744.869.991,00	67.164.900.072,00	15,75
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	93.352.969.574,00	77.687.522.129,00	20,16
524211	Beban Perjalanan Biasa – Luar Negeri	48.735.514.428,00	42.202.896.081,00	15,48

524212	Beban Perjalanan Tetap – Luar Negeri	1.978.694.434,00	1.594.781.678,00	24,07
524219	Beban Perjalanan Lainnya – Luar Negeri	20.660.308.910,00	22.261.290.368,00	(7,19)
	Total	625.199.086.404,00	554.089.018.108,00	12,83

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 134
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban Perjadin-LO	Belanja Perjadin-LRA	Selisih
625.199.086.404,00	632.654.237.299,00	(7.455.150.895,00)

Rincian selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 135
Rincian Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Beban Perjadin-LO	Belanja Perjadin-LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	321.039.530.376,00	328.516.551.271,00	(7.477.020.895,00)
Beban Perjalanan Tetap	676.300.000,00	676.300.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.010.898.691,00	60.989.028.691,00	21.870.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	77.744.869.991,00	77.744.869.991,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	93.352.969.574,00	93.352.969.574,00	0,00
Beban Perjalanan Biasa – Luar Negeri	48.735.514.428,00	48.735.514.428,00	0,00
Beban Perjalanan Tetap – Luar Negeri	1.978.694.434,00	1.978.694.434,00	0,00
Beban Perjalanan Lainnya – Luar Negeri	20.660.308.910,00	20.660.308.910,00	0,00
Total	625.199.086.404,00	632.654.237.299,00	(7.455.150.895,00)

Penjelasan selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 136
Penjelasan Selisih Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Perjalanan Biasa	(7.477.020.895,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi:



		- Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp17.455.060.243,00) - Pencatatan Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp9.978.039.348,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.870.000,00	Pencatatan Akrua atas Transaksi: Pencatatan Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp21.870.000,00
Total	(7.455.150.895,00)	

Perhitungan selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 137
Perhitungan Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO
dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

a	Beban Perjalanan Dinas –LO	625.199.086.404,00
b	Belanja Perjalanan Dinas –LRA	632.654.237.299,00
c	Selisih LO dengan LRA	(7.455.150.895,00)
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
d	Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas TAYL	(17.455.060.243,00)
e	Pencatatan Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Berjalan	9.999.909.348,00
g	TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (d + e + f)	(7.455.150.895,00)
	Selisih	0,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp7.455.150.895,00 adalah karena adanya faktor yang mengurangi Beban Perjalanan Dinas-LO tahun berjalan yaitu pembayaran utang belanja perjalanan dinas tahun lalu (biaya mutasi) sebesar Rp17.455.060.243,00 dan faktor yang menambah Beban Perjalanan Dinas-LO yaitu pencatatan utang tahun berjalan sebesar Rp9.999.909.348,00.

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp1.629.306.089,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.629.306.089,00 dan Rp307.668.046.124,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138
Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.145.000,00	647.756.300,00	(99,21)

526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	700.616.061,00	110.057.938,00	536,98
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	923.545.028,00	306.910.231.886,00	(99,70)
	Total	1.629.306.089,00	307.668.046.124,00	(99,47)

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 139
Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat –LO	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat –LRA	Selisih
1.629.306.089,00	0,00	(1.629.306.089,00)

Rincian selisih antara Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 140
Rincian Selisih Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat –LO	Blj. Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat -LRA	Selisih
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.145.000,00	0,00	(5.145.000,00)
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	700.616.061,00	0,00	(700.616.061,00)
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	923.545.028,00	0,00	(923.545.028,00)
Total	1.629.306.089,00	0,00	(1.629.306.089,00)

Penjelasan selisih antara Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 141
Penjelasan Selisih Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	(5.145.000,00)	Beban terbentuk dikarenakan Belanja tidak menggunakan Akun 526xxx namun karena dicatat dalam kategori untuk diserahkan kepada Masyarakat, maka terbentuk sebagai

		Beban diserahkan kepada Masyarakat-LO pada saat barang dikeluarkan/diserahkan. Beban senilai (Rp4.745.000,00) terdapat pada Ditjen AHU. Beban senilai (Rp400.000,00) terdapat pada Rutan Weda berupa barang-barang yang digunakan oleh warga binaan pemasyarakatan.
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	(700.616.061,00)	Beban terbentuk dikarenakan Belanja tidak menggunakan Akun 526xxx namun karena dicatat dalam kategori untuk diserahkan kepada Masyarakat, maka terbentuk sebagai Beban diserahkan kepada Masyarakat-LO pada saat barang dikeluarkan/diserahkan. Beban senilai (Rp27.930.800,00) terdapat pada 3 Satker Kanwil. Beban senilai (Rp623.264.506,00) terdapat pada 24 Satker Pemasyarakatan berupa barang-barang yang digunakan oleh warga binaan pemasyarakatan. Beban senilai (Rp428.400,00) terdapat pada 2 Satker Keimigrasian. Beban senilai (Rp48.992.355,00) terdapat pada Ditjen PP berupa buku-buku peraturan yang dibagikan kepada masyarakat.
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	(923.545.028,00)	Beban terbentuk dikarenakan Belanja tidak menggunakan Akun 526xxx namun karena dicatat dalam kategori untuk diserahkan kepada Masyarakat, maka terbentuk sebagai Beban diserahkan kepada Masyarakat-LO pada saat barang dikeluarkan/diserahkan. Beban senilai (Rp806.421.300,00) terdapat pada 25 Satker Pemasyarakatan berupa barang-barang yang digunakan oleh warga binaan pemasyarakatan. Beban senilai (Rp117.123.728,00) terdapat pada Ditjen PP berupa buku-buku peraturan yang dibagikan kepada masyarakat.
Total	(1.629.306.089,00)	

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.126.350.293.138,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.126.350.293.138,00 dan Rp1.008.619.969.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 142
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	852.310.922.146,00	704.107.111.792,00	21,05
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	272.301.879.553,00	271.438.475.340,00	0,32
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.216.713.050,00	2.609.859.549,00	(15,06)
591312	Beban Penyusutan Irigasi	590.890.664,00	817.816.437,00	(27,75)

591313	Beban Penyusutan Jaringan	658.611.349,00	783.337.593,00	(15,92)
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	532.475.289,00	159.164.250,00	234,54
592115	Beban Amortisasi Software	17.917.856.120,00	19.707.993.268,00	(9,08)
592116	Beban Amortisasi Lisensi	6.811.553.863,00	5.096.904.643,00	33,64
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	2.609.225.500,00	0,00	0,00
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	19.166.667,00	260.132.933,00	(92,63)
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Opr. Pemerintah	3.760.108.483,00	3.639.173.885,00	3,32
Total		1.126.350.293.138,00	1.008.619.969.690,00	14,98

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 143
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pd Neraca	Selisih
1.126.350.293.138,00	1.020.171.217.262,00	139.558.185.422,00

Rincian selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 144
Rincian Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

A	Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	1.126.350.293.138,00
a	Akumulasi Penyusutan Awal	(6.432.500.955.345,00)
b	Akumulasi Penyusutan Akhir	(7.452.672.172.607,00)
B	Selisih (A – a + b)	139.558.185.422,00
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		
c	Akumulasi Penyusutan --- Transfer Masuk	(167.682.029.326,00)
d	Akumulasi Penyusutan --- Koreksi Tambah	(33.061.965.730,00)
e	Akumulasi Penyusutan – Reklas Masuk	(73.137.832.399,00)
C	Akum. Penyusutan Transaksional (Masuk) (c + d + e)	(273.881.827.455,00)
f	Akumulasi Amortisasi --- Transfer Keluar	168.846.247.527,00
g	Akumulasi Penyusutan --- Koreksi Kurang	102.655.464.923,00
h	Akumulasi Penyusutan --- Reklas Keluar	79.980.488.640,00



i	Akumulasi Penyusutan – Penghapusan Aset	61.957.811.787,00
D	Akum. Peny. Transaksional (Keluar) (f + g + h + i)	413.440.012.877,00
E	TOTAL (C + D)	139.558.185.422,00
	Selisih (B - E)	0,00

**Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
(Rp10.594.819.272,00)**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp10.594.819.272,00) dan (Rp10.803.663.474,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 145
Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	(10.724.701.691,00)	(10.804.669.303,00)	(0,74)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	140.479.445,00	0,00	0,00
594411	Beban Penyisihan – Bagian Lancar TP/TGR	(340.420,00)	1.001.223,00	(134,00)
594931	Beban Penyisihan – Piutang TP/TGR	(1.742.106,00)	4.606,00	(37.922,54)
594991	Beban Penyisihan – Piutang Jk. Pjg Lainnya	(8.514.500,00)	0,00	0,00
	Total	(10.594.819.272,00)	(10.803.663.474,00)	(1,93)

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 146
Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO	Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca	Selisih
10.594.819.272,00	11.800.318.033,00	(1.205.498.761,00)

Rincian selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 147
Rincian Selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO	Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca	Selisih
Beban Penyisihan Piutang PNB	(10.724.701.691,00)	11.740.685.697,00	(22.465.387.388,00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	140.479.445,00	0,00	140.479.445,00
Beban Penyisihan – Bagian Lancar TP/TGR	(340.420,00)	(1.282.054,00)	941.634,00
Beban Penyisihan – Piutang TP/TGR	(1.742.106,00)	69.428.890,00	(71.170.996,00)
Beban Penyisihan – Piutang Jangka Panjang Lainnya	(8.514.500,00)	(8.514.500,00)	0,00
Total	10.594.819.272,00	11.800.318.033,00	(1.205.498.761,00)

Penjelasan selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 148
Penjelasan Selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

A	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO	10.594.819.272,00
a	Penyisihan Piutang Akhir	(348.117.845.484,00)
b	Penyisihan Piutang Awal	(359.918.163.517,00)
B	Selisih (A – a + b)	(1.205.498.761,00)
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
c	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Penyisihan Piutang	(1.205.498.761,00)
d	Reklas Penyisihan menjadi Piutang	
C	TOTAL (c + d)	(1.205.498.761,00)
	Selisih (B - C)	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan selisih antara Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca sebesar **(Rp1.205.498.761,00)** disebabkan karena adanya koreksi lainnya karena kurang catat penyisihan sebesar .

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar **Rp4.344.573.336,00**

D.12.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pendapatan hasil Penjualan/Lelang Barang Persediaan, Aset Tanah/Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin yang dihapuskan.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kementerian Hukum dan Hak



Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.344.573.336,00 dan Rp3.593.027.533,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 149
Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	37.766.000,00	59.990.253,00	(37,05)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	793.888.793,00	320.453.410,00	147,74
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.512.918.543,00	3.212.583.870,00	9,35
	Total	4.344.573.336,00	3.593.027.533,00	20,92

Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 150
Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA	Selisih
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	37.766.000,00	37.766.000,00	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	793.888.793,00	793.888.793,00	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.512.918.543,00	3.512.918.543,00	0
	4.344.573.336,00	4.344.573.336,00	0

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA.



**Beban Pelepasan Aset
Non Lancar**
Rp14.852.439.484,00

D.12.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.852.439.484,00 dan Rp23.990.909.396,00.

Beban ini terbentuk dari Jurnal kirim SIMAK-BMN akibat kerugian pelepasan aset non lancar.

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 151
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Kerugian Pelepasan Aset	14.852.439.484,00	Merupakan Beban Kerugian yang timbul dari transaksi penjualan/lelang barang persediaan, Aset Tanah/Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin yang dihapuskan.
Total	14.852.439.484,00	

**Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya**
Rp798.343.795.611,00

D.12.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Kelompok pendapatan yang masuk dalam kategori Pendapatan Non Operasional Lainnya-LO adalah pendapatan yang tidak membentuk pendapatan operasional tahun berjalan karena bukan merupakan pendapatan operasional dari menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti pendapatan dari Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara, Tuntutan Perbendaharaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi, Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan lain-lain.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp798.343.795.611,00 dan Rp473.815.158.469,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	413.730.000,00	454.579.028,00	(8,99)
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0,00	154.627.746,00	(100,00)

423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.562.965.242,00	8.464.834.958,00	(81,54)
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.577.810.127,00	2.842.773.710,00	25,86
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	9.873.973.885,00	11.017.334.363,00	(10,38)
423971	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	601.442.347,00	71.559.124,00	740,48
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	1.101.118.364,00	336.403.342,00	227,32
491311	Pendapatan Penyesuaian Lainnya	672.266,	0,00	#DIV/0!
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	4.057.929,00	84.382.162,00	(95,19)
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	10.819.490.258,00	8.737.713.938,00	23,83
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	770.801.701.467,00	441.650.950.098,00	74,53
	Total	798.343.795.611,00	473.815.158.469,00	68,58

Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 153
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LRA	Selisih
798.343.795.611,00	22.982.474.300,00	775.774.487.585,00

Rincian selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 154
Rincian Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	LO	LRA	Selisih
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	454.579.028,00	253.260.541,00	201.318.487,00
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	154.627.746,00	180.655.705,00	(26.027.959,00)

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	8.464.834.958,00	4.167.335.967,00	4.297.498.991,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.842.773.710,00	3.062.372.346,00	(219.598.636,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	11.017.334.363,00	19.780.968.968,00	(8.763.634.605,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	71.559.124,00	71.559.124,00	0,00
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	336.403.342,00	0,00	336.403.342,00
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	84.382.162,00	0,00	84.382.162,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	8.737.713.938,00	0,00	8.737.713.938,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	441.650.950.098,00	0,00	441.650.950.098,00
Total	473.815.158.469,00	27.516.152.651,00	446.299.005.818,00

Selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 155
Penjelasan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya –LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	Selisih	Keterangan
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	201.318.487,00	- Pencatatan Baru Piutang TP/TGR sebesar Rp244.065.996,00 - Koreksi atas Pendapatan TP/TGR sebesar Rp210.513.032,00 - Pendapatan TP/TGR atas transaksi tahun anggaran yang lalu sebesar (Rp253.260.541,00)
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	(26.027.959,00)	- Pencatatan Baru Piutang TP/TGR sebesar Rp154.627.746,00 - Pendapatan TP/TGR atas transaksi tahun anggaran yang lalu sebesar (Rp180.655.705,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.297.498.991,00	- Setoran atas Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tahun lalu sebesar (Rp2.629.000,00) - Pencatatan Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 4.300.127.991,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(219.598.636,00)	- Pendapatan atas pembayaran Piutang PNBP tahun lalu sebesar (Rp267.067.293,00) - Pencatatan Piutang PNBP sebesar Rp47.468.657,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(8.763.634.605,00)	- Pendapatan atas pembayaran Piutang PNBP tahun lalu sebesar (Rp10.523.326.630,00) - Pencatatan Piutang PNBP sebesar Rp1.241.446.500 - Koreksi atas pendapatan sebesar Rp518.245.525
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	336.403.342,00	Pendapatan atas selisih Kas di Bendahara Pengeluaran Satker Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri karena perbedaan kurs
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	84.382.162,00	Pendapatan atas selisih PNBP Satker Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri karena perbedaan kurs
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	8.737.713.938,00	Pendapatan yang terbentuk atas perolehan asset lainnya
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	441.650.950.098,00	Pendapatan yang terbentuk dari selisih harga pembelian persediaan
Total	446.299.005.818,00	

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
***Rp689.182.033.242,00**

D.12.4 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp689.182.033.242,00 dan Rp281.430.782.687,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 156
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ Turun (%)
521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase	8.020.009,00	24.851.226,00	(67,73)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	408.757.925.733,00	279.783.810.953,00	46,10
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	901.801.976,00	1.486.435.393,00	(39,33)
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	346.392.327,00	93.194.565,00	271,69
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	122.769.409,00	42.490.550,00	188,93
	Total	689.182.033.242,00	281.430.782.687,00	45,73

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Hukum dan Hask Asasi Manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 157
Penjelasan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2018	Keterangan
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase	8.020.009,00	Beban atas selisih saldo Uang Persediaan Satker Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri karena perbedaan kurs
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	408.757.925.733,00	Beban yang terbentuk dari selisih harga pembelian persediaan
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	901.801.976,00	Beban yang terbentuk dari persediaan dengan kondisi rusak/usang
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	346.392.326,00	Beban atas selisih Kas di Bendahara Pengeluaran Satker Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri karena perbedaan kurs
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	122.769.409,00	Beban atas selisih PNBK Satker Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri karena perbedaan kurs
Total	689.182.033.242,00	



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN ATAS
POS-POS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp24.482.912.484.963,00

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp24.482.912.484.963,00 dan Rp23.088.519.377.924,00.

Surplus (Defisit) LO

(Rp8.397.865.557.758,00)

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar ***(Rp8.397.865.557.758,00)*** dan ***(Rp6.664.981.786.252,00)***.

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Yang

Menambah/ Mengurangi

Ekuitas

(Rp988.246.429.629,00)

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar ***(Rp988.246.429.629,00)*** dan Rp859.122.012.324,00.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp21.090.031.820,00

E.3.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp21.090.031.820,00 dan Rp32.556.943.218,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :



Tabel 158
Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2018

JENIS PERSEDIAAN	NILAI KOREKSI
Barang Konsumsi	582.424.100,00
Amunisi	15.793.712.834,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	1.746.000,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan ke Masyarakat	4.677.134.592,00
Persediaan Lainnya	505.000,00
Persediaan Yang Belum Diregister	34.509.294,00
TOTAL KOREKSI	21.090.031.820,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
(Rp1.021.157.279.315,00)

E.3.2. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **(Rp1.021.157.279.315,00)** dan Rp824.349.720.214,00.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 159
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi per 31 Desember 2018

JENIS KOREKSI	NILAI KOREKSI
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.021.258.742.015,00)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	101.462.700,00
TOTAL KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(Rp1.021.157.279.315,00)

Koreksi Lain-Lain
Rp11.820.817.866,00

E.3.3. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.820.817.866,00 dan Rp2.215.348.892,00.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, beban, hibah, piutang, dan utang.

Koreksi dilakukan untuk mutasi tambah atau mutasi kurang suatu transaksi karena kesalahan pencatatan transaksi di tahun-tahun sebelumnya. Koreksi utang/piutang maupun pendapatan hasil suatu

proses validasi atau penilaian ulang dari Inspektorat Jenderal, BPKP, atau BPK.

Rincian Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran.

Transaksi Antar Entitas **E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS** Rp9.127.691.712.422,00

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp9.127.691.712.422,00 dan Rp7.200.252.880.967,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun antara K/L dengan BUN.

Perhitungan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 160
Perhitungan Transaksi Antar Entitas LPE
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	TRANSAKSI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Ditagihkan Kepada Entitas Lain	12.640.163.039.531,00	10.415.767.842.852,00
2	Diterima Dari Entitas Lain	3.563.546.496.086,00	3.222.827.045.677,00
3	Transfer Keluar	1.640.530.373.151,00	1.614.554.053.422,00
4	Transfer Masuk	1.603.177.212.936,00	1.600.207.369.555,00
5	Pengesahan Hibah	84.897.416.216,00	21.661.567.579,00
6	Pengembalian Pengesahan Hibah	20.004,00	2.799.920,00
7	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	3.530.932.980,00	0,00
TOTAL (1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 + 7)		9.127.691.712.422,00	7.200.252.880.967,00

E.4.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018. DDEL sebesar Rp3.563.546.496.086,00 sedangkan DKEL sebesar Rp12.640.163.039.531,00.

E.4.2. TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK

Transfer Keluar /Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA-BUN.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Transfer Keluar sebesar Rp1.640.530.373.151,00 dan Transfer Masuk sebesar Rp1.603.177.212.936,00.

Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp37.353.160.215,00.

Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran.

E.4.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp84.897.416.216,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp20.004,00.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung dapat dilihat pada lampiran.

E.4.4. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAHUN ANGGARAN YANG LALU (TAYL)

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-6799/PB/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu yang menyatakan bahwa masih terdapat Hibah Langsung Yang Belum Disahkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK-K/L) Tahun 2017 *Audited* yang disebabkan adanya hibah langsung bentuk uang/barang/jasa/surat berharga yang telah diterima Satuan Kerja namun belum dilakukan pengajuan register dan/atau proses pengesahan hibah langsung.

Ruang lingkup pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) adalah hibah langsung yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.530.932.980,00 dan Rp0,00.



Rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dapat dilihat pada lampiran.

Ekuitas Akhir

Rp24.224.492.209.998,00

E.5. EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp24.224.492.209.998,00 dan Rp24.482.912.484.963,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyusun Kebijakan Akuntansi Akrual yang memuat transaksi-transaksi spesifik, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang didahului dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, hasil revaluasi seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-35/KN/2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik (BMN), maka hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil Penilaian Kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK.

Atas kebijakan tersebut, terdapat perbedaan penyajian nilai asset tetap objek revaluasi pada Laporan BMN dan Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Saldo Menurut LK	Saldo Menurut LBMN	Selisih
1	Tanah	12.625.444.631.053,00	45.891.670.322.878,00	(33.266.225.691.825,00)
2	Gedung dan Bangunan	10.457.963.798.623,00	11.458.385.645.911,00	(1.000.421.847.288,00)

3	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.323.816.547.094,00)	(678.928.254.313,00)	(1.644.888.292.781,00)
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.628.773.346,00	76.895.079.903,00	(2.266.306.557,00)
5	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(48.688.864.957,00)	(38.994.267.576,00)	(9.694.597.381,00)
6	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	318.379.510.023,00	325.116.354.831,00	(6.736.844.808,00)
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(256.677.527.937,00)	(251.039.752.157,00)	(5.637.775.780,00)

F.3. PERMASALAHAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018

A. E-REKON&LK

1. MONITORING KEUANGAN

Transaksi Dalam Konfirmasi Segmen CoA

Secara keseluruhan tidak ada selisih nilai antara SIAP (Bendahara Umum Negara) dengan SAI (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Selisih terdapat pada program/kegiatan/output yang sama dengan akun yang berbeda atau sebaliknya, antara lain:

TDK Segmen COA – Belanja

No	Uraian	SD-CP P/K/O	Kode Akun	SIAP	SAI	TDK
----	--------	----------------	--------------	------	-----	-----



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kendari	010.01.15 58.994	523121	352.303.489,00	352.603.489,00	(300.000,00)
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kendari	010.01.15 58.994	523122	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kendari	010.01.15 58.951	521211	71.202.500,00	68.752.500,00	2.450.000,00
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kendari	010.01.15 58.994	521211	191.511.083,00	193.961.083,00	(2.450.000,00)
5	Rumah Tahanan Negara Balige	010.08.52 52.994	522121	290.000,00	0,00	290.000,00
6	Rumah Tahanan Negara Balige	010.08.52 52.994	521114	4.933.735,00	5.223.735,00	(290.000,00)
7	Kantor Imigrasi Kendari	040.10.52 54.008	521211	57.837.500,00	57.962.500,00	(125.000,00)
8	Kantor Imigrasi Kendari	040.10.52 54.009	521211	25.000.000,00	24.875.000,00	125.000,00
9	Kantor Imigrasi Sukabumi	040.10.52 54.012	521219	37.730.500,00	40.010.878,00	(2.280.378,00)
10	Kantor Imigrasi Sukabumi	040.10.52 54.013	521219	4.850.378,00	2.570.000,00	2.280.378,00
11	Kantor Imigrasi Sukabumi	040.10.52 54.001	521211	4.718.800,00	7.629.900,00	(2.911.100,00)
12	Kantor Imigrasi Sukabumi	040.10.52 54.013	521211	3.216.350,00	305.250,00	2.911.100,00
13	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	040.10.52 54.951	522191	17.400.000,00	19.000.000,00	(1.600.000,00)
14	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	040.10.52 54.012	522191	28.600.000,00	27.000.000,00	1.600.000,00
15	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	040.10.52 54.951	524111	132.174.236,00	137.094.236,00	(4.920.000,00)
16	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	040.10.52 54.009	524111	95.006.320,00	101.123.657,00	(6.117.337,00)
17	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	040.10.52 54.012	524111	60.662.765,00	49.625.428,00	11.037.337,00
JUMLAH				1.087.737.656,00	1.087.737.656,00	0,00

TDK Segmen COA – Pengembalian Belanja

No	Uraian	SD-CP P/K/O	Kode Akun	SIAP	SAI	TDK
1	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Palangkaraya	010.10.52 54.011	5212 11	(8.675.000,00)	0,00	(8.675.000,00)
2	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Palangkaraya	040.10.52 54.011	5212 11	0,00	(8.675.000,00)	8.675.000,00
3	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kendari	010.ZZ.Z ZZZ.ZZZ	5241 14	(330.000,00)	0,00	(330.000,00)
4	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kendari	010.06.52 50.002	5241 14	0,00	(330.000,00)	330.000,00
Jumlah				(9.005.000,00)	(9.005.000,00)	0,00

TDK Segmen COA – Pendapatan

No	Uraian	SD-CP P/K/O	Kode Akun	SIAP	SAI	TDK
1	Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sentul	000.00.0000.000	423141	5,00	0,00	5,00
2	Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sentul	000.00.0000.000	425131	(82.605,00)	(82.600,00)	(5,00)

Jumlah	(82.600,00)	(82.600,00)	0,00
--------	-------------	-------------	------

2. MONITORING BMN

Rekon SP2D BMN Akun 53

Monitoring BMN – Rekon SP2D Akun 53 merupakan monitoring terhadap pencatatan dokumen SP2D untuk akun 53 antara aplikasi SAIBA dengan SIMAK-BMN. Perbedaan data SP2D akun 53 pada Kementerian Hukum dan HAM disebabkan, antara lain:

- Setoran Pengembalian Belanja akun 53 karena temuan BPK atau Inspektorat Jenderal, terdapat pada satker:
 - Kantor Imigrasi Balikpapan;
- Hibah yang dicatat sebagai Pengembangan Aset, terdapat pada satker:
 - Rudenim Semarang;
- Belanja aset di bawah nilai kapitalisasi, terdapat pada satker:
 - Bapas Jaktim/Jakut;
- Pembayaran utang pihak ketiga atas pembangunan yang sudah menjadi aset di tahun anggaran yang lalu, terdapat pada satker:
 - Kantor Wilayah Sumatera Barat (DIPA Sekretariat Jenderal);
- Belanja menggunakan akun 53 namun digunakan untuk belanja non 53, terdapat pada satker:
 - Kantor Wilayah Maluku (DIPA Sekretariat Jenderal)
 - Ditjen Pemasyarakatan,
 - Ditjen Kekayaan Intelektual;
- Kontrak yang tidak dapat terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, terdapat pada satker:
 - Ditjen Administrasi Hukum Umum,
 - Ditjen Kekayaan Intelektual.

3. DAFTAR

a. Saldo Tidak Normal

Saldo Tidak Normal terdapat di Satker Konsolidasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Kementerian Hukum dan HAM melakukan koreksi pencatatan atas hasil revaluasi BMN (*Take Out Revaluasi*) melalui penjurnalan di SAIBA pada **Satker Konsolidasi**.

b. Akun Non Referensi

Akun non referensi merupakan akun yang tidak lagi diakui dalam kodifikasi segmen pada Bagan Akun Standar sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-211/PB/2018 Tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan tanggal pelaporan masih memiliki akun non referensi tersebut pada Laporan Realisasi Anggaran di Segmen Akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk akun 423141 (Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan). Satuan Kerja yang masih memiliki akun tersebut dengan suatu alasan tertentu tidak melakukan revisi. Satuan Kerja yang masih memiliki akun 423141 (Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan), antara lain:

- Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura,
- Lembaga Pemasyarakatan Tembilahan,
- Rumah Tahanan Negara Banta Eng, dan
- Rutan Kelas IIb Pekan Baru Propinsi Riau.

c. Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja

Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM terdapat pada satker Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Purbalingga. Hal ini disebabkan terdapat potongan gaji PNS berupa potongan lain-lain di aplikasi GPP. Tetapi saat membuat SPM di aplikasi SAS, potongan tersebut terbaca sebagai pengembalian belanja yang seharusnya merupakan pendapatan. Karena suatu hal tertentu, satker belum melakukan ralat.

d. Jurnal Tidak Lazim

Jurnal Tidak Lazim merupakan penjurnalan terkait aset yang dilakukan secara manual di aplikasi SAIBA. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki jurnal tidak lazim sebanyak 461 (empat ratus enampuluh satu) jurnal, yang dilakukan untuk hal sebagai berikut:

- Penjurnalan terkait *Take Out* Revaluasi pada Satker Konsolidasi sebanyak 184 (seratus delapanpuluh empat) jurnal;
- Penjurnalan di SAIBA untuk memunculkan Hibah Yang Belum disahkan, saat BAST Hibah telah dicatat di aplikasi SIMAK-BMN sebanyak 104 (sembilanpuluh enam) jurnal;
- Perolehan aset (pembelian atau hibah) dengan nilai dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan penjurnalan di SAIBA sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel sebanyak 90 (sembilanpuluh) jurnal;
- Penjurnalan untuk mengakui sebagai piutang yang disebabkan Garansi Bank atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan disetorkan ke kas negara setelah tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 5 (lima) jurnal;
- Penjurnalan yang dilakukan untuk pembayaran utang (belanja modal yang masih harus dibayar) atas pembangunan yang sudah menjadi aset di tahun anggaran yang lalu sebanyak 2 (dua) jurnal;
- Penjurnalan yang dilakukan karena pembulatan nilai persediaan sebanyak 3 (tiga) jurnal;
- Penjurnalan yang dilakukan untuk menyesuaikan selisih nilai kurs sebanyak 28 (dua puluh delapan) jurnal;
- Jurnal koreksi yang dilakukan di SAIBA karena telah dilakukan setoran pengembalian atas jaminan pekerjaan yang belum terselesaikan dan/atau atas temuan dari Inspektorat



Jenderal atau Badan Pemeriksa Keuangan sedangkan di SIMAK-BMN sudah tercatat sebagai aset atau KDP sebanyak 13 (tiga belas) jurnal;

- Penjurnalan yang dilakukan karena kesalahan penggunaan akun belanja sebanyak 32 (tiga puluh dua) jurnal.

B. PENGGUNAAN AKUN YANG KURANG TEPAT DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-211/PB/2018 Tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, terdapat penggunaan segmen akun kas yang kurang tepat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Biro Keuangan telah mengeluarkan surat terkait hal tersebut, yaitu Surat Kepala Biro Keuangan Nomor: SEK.3.KU.01.04-83 Tanggal 31 Mei 2018 Hal: Revisi Akun 522121 (Belanja Jasa Pos dan Giro) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diingatkan kembali melalui Surat Kepala Biro Keuangan Nomor: SEK.3.KU.05.02-42 Tanggal 14 November 2018 Hal: Evaluasi Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Triwulan III TA 2018, akan tetapi beberapa satuan kerja dengan suatu alasan tertentu tidak melakukan revisi dan ralat SPM.

Akun yang kurang tepat dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, antara lain:

a. Akun 522121 (Belanja Jasa Pos dan Giro)

Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos di seluruh Indonesia.

No	Eselon I	Allotment	Realisasi
----	----------	-----------	-----------



1	Sekretariat Jenderal	51.010.000,00	44.318.500,00
2	Ditjen Administrasi Hukum Umum	72.724.000,00	21.547.240,00
3	Ditjen Pemasyarakatan	81.879.000,00	38.614.713,00
4	Ditjen Imigrasi	81.644.000,00	62.552.533,00
Total		287.257.000,00	167.032.986,00

b. Akun 523122 (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina)

Akun untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.

No	Eselon I	Allotment	Realisasi
1	Sekretariat Jenderal	150.000.000,00	148.445.000,00
2	Ditjen Administrasi Hukum Umum	89.460.000,00	77.287.800,00
3	Ditjen Pemasyarakatan	48.907.000,00	47.698.235,00
4	Ditjen Imigrasi	234.576.000,00	228.451.500,00
Total		522.943.000,00	501.882.535,00

F4. RANGKUMAN PENGUNGKAPAN PADA ESELON I

I) SEKRETARIAT JENDERAL

I.1 KANTOR WILAYAH BENGKULU

Temuan BPK Tahun 2012

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp104.689.276,00 yang merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tahun 2012.

Belum ada pembayaran atas Piutang Bukan Pajak kembali sampai dengan TA 2018. Piutang Bukan Pajak ini atas PT. Sinatria Inti Surya.

Temuan Inspektorat Jenderal Tahun 2017

Terdapat temuan Inspektorat Jenderal Tahun 2017 senilai Rp89.733.845,00. Temuan yang sudah ditindaklanjuti dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp26.174.833,00 dengan rincian 2 temuan berstatus tuntas, 2 temuan berstatus belum ditindaklanjuti, dan 8 temuan berstatus dalam proses tindak lanjut.

I.2 KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

Pada aplikasi SIMAK-BMN tidak ada penginputan terhadap Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) sesuai dengan realisasi pada aplikasi SAIBA yang merupakan pembayaran Utang untuk Pekerjaan Pembangunan Rutan Padang TA 2014 dan LPKN Sawahlunto TA 2014. Karena pada aplikasi SIMAK-BMN sudah diinput nilai tersebut pada Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara PHO dan FHO pekerjaan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk pertimbangan memunculkan utang pihak ketiga dengan melakukan jurnal penyesuaian terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada neraca SAIBA.

I.3 KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK

Sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2018 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Samarinda (Setjen) terdapat temuan BPK berupa penggunaan Belanja Barang tahun

anggaran yang lalu (TA 2017) yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta penggunaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri, yaitu Belanja Perjalanan Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Terhadap Temuan BPK ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Setjen) telah melakukan pengembalian kepada Negara dengan melakukan penyetoran kepada Kas Negara sebesar kerugian yang harus disetorkan pada bulan September 2018.

No.	Tanggal	Akun	Keterangan Akun	Jumlah Setoran	NTPN	Keterangan
1.	04 Sept 2018	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Tahun Yang Lalu	2.050.000,00	DD29718TR LOKEJRG	Pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu TA. 2017 an. Sutrisno,SH
2.	04 Sept 2018	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Tahun Yang Lalu	1.400.000,00	415575MFC JKO76RG	Pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu TA. 2017 an. Amri Diapari Harahap,SHE
Jumlah				3.450.000,00		

I.4 KANTOR WILAYAH PAPUA

- Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memiliki Tanah, yang di atas Tanah tersebut dibangun rumah Negara golongan II yang ditempati oleh pejabat yang telah mutasi / pensiun dan pegawai yang telah pindah ke instansi lain dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Seluas 397 m², dibangun rumah negara golongan II , yang ditempati oleh Pensiunan atas nama Bapak Silas Dirk Enock yang terletak di Jl. Agats Dok V Bawah Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura.
 - Seluas 875 m², dibangun rumah negara golongan II di Jalan Sawo Kelurahan Argapura Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura yang ditempati oleh Pegawai yang telah pindah ke instansi lain an. Ibu Hana Hikoyabi.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor NUP.5 senilai Rp12.100.000,00 milik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, dikuasai oleh Bpk. Abdul Kadir, SH. Pensiunan Pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua.

- 1 (satu) unit *Notebook* Lenovo Y310 (tahun perolehan 2009) senilai yang dipegang oleh Bpk. Ruben Mandowen, SH (pensiunan) , mantan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

I.5 KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

- Terdapat hibah dari Pemkab Tanah Bumbu berupa tanah seluas 56.000 m² dengan nilai sebesar Rp560.000.000,00 yang direncanakan untuk pembangunan Lapas Kelas III Batulicin yang pencatatan asetnya masih dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.
- Terdapat hibah dari Pemprov Kalimantan Selatan berupa tanah seluas 42.000 m² dengan nilai Rp548.937.500 yang sekarang telah dibangun Lapas Kelas III Banjarbaru dan pencatatan aset tanahnya masih dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, namun hingga saat ini belum bisa dilakukan pembuatan sertifikat tanah karena masih terkendala persyaratan administrasi yang belum lengkap (batas ukur tanah/koordinat).
- Terdapat tanah tempat kerja lainnya di Kab. Kotabaru hasil temuan BPK RI yang oleh Pengadilan Kotabaru diserahkan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

I.6 KANTOR WILAYAH MALUKU

Terdapat penambahan Belanja Modal untuk Sewa Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah Maluku sebesar Rp.1.707.413.000,00 dengan menggunakan Akun 533114 sejumlah Rp.1.680.734.000,00 dan Akun 532111 sejumlah Rp.26.679.000,00 yang digunakan untuk pembayaran sewa gedung dan bangunan Kanwil Maluku di Gedung *Islamic Center* Ambon selama 24 bulan terhitung mulai bulan November 2018 sampai dengan oktober 2020 sesuai dengan perjanjian sewa gedung nomor W.28.PB.04.02-2113 dan Nomor : 032.838 Tahun 2018 Tanggal 05 Desember 2018 dan sudah direalisasikan pada akun

533114 sebesar Rp.1.470.733.440,00 sesuai SPM No.00243 tanggal 21 Desember 2018 dan SP2D No.180611301033035 tanggal 27 Desember 2018.

I.7 KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) adalah sebagai berikut:

- Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah TA 2010 s.d. 2012 (Semester I) senilai Rp414.922.873,38. Telah disetor ke kas Negara pada Tahun 2012 senilai Rp17.350.000,00; pada Tahun 2013 disetor senilai Rp28.000.000,00; pada Tahun 2014 disetor senilai Rp196.480.194,53; pada Tahun 2015 disetor senilai Rp20.000.000,00; pada Tahun 2017 disetor senilai Rp25.000.000,00; sisa yang belum disetor senilai Rp128.092.678,85 (kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi pada Rutan Poso).
- Kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan TA 2010 dan 2011 pada Satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah senilai Rp66.810.000,00. Telah disetor ke kas Negara pada tahun 2013 senilai Rp22.750.000,00; tahun 2015 disetor senilai Rp14.510.000,00; tahun 2016 disetor senilai Rp1.500.000,00; tahun 2017 disetor senilai Rp5.000.000,00; tahun 2018 disetor senilai Rp5.000.000,00; sisa yang belum disetor senilai Rp18.050.000,00 (pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pada Lapas Palu).
- Mekanisme pertanggungjawaban realisasi belanja barang menggunakan uang persediaan pada Satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah tidak sesuai ketentuan senilai Rp62.552.650,00. Telah disetor ke kas Negara pada tahun 2012 senilai Rp26.500.000,00; pada Tahun 2013 disetor senilai Rp15.000.000,00; Tahun 2015 disetor senilai Rp16.652.650,00; Tahun 2015 disetor senilai Rp4.400.000,00 sisa yang belum disetor senilai Rp0,00.
- Prosedur pengadaan barang dan Jasa TA 2011 dan 2012 pada Kanim

Palu tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp45.333.160,00. Telah disetor ke kas Negara pada tahun 2012 senilai Rp45.333.160,00, sisa yang belum disetor senilai Rp0,00.

- Kelebihan pembayaran biaya pengiriman beras TA 2010 pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah senilai Rp62.734.000,00. Telah disetor ke kas Negara pada tahun 2015 senilai Rp32.450.500,00; Tahun 2015 17.654.100,00; Tahun 2017 6.092.100,00; sisa yang belum disetor senilai Rp0,00.
- Kelebihan pembayaran realisasi belanja barang kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2012 pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah senilai Rp18.600.000,00. Telah disetor ke kas Negara pada tahun 2012 senilai Rp18.600.000,00, sisa yang belum disetor senilai Rp0,00.

I.8 KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.529.529,00 yang merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat pada tahun 2014. Piutang Bukan Pajak ini atas nama CV. Tabyol Perkasa.

Sehubungan tidak dapat ditagihnya piutang tersebut kepada CV. Tabyol Perkasa dan sudah dilakukan penagihan melalui surat sebanyak 4 (empat) kali, kantor wilayah mengajukan permohonan penyerahan pengurusan piutang negara dan dinyatakan telah beralih pengurusan piutang negara tersebut kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara Cabang Papua Barat dengan dikeluarkannya surat dari Panitia Pengurusan Piutang Negara Cabang Papua Barat dengan nomor: SP3N.13/PUPNC.32.01/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penerimaan Pengurusan Piutang Negara.

I.10 SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)

- Terdapat Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) senilai Rp115.386,00 yang merupakan dana jasa lembaga keuangan yang

belum disetor dari tahun 2015 pada Bendahara DOM;

- Sewa tanah oleh PT Paramitha Bangun Pratama untuk pembayaran tahun 2018 dan 2019 yang jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2018 sebesar Rp1.640.600.000,00 dengan denda sampai tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp236.246.400,00, dan Piutang PT Paramitha Bangun Pratama TA 2019 sebesar Rp1.702.900.000,00.

II. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Tindak Lanjut Atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan

Sesuai dengan surat Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 163A/S/XIV/12/2018 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan serta Rencana Aksi, beberapa temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) TA 2018 pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah sebagai berikut:

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Pembayaran Bank Guarantee senilai USD 1.000.000 diadministrasikan sebagai pembayaran Konsultan Hukum Lipman Karas dan dikenakan pajak senilai USD20.408	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: - Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: - Panitia PPHP yang kurang cermat dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan atas Jasa Konsultan Hukum - Bendahara Pengeluaran pada Bagian Keuangan yang membayar pajak tidak seharusnya. - Memonitor penempatan Bank Guarantee pada DOJ Hongkong. - Memerintahkan Bagian AKLAP Ditjen AHU untuk mencatat dan melaporkan Bank Guarantee pada DOJ Hongkong dalam LK sebagai surat berharga negara.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran
2.	Pengadaan E-KTP Reader Tanpa Didukung Perencanaan yang Memadai sehingga Terjadi Pemborosan	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: - Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: - Kuasa Pengguna Anggaran tidak menyusun rencana pengadaan sesuai dengan kebutuhan;	-> Sudah buat surat teguran

	Senilai Rp10.890.199.545 ,00	2) Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan Perencanaan Pengadaan dengan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terlebih dahulu; 3) Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara belum optimal melakukan pengendalian Barang Milik Negara. 4) Ditjen AHU belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas belanja modal. b. Memerintahkan kepada Penerima E-KTP Reader yaitu Ditjen Pemasaryakatan, Ditjen Imigrasi dan Ditjen KI segera memanfaatkan peralatan dimaksud; c. Mempertanggungjawabkan atas kehilangan lima buah E-KTP Reader senilai Rp46.514.910,00.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran
3.	Lemahnya Pengendalian Internal atas Pengadaan dan Pembayaran Jasa Pendampingan Dalam Menangani Gugatan Churcill Mining PLC dan Planet Mining PTY LTD Ditentukan Oleh Law Firm Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosley	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada 1) PPK pengadaan Jasa konsultan hukum Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosley pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2) Panitia Penerima Hasil pekerjaan memeriksa hasil pekerjaan yang disajikan dengan tidak membandingkan lingkup pekerjaan dalam kontrak. b. Memerintahkan KPA dan PPK melakukan kajian atas kelemahan kontrak perjanjian terkait spesifikasi; dan c. Menarik pembayaran diluar ruang lingkup pekerjaan senilai Rp227.809.875,00.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran
4.	Kegiatan Pembuatan Aplikasi Kanwil DIY Dilaksanakan Secara Proforma	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: 1) Kuasa Pengguna Anggaran yang kurang cermat di dalam tugasnya melaksanakan pengawasan; 2) Pejabat Pembuat Komitmen yang lalai di dalam melaksanakan tugasnya; 3) Pejabat Pengadaan yang tidak melaksanakan tugasnya; 4) Pejabat Penerima yang tidak melaksanakan tugasnya; dan 5) Kepala Bagian Program dan Pelaporan kurang cermat menganggarkan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Masterplan TIK. b. Memerintahkan PPK lebih cermat dalam menyusun HPS; c. Memerintahkan Kepala Bagian Program dan Pelaporan lebih cermat dalam menyusun perencanaan; dan d. Memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk menghitung keuntungan yang tidak berhak diperoleh penyedia barang/jasa.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran

5.	Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Konsultan Perencanaan DC4 Berstandar Tier IV Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: 1) Sub Direktorat Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras Direktorat TI selaku penanggung jawab kegiatan tidak membuat daftar kuantitas dan harga sesuai dengan ketentuan; dan 2) PPK dan Pokja ULP belum sepenuhnya menjalankan tugas pokok dan kewenangannya. b. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran atas kegiatan jasa konsultansi senilai Rp269.747.666,00 (Rp148.762.200,00 + Rp120.985.466,00) dengan menyetorkan ke Kas Negara.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran
6.	Penyusunan HPS Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kementerian Hukum dan HAM Gedung Eks Sentra Mulia tidak Dikalkulasikan Secara Keahlian dan tidak Memedomani Standar Biaya Masukan	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: 1) Pejabat Pengadaan yang lalai dalam melaksanakan proses pengadaan langsung yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan; 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan yang menjadi kewenangannya; b. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam instansinya.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran
7.	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp637.575.114,75	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: 1) PPK lalai dalam melakukan pengendalian atas perjalanan dinas. 2) Bendahara Pengeluaran tidak cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas. 3) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak memedomani ketentuan dan prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah ditetapkan. b. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp637.575.114,75.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran

8.	Pekerjaan Pembangunan dan Renovasi Rumah Dinas Eselon I Tahun Anggaran 2017 Senilai Rp1.277.785.379,00 dan Renovasi Rumah Genset Lebak Bulus Tahun 2018 Senilai Rp567.479.000,00 Dilakukan Dengan Pemecahan Paket Pekerjaan dan Mendahului Kontrak	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: 1) Kuasa Pengguna Anggaran lalai di dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan proses pengadaan; 2) Ketua ULP melakukan pelanggaran mekanisme pengadaan; 3) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pengadaan tidak sesuai ketentuan; 4) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan proses pengadaan tidak sesuai ketentuan. b. Meningkatkan pengendalian atas pengadaan barang dan jasa.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran
9.	Volume Pekerjaan Terpasang pada Pekerjaan Pengadaan Genset 2000 kVA dan 65 kVA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tidak Sesuai dengan yang Ditetapkan dalam Kontrak Senilai Rp90.131.546,25	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk menegur: a. PPK dan PPHP belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian realisasi kegiatan dan realisasi keuangan yang menjadi kewenangannya; b. Memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan bayar sebesar Rp90.131.546,25 dan menyetorkan ke Kas Negara.	-> Sudah buat surat teguran
10.	Pertanggungjawab an atas Realisasi Pembayaran Biaya Langsung Non Personil pada Jasa Konsultasi Belum Didukung dengan Bukti Pengeluaran yang Lengkap dan Sah senilai Rp67.030.492,00 dan Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Biaya Langsung Personil Minimal Senilai Rp73.000.000,00	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PPK yang tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara memadai atas realisasi pembayaran jasa konsultasi; b. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran atas kegiatan jasa konsultasi senilai Rp140.030.492,00 (Rp73.000.000,00 + Rp67.030.492,00) dengan menyetorkan ke Kas Negara.	-> Sudah buat surat teguran

11.	Volume Pekerjaan Terpasang pada Dua Paket Pekerjaan Renovasi Bangunan Rumah Dinas Eselon I Tidak Sesuai dengan yang Ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja Senilai Rp32.336.256,00	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: 1) PPK yang kurang optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang kurang cermat dalam menilai hasil pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja; b. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran senilai Rp32.336.256,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran
12.	Volume Pekerjaan Terpasang pada Pekerjaan Relokasi dan Instalasi Genset 750 KVA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tidak Sesuai dengan yang Ditetapkan dalam Kontrak Senilai Rp10.390.257,70	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: 1) PPK kurang optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak; 2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kurang cermat dalam melaksanakan penilaian terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak. b. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran senilai Rp10.390.257,70 dengan menyetorkan ke Kas Negara.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran
13.	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Integritas Pegawai Ditjen AHU Tahun 2017 dan Kegiatan Kesamaptaan Bela Negara Tahun 2018 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: a. PPK yang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Pejabat Penerima Hasil Pengadaan yang kurang cermat dalam melaksanakan penilaian terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak; c. Penanggung Jawab Kegiatan yang tidak memedomani ketentuan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran
14.	Proses Pengadaan Jasa atas Lima Paket Belanja Barang yang Dilaksanakan Oleh CV. AD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: 1) Ketua Unit Layanan Pengadaan yang melakukan pelanggaran mekanisme pengadaan; 2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan proses pengadaan tidak sesuai ketentuan;	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran



		3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan yang menjadi kewenangannya; dan 4) Pejabat Penerima Hasil Pengadaan yang kurang cermat dalam melaksanakan penilaian terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak. b. Melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran senilai Rp242.727.000,00; dan c. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam instansinya.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran '-> Sudah disetor sebesar Rp63.000.000 NTPN 7A83D1C6C8KJK E9 Tanggal 26-09-2018 '-> Sudah disetor sebesar Rp8.360.000 NTPN 20A807RVSG8VU DU9 Tanggal 24-09-2018"
15.	Lebih Bayar atas Kegiatan Pengadaan Jasa EO Penyusunan dan Pelaporan Target Kinerja Program AHU dan Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Hukum Dan HAM Senilai Rp39.200.000,00	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan yang menjadi kewenangannya; dan 2) Panitia Penerima Hasil Barang (PPHP) tidak memeriksa hasil pekerjaan secara cermat. b. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran senilai Rp39.280.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran
16.	Pembebanan Anggaran untuk Cleaning Service, Office Boy, dan Pengemudi dalam Rapat Dalam Kantor Tidak Tepat	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk mengingatkan kepada: a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ditjen AHU yang lalai dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan RDK; b. Penanggungjawab dan peserta kegiatan RDK yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku; dan c. Mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran pelaksanaan kegiatan RDK sebesar Rp2.010.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara.	-> Sudah buat surat teguran -> Sudah buat surat teguran

17.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku belum mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan operasional kepada CV Menara Abadi sebesar Rp12.745.317,00	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. PPK dan PPHP belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian realisasi kegiatan dan realisasi keuangan yang menjadi kewenangannya. b. Memerintahkan PPK untuk mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp12.745.317,00 dan menyetorkan ke Kas Negara.	
18.	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Maluku Belum Tertib	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Memerintahkan Penanggungjawab Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan pembayaran honorarium yang belum diberikan kepada penerima sebesar Rp27.805.000,00; b. Memerintahkan Penanggungjawab Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp570.000,00 dan menyetorkan ke Kas Negara.	-> Sudah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp570.000 NTPN 6ADA45OSQPOH D5NP Tanggal 23-10-2018
19.	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp25.918.103,00	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada: 1) PPK lalai dalam melakukan pengendalian atas perjalanan dinas. 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas. 3) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak memedomani ketentuan dan prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah ditetapkan. b. Memerintahkan PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang belum didukung bukti yang lengkap.	
20.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo lebih bayar atas pengadaan sewa kendaraan operasional TA 2017 oleh PT. SA	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk: a. Mengenaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PPK dan panitia PPHP kurang tegas dalam melaksanakan kontrak dan serah terima sewa kendaraan; b. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan lebih bayar atas selisih spesifikasi kendaraan sebesar	

		Rp3.033.900,00 dan menyetorkan ke Kas Negara.	
21.	Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo tidak sesuai dengan Surat Perintah Penugasan	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Direktur Jenderal AHU untuk memperingatkan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai ketentuan.	
22.	Pengeluaran Belanja Barang pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap	BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk memerintahkan Penanggungjawab Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja yang belum dilengkapi bukti.	

Rincian lebih lanjut tertuang dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tingkat Eselon I.

III. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

III.1 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Pengadaan Alat Test Skrinning HIV Tahun 2012 (APBN-P)

BPK melalui surat nomor 151/S/XIV/8/2013 tanggal 2 Agustus 2013, menyampaikan temuan BPK mengenai Pekerjaan Pengadaan Alat Test Skrinning HIV Tahun 2012 (APBN-P) pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan PT.Hutama Sejahtera Radofa (PT.HSR) dengan Nomor Kontrak PAS1.PL02.03-1037, Tanggal Kontrak 24 September 2012 serta Nilai Kontrak Perjanjian sebesar Rp.7.834.200.000,- (Tujuh Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta dua Ratus Ribu Rupiah).

Waktu Penyelesaian Pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dengan ketentuan dan detail pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pembayaran angsuran / tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari total harga/nilai kontrak atau $60\% \times \text{Rp.7.834.200.000,-} = \text{Rp.4.700.520.000,-}$ (Empat miliar tujuh ratus lima ratus dua puluh ribu rupiah). Angsuran Tahap I ini telah dibayarkan pada tanggal 02 Nopember 2012 dengan SP2D Nomor: 908355A/139/110 dan SPM Nomor: 00716/409263/LS/2012.
- Pembayaran angsuran/tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari total harga/nilai kontrak atau $40\% \times \text{Rp.7.834.200.000,-} = \text{Rp.3.133.680.000,-}$ (tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Angsuran Tahap II ini telah dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2012 dengan SP2D Nomor: 9420089A/139/110 dan SPM Nomor: 00940/409263/LS/2012.

Selama Tahun 2012, Alat Test Skrining HIV tersebut telah di distribusikan ke Satker-satker berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama UPT	Kanwil	Jumlah		Tgl. Terima
			1 Set = 100 Test		
1	LAPAS KLAS 1MEDAN	SUMATERA UTARA	22	SET	13/11/2012
2	RUTAN KLAS 1 MEDAN	SUMATERA UTARA	29	SET	13/11/112
3	LAPAS KLAS IIA LUBUK PAKAM	SUMATERA UTARA	9	SET	-
4	LAPAS KLAS IIA BATAM	KEPULAUAN RIAU	10	SET	14/11/2012
5	LAPAS KLAS I PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	10	SET	-
6	LAPAS KLAS I TANGERANG	BANTEN	16	SET	-
7	LAPAS KLAS IIA PEMUDA TANGERANG	BANTEN	21	SET	12/11/2012
8	LAPAS KLAS IIA SERANG	BANTEN	7	SET	13/11/2012
9	LAPAS WANITA TANGERANG	BANTEN	1	SET	-
10	LAPAS KLAS I CIPINGA	DKI JAKARTA	25	SET	09/11/2012
11	LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA CIPINANG	DKI JAKARTA	27	SET	09/11/2012
12	LAPAS KLAS IIA JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	13	SET	-
13	RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	35	SET	-
14	RUTAN KLAS I CIPINANG	DKI JAKARTA	28	SET	09/11/2012
15	RUTAN KLAS IIA JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	9	SET	-
16	LAPAS KLAS I CIREBON	JAWA BARAT	7	SET	14/11/2012
17	LAPAS KLAS IIA BANCEUY	JAWA BARAT	15	SET	09/11/2012
18	LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA CIREBON	JAWA BARAT	10	SET	-
19	LAPAS KLAS IIA BOGOR	JAWA BARAT	12	SET	17/11/2012
20	LAPAS KLAS IIA BEKASI	JAWA BARAT	16	SET	12/11/2012
21	LAPAS KLAS IIA KARAWANG	JAWA BARAT	11	SET	10/11/2012
22	LAPAS KLAS IIA WANITA BANDUNG	JAWA BARAT	4	SET	-
23	RUTAN KLAS I BANDUNG	JAWA BARAT	14	SET	-
24	LAPAS KLAS I SEMARANG	JAWA TENGAH	12	SET	-
25	LAPAS KLAS IIA PEKALONG	JAWA TENGAH	5	SET	-
26	LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA NK	JAWA TENGAH	5	SET	26/11/2012
27	LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA	DI YOGYAKARTA	4	SET	02/11/2012
28	LAPAS KLAS I MALANG	JAWA TIMUR	19	SET	10/11/2012
29	LAPAS KLAS I MADIUN	JAWA TIMUR	14	SET	10/11/2012
30	LAPAS KLAS IIA WANITA MALANG	JAWA TIMUR	4	SET	10/11/2012
31	LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA PAMEKASAN	JAWA TIMUR	8	SET	-
32	RUTAN KLAS I SURABAYA	JAWA TIMUR	17	SET	09/11/2012
33	LAPAS KLAS IIA DENPASAR	BALI	9	SET	21/11/2012
34	LAPAS KLAS IIA SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	6	SET	17/11/2012
35	LAPAS KLAS IIA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	20	SET	19/11/2012
36	LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA SUNGGUMINASA	SULAWESI SELATAN	6	SET	14/11/2012

Berdasarkan hasil analisa BPK, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, telah terjadi pelaksanaan lelang yang tidak sesuai ketentuan, yaitu adanya persengkongkolan baik vertikal yaitu antara PPK, ULP dengan rekanan, maupun horisontal yaitu antara sesama rekanan peserta lelang. Hal ini disimpulkan berdasarkan kondisi berikut :

- a) dalam penentuan besaran HPS, PPK hanya berdasarkan Pricelist yang dikeluarkan oleh distributor tunggal PT. Aryasa Tekad Pratama

(PT.ATP) tanpa melakukan konfirmasi langsung ke PT.ATP mengenai kebenaran harga yang sesungguhnya sehingga terjadi *Marked Up* harga yang dibuat PT.HSR

- b) Dalam mengakses LPSE terdapat persamaan *IP Address* antara sesama peserta lelang.
- c) Terdapat kesamaan format tulisan dalam dokumen penawaran dan surat dukungan, kesamaan dokumen identitas produk dan perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) antara PT. HSR dan PT.KPN, serta
- d) PT. HSR telah memalsukan dokumen perusahaan baik kepemilikan aset maupun tentang Akte perusahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik
- e) Harga *Discount* minimal 20% dari *price list* Reagent Combo sebesar Rp.12.000.000/kit yang diberikan oleh PT.ATP kepada PT.HSR untuk pembelian 480 set/kit tetapi tidak dikurangkan oleh PPK dalam menyusun HPS, yaitu $\text{Rp.12.000.000} \times 20\% \times 480 = \text{Rp.1.152.000.000,-}$
- f) Berdasarkan perhitungan riil antara harga yang diberikan oleh PT.HSR dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh PT. ATP selaku distributor dalam daftar harga produk alat kesehatan / diagnostic Kit per 1 Januari 2012 yaitu selisih nilai berupa keuntungan yang diterima oleh PT.HSR sebesar Rp 1.259.541.600,- sehingga total kerugian negara adalah sebesar Rp.2.411.541.600,-

Berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor ITJ.PW.04.02-31 tanggal 7 Maret 2017 mengenai Tindak lanjut hasil audit investigasi pengadaan Alat Test Skinning HIV Tahun 2012 pada Ditjen Pemasarakatan, diperintahkan kepada KPA dan PPK pengadaan alat test skinning HIV tahun 2012 untuk menarik dan menyetor ke kas negara atas kelebihan pembayaran tersebut dari PT.Hutama Sejahtera Radofa sebesar Rp.1.208.596.500,-

Sebagai tindak lanjut atas surat Inspektorat Jenderal tersebut, maka PT.Hutama Sejahtera Radofa mengeluarkan surat pernyataan kesanggupan

bayar selama 10 tahun terhitung sejak bulan Juni 2017. Pembayaran yang telah dilakukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	NTPN
1	12 Juni 2017	50.000.000,-	1C2E 16K2 JLCD 4808
2	13 Des 2017	100.000.000,-	C5B1 05T1 K82M PDUO
3	02 Okt 2018	100.000.000,-	213A 12A4 0S4S HSL8
4	10 Des 2018	50.000.000,-	F972 2185 QETB 6ET8
Total Pembayaran		300.00.000,-	

Sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2018 masih terdapat sisa piutang sebesar Rp.908,596,500,- pada laporan neraca satker instansi pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Pada Satker Pemasyarakatan Belum Tertib.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2017 pada LHP Nomor: 15a/HP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, ditemukan bahwa Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satker – satker Pemasyarakatan Belum dilakukan secara tertib dan memadai. Hal ini ditunjukkan dengan Temuan Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Adanya sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran pada akhir pelaporan neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp.31.991.241,-;
2. Terdapatnya penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan uang APBN pada Bapas Klas II Mataram dan Rutan Klas II B Selong.
3. Terdapat pembayaran oleh bendahara/BPP Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tidak melalui verifikasi yang memadai.

Tanggapan instansi atas Temuan Pemeriksaan tersebut adalah

1. Adanya sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran pada akhir pelaporan neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp.31.991.241,-;
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum

disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca pada satker – satker berikut:

Kode	Nama Satker	Kas BP	Kas TUP	Total
013.05.404971	Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto	4.455.341		4.455.341
013.05.497809	Rumah Tahanan Negara Manado	4.874.900		4.874.900
013.05.404271	Lembaga Pemasyarakatan Cipinang		773.000	773.000
013.05.407653	Rumah Tahanan Negara Raba/Bima		21.888.000	21.888.000
TOTAL		9.330.241	22.661.000	31.991.241

Adanya sisa Kas di BP pada satker Lapas Purwokerto dan Rutan Manado terjadi karena kealpaan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan kewajibannya untuk menyetorkan sisa UP tersebut ke kas negara sebelum batas waktu yang ditentukan akibat jabatan rangkap yang dipikul oleh Bendahara Pengeluaran tersebut. Selain sebagai Bendahara Pengeluaran, mereka juga harus melaksanakan tugas untuk menyusun laporan keuangan, sebagai operator saiba dan / atau penjagaan karena kurangnya personil pada satker ybs.

Adanya sisa Kas TUP pada Lapas Cipinang dan Rutan Raba / Bima terjadi karena keterlambatan perhitungan sisa uang kegiatan yang dibiayai oleh dana TUP.

2. Terdapatnya penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan uang APBN pada Bapas Klas II Mataram dan Rutan Klas II B Selong.

a. Bapas Klas II Mataram

Rekening Bank Mandiri atas nama Firman Akbar dengan nomor rekening 1610002783244, merupakan rekening penampungan sementara dari hasil pemotongan tunjangan kinerja para pegawai yang mempunyai pinjaman pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum disetorkan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut.

b. Rutan Klas IIB Selong

Penggunaan rekening penampungan disebabkan pihak bank tidak berkenan mendistribusikan pembayaran tunjangan kinerja ke masing-masing pegawai dari rekening Giro bendahara pengeluaran ke masing-masing rekening pegawai, karena adanya potongan internal yang dipotong dari tunjangan kinerja pegawai setiap bulannya. Potongan internal tersebut terdiri dari potongan

koperasi pengayoman rutan, potongan kois, potongan DWP. Sejak tahun 2011 bendahara pengeluaran berinisiatif menggunakan rekening penampungan atas nama pribadi yang dipergunakan untuk menerima/menampung dana tunjangan kinerja setiap bulannya setelah dipindahkan dari rekening giro bendahara pengeluaran menggunakan cek yang ditanda tangani oleh Kepala Rutan. Rekening tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran tunjangan kinerja ke masing-masing rekening pegawai setelah dikurangi potongan-potongan internal dan hal ini atas sepengetahuan kepala Rutan Selong.

3. Terdapat pembayaran oleh bendahara/BPP Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang tidak melalui verifikasi yang memadai. Dalam pengelolaan APBN pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Bagian Keuangan Direktorat Jenderal pemasarakatan menggunakan aplikasi SIKPAS (Sistem informasi keuangan Pemasarakatan).

Aplikasi SIKPAS merupakan aplikasi internal pada Ditjen Pemasarakatan yang membantu para pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan dalam proses pengajuan tagihan UP dan LS sebelum ke KPPN. Adapun prosesnya melalui beberapa tahap verifikasi mulai dari PPK, ULPSPM, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran. Perihal terdapat 19 transaksi UP dan 72 transaksi LS yang tidak melakukan upload file namun tetap diverifikasi hingga terjadi pencairan, kami yakinkan bahwa transaksi tersebut berkas fisiknya lengkap dan memang para pengelola kegiatan tidak mengupload ke aplikasi SIKPAS.

Untuk mengantisipasi kekurangan yang berkaitan dengan upload data seperti yang terjadi di tahun 2017 maka pada tahun anggaran 2018 kami telah melakukan antisipasi pada Aplikasi SIKPAS melalui system blocking proses pembuatan kuitansi penagihan bagi para pelaksana kegiatan yang belum melakukan upload berkas tagihan terkait.

Pengelolaan Barang Persediaan Amunisi dan Barang Konsumsi Belum Memadai

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2017 pada LHP Nomor: 15a/HP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, ditemukan bahwa :

1. *Stock opname* pada beberapa satker pemasyarakatan yang dijadikan uji petik pada Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat hanya terbatas pada persediaan yang ada di gudang saja atau bahkan ada satker yang tidak pernah melakukan *opname* fisik. Jika terdapat BA *stock opname* pada akhir tahun, maka BA tersebut dibuat bukan berdasarkan inventaris fisik, namun disesuaikan dengan saldo persediaan yang ada di aplikasi persediaan.
2. Pengurusan barang persediaan berupa amunisi, gembok dan alat pengamanan lainnya berada dalam penguasaan Kepala Pengamanan Lapas/Rutan, namun tidak ada koordinasi dengan petugas pengurus barang terkait kondisi dan status persediaan yang berada di dalam penguasaannya.
3. Persediaan berupa obat – obatan yang disimpan oleh Poliklinik tidak pernah di catat oleh pengurus barang, sehingga persediaan belum menunjukkan kondisi sebenarnya.
4. Belum dilakukannya pencatatan dan pengungkapan yang memadai atas barang persediaan hasil kegiatan industri di dalam lapas, karena belum adanya aturan internal yang mengatur mengenai pengelolaan dan pencatatan persediaan tersebut.

Tanggapan intansi atas Temuan Pemeriksaan tersebut adalah bahwa Ditjen PAS akan melakukan pengawasan dan pengendalian melalui SOP serta mewajibkan satker membuat buku manual persediaan. Terkait pencatatan persediaan hasil kegiatan industri di dalam lapas / rutan, maka Ditjen PAS akan melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait kodifikasi barang dan konsep penata usahaan persediaan terbaik yang akan diterapkan nantinya.

Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Yang Tidak Sesuai Dengan Progress Fisik.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun Anggaran 2017 pada LHP Nomor: 15c/HP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, ditemukan bahwa:

1. Pengadaan Alat Screening 3D system sebesar Rp. 198.965.085.000 tidak didukung asuransi dan pekerjaan instalasi dilaksanakan tidak sesuai kontrak.

Tanggapan instansi atas Temuan Pemeriksaan tersebut adalah bahwa Pihak penyedia, PT.USI telah melakukan pembayaran denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 228.723.000,- pada tanggal 24 April 2018 dengan NTPN 34C8E8B0Q10S6P49.

Terkait lapas aceh yang rusak dikarenakan kerusakan PT.USI akan memperbaiki alat Tersebut dan akan memberikan asuransi terhadap barang Screening 3D System.

2. Pembayaran pekerjaan pembangunan lapas khusus high risk karanganyar nusakambangan pilot project tahap II (APBN-P) Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan tidak sesuai progres fisik.

Tanggapan instansi atas Temuan Pemeriksaan tersebut adalah bahwa berdasarkan hasil temuan diketahui progress pekerjaan mencapai 57,35%. Pada saat wawancara antara BPK, PPK, PT MPN telah disepakati bahwa progress pekerjaan sebesar 74% dikarenakan diperhitungkan juga progres terkait material on site nya, dimohon sekiranya pengenaan denda keterlambatan setelah menghitung progres fisik di 74%.

PT. MPN telah melakukan pembayaran atas denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.463.044.038,- pada tanggal 18 Mei 2018 dengan NTPN 9B85A61NTUH9416.



Sehubungan dengan Temuan Pemeriksaan tersebut diatas BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar mengintruksikan Dirjen Pemasyarakatan untuk :

1. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk lebih optimal dalam mengawasi pengadaan barang / jasa;
2. Memberikan sanksi kepada:
 - PPK Pengadaan Alat *Screening 3D System* dan PPK Pembangunan Lapas Khusus *High Risk* Karang Anyar Nusakambangan yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - Melalui PPK memerintahkan PT USI untuk menyediakan asuransi sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, kerusakan kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga sesuai kontrak.

Pembayaran Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Tidak Sesuai Progress Fisik Dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp.197,63 Juta.

- 1) Pembayaran Kegiatan Pengadaan Belanja Barang berupa pengadaan alat makan minum, alat test urine, gembok dan matras yang tidak Sesuai Progress Fisik Senilai Rp.84.487.577.984,- dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 183.723.897,99,-
Pembayaran atas ke empat paket pekerjaan diatas didasarkan kepada BAST 100 % yang tanggalnya mendahului tanggal batas waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, dan keempat barang tersebut terlambat diterima oleh satker. Keterangan keterlambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengadaan	Jumlah Satker Terlambat Menerima	Jumlah Barang Terlambat Diterima	Total Nilai Keterlambatan
1.	Pengadaan Alat Makan - Minum	61	14.590	40.508.184,04
2	Pengadaan Alat Test Urine	37	14.020	52.094.551,25
3	Pengadaan Gembok	16 Kanwil & 1 Ditjenpas	15.395	80.312.256,70
4	Pengadaan matras	7	1.350	10.808.906,00
Total			45.355	183.723.897,99

Komentar Instansi:

Menindaklanjuti hasil konsep temuan BPK, terkait Hal Tersebut maka Para Penyedia Pengadaan Barang Alat Makan Minum, Pengadaan Alat Test Urine, Pengadaan Gembok, dan Pengadaan Matras mengakui akan keterlambatannya dikarena proses teknis pengiriman yang keluar dari jadwal. Dan oleh karena itu ke Empat penyedia ini menyanggupi membayar denda sesuai hasil temuan BPK senilai Total Rp. 183.723.897,99,-

Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah melakukan penarikan atas denda keterlambatan tersebut dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengadaan	Jumlah Pembayaran	Tgl Pembayaran	NTPN
1.	Pengadaan Alat Makan - Minum	40.508.184	16-Apr-18	82DAC4R03JJBT08
2	Pengadaan Alat Test Urine	52.094.552	16-Apr-18	1C3AE4UJQ6EQFV08
3	Pengadaan Gembok	80.312.257	19-Apr-18	0557E4EHE7LC4G9I
4	Pengadaan matras	10.808.906	17-Apr-18	0B7651RKLTRIFIOO
Total		183.723.899		

- 2) BAST pembayaran kegiatan paket pengadaan langsung berupa buku agenda Direktorat Jenderal Pemasarakatan senilai Rp 198.651.250,- yang tidak sesuai Kondisi Senyatanya. Pembayaran atas paket pekerjaan ini dilakukan tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Barang, dan mengalami keterlambatan selama 77 hari dengan denda yang harus dibayarkan sebesar Rp.13.905.622,50,-

Komentar Instansi:

Keterlambatan ini disebabkan karena terlambatnya pihak Ditjenpas di dalam menyampaikan konten agenda tersebut kepada pihak percetakan. Denda atas keterlambatan pengadaan buku agenda ini

telah disetorkan ke kas negara sejumlah Rp 13.905.623,- pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN 9B5B 747J S85J T5H2.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan HAM Tidak Sesuai Ketentuan Yang Terdiri Dari :

- a. Kelebihan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp.16.707.600,-
- b. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas Dalam Negeri sebesar Rp.4.084.200,-

Komentar Instansi:

- a. Kelebihan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri terjadi karena ketidakpahaman pelaksana kegiatan akan peraturan dalam pemberian uang harian perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana diatur di dalam PMK 164/PMK.05/2015 yang telah diubah dengan PMK Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dinas Luar Negeri. Seluruh Kelebihan atas pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar negeri telah disetorkan seluruhnya ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tujuan	Jumlah	Tgl Setor	NTPN
1	Ma'mun	Nadi, Fiji	2.566.200	18-Apr	6BA1C3RH9C6EVBH2
2	Wahidin	Nadi, Fiji	1.723.800	18-Apr	AA6CB3RGR3RAI2H2
3	Aliandra Harahap	Nadi, Fiji	1.723.800	18-Apr	6D1D53RG59BIQFH2
4	Dedy Edward Saputra	Nadi, Fiji	1.723.800	18-Apr	9D3D13REAPCTEEH2
5	Asminan Mirza Z	brisbane	4.563.000	18-Apr	0EA243RGGKIFPUH2
6	Sutrisman		2.363.400	18-Apr	D446B3RHK4PAF8H2
7	Sigit Budiyanto		2.043.600	18-Apr	286EE3RF12M1OTH2
Total			16.707.600		

- b. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas Dalam Negeri disebabkan oleh tiket yang dipesankan melalui Biro Travel yang mengambil keuntungan diatas keuntungan wajar sebesar 10%. Keseluruhan kelebihan pembayaran ini telah ditarik dan disetorkn ke negara dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama	Jumlah	Tgl Setor	NTPN
1	Endang Lintang Hardiman	402.000	18-Apr	2DECF3UHJF8D2H2
2	Irhamuddin	1.496.000	18-Apr	815223A3BB1OQPH9
3	Kusbiantoro	349.000	18-Apr	293373UIN8P8FSH2
4	Maulidi Hilal	203.500	18-Apr	3E41A3UJRU864AH2
5	Sugito	454.000	18-Apr	3DE703UI6V7US4H2
6	Ahmad Syafei	344.300	18-Apr	0E5733UM3H9SUGH2
7	Mat Basir, SH	171.600	18-Apr	65A6B3GC1CM7FHOI
8	Titiek Daryani	319.500	18-Apr	F529B3UGVCKPPSH2
9	Toddy Yudho	344.300	18-Apr	5558B3UL79TKRNH2
Total		4.084.200		

Pembayaran Imbalan Rapat Dalam Kantor Yang Tidak Sesuai Ketentuan, Kelebihan Pembayaran Imbalan Rapat Dalam Kantor Sebesar Rp.50.339.500,00 Atas Rapat Yang Diselenggarakan Tidak Sesuai Waktunya

Komentar Instansi:

Atas imbalan Rapat dalam Kantor berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan PN, Inpres pada 11 Desember 2017 sesuai SP No. PAS1.KP.04.01 – 2920, yang tidak menghadirkan eselon I / II Lainnya / Masyarakat telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp 5.327.500,- pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN 3E0C63PK6F8F4MH2.
2. Penyusunan Petunjuk pelaksanaan JFT PK & APK pd tgl 1 November 2017 sesuai SP PAS1.KP.04.01-2906 tanggal 1 november 2017 yang memperoleh pembayaran ganda atas kegiatan RDK di tanggal yang sama telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp 1.330.000,- pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN 857FC3PSQUQH4SH2.
3. Kegiatan penyempurnaan Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan pada tanggal 2 sd 3 Februari 2017 sesuai SP Nomor PAS1.KP.04.01 – 837, atas pegawai yang cuti telah disetorkan ke negara sebesar Rp.1.500.000,- pada tanggal 19 April 2018 dengan NTPN 75BD64DPTAB9ID9I.
4. Kegiatan penyempurnaan Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan pada tanggal 25 Januari 2017 sesuai SP Nomor PAS1.KP.04.01 – 225



- tanggal 24 Januari 2017, atas pegawai yang menerima pembayaran ganda telah disetorkan ke negara sebesar Rp 300.000,- pada tanggal 19 April 2018 dengan NTPN 144FE4DQ6B20JK9I.
5. Penyusunan RKAKL Ditjenpas, Divpas dan UPT Pemasyarakatan pada tanggal 30 sd 31 Mei 2017 sesuai SP Nomor PAS1.KP.04.01 – 1379 tanggal 29 Mei 2017, atas pegawai yang cuti telah disetorkan ke negara sebesar Rp 665.000,- pada tanggal 19 April 2018 dengan NTPN EC2DF4DQE6GKLN9I.
 6. Penyusunan RKAKL Ditjenpas, Divpas dan UPT Pemasyarakatan pada tanggal 14 Februari 2017 sesuai SP Nomor PAS1.KP.04.01 – 838, atas pegawai yang sedang dinas luar telah disetorkan ke negara sebesar Rp 600.000,- pada tanggal 19 April 2018 dengan NTPN DB95E4DQMB99FJ9I.
 7. Penyusunan RKAKL Ditjenpas, Divpas dan UPT Pemasyarakatan pada tanggal 20 Januari 2017 sesuai SP Nomor PAS1.KP.04.01 – 56 tanggal 20 Januari 2017, atas pegawai yang pulang cepat telah disetorkan ke negara sebesar Rp 300.000,- pada tanggal 19 April 2018 dengan NTPN CF7C04DR21E8MD9I.
 8. Evaluasi SBK 2017 dan Persiapan Penyusunan SBK 2018 pada tanggal 6 april 2017 sesuai dgn SP No. PAS1.KP.04.01-1172 atas pegawai yang dinas luar sebesar Rp. 855.000,- telah disetorkan ke negara seluruhnya pada tanggal 19 April 2018 dengan NTPN 5252E4DRCOD2MO9I.
 9. Koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan PN., Inpres tanggal 15 Maret 2017 sesuai SP No. PAS1. KP.04.01-1100 tanggal 15 Maret 2017 atas atas pegawai dinas luar dan cuti sebesar Rp.795.000,- telah disetorkan ke negara seluruhnya pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN 02E9B3PKLA7L1HH2.
 10. Rangka Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Prioritas Nasional, Inpres pada tanggal 13 Maret 2017 sesuai dengan SP nomor PAS1.KP.04.01- 941 atas pegawai cuti sebesar Rp

- 300.000,- telah disetorkan ke negara seluruhnya pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN 3F0FC3PKBMSSGOH2
11. Kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemasaran hasil kegiatan industri di lapas pada tanggal 24 Juli 2017 dengan nomor SP PAS1.KP.04.01 - 331 tanggal 21 Juli 2017 atas pelaksanaan RDK tanpa kehadiran eselon 1/II lain atau masyarakat sebesar Rp.6.000.000,- telah disetorkan ke negara seluruhnya pada tanggal 26 April 2018 dengan NTPN AB08B7UC1L7AEKL2.
 12. Penyusunan Modul pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi narapidana tindak pidana terorisme yang dilaksanakan pada tanggal 25 ,26,28 April dan 2 Mei 2017 sesuai SP No. PAS1.KP.04.01-1220 tanggal 20 April 2017 atas pelaksanaan RDK tanpa kehadiran eselon 1/II lain atau masyarakat sebesar total Rp 21.345.000,-

Komentar Instansi:

Pelaksanaan RDK pada tanggal 26 April dan 2 Mei 2017 dihadiri oleh pihak INSET sebagai Narasumber, hal ini sesuai dengan SK penunjukkan Sdr Prof Dr. Ahmad Syafei Mufied sebagai narasumber nomor PAS1.KU.01.04-216 Tahun 2017 tanggal 26 Maret 2017 (terlampir). Pada konfirmasi awal bukti kehadiran dan SK narasumber tidak disertakan karena merupakan bagian dari dokumen tagihan ybs sebagai narsum, bukan sebagai peserta RDK.

Adapun total pengembalian belanja atas pemberian Uang Imbalan rapat dalam kantor atas pegawai yang pulang cepat pada tanggal 26 April 2017 setelah dilakukan konfirmasi ulang adalah sbb:

no	nama	Jumlah	Keterangan
1	Husnal Fikri	300.000	Dinas Luar
2	Wenny Maria	300.000	Dinas Luar
3	Achmad Fauzi	300.000	Diklat
4.	Wardiansyah	300.000	Tugas Luar
5.	Neneng Sumiati	300.000	Cuti
Total		1.500.000	

Adapun total pengembalian belanja atas pemberian Uang Imbalan rapat dalam kantor atas pegawai yang diklat di tanggal 2 Mei 2017 adalah sbb

no	nama	Jumlah	Keterangan
1	Achmad Fauzi	300.000	Diklat
Total		300.000	

Untuk pelaksanaan RDK pada tanggal 25 April dan 28 April 2017 dilaksanakan dengan mengundang staff fungsional umum dari bagian kepegawaian dan tanpa kehadiran eselon 1/II lain atau masyarakat dengan Total pengembalian untuk RDK tertanggal 25 April 2017 adalah sebesar Rp. 4.800.000,- dan untuk tanggal 28 April 2017 sebesar Rp.4.800.000,-.

Keseluruhan total pengembalian adalah sebesar Rp. 11.400.000,- telah disetorkan ke negara seluruhnya pada tanggal 26 April 2018 dengan NTPN 0B1197U6KFRG8PL2.

13. Penyus. Bukped. Remisi Online di Ruang Rapat Perpus lantai 2 Ditjenpas pada tanggal 9 Maret 2017 sesuai SP no. PAS1.KP.04.01-910 tanggal 8 Maret 2017 pelaksanaan RDK tanpa kehadiran eselon 1/II lain atau masyarakat sebesar Rp.3.600.000,-

Komentar Instansi

Pelaksanaan RDK pada tanggal 9 Maret 2017 dihadiri oleh pihak PT. Bahtera Informatika sebagai Narasumber, hal ini sesuai dengan SK penunjukkan Sdr Chenri Jano dari PT.Bahtera Informatika sebagai narasumber nomor PAS1.20.DL.06.02 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 (terlampir). Pada konfirmasi awal bukti kehadiran dan SK narasumber tidak disertakan karena merupakan bagian dari dokumen tagihan ybs sebagai narasumber, bukan sebagai peserta RDK. Namun berdasarkan absensi peserta RDK diperoleh informasi bahwa beberapa pegawai pulang cepat, sehingga untuk imbalan uang rapat dalam kantor yang harus dikembalikan pada RDK tanggal 9 Maret 2017 (semula akan dilaksanakan pada 27 Februari 2017) adalah sebagai berikut:

no	nama	Jumlah	Keterangan
1	Ilham Djaya	300.000	Pulang Cepat
2	Nida Ropita	300.000	Pulang Cepat
3	Dwi Fuad Jamali	300.000	Pulang Cepat
4.	Simon Halomoan	300.000	Pulang Cepat
Total		1.200.000	

Kelebihan pembayaran imbalan rapat dalam kantor tersebut sebesar Rp.1.200.000,- telah disetorkan ke negara seluruhnya pada tanggal 26 April 2018 dengan NTPN A04B57U73K4MTDL2.

14. Penyus. Bukped. Remisi Online di Ruang Rapat Perpus lantai 2 Ditjenpas pada tanggal 9 Februari 2017 sesuai SP no. PAS1.KP.04.01-259 tanggal 9 Februari 2017 pelaksanaan RDK tanpa kehadiran eselon 1/II lain atau masyarakat sebesar Rp.3.600.000,-

Komentar Instansi

Pelaksanaan RDK pada tanggal 9 Maret 2017 dihadiri oleh pihak PT. Bahtera Informatika sebagai Narasumber, hal ini sesuai dengan SK penunjukkan Sdr Chenri Jano sebagai narasumber nomor PAS1.20.DL.06.02 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 (terlampir). Pada konfirmasi awal bukti kehadiran dan SK narasumber tidak disertakan karena merupakan bagian dari dokumen tagihan ybs sebagai narsum, bukan sebagai peserta RDK.

Namun berdasarkan absensi peserta RDK diperoleh informasi bahwa terdapat pegawai yang sedang menjalankan dinas luar, sehingga untuk imbalan uang rapat dalam kantor yang harus dikembalikan pada RDK tanggal 9 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

no	nama	Jumlah	Keterangan
1	Catur Budi Fayatin	300.000	Dinas Luar
Total		300.000	

Kelebihan pembayaran imbalan rapat dalam kantor tersebut sebesar Rp.300.000,- telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 26 April 2017 dengan NTPN 5CD547U8AK3QG3L2.

15. Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan PB Online pada tanggal 8 Maret 2017 sesuai SP no. PAS1.KP.04.01-909 tanggal 6 Maret 2017 pelaksanaan RDK tanpa kehadiran eselon 1/II lain atau masyarakat sebesar Rp.3.600.000,- telah disetorkan ke negara seluruhnya pada tanggal 26 April 2018 dengan NTPN 6F4047U9OJJFTHL2.
16. Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan PB Online pada tanggal 2 Februari 2017 sesuai SP no. PAS1.KP.04.01-258 tanggal 1 Februari 2017 pelaksanaan RDK tanpa kehadiran eselon 1/II lain atau

- masyarakat sebesar Rp.3.600.000,- telah disetorkan ke negara seluruhnya pada tanggal 26 April 2018 dengan NTPN 0DE7A7UH99KMGKL2.
17. Penyusunan Modul Standar Pelayanan Bantuan Hukum tanggal 27 Maret 2017 sesuai SP No. PAS1.KP.04.01-977 tanggal 21 Maret 2017 atas pegawai pulang cepat an Djuriah sebesar Rp.332.500,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 20 April 2018 dengan NTPN 6E11E5BM3KAU4E22.
18. Penyusunan Standar Registrasi Tahanan tanggal 31 Mei 2017 sesuai SP No. PAS1.KP.04.01 -1325 tanggal 24 Mei 2017 atas pegawai pulang cepat, sakit, cuti dan dinas luar sebesar Rp.5.145.000,-
- Komentar instansi
- Pada konfirmasi awal, Bagian Tata Usaha Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran menyampaikan bahwa RDK Penyusunan Standar Registrasi Tahanan berubah waktu pelaksanaan dari tanggal 31 Mei maju menjadi tanggal 10 Mei 2017, sementara pelaksanaan kegiatan RDK sebenarnya adalah pada tanggal 24 Juli 2017 sesuai dengan nota dinas direktur nomor PAS4.KU.01.02-213 tanggal 24 Juli 2017 mengenai perubahan tanggal pelaksanaan dan nama peserta kegiatan. Hal ini juga dikuatkan dengan penjelasan dari penanggung jawab kegiatan dan absensi dari pihak kepegawaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan dokumen data dukung, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana kegiatan telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan RDK.
19. Penyusunan Standar Registrasi Tahanan tgl 10 Mei 2017 sesuai SP no. PAS1.KP.04.01-1177 tanggal 3 Mei 2017 atas nama pegawai Abu Zeid yang sedang melaksanakan tugas dinas luar digantikan kehadirannya oleh Bayu Aji sesuai Nota Dinas no PAS4.KU.01.02-162 tanggal 10 Mei 2017. (terlampir)
20. Penyusunan Standar Registrasi Tahanan tgl 17 April 2017 sesuai SP No PAS1. KP.04.01-1042 tanggal 3 April 2017 atas pegawai pulang cepat sebesar Rp.4.335.000,-

Komentar instansi

Pelaksanaan RDK Penyusunan Standar Registrasi Tahanan sesuai SP No PAS1. KP.04.01-1042 tanggal 3 April 2017 mengalami perubahan waktu pelaksanaan dari tanggal 17 April 2017 menjadi tanggal 28 April 2017, sesuai dengan nota dinas direktur nomor PAS4.KU.01.02-133 tanggal 24 April 2017 mengenai perubahan tanggal pelaksanaan dan nama peserta kegiatan. Hal ini juga dikuatkan dengan penjelasan dari penanggung jawab kegiatan dan absensi dari pihak kepegawaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan dokumen data dukung, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana kegiatan telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan RDK.

21. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang rehabilitasi WBP dan Tahanan penyalahgunaan narkoba di UPT Pemasyarakatan pada tanggal 27 September 2017 atas RDK yang dilakukan pada jam kerja sebesar Rp. 4.770.000,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN 878703UHG145KVH2.
22. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang rehabilitasi WBP dan Tahanan penyalahgunaan narkoba di UPT Pemasyarakatan pada tanggal 20 Juni 2017 atas RDK yang dilakukan pada jam kerja sebesar total Rp.5.670.000,- telah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:
Setoran I sebanyak Rp.5.385.000,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN B13EA3UIIT2TB5H2.
Setoran II sebanyak Rp 285.000,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 19 April 2018 dengan NTPN F80BA4TF6639PP9I.
23. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang rehabilitasi WBP dan Tahanan penyalahgunaan narkoba di UPT Pemasyarakatan pada tanggal 16 Juni 2017 atas RDK yang dilakukan pada jam kerja sebesar Rp.5.610.000,- telah disetorkan

- seluruhnya ke kas negara pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN FACB03UO9V3GPIH2.
24. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang rehabilitasi WBP dan Tahanan penyalahgunaan narkoba di UPT Pemasarakatan pada tanggal 19 Juni 2017 atas RDK yang dilakukan pada jam kerja sebesar Rp.5.640.000,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN 294253UNBMH3GAH2.
25. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang rehabilitasi WBP dan Tahanan penyalahgunaan narkoba di UPT Pemasarakatan pada tanggal 15 Juni 2017 atas RDK yang dilakukan pada jam kerja sebesar Rp.5.610.000,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN 76FF43UJT3G93EH2.
26. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang rehabilitasi WBP dan Tahanan penyalahgunaan narkoba di UPT Pemasarakatan pada tanggal 2 Juni 2017 atas RDK yang dilakukan pada jam kerja sebesar total Rp.5.655.000,-
Setoran I sebesar Rp.5.145.000,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN CC2513UPF76FTIH2.
Setoran II sebesar Rp.510.000,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN BE8614T835P64D9I.
27. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang rehabilitasi WBP dan Tahanan penyalahgunaan narkoba di UPT Pemasarakatan pada tanggal 28 September 2017 atas RDK yang dilakukan pada jam kerja sebesar Rp.3.897.000,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN 242BA3UQ39Q36FH2.
28. Penyusunan Standard Aplikasi Database Anak di LPAS/LPKA pada tanggal 22 September 2017 sesuai SP No. PAS1.KP.04.01-1810

tanggal 20 September 2017 atas pegawai peserta RDK yang dinas luar dan pulang cepat sebesar Rp.1.977.500,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN 206C53UTATABOJH2.

29. Penyusunan Standard Aplikasi Database Anak di LPAS/LPKA pada tanggal 16 Mei 2017 sesuai SP No. PAS1.KP.04.01-1273 tanggal 15 Mei 2017 atas pegawai peserta RDK yang dinas luar dan pulang cepat sebesar Rp.332.500,- telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 18 April 2018 dengan NTPN EB2223UU7E0KJ5H2.

Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Pada Ditjen Pemasyarakatan Tidak Sesuai Progress Fisik.

1. Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan *Steamer* pada Ditjen Pemasyarakatan per tanggal 31 Desember 2017 Tidak Sesuai *Progress Fisik* yang mengakibatkan:
- *Steamer* tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan oleh masing-masing Sakter penerima secara tepat waktu;
 - Denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia sebesar Rp.342.628.345,71; dan
 - Penyajian akun KDP dalam Neraca Kemenkumham Tahun 2017 (*unaudited*) *Steamer* lebih saji sebesar Rp.12.271.256.140,00.

Komentar Instansi:

- Penyajian KDP pada Laporan keuangan Ditjen Pemasyarakatan TA 2017 telah dikoreksi menjadi Uang Muka Belanja Modal, sehingga terjadi perpindahan nilai aset tetap menjadi aset lancar sebesar Rp.12.271.256.140,-.
- Menindaklanjuti hasil konsep temuan BPK, terkait hal tersebut Penyedia yaitu PT.Era Budi Lestari mengakui keterlambatannya dikarenakan proses teknis pengiriman yang keluar dari jadwal. Oleh karena itu PT. Era Budi Lestari telah melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp.342.628.345,71 pada tanggal 27 April 2018 dengan NTPN 8CFF05N4NLP3SHDO.

2. Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Senjata Gas Air Mata pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 31 Desember 2017 Tidak Sesuai Dengan Prestasi Fisik dan Terdapat Keterlambatan Pengiriman ke Satuan Kerja Penerima yang mengakibatkan:
 - Denda keterlambatan terhadap barang yang terlambat diserahkan sesuai dengan Perjanjian Kontrak sebesar Rp1.031.625.000,00;
 - Kemenkumham dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan mengganggu resiko atas penyelesaian pekerjaan Senjata Gas Air Mata sebesar Rp32.513.673.600,00
 - Senjata Gas Air Mata sebesar Rp33.425.409.600,00 tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan secara tepat waktu oleh masing-masing Satker penerima; dan
 - Penyajian Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Kemenkumham Tahun 2017 (*unaudited*) Senjata Gas Air Mata lebih saji sebesar Rp.33.425.409.600,00

Komentar Instansi:

- Penyajian KDP untuk pengadaan senjata gas air mata ini pada Laporan keuangan Ditjen Pemasyarakatan TA 2017 telah dikoreksi menjadi Uang Muka Belanja Modal, sehingga terjadi perpindahan nilai aset tetap menjadi aset lancar sebesar Rp.33.425.409.600,-
- Menindaklanjuti hasil konsep temuan BPK, penyedia PT. Duta Berlian Nusantara memberi pendapat bahwa Terjadinya keterlambatan ini disebabkan oleh adanya 2 perizinan yang tiba-tiba dipersyaratkan sebagai persyaratan masuknya senjata dan amunisi ke Indonesia dimana hal tersebut terjadi dikarenakan pernyataan Panglima TNI dan dilanjutkan dengan pernyataan dari Menteri Pertahanan RI pada tanggal 3 Oktober 2017 yang menegaskan bahwa izin pengadaan senjata yang dilakukan lembaga militer atau non militer harus melalui Kementerian Pertahanan RI, Adapun perizinan tersebut berupa :

- a. Surat Persetujuan Pengeluaran Senjata dari Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI dan;
- b. Penayangan surat izin Impor dari Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri di Portal Indonesia National Single Window (INSW).

Perlu diinformasikan juga bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi di Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kemenhan RI mengenai surat tersebut dan kesimpangsiuran tersebut baru berakhir setelah penggantian Panglima TNI pada 8 Desember 2017. Pengeluaran Surat Persetujuan Pengeluaran Senjata tertanggal 22 Desember 2017 namun pada kenyataannya Surat tersebut baru diterima PT. Fajar Indah pada tanggal 29 Desember 2017 untuk selanjutnya PT. Fajar Indah melanjutkan pengurusan Surat Izin Pengeluaran Barang ke BAIS TNI yang akhirnya diterima oleh Pihak PT. Fajar Indah tanggal 10 Januari 2018 (Surat BAIS tertanggal 22 Desember 2017).

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PT. Fajar Indah mengajukan penayangan Surat Izin Impor di Baintelkam Mabes Polri yang baru berhasil di tayangkan pada tanggal 16 Januari 2018, Kemudian PT. Fajar Indah melakukan persiapan pengeluaran barang di Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, pihak Bea Cukai mempersyaratkan adanya surat Perizinan Pengawasan Barang dari Baintelkam Mabes Polri yang oleh PT. Fajar Indah diajukan pada tanggal 26 Januari 2018 untuk meminta pengawasan dilakukan pada tanggal 29 – 30 Januari 2018. Pada tanggal 29 Januari 2018 barang sampai di gudang PT. Fajar Indah dan langsung dipersiapkan untuk dikirim ke Satker Penerima. Jadi keterlambatan minimal 31 hari sejak 30 Desember 2017 sampai tanggal 30 Januari 2018 disebabkan adanya 2 perizinan yang tiba-tiba muncul dengan melibatkan Direktorat Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI dan portal INSW yang disebabkan oleh pernyataan Panglima TNI saat itu ditambah

dengan pernyataan Menteri Pertahanan RI yang menyebabkan kesimpangsiuran informasi bahkan di internal Dirjen Kekuatan dan Pertahanan Kemenhan RI itu sendiri.

Atas keterlambatan pengiriman barang tersebut, telah dilakukan penyeteron denda keterlamabatan ke kas negara sebesar Rp.241.311.525,- pada tanggal 14 Mei 2018 dengan NTPN 0373C34IT6F88R18.

3. Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Senjata Bubuk Merica Pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan per 31 Desember 2017 Tidak Sesuai Prestasi Fisik dan Terdapat Keterlambatan Pengiriman ke Satuan Kerja Penerima yang mengakibatkan:

- Denda Keterlambatan yang tidak dikenakan terhadap barang yang belum diserahkan sesuai dengan kontrak minimal sebesar Rp1.036.187.697,60 ($3,1\% \times \text{Rp}33.425.409.600,00$);
- Kemenkumham dalam hal ini Ditjen Pemasarakatan menanggung risiko atas penyelesaian pekerjaan Senjata Bubuk Merica sebesar Rp28.874.313.768,00;
- Senjata bubuk Merica sebesar Rp29.684.201.448,00 belum dapat dimanfaatkan dan difungsikan secara tepat waktu oleh masing-masing satker penerima; dan
- Penyajian akun KDP dalam Neraca Kemenkumham Tahun 2017 (*unaudited*) lebih saji sebesar Rp29.684.201.448,00 dan akun Uang Muka Belanja Modal kurang saji sebesar Rp.29.684.201.448,00.

Komentar Instasi:

- Penyajian KDP untuk pengadaan senjata bubuk merica ini pada Laporan keuangan Ditjen Pemasarakatan TA 2017 telah dikoreksi menjadi Uang Muka Belanja Modal, sehingga terjadi perpindahan nilai aset tetap menjadi aset lancar sebesar Rp.29.684.201.448,00.
- Menindaklanjuti hasil konsep temuan BPK, penyedia PT. Bapras Putra Tama memberi pendapat bahwa pernyataan amunisi yang

- telah tiba di negara Turki tidak langsung dikirim ke Indonesia tetapi menunggu barang lain untuk menghemat biaya pengiriman sehingga barang baru tiba pada tanggal 2 Februari 2018 adalah tidak tepat. Adapun alasan amunisi tersebut tidak langsung dikirim ke Indonesia adalah berdasarkan kepada surat FLIGHT CLEARANCE FOR INDONESIAN TERRITORY dari Kementerian Perhubungan C.q Direktorat Angkutan Udara dengan nomor surat : 00919/3001/NONSCHED-INT/2018 yang menyatakan memberi izin mendarat untuk pesawat yang membawa barang dimaksud pada tanggal 01 februari 2018. Adapun pengeluaran surat ini membutuhkan persetujuan dari pihak Kementerian Luar Negeri, Markas Besar TNI serta Kementerian Perhubungan.
- Sehingga Kondisi yang menunjukkan keterlambatan minimal 35 hari sejak 30 Desember 2017 sampai tanggal 2 Februari 2018 adalah diakibatkan adanya kesimpangsiuran peraturan yang disebabkan hal yang sama dengan kasus Senjata Bubuk Merica.
4. Ketidaksesuaian Volume Fisik Pekerjaan yang Terpasang atas Paket Pekerjaan Pengadaan Genset pada Direktorat Jenderal Permasalahatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.14.950.000,00 dan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp.43.296.600,00 yang mengakibatkan:
- Genset senilai Rp3.157.000.000,00 (Rp451.000.000,00 x 7 unit) tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan secara tepat waktu;
 - Kelebihan pembayaran kepada PT SMM sebesar Rp14.950.000,00; dan
 - Indikasi denda keterlambatan atas penyelesaian yang belum dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian Rp.43.296.000,00.

Komentar Instansi:

- Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah melakukan penarikan kembali atas kelebihan pembayaran kepada PT.SMM sebesar



Rp.14.950.000,00 dan telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 16 April 2018 dengan NTPN 8D452535JQP5608.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PT.SMM sebesar Rp.43.296.000,00 dan telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 16 April 2018 dengan NTPN 6C3DA521E2ONRC08.

Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palangkaraya TA 2017

Kekurangan volume fisik pekerjaan yang terpasang atas paket pekerjaan pembangunan gedung kantor utama, tembok keliling dan ruang dapur pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palangkaraya TA 2017 yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada PT. Dua Bersama atas kekurangan volume tersebut sebesar Rp.296.715.821,80,

Komentar Instansi:

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palangkaraya telah menarik kelebihan atas pembayaran kepada PT.Dua Bersama sebesar Rp 296.715.821,80 dan telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 27 Maret 2018 dengan NTPN nomor 3616C03LJ5M0P35D.

Kekurangan Pengenaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Renovasi Gedung Dan Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh TA 2017

Kekurangan Pengenaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.28.823.069,14,-

Komentar Instansi:

LPKA Banda Aceh telah mengenakan denda dimaksud dan disetorkan ke negara pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 28.823.100,- dengan NTPN nomor 9E8F18RI9MCSMALG.

Volume Pekerjaan Pembangunan Dan Renovasi Gedung Dan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang

Volume Pekerjaan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang Tahun Anggaran 2017 Tidak Sesuai RAB Sebesar Rp. 448.340.443,93,- yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada PT.Daman Variakarya (PT.DV) atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.448.340.443,93,-

Komentar Instansi:

PT.DV telah melakukan penyetoran kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara dengan detail pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran tahap I telah dilakukan pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 150.000.000,- dengan NTPN 83A71777O9SVRMSI
- b. Pembayaran tahap II telah dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp 150.000.000,- dengan NTPN 235587UQK6VB8EI
- c. Pembayaran tahap III telah dilakukan pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 148.340.443,93,- dengan NTPN C5E42264133UDCUR.

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 Dan 2009 Terkait Kerjasama Pihak Ketiga Pada Lapas Malang

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembinaan keterampilan narapidana pada Lapas Malang, maka Lapas Malang mengikat hubungan kerjasama dengan CV. Berkat Mandiri di bidang industri kerajinan rotan berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: E-26.PK.03.10-04 dan Nomor 001/IV/BM.2004 tanggal 17 April 2004. Berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Nomor 80/S/III-XIV.2/12/2010 tanggal

21 Desember 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, diperoleh informasi bahwa CV.Berkat Mandiri tidak dapat memenuhi kewajibannya menyetor PNPB ke Kas Negara sebesar Rp.31.333.875,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), karena perusahaan dimaksud telah bangkrut / pailit sejak tahun 2008 dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan rekomendasi BPK RI, maka pada TA 2017 Lapas Malang telah mengakui adanya Piutang PNPB sebesar Rp.31.333.875,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan pada awal tahun 2018 akan melakukan transfer sejumlah nilai piutang tersebut kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang selanjutnya akan melakukan usaha penagihan atas transaksi tersebut.

Pada tanggal 19 Januari 2018, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI, maka telah disetorkan PNPB sebesar Rp.31.333.875,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan NTPN C981 A63N FE1D NRJI.

KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

Lapas Terbuka Klas IIB Pasaman

Temuan BPK atas pengelolaan anggaran kegiatan Bimbingan Kerja tahun 2013 pada Lapas Pasaman yang peruntukan awalnya adalah untuk pembelian bibit ayam dan pakan / obat-obatan serta pembelian kebutuhan lahan budidaya jagung. Atas temuan ini telah ditindaklanjuti dengan membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas tindak pidana korupsi dengan kutipan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 28/Pid-Sus-TPT/2017/PN.Pdg. an.terdakwa Rizal Permana,SH, Yunaidi,SH dan Deni Adris.

Barang bukti sebesar Rp.164.500.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan disetorkan ke kas negara oleh pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

Temuan Bpk Yang Belum Ditindaklanjuti / Belum Sesuai Rekomendasi BPK

Audit Kinerja Layanan Pemasarakatan TA 2013

1. Temuan : Perencanaan Anggaran Kemenkumham Kurang Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Pemasarakatan

Rekomendasi A : Mengusulkan standar biaya khusus kegiatan layanan pemasarakatan dhi. layanan PB (litmas dan home visit) kepada Menteri Keuangan sesuai dengan biaya riil di setiap provinsi

Tindak Lanjut A : a. Telah disampaikan Surat Usulan SBK Kegiatan PB dan Home Visit Dirjen PAS Nomor PAS.PR.01.02-01 tanggal 15 Januari 2015 ke Sekjen dan selanjutnya disampaikan Surat Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham kepada Direktur Anggaran III DJA Kementerian Keuangan Nomor SEK.1.KU.01.04-62 perihal Penyampaian Usulan SBK Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2016, namun tindak lanjut tersebut tidak dapat diterima karena sesuai rekomendasi yang seharusnya bersurat adalah Menkumham ditujukan kepada Menteri Keuangan
b. Surat Setjen Kemenkumham Nomor: SEK.PW.04.01-08 tanggal 10 Mei 2016 kepada Sekretaris Ditjen Pemasarakatan.

Rekomendasi B : Menginstruksikan Sekjen dan Dirjen Pemasarakatan untuk menyusun anggaran pemberian makan bagi WBP/Tahanan sesuai dengan kuantitas tingkat hunian dengan memperhitungkan tren kenaikan/penurunan jumlah WBP/Tahanan.

Tindak Lanjut B : a. Usulan Biaya Pemberian Makan bagi WBP dan Tahanan dengan Metode Makanan Siap Santap oleh Direktorat Bina Kesehatan dan keperawatan Narapidanan dan Tahanan Ditjen Pemasarakatan
b. Surat Setjen Kemenkumham Nomor: SEK.PW.04.01-08 tanggal 10 Mei 2016



- kepada Sekretaris Ditjen
Pemasyarakatan
- Rekomendasi C : Menginstruksikan Sekjen dan Dirjen Pemasyarakatan untuk mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai perubahan kenaikan indeks biaya pemberian makan (lauk pauk dan beras) bagi WBP/Tahanan dengan mempertimbangkan kenaikan tingkat inflasi
- Tindak Lanjut C : a. Surat Setjen Kemenkumham Nomor: SEK.PW.04.01-08 tanggal 10 Mei 2016 kepada Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan.
b. Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan telah membuat surat kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum RI Nomor: PAS1.PK.01.07.02-12 tanggal 27 November 2017 perihal Permohonan Penyesuaian Harga Satuan Bahan Makanan.
- Rekomendasi D : Merubah mekanisme pemberian makan bagi WBP/Tahanan dari penyediaan bahan makanan menjadi makanan siap santap.
- Tindak Lanjut D : Usulan Biaya Pemberian Makan bagi WBP dan Tahanan dengan Metode Makanan Siap Santap oleh Direktorat Bina Kesehatan dan keperawatan Narapidanan dan Tahanan Ditjen Pemasyarakatan.
- 2. Temuan : Pengelolaan SDM Kemenkumham Belum Optimal Mendukung Layanan Pemasyarakatan**
- Rekomendasi A : Menginstruksikan Sekjen Kemenkumham untuk memerintahkan seluruh Kakanwil Kemenkumham agar melaksanakan pola mutasi dan promosi bagi petugas pemasyarakatan di Divisi Pemasyarakatan dan Satker Pemasyarakatan secara konsisten dan tidak membedakan.
- Tindak Lanjut A : Ditjen Pemasyarakatan telah membuat Draft Permenkumham tentang Peta Jalur Karier Petugas Pemasyarakatan dalam Jabatan Struktural. (belum ada peraturan hanya ada draft)
- Rekomendasi B : Menginstruksikan Sekjen Kemenkumham untuk menyusun bahan pertimbangan kepada Menteri PAN dan RB mengenai tingkat penghasilan bagi pegawai



- Kemenkumham dengan mempertimbangkan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan.
- Tindak Lanjut B : a. Telah dikeluarkan Surat namun bukan kepada Menteri Keuangan sesuai rekomendasi BPK, melainkan ditujukan kepada MenPAN dan RB sehingga tindak lanjut tidak bisa diterima.
- b. Dirjen Pemasarakatan telah membuat surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS.PR.01.02-13 tanggal 10 Januari 2017 perihal Penyampaian Kajian tentang Pemberian Tunjangan Risiko bagi Petugas Pemasarakatan.
3. **Temuan** : **Pengelolaan Kegiatan Kamtib Lapas dan Rutan Belum Optimal Mendukung Layanan Pemasarakatan**
- Rekomendasi : BPK merekomendasikan kepada Menkumham agar DirjenPAS mengusulkan penambahan pegawai yang bertugas melakukan pengamanan Lapas/ Rutan kepada Menteri PAN dan RB
- Tindak Lanjut : Telah dibuat Surat Usulan Penambahan SDM Pemasarakatan dari Dirjen PAS ke Mempan dan RB Nomor PAS-KP.01.03-195 tanggal 7 Agustus 2014, sedangkan rekomendasi BPK pihak yang bersurat seharusnya Menkumham sehingga tindak lanjut tidak bisa diterima.

Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 No. 13/HP/XIV/05/2017

1. **Temuan** : Alat Screening 3D System, Body Scanner dan Alat Detektor XRay Ukuran Besar pada Ditjen Pemasarakatan Sebesar Rp532,44 Miliar Belum Memperoleh Izin Bapeten Sehingga Belum Dapat Difungsikan Sesuai Peruntukannya
- Rekomendasi : Mengevaluasi kebijakan pengadaan peralatan yang mengandung paparan radiasi.

Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2017 No. 15/HP/XIV/05/2018

1. **Temuan** : **Pengadaan Alat Screening 3D System sebesar Rp198,96 Miliar Tidak didukung Asuransi dan Pekerjaan Instalasi Dilaksanakan Tidak Sesuai Kontrak**

Rekomendasi : Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: 1) PPK Ditjen Pemasarakatan yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang; 2) PPHP yang tidak cermat dalam memeriksa pekerjaan pengadaan barang;

2. **Temuan** : **Pengadaan Alat Screening 3D System sebesar Rp198,96 Miliar Tidak didukung Asuransi dan Pekerjaan Instalasi Dilaksanakan Tidak Sesuai Kontrak**

Rekomendasi : Dirjen Pemasarakatan untuk menetapkan aturan internal terkait pengelolaan dan pencatatan barang persediaan berupa hasil kegiatan industri dalam Lapas

3. **Temuan** : **Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Lapas Khusus High Risk Karang Anyar Nusakambangan Pilot Project Tahap II (APBN-P) Tahun 2017 pada Ditjen Pemasarakatan Tidak Sesuai Progres Fisik**

Rekomendasi : Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:
1) PPK Ditjen Pemasarakatan yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
2) PPHP yang tidak cermat dalam memeriksa pekerjaan.

III.2 Ganti Rugi Dalam Bentuk Barang (GRBB) Yang Diserahkan Oleh PT Holcim Indonesia Tbk. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia

Pada tanggal 14 Desember 2018, bertempat di Cilacap telah ditanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Kompensasi Hasil Ganti Rugi Dalam Bentuk Barang (GRBB) yang diserahkan oleh PT Holcim Indonesia Tbk. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2017 yang direalisasikan pada tahun 2018 dengan nomor 526/LCA.DIR/XII/2018 atau nomor SEK.4-PB.04.02 – 1733. BAST ini didasarkan kepada :

1. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PT.Semen Cibinong Tbk nomor E.PL.03.06-629 dan 0034/DIR/XI/2001 tanggal 27 November 2001 tentang Penambangan Batu Kabur di Pulau Nusakambangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Addendum Kedua Nomor SEK-01.MHH.05.01 Tahun 2018 dan 98/LCA.DIR/III/2018 tanggal 8 Maret 2018;
2. Berita Acara Perhitungan Ganti Rugi Dalam Bentuk Barang (GRBB) Tahun 2017 Realisasi 2018 dan Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2018 Yang akan diserahkan oleh PT. Holcim Indonesia Tbk. Kepada Kementerian Hukum dan HaM RI nomor SEK.4.PB.06.04-300 dan CHI.CR.048/III/2018 tanggal 8 Maret 2018;
3. Surat PT. Holcim Indonesia, Tbk, Nomor CHI.CR.305/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Laporan Final Pekerjaan GRBB dan CSR Realisasi Tahun 2018 di Nusakambangan;
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-69.PB.04.02 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) Tahun 2017 Realisasi tahun 2018 yang akan Diserahkan oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka PT. Holcim Indonesia , Tbk dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sepakat untuk membuat dan menandatangani BAST atas barang – barang berikut yang diterima

oleh satker- satker pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang telah dilaporkan pada aplikasi SIMAK Satker sebagai penambahan aset yang berasal dari *Perolehan Lainnya* dan koreksi perubahan nilai gedung yang berasal dari GRBB Holcim berupa renovasi bangunan Wisma Sari, bangunan olah raga dan bangunan klinik, yaitu pada satker berikut:

No	Satuan Kerja	Aset Diterima dari GRBB	Pencatatan pada SIMAK	Jumlah
1	Lapas Klas I Batu	Kapal Patroli Pantai	Perolehan lainnya	430.000.000
		Peralatan Perkantoran	Perolehan lainnya	836.890.964
		Perbaikan Klinik	Koreksi Nilai	248.400.000
		Renovasi Gedung Wisma Sari	Koreksi Nilai	1.395.047.175
		Bangunan Olah Raga Terbuka	Koreksi Nilai	302.500.000
		Pagar Permanen (pelabuhan sodong)	Perolehan lainnya	160.000.000
2	Lapas Klas IIA Besi	Mitsubishi strada Triton	Perolehan lainnya	360.500.000
3	Lapas Terbuka NK	Mitsubishi strada Triton	Perolehan lainnya	360.500.000
4	Lapas Narkotika NK	Mitsubishi strada Triton	Perolehan lainnya	360.500.000
5	Lapas Kembang Kuning NK	Mitsubishi strada Triton	Perolehan lainnya	360.500.000
6	Lapas Permisan	Mitsubishi strada Triton	Perolehan lainnya	360.500.000
TOTAL GRBB				5.175.338.139

III.3 Pembayaran Tagihan Listrik Satker Pemasyarakatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pada bulan November 2018, Kantor PLN Pusat menanyakan mengenai penyelesaian tagihan listrik pada beberapa satker pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Atas kondisi ini, proses revisi DIPA dari Ditjen Pemasyarakatan kepada satker-satker yang mempunyai tunggakan sudah tidak dimungkinkan mengingat :

1. Biaya langganan daya dan jasa merupakan belanja operasional pada DIPA Ditjenpas dan Belanja Operasional tidak dimungkinkan untuk dikurangi jumlahnya;
2. Revisi antar DIPA sudah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2018, sehingga revisi DIPA tidak bisa dilakukan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengambil langkah untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut dengan mempertimbangkan faktor keamanan Lapas/Rutan ybs bila listrik sampai dipadamkan oleh pihak PLN setempat.

Ditjen Pemasyarakatan selama bulan November dan Desember 2018 telah membayarkan tagihan langganan daya dan jasa listrik pada 135 satker pemasyarakatan sebesar Rp.10.962.351.579,00.

Daftar satker yang listriknya dibayarkan oleh Ditjen Pemasyarakatan selama TA 2018 dijelaskan secara rinci pada Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

III.4 Alokasi Dana Prioritas Nasional TA 2018 Dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2018 Pada Program Pembinaan & Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Dana Prioritas Nasional 2018

Menjawab surat Menteri Hukum dan HAM RI kepada Menteri PPN dan Kepala Bappenas nomor M.HH.PR.01.04-25 tanggal 18 Oktober 2017 dan surat nomor M.HH.PR.01.04-28 tanggal 27 Oktober 2017 hal Usulan Perubahan Rincian Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018, maka telah dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran dan lokasi proyek prioritas nasional Tahun 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan memperhatikan jumlah penghuni dan ketersediaan data dukung.

Usulan Perubahan Rincian Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018, dibuat untuk mengatasi kondisi *overcrowding* di Lapas/Rutan, yaitu :

- a. Saat ini terdapat 47.528 narapidana bandar narkotika dan 215 narapidana teroris yang termasuk kategori narapidana *High risk* yang masih ditempatkan pada Lapas / Rutan umum, sehingga diusulkan untuk memasukkan pembangunan Lapas *Super Maximum Security* Karang Anyar di Nusakambangan pada Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018.

- b. Untuk mengatasi permasalahan *Overcrowding* pada UPT Pemasyarakatan wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, maka dibutuhkan bangunan Bapas yang dilengkapi dengan rumah singgah pada proyek prioritas nasional tahun 2018.

Rekapitulasi Lokasi Pembangunan Proyek Prioritas Nasional Pembangunan Final UPT Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2018 disajikan pada Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2018

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan anggaran selama tahun anggaran berjalan, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengajukan permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ABT yang diajukan adalah ditujukan untuk:

No	PERUNTUKAN ABT	JUMLAH
1	Proyek Percepatan Pembangunan Lapas Khusus High Risk Karang Anyar Nusakambangan	243.384.709.700
2	Revisi Belanja Pegawai ke Satker	330.528.668.000
3	Revisi Uang Makan ke Satker	79.076.690.000
4	Revisi Belanja Pengadaan Bahan Makanan (BAMA)	220.045.542.000
TOTAL ABT 2018		873.035.609.700

Rincian Alokasi ABT dan detail proyek Percepatan Pembangunan Lapas Khusus *High Risk* Karang Anyar, Nusakambangan dapat dilihat pada Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

III.5 Perjanjian Pinjam Pakai Pemanfaatan Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1790 tahun 2017 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang terletak Di Desa Ciangir, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum

dan HAM RI, maka dikeluarkanlah Naskah Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Ditjen Pemasyarakatan nomor 43 Tahun 2017 / Nomor PAS-48.HM.05.02 Tahun 2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak di Desa Ciangir, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk penggunaan tanah seluas + 300.000m², yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Medium security dengan konsep Open Camp.

Untuk Tahun Anggaran 2018 dilakukan perikatan kerjasama untuk pembangunan Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Ciangir, Balai Latihan Kerja dan Rumah Singgah bagi klien Bapas.

III.6 Hibah Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Terbuka Kendal

Pada kegiatan peresmian Lapas Terbuka Kendal sebagai Lapas percontohan untuk kegiatan Industri dalam lapas, diperoleh sejumlah uang yang berasal dari sumbangan seluruh pejabat di jajaran kementerian hukum dan HAM RI dan para tamu dari instansi lain yang hadir pada saat itu. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Lapas Terbuka Kendal dan digunakan untuk menghasilkan Barang Milik Negara (BMN) di bawah pengelolaan Lapas Terbuka Kendal.

BMN tersebut sampai dengan tanggal laporan belum dapat dicatatkan sebagai aset pada aplikasi SIMAK satker Lapas Terbuka Kendal, karena keberadaan asal usul barang yang tidak memenuhi syarat dicatat sebagai hibah langsung karena tidak adanya Berita Acara Serah Terima Uang atas transaksi diterimanya uang sumbangan dan atau Berita Acara Serah Terima Barang saat barang - barang tersebut mulai dimanfaatkan oleh satker. Atas kondisi ini, pihak satker akan mencatatkan barang - barang tersebut sebagai saldo awal pada pencatatan tahun anggaran 2018.

Adapun daftar barang - barang tersebut adalah :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nominal (Rp)
BMN				
1	Mushola al-Hadi	162	m2	250.000.000
2	Taman Mushola	84	m2	10.000.000
3	Taman Depan	5.508	m2	88.500.000
4	Taman Gdg serbaguna	438	m2	6.500.000
5	Kandang Burung Puyuh	52,5	m2	40.000.000
6	Kandang Ayam	72	m2	50.000.000
7	Green House	40	m2	10.000.000
8	Rak Hidroponik	11	m2	18.000.000
9	Sound system mushola	1	unit	11.700.000
Persediaan				
1	Ayam Petelur	240	ekor	12.720.000
2	Burung Puyuh	1200	ekor	15.600.000
Total				513.020.000

III.7 Perubahan Nomenklatur

Sampai dengan 31 Desember 2017, dalam pelaporan e rekon terdapat 15 unit Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang di dalam dokumen DIPAny mempunyai kewenangan sebagai Kantor Pusat (KP), padahal satker - satker tersebut merupakan bagian satker di bawah bagan anggaran 013.05 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang seharusnya memiliki kode kewenangan daerah (KD). Hal ini mengakibatkan ke 15 satker LPKA baru tersebut tidak masuk dalam laporan e rekon wilayah tempat dimana satker tersebut berdomisili.

Revisi Kode Kewenangan ini tidak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada TA 2017 ini dikarenakan telah terjadinya realisasi anggaran pada satker ybs, proses perubahan kode kewenangan akan dilakukan pada awal TA 2018.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Anggaran No.S-1/AG.5/2018 tertanggal 4 Januari 2018 sebagai jawaban atas surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan no. PAS1.PR.01.04-122 tanggal 12 Desember 2017 perihal Permohonan Perubahan Referensi Kode Kewenangan Satuan Kerja Pemasyarakatan pda Aplikasi RKAKL 2018 diperoleh informasi bahwa :

1. Perubahan kode kewenangan satker tidak dapat dilakukan melalui revisi DIPA karena akan berpengaruh terhadap histori data transaksi

di Aplikasi SPAN, sehingga untuk satker yang mengalami perubahan kewenangan harus menggunakan kode satker baru.

2. Satker yang mengalami perubahan kode satker per Februari 2018 adalah sbb:

No	Nama Satker	Kode Satker Baru	Kode Satker Lama
1	LPKA Banda Aceh	352604	419136
2	LPKA Pangkal Pinang	352605	419137
3	LPKA Bengkulu	352606	419138
4	LPKA Palangkaraya	352607	419141
5	LPKA Samarinda	352608	419142
6	LPKA Palu	352609	419143
7	LPKA Gorontalo	352610	419144
8	LPKA Kendari	3526112	419145
9	LPKA Ambon	352613	419146
10	LPKA Ternate	352614	419164
11	LPKA Jayapura	352615	419165
12	LPKA Manokwari	352616	419166
13	LPKA Mamuju	352617	419167

III.8 Dana Kapitasi Pada FKTP Di Lingkungan Kanwil DKI Jakarta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bekerjasama dengan Fasilitas - Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah lingkungan kerja mereka untuk memberikan fasilitas pembayaran bagi para peserta BPJS disekitar mereka berdasarkan jumlah peserta BPJS yang terdaftar. Fasilitas pembayaran ini diberikan kepada seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah DKI Jakarta, termasuk juga kepada FKTP yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dana Kapitasi merupakan suatu system pembayaran pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP Pemerintah Pusat berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pengaturan Tata Cara Pengelolaan Dana Kapitasi ini diatur sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai PMK No. 88/PMK.02/2016



tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat.

Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Satker Penerima Dana Kapitasi adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Jumlah Dana Kapitasi TA. 2017		Keterangan
1	Lapas Cipinang	Rp	49.940.000	Telah Disetorkan ke Kas Negara
2	Rutan Jakarta Timur	Rp	25.880.000	Telah Disetorkan ke Kas Negara
3	Rutan Jakarta Pusat	Rp	249.144.413	Telah Disetorkan ke Kas Negara
4	Rutan Cipinang	Rp	28.713.000	Telah Disetorkan ke Kas Negara
5	Lapas Salemba	Rp	8.185.923	Telah Disetorkan ke Kas Negara
6	Lapas Narkotika Jakarta	Rp	74.796.152	Telah Disetorkan ke Kas Negara
JUMLAH		Rp	436.659.488	

Satker penerima dana kapitasi telah menyetorkan seluruh Dana Kapitasi tersebut ke kas negara sebagai dana kapitasi yang akan digunakan oleh Satker yang bersangkutan di tahun mendatang setelah menyelesaikan penyusunan estimasi pendapatan PNBPN dan rencana penggunaan PNBPN tersebut agar dapat dicantumkan pada lembar estimasi pendapatan di DIPA Satker ybs pada tahun anggaran 2018, namun hal ini belum juga terealisasi sampai dengan laporan ini dibuat.

Saat ini satker - satker penerima dana kapitasi sedang menyiapkan RAB atas rencana kebutuhan dan penggunaan anggaran Dana Kapitasi tersebut untuk direvisi dan diajukan ke pihak Direktorat Jenderal Anggaran.



LAMPIRAN

**PENJELASAN ATAS
POS-POS NERACA**



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Rincian Piutang PNBP Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2018

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	3.610.487.150,00	Piutang PNBP berupa sewa tanah oleh PT Paramitha Rp3.343.500.000,00 dan transfer masuk piutang pegawai pensiun dari kanwil jambi berupa temuan itjen atas kelebihan pembayaran Rp30.740.750,00
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bandung	135.756.610,00	Piutang PNBP berupa pengembalian belanja PT Amethys Utama Rp84.194.455,00 dan PT Daya Persana Rp51.562.155,00
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu	104.689.276,00	Piutang PNBP berupa pengembalian belanja PT Sinatria Inti Surya
4	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	21.529.529,00	Piutang PNBP berupa pengembalian belanja CV Tabyol
	SUBTOTAL	3.872.462.565,00	
	Ditjen AHU		
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	19.695.500.000,00	Piutang atas pekerjaan yang tidak dikerjakan 100% sampai akhir Tahun Anggaran 2018 berupa pekerjaan Infrastruktur Jaringan High Availability Rp13.889.700.000,00 , pekerjaan server data base Rp3.152.600.000,00 dan pekerjaan perangkat jaringan Data Center Ditjen AHU Rp2.653.200.000,00
		347.227.258,00	Piutang Bukan Pajak Ditjen AHU telah dilimpahkan ke DJKN
	SUBTOTAL	20.042.727.258,00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
1	Balai Pemasyarakatan Kendari	7.751.659,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK
2	Lembaga Pemasyarakatan Bekasi	9.502.000,00	Kelebihan Pembayaran Belanja Pengadaan Bahan dan Makanan selama tahun 2018 yang baru disetorkan oleh rekanan setelah tanggal 31 Desember 2018
3	Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur	32.935.307,00	
4	Lapas Sumedang	1.869.200,00	
5	Lapas Majalengka	560.781,00	
6	Lapas Purwakarta	1.233.221,00	
7	Lembaga Pemasyarakatan Subang	10.838.610,00	
8	Rumah Tahanan Negara Rangkas Bitung	921.584,00	
9	Rumah Tahanan Negara Pemalang	5.515.429,00	
10	Rumah Tahanan Negara Rembang	206.305,00	
11	Rumah Tahanan Negara Magetan	1.560.831,00	
12	Lapas Muara Bulian	893.303,00	
13	Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo	20.373.368,00	



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

14	Lembaga Pemasyarakatan Muara Tebo	1.211.556,00	
15	Lembaga Pemasyarakatan Sintang	24.066.233,00	
16	Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin	313.100.810,00	
17	Lembaga Pemasyarakatan Anak Martapura	3.624.201,00	
18	Rumah Tahanan Negara Pelaihari	13.177.057,00	
19	Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru	10.992.640,00	
20	Rumah Tahanan Negara Barabai	540.312,00	
21	Lembaga Pemasyarakatan Amuntai	8.060.115,00	
22	Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo	3.390.672,00	
23	Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta	358.480,00	
24	Lembaga Pemasyarakatan Polewali	15.985.618,00	
25	Lapas Perempuan Kelas IIa Jakarta	8.060.000,00	
26	Rumah Tahanan Negara Serang	3.352.262,00	
27	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Di Cirebon	67.904,00	
28	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta	5.358.000,00	
29	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan	25.000,00	
30	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Martapura	155.387.619,00	
31	Lapas Kelas III Banjar Propinsi Jawa Barat	736.261,00	
32	Lapas Anak Kelas III Bandung Propinsi Jawa Barat	2.893.964,00	
33	Rutan Kelas IIb Gunung Sindur Propinsi Jawa Barat	7.109.370,00	
34	Lapas Kelas III Sarolangun Propinsi Jambi	468.099,00	
35	Lembaga Pemasyarakatan Kalianda	3.211.954,00	
36	Lembaga Pemasyarakatan Semarang	465.332,00	kekurangan pembayaran sewa kantin TA 2018 yang disetorkan Tahun 2019
37	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	908.596.500,00	Temuan Team Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada pengadaan screening HIV tahun 2012
38	Lembaga Pemasyarakatan Wamena	40.421.364,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK
39	Lapas Perempuan Kelas III Mamuju	66.438.400,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK
40	Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	155.037.714,00	kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK
41	Rumah Tahanan Negara Manado	94.310.000,00	Kelebihan pembayaran sewa Direksi Keet dan jasa, air dan listrik atas temuan Team Inspektorat Jenderal



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42	Rumah Tahanan Negara Kendari	16.428.717,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK
43	Rumah Penyimpanan Benda Sitan Negara Jayapura	20.795.000,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK
44	Kantor Rupbasan Blitar	183.800,00	Piutang PNBPN atas sewa rumah dinas yang belum dibayarkan selama tahun anggaran 2018
45	Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru	658.738.200,00	Piutang PNBPN lainnya atas pengembalian 5% biaya jaminan bank penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan
46	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	373.615.678,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK
47	Lapas Kelas III Gunung Sindur Propinsi Jawa Barat	32.620.086,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK
48	Lapas Anak Kelas III Bandar Lampung Propinsi Lampung	187.155.593,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK
	SUBTOTAL	3.230.146.109,00	
	Ditjen Imigrasi		
1	Kantor Imigrasi Pekanbaru	11.000.000,00	Piutang atas pekerjaan yang belum selesai
2	Kantor Imigrasi Tanjung Pinang	50.000.000,00	Temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen
3	Kantor Imigrasi Batam	900.000.000,00	Temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen
4	Kantor Imigrasi Cengkareng	1.050.000.000,00	Temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen
5	Kantor Imigrasi Ngurah Rai	4.090.000.000,00	Temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen
6	Direktorat Jenderal Imigrasi	1.799.161.590,00	Piutang pekerjaan yang tidak selesai atas Pengadaan sarana dan prasarana komunikasi
7	Kantor Imigrasi Wonosobo	370.000,00	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja
	SUBTOTAL	7.900.531.590,00	
	Ditjen KI		
1	Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual	3.454.904.706,00	Piutang Denda Sewa Bis Rp1.850.000,00 , Piutang Denda Jasa Building Management Rp2.189.796,00 dan kelebihan pembayaran pengadaan perlengkapan mushala yang merupakan temuan dari Inspektorat Jenderal sebesar Rp6.808.250,00 dan piutang lainnya berupa pembayaran untuk kontrak pengerjaan Roll O Pact oleh PT. Hagitasinar Lestarmegah senilai Rp3.444.056.660,00
		347.536.646.278,00	Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH) Rp308.259.493.837,00 , piutang Pembatalan atas Permintaan Sendiri (PAPS) 31 Desember 2018 adalah Rp39.268.691.766,00 dan piutang sewa BNI Rp8.460.675,00
	SUBTOTAL	350.991.550.984,00	
	Ditjen PP		



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	33.223.415,00	Kelabihan Pembayaran ATK An. CV. Niaga Lestari dan PT. Kharisma Siba Nusantara dan kelebihan pembayaran volume pekerjaan pekerjaan partisi lantai IV ruang Harmonisasi II an. PT Wabari Sestindo
	SUBTOTAL	33.223.415,00	
	BPHN		
1	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah	2.000.000,00	Double pencairan dana bantuan hukum
	SUBTOTAL	2.000.000,00	
	BPSDM		
1	Akademi Ilmu Pemasarakatan	55.000.000,00	Piutang Poltekip penyewaan gedung ALTRI (Akademi Litigasi Republik Indonesia)
	SUBTOTAL	55.000.000,00	
	Grand Total	386.127.641.921,00	

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2018

Nama Satker	Jumlah Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan	Keterangan
Sekretariat Jenderal				
Sekretariat Jenderal (Pusat)	3.628.487.150,00	0,50%	18.142.436,00	Lancar
Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bandung	135.756.610,00	0,50%	678.783,00	Lancar
Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu	104.689.276,00	0,50%	523.446,00	Lancar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	21.529.529,00	100,00%	21.529.529,00	Macet
SUBTOTAL	3.890.462.565,00		40.874.194,00	
Ditjen AHU				
Balai Harta Peninggalan Medan	31.525.008,00	0,50%	157.625,00	Lancar
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	19.715.900.000,00	0,50%	98.579.500,00	Lancar
	347.227.258,00	100,00%	347.227.258,00	Macet
SUBTOTAL	20.094.652.266,00		445.964.383,00	
Ditjen Pemasarakatan				
Balai Pemasarakatan Jakarta Selatan	587.500,00	0,50%	2.938,00	Lancar
Balai Pemasarakatan Kendari	9.876.671,00	0,50%	49.380,00	Lancar
Balai Pemasarakatan Sibolga	900.000,00	0,50%	4.500,00	Lancar
Balai Pemasarakatan Ternate, Maluku Utara	22.438.370,00	0,50%	112.192,00	Lancar
Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	18.000.000,00	0,50%	90.000,00	Lancar
Direktorat Jenderal Pemasarakatan	922.766.500,00	0,50%	4.613.833,00	Lancar
Kantor Rupbasan Blitar	183.800,00	0,50%	919,00	Lancar
Lapas Anak Kelas III Bandar Lampung Propinsi Lampung	187.155.593,00	0,50%	935.778,00	Lancar
Lapas Anak Kelas III Bandung Propinsi Jawa Barat	2.893.964,00	0,50%	14.470,00	Lancar
Lapas Indramayu	3.094.000,00	0,50%	15.470,00	Lancar
Lapas Kelas III Banjar Propinsi Jawa Barat	736.261,00	0,50%	3.681,00	Lancar



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lapas Kelas III Gunung Sindur Propinsi Jawa Barat	32.620.086,00	0,50%	163.100,00	Lancar
Lapas Kelas III Sarolangun Propinsi Jambi	468.099,00	0,50%	2.340,00	Lancar
Lapas Majalengka	560.781,00	0,50%	2.804,00	Lancar
Lapas Mojokerto	6.183.000,00	0,50%	30.915,00	Lancar
Lapas Muara Bulian	893.303,00	0,50%	4.467,00	Lancar
Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	8.060.000,00	0,50%	40.300,00	Lancar
Lapas Perempuan Kelas III Mamuju	66.438.400,00	0,50%	332.192,00	Lancar
Lapas Purwakarta	1.233.221,00	0,50%	6.166,00	Lancar
Lapas Sumedang	1.869.200,00	0,50%	9.346,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Ambon	24.000.000,00	0,50%	120.000,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Amuntai	8.060.115,00	0,50%	40.301,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Anak Martapura	3.624.201,00	0,50%	18.121,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru	658.738.200,00	0,50%	3.293.691,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin	313.100.810,00	0,50%	1.565.504,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Bekasi	9.502.000,00	0,50%	47.510,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Curup	6.000.000,00	0,50%	30.000,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo	3.390.672,00	0,50%	16.953,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Kalianda	3.211.954,00	0,50%	16.059,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru	10.992.640,00	0,50%	54.963,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo	20.373.368,00	0,50%	101.867,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Muara Tebo	1.211.556,00	0,50%	6.058,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	373.615.678,00	0,50%	1.868.079,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Di Cirebon	67.904,00	0,50%	340,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta	5.358.000,00	0,50%	26.790,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Martapura	155.387.619,00	0,50%	776.938,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan	25.000,00	0,50%	125,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Polewali	15.985.618,00	0,50%	79.928,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Sintang	24.066.233,00	0,50%	120.331,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Subang	10.838.610,00	0,50%	54.193,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta	358.480,00	0,50%	1.792,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak	500.000,00	0,50%	2.500,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Wamena	40.421.364,00	0,50%	202.106,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	155.037.714,00	0,50%	775.189,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang	465.332,00	0,50%	2.327,00	Lancar
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jayapura	20.795.000,00	0,50%	103.975,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Barabai	540.312,00	0,50%	2.702,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur	32.935.307,00	0,50%	164.677,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Kendari	16.428.717,00	0,50%	82.144,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Magetan	1.560.831,00	0,50%	7.804,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Manado	94.310.000,00	0,50%	471.550,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Pelaihari	13.177.057,00	0,50%	65.885,00	Lancar



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rumah Tahanan Negara Pemalang	5.515.429,00	0,50%	27.577,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Rangkas Bitung	921.584,00	0,50%	4.608,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Rembang	206.305,00	0,50%	1.031,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Serang	3.352.262,00	0,50%	16.761,00	Lancar
Rutan Kelas IIB Gunung Sindur Propinsi Jawa Barat	7.109.370,00	0,50%	35.547,00	Lancar
SUBTOTAL	3.328.143.991,00		16.640.717,00	
Ditjen Imigrasi				
Kantor Imigrasi Pekanbaru	11.000.000,00	0,50%	55.000,00	Lancar
Kantor Imigrasi Tanjung Pinang	50.000.000,00	0,50%	250.000,00	Lancar
Kantor Imigrasi Batam	900.000.000,00	0,50%	4.500.000,00	Lancar
Kantor Imigrasi Cengkareng	1.050.000.000,00	0,50%	5.250.000,00	Lancar
Kantor Imigrasi Ngurah Rai	4.000.000.000,00	0,50%	20.000.000,00	Lancar
	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	Macet
Direktorat Jenderal Imigrasi	1.799.161.590,00	10,00%	179.916.159,00	Kurang Lancar
Kantor Imigrasi Wonosobo	370.000,00	0,50%	1.850,00	Lancar
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan	1.360.000,00	0,50%	6.800,00	Lancar
Kantor Imigrasi Jakarta Pusat	8.400.000,00	0,50%	42.000,00	Lancar
Kantor Imigrasi Jakarta Timur	1.240.000,00	0,50%	6.200,00	Lancar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat	75.600.000,00	0,50%	378.000,00	Lancar
Kantor Imigrasi Ternate	24.000.000,00	0,50%	120.000,00	Lancar
Kantor Imigrasi Tangerang	6.000.000,00	0,50%	30.000,00	Lancar
SUBTOTAL	8.017.131.590,00		300.556.009,00	
Ditjen KI				
Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual	3.810.165.381,00	0,50%	19.050.826,00	Lancar
	8.650.000,00	10,00%	865.000,00	Kurang Lancar
	24.800.000,00	50,00%	12.400.000,00	Diragukan
	347.147.935.603,00	100,00%	347.147.935.603,00	Macet
SUBTOTAL	350.991.550.984,00		347.180.251.429,00	
Ditjen PP				
Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	63.973.383,00	0,50%	319.867,00	Lancar
SUBTOTAL	63.973.383,00		319.867,00	
Ditjen HAM				
Direktorat Jenderal HAM	22.344.000,00	0,50%	111.720,00	Lancar
SUBTOTAL	22.344.000,00		111.720,00	
BPHN				
Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah	2.000.000,00	0,50%	10.000,00	Lancar
SUBTOTAL	2.000.000,00		10.000,00	
BPSDM				
Akademi Ilmu Pemasarakatan	55.000.000,00	0,50%	275.000,00	Lancar
SUBTOTAL	55.000.000,00		275.000,00	
TOTAL	386.465.258.779,00		347.985.003.319,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2018

Nama Satker	Jumlah Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL				
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	9.697.690.000,00	0,50%	48.488.450,00	Lancar
	71.012.424,00	100,00%	71.012.424,00	Macet
SUBTOTAL	9.768.702.424,00		119.500.874,00	
DITJEN AHU				
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	35.700.000,00	0,50%	178.500,00	Lancar
BALAI HARTA PENINGALAN MEDAN	13.135.396,00	0,50%	65.677,00	Lancar
SUBTOTAL	48.835.396,00		244.177,00	
DITJEN PEMASYARAKATAN				
LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBON	144.713.032,00	0,50%	723.565,00	Lancar
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA NAMLEA	18.228.119,00	0,50%	91.141,00	Lancar
LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	12.182.800,00	0,50%	60.914,00	Lancar
SUBTOTAL	175.123.951,00		875.620,00	
DITJEN IMIGRASI				
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	285.080.000,00	0,50%	1.425.400,00	Lancar
KANTOR IMIGRASI TERNATE	233.209.240,00	0,50%	1.166.046,00	Lancar
KANTOR IMIGRASI ENTIKONG	9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	Macet
KANTOR IMIGRASI TANGERANG	7.795.000,00	0,50%	38.975,00	Lancar
SUBTOTAL	535.584.240,00		12.130.421,00	
DITJEN PP				
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.936.520,00	0,50%	44.683,00	Lancar
SUBTOTAL	8.936.520,00		44.683,00	
DITJEN PP				
DIREKTORAT JENDERAL HAM	9.278.000,00	0,50%	46.390,00	Lancar
SUBTOTAL	9.278.000,00		46.390,00	
TOTAL	10.546.460.531,00		132.842.165,00	

Per 31 Desember 2018[illegible]

NO	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																	JUMLAH UTANG
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar					Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar								Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga	
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpon (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Uang Pailit	
				Rp	Keterangan								Rp	Keterangan					
1	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	38.045.584,00	-	-	Kekurangan Gaji Bulan Desember 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.045.584,00	
2	Lembaga Pemasyarakatan Cipinang	-	-	-	-	-	-	-	-	452.359.620,00	-	-	-	-	-	-	-	452.359.620,00	
3	Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	837.981.407,00	-	-	-	-	-	-	-	837.981.407,00	
4	Rumah Tahanan Negara Cipinang	-	227.636.000,00	-	Utang Uang Makan Bulan desember	-	-	-	-	486.531.575,00	-	-	-	-	-	-	-	714.167.575,00	
5	Lembaga Pemasyarakatan Salemba	-	-	-	-	-	-	-	-	14.601.602,00	-	-	-	-	-	-	-	14.601.602,00	
6	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sentul	2.004.359,00	176.412.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.416.359,00	
7	Lembaga Pemasyarakatan Karawang	-	217.388.000,00	-	-	-	-	-	-	88.461.156,00	-	-	-	-	-	-	-	305.849.156,00	
8	Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	470.643.600,00	-	-	-	-	-	-	-	470.643.600,00	
9	Lapas Garut	-	20.698.000,00	-	Kekurangan uang makan bulan Desember 2018	-	-	-	-	254.934.791,00	-	-	-	-	-	-	-	275.632.791,00	
10	Lapas Ciamis	-	-	-	-	158.694.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.694.000,00	
11	Lapas Tasikmalaya	-	9.535.000,00	-	-	-	-	-	-	70.206.669,00	-	-	-	-	-	-	-	79.741.669,00	
12	Balai Pemasyarakatan Cirebon	-	26.239.000,00	-	Kekurangan uang makan bulan Desember 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.239.000,00	
13	Rumah Tahanan Negara Cirebon	-	-	-	-	8.400.115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.400.115,00	
14	Lapas Majalengka	-	54.735.000,00	-	kekurangan kenaikan pangkat 2 pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.735.000,00	
15	Lapas Indramayu	-	-	-	Uang makan 120 pegawai bulan November dan Desember 2018	20.566.750,00	-	-	-	2.885.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.451.750,00	
16	Balai Pemasyarakatan Bogor	-	30.151.000,00	-	Uang makan pegawai bulan Desember 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.151.000,00	
17	Lembaga Pemasyarakatan Bogor	-	110.324.000,00	-	-	-	-	-	-	730.928.229,00	-	-	-	-	-	-	-	841.252.229,00	
18	Lapas Sukabumi	-	-	-	Uang makan pegawai bulan November dan Desember 2018	-	-	-	-	146.796.632,00	-	-	-	-	-	-	-	146.796.632,00	
19	Lapas Cianjur	-	31.255.000,00	-	Uang makan 54 pegawai bulan Desember 2018	-	-	-	-	49.729.043,00	-	-	-	-	-	-	-	80.984.043,00	
20	Lapas Purwakarta	688.440,00	-	-	kekurangan kenaikan pangkat 2 pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.440,00	
21	Lembaga Pemasyarakatan Subang	2.815.966,00	198.391.000,00	-	Uang makan 120 pegawai bulan November dan Desember 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.206.966,00	
22	Balai Pemasyarakatan Garut	-	16.205.000,00	-	Uang makan pegawai bulan Desember 2018	-	-	-	-	-	-	-	Akrual listrik dan internet (tagihan desember terbit di Januari 2019)	-	-	-	-	16.205.000,00	

NO	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																JUMLAH UTANG	
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar								Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga		
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpon (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp		Uang Pailit
				Rp	Keterangan								Rp	Keterangan					
52	Rumah Tahanan Negara Kebumen	-	-	-	-	3.349.000,00	1.652.878,00	103.570,00	1.338.100,00	-	29.233.123,00	-	-	-	-	-	-	35.676.671,00	
53	Balai Pemasyarakatan Pati	-	-	-	-	-	1.202.284,00	148.909,00	591.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.942.693,00	
54	Lembaga Pemasyarakatan Pati	1.297.518,00	-	-	-	-	14.094.842,00	148.092,00	641.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.182.162,00	
55	Rumah Tahanan Negara Rembang	845.253,00	-	-	-	95.700,00	3.681.980,00	93.440,00	1.786.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.503.073,00	
56	Rumah Tahanan Negara Jepara	-	-	-	-	66.740,00	7.434.654,00	165.982,00	-	-	996.000,00	-	-	-	-	-	-	8.663.376,00	
57	Rumah Tahanan Negara Kudus	-	-	-	-	4.695.825,00	5.752.990,00	402.965,00	687.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.539.280,00	
58	Rumah Tahanan Negara Blora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.802.702,00	-	-	-	-	-	-	7.802.702,00	
59	Balai Pemasyarakatan Surakarta	-	-	-	-	240.000,00	2.982.677,00	332.151,00	1.210.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.765.628,00	
60	Rumah Tahanan Negara Surakarta	-	-	-	-	719.980,00	16.228.379,00	1.486.594,00	-	-	38.743.000,00	-	-	-	-	-	-	57.177.953,00	
61	Lembaga Pemasyarakatan Sragen	2.715.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.638.186,00	-	-	-	-	-	-	43.353.666,00	
62	Lapas Klaten	-	-	-	-	4.759.050,00	5.866.316,00	1.477.682,00	938.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.041.048,00	
63	Rumah Tahanan Negara Wonogiri	-	-	-	-	13.938.100,00	5.471.618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.409.718,00	
64	Balai Pemasyarakatan Purwokerto	-	-	-	-	17.500,00	980.328,00	195.317,00	1.391.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.584.145,00	
65	Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto	-	-	-	-	-	30.616.299,00	116.000,00	2.860.000,00	-	153.840.711,00	-	-	-	-	-	-	187.433.010,00	
66	Rumah Tahanan Negara Banyumas	-	-	-	-	284.850,00	5.954.353,00	972.122,00	-	-	15.704.921,00	-	-	-	-	-	-	22.916.246,00	
67	Rumah Tahanan Negara Purbalingga	3.236.961,00	2.135.000,00	-	-	16.590,00	3.243.852,00	132.274,00	736.200,00	-	18.780.995,00	-	-	-	-	-	-	28.281.872,00	
68	Rumah Tahanan Negara Banjarnegara	-	-	-	-	300.000,00	4.100.000,00	250.000,00	945.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.595.170,00	
69	Lapas Cilacap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.853.553,00	-	-	-	-	-	-	82.853.553,00	
70	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan	-	-	-	-	-	1.019.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.019.592,00	
71	Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo	199.769,00	48.038.000,00	-	-	3.571.200,00	3.089.454,00	50.320,00	1.127.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	56.076.243,00	
72	Rumah Tahanan Negara Batang	-	-	-	-	158.000,00	10.599.762,00	524.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.282.390,00	
73	Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusakambangan	2.543.000,00	60.565.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.108.000,00	
74	Lembaga Pemasyarakatan Slawi	-	-	-	-	2.500.000,00	10.970.853,00	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.820.853,00	
75	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Semarang, Kot.Semarang, Jawa Tengah	-	-	-	-	-	1.899.486,00	58.710,00	552.235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.510.431,00	
76	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri	-	-	-	-	127.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.400,00	
77	Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal	-	-	-	-	-	12.100.000,00	-	-	-	11.135.672,00	-	-	-	-	-	-	23.235.672,00	
78	Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Nusakambangan	-	-	-	-	-	7.163.261,00	-	-	-	77.988.573,00	-	-	-	-	-	-	85.151.834,00	
79	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan	-	42.368.000,00	-	-	-	17.140.961,00	1.404.302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.913.263,00	
80	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Purwokerto	-	-	-	-	16.950,00	1.841.436,00	129.759,00	-	-	869.000,00	keperluan perkantoran	-	-	-	-	-	2.857.145,00	
81	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Surakarta	880.784,00	-	-	-	238.300,00	1.904.412,00	666.641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690.137,00	
82	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pekalongan	-	-	-	-	120.500,00	1.857.707,00	50.875,00	742.133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.771.215,00	
83	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Cilacap	-	-	-	-	181.150,00	1.358.398,00	797.637,00	-	-	229.900,00	TV Berlangganan	-	-	-	-	-	2.567.085,00	

NO	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																JUMLAH UTANG	
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar								Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga		
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpn (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp		Uang Paifit
				Rp	Keterangan								Rp	Keterangan					
84	Rumah Tahanan Negara Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.167.900,00	-	-	-	-	-	-	12.167.900,00	
85	Rumah Tahanan Negara Yogyakarta	-	-	-	-	44.500,00	-	-	-	-	2.922.100,00	-	-	-	-	-	-	2.966.600,00	
86	Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta	168.900,00	-	-	-	425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593.900,00	
87	Rumah Tahan Negara Wonorejo	-	2.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.520.000,00	
88	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.705.800,00	-	-	-	-	-	-	69.705.800,00	
89	Lpka Jogjakarta, Provinis D.I Yogyakarta	-	-	-	-	2.168.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.168.500,00	
90	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.446.000,00	-	-	-	-	-	-	94.446.000,00	
91	Lembaga Pemasyarakatan Sleman	472.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472.690,00	
92	Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok	-	163.870.000,00	-	-	-	103.054.501,00	2.679.708,00	-	-	485.513.918,00	-	-	-	-	-	-	755.118.127,00	
93	Lembaga Pemasyarakatan Malang	3.045.884,00	27.252.000,00	-	-	4.843.600,00	42.227.042,00	120.522,00	2.622.800,00	-	667.991.837,00	-	-	-	-	-	-	748.103.685,00	
94	Lembaga Pemasyrakatan Madiun	-	148.126.000,00	-	-	29.500,00	42.614.344,00	50.594,00	831.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	191.651.438,00	
95	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Madiun	-	50.179.000,00	-	-	-	33.197.341,00	31.570,00	2.303.000,00	-	571.606.098,00	-	-	-	-	-	-	657.317.009,00	
96	Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan	-	142.820.000,00	-	-	-	20.053.447,00	62.320,00	1.145.000,00	-	307.655.133,00	-	-	-	-	-	-	471.735.900,00	
97	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan	-	-	-	-	-	116.100.390,00	1.507.885,00	-	52.500,00	129.123.012,00	-	-	-	-	-	-	246.783.787,00	
98	Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro	-	-	-	-	100.000,00	11.237.977,00	31.160,00	2.181.500,00	-	269.766.904,00	-	-	-	-	-	-	283.317.541,00	
99	Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo	-	-	-	-	1.250.000,00	27.831.743,00	135.300,00	809.500,00	205.500,00	363.228.836,00	-	-	-	-	-	-	393.460.879,00	
100	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang	735.576,00	3.815.000,00	-	-	36.955.000,00	8.918.324,00	169.680,00	744.728,00	-	147.244.261,00	-	-	-	-	-	40.469.600,00	239.052.169,00	
101	Lembaga Pemasyarakatan Kediri	-	-	-	-	1.089.100,00	26.775.022,00	1.737.300,00	569.800,00	-	321.325.600,00	-	-	-	-	-	-	351.496.822,00	
102	Lembaga Pemasyarakatan Jember	-	-	-	-	1.577.322,00	19.513.451,00	156.640,00	1.158.500,00	-	369.674.000,00	-	-	-	-	-	-	392.079.913,00	
103	Lapas Mojokerto	-	-	-	-	-	16.564.124,00	90.640,00	2.071.000,00	-	41.730.416,00	-	-	-	-	-	-	60.456.180,00	
104	Lapas Jombang	-	74.131.000,00	-	-	147.500,00	9.555.058,00	1.232.213,00	-	-	331.815.607,00	-	-	-	-	-	-	416.881.378,00	
105	Lapas Lamongan	-	51.564.000,00	-	-	17.069.590,00	9.916.432,00	2.842.280,00	-	490.000,00	475.331.240,00	-	-	-	-	-	-	557.213.542,00	
106	Lapas Tuban	-	19.575.000,00	-	-	-	13.264.158,00	169.103,00	1.435.898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.444.159,00	
107	Lapas Ngawi	-	60.726.000,00	-	-	3.118.800,00	4.685.699,00	-	-	-	66.788.044,00	-	-	-	-	-	-	135.318.543,00	
108	Lapas Blitar	-	-	-	-	3.063.750,00	11.412.635,00	111.972,00	1.323.000,00	1.065.500,00	84.107.000,00	-	-	-	-	-	-	101.083.857,00	
109	Lapas Tulungagung	-	-	-	-	11.255.201,00	8.550,00	1.250.000,00	-	-	31.890.520,00	-	-	-	-	-	-	44.404.271,00	
110	Lapas Probolinggo	-	26.713.000,00	-	-	1.438.500,00	9.351.106,00	131.070,00	2.658.500,00	-	331.132.200,00	-	-	-	-	-	-	371.424.376,00	
111	Lapas Pasuruan	-	-	-	-	-	233.488,00	1.004.851,00	-	-	499.658.794,00	-	-	-	-	-	-	500.897.133,00	
112	Lapas Lumajang	169.970.680,00	-	-	-	-	9.924.667,00	50.809,00	2.597.960,00	-	228.327.976,00	-	-	-	-	-	-	410.872.092,00	
113	Lapas Bondowoso	929.556,00	1.248.000,00	-	-	-	-	-	-	-	107.405.192,00	-	-	-	-	-	-	109.582.748,00	
114	Lapas Banyuwangi	-	95.339.000,00	-	-	1.032.987,00	24.406.432,00	138.558,00	742.500,00	-	286.952.037,00	-	-	-	-	-	-	408.611.514,00	
115	Rumalt Tahanan Negara Ponorego	-	45.285.000,00	-	-	136.000,00	5.941.344,00	87.156,00	1.150.500,00	-	21.824.761,00	-	-	-	-	-	-	74.424.761,00	
116	Rumalt Tahanan Negara Pacitan	-	28.400.000,00	-	-	172.410,00	4.773.000,00	62.595,00	814.500,00	-	24.796.537,00	-	-	-	-	-	-	59.019.042,00	
117	Rumalt Tahanan Negara Magetan	-	-	-	-	30.693.000,00	4.606.956,00	407.681,00	1.009.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.717.437,00	
118	Rumalt Tahanan Negara Surabaya	-	147.800.500,00	-	-	39.136.300,00	-	216.320,00	-	-	1.124.386.041,00	-	-	-	-	-	-	1.311.539.161,00	
119	Rumalt Tahanan Negara Kraksaan	-	40.956.000,00	-	-	1.684.800,00	7.488.313,00	73.320,00	2.387.800,00	-	6.185.553,00	-	-	-	-	-	-	58.775.786,00	
120	Rumalt Tahanan Negara Bangil	-	-	-	-	-	12.944.275,00	69.140,00	2.375.933,00	-	72.412.104,00	-	-	-	-	-	-	87.801.452,00	
121	Rumalt Tahanan Negara Situbondo	-	39.766.000,00	-	-	1.166.520,00	8.227.235,00	58.570,00	1.889.798,00	-	47.126.200,00	-	-	-	-	-	-	98.234.323,00	
122	Rumalt Tahanan Negara Trenggalek	-	-	-	-	857.600,00	6.296.295,00	102.058,00	501.000,00	-	63.018.000,00	-	-	-	-	-	-	70.774.953,00	
123	Rumalt Tahanan Negara Nganjuk	-	-	-	-	33.000,00	7.444.300,00	1.294.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.771.300,00	

NO	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																JUMLAH UTANG	
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar									Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpn (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp		Uang Pailit
Rp	Keterangan			Rp	Keterangan														
124	Rumah Tahanan Negara Bangkalan	-	94.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	110.694.469,00	-	-	-	-	-	-	204.784.469,00	
125	Rumah Tahanan Negara Sampang	-	-	-	-	143.600,00	3.568.158,00	-	831.000,00	-	43.972.936,00	-	-	-	-	-	-	48.515.694,00	
126	Rumah Tahanan Negara Sumenep	-	-	-	-	1.263.620,00	7.146.371,00	1.226.900,00	-	-	41.748.000,00	-	-	-	-	-	-	51.384.891,00	
127	Rumah Tahanan Negara Gresik	-	665.000,00	-	-	40.843.200,00	10.953.244,00	111.130,00	836.500,00	-	39.366.260,00	-	-	-	-	-	-	92.775.334,00	
128	Cabang Rumah Tahanan Negara Arjasa	-	4.392.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.392.000,00	
129	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Surabaya, Kot.Surabaya, Jawa Timur	-	-	-	-	268.300,00	3.160.217,00	599.404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.027.921,00	
130	Kantor Rupbasan Blitar	-	-	-	-	27.000,00	2.492.605,00	247.811,00	1.037.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.804.416,00	
131	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jombang	-	3.333.000,00	-	-	147.500,00	815.380,00	682.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.978.056,00	
132	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Mojokerto	-	6.550.000,00	-	-	-	-	-	817.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.367.000,00	
133	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasuruan	-	3.660.000,00	-	-	-	341.712,00	57.910,00	432.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.491.622,00	
134	Ruphasan Probolinggo	-	14.547.000,00	-	-	1.433.000,00	1.351.000,00	225.598,00	1.069.861,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.626.459,00	
135	Balai Pemasyarakatan Surabaya	-	-	-	-	598.000,00	3.912.932,00	95.051,00	341.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.946.983,00	
136	Balai Pemasyarakatan Pamekasan	-	-	-	-	-	3.976.320,00	2.689.904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.666.224,00	
137	Balai Pemasyarakatan Malang	-	-	-	-	-	2.146.327,00	1.447.245,00	-	1.504.213,00	-	-	-	-	-	-	-	5.097.785,00	
138	Balai Pemasyarakatan Bojonegoro	-	-	-	-	374.600,00	809.500,00	69.000,00	550.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.803.600,00	
139	Balai Pemasyarakatan Kediri	-	-	-	-	-	2.305.184,00	675.553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.980.737,00	
140	Balai Pemasyarakatan Madiun	-	23.254.000,00	-	-	234.440,00	2.557.665,00	683.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.729.835,00	
141	Balai Pemasyarakatan Jember	-	7.407.000,00	-	-	347.633,00	3.098.000,00	470.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.323.103,00	
142	Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	238.757.587,00	-	-	-	-	-	-	-	238.757.587,00	
143	Rumah Tahanan Negara Sabang	-	16.952.000,00	-	-	-	-	-	-	28.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	44.952.000,00	
144	Rumah Tahanan Negara Sigli	-	20.138.000,00	-	-	-	-	-	-	247.880.312,00	-	-	-	-	-	-	-	268.018.312,00	
145	Lembaga Pemasyarakatan Lhok Seumawe	-	-	-	-	-	-	-	-	102.066.094,00	-	-	-	-	-	-	-	102.066.094,00	
146	Cabang Rumah Tahanan Negara Lhok Sukon	-	41.415.000,00	-	-	38.947.792,00	81.504.671,00	-	-	92.289.174,00	-	-	-	-	-	-	-	254.156.637,00	
147	Cabang Rumah Tahanan Negara Beureun	-	-	-	-	-	23.599.732,00	-	-	63.405.750,00	-	-	-	-	-	-	-	87.005.482,00	
148	Rumah Tahanan Negara Takengon	-	35.469.000,00	-	-	80.409.543,00	-	-	-	42.978.539,00	-	-	-	-	-	-	-	158.857.082,00	
149	Cabang Rumah Tahanan Negara Kota Bakti	-	29.962.000,00	-	-	-	-	-	-	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	34.912.000,00	
150	Lembaga Pemasyarakatan Langsa	-	111.246.000,00	2.160.000,00	utang tunjangan struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.406.000,00	
151	Lembaga Pemasyarakatan Kuala Simpang	-	-	-	-	238.533.600,00	-	144.065.453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.599.053,00	
152	Rumah Tahanan Negara Idi	-	36.777.000,00	-	-	3.245.000,00	6.306.750,00	-	-	21.995.664,00	-	-	-	-	-	-	-	68.324.414,00	
153	Lembaga Pemasyarakatan Kutacane	-	116.265.000,00	-	-	-	-	-	-	73.648.500,00	-	-	-	-	-	-	-	189.913.500,00	
154	Cabang Rumah Tahanan Negara Blangkajeren	-	16.131.000,00	-	-	-	-	-	-	93.410.296,00	-	-	-	-	-	-	-	109.541.296,00	
155	Cabang Rumah Tahanan Negara Calang	-	6.720.000,00	-	-	-	-	-	-	63.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	70.370.000,00	

NO	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																JUMLAH UTANG	
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar									Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpn (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp		Uang Pailit
Rp	Keterangan			Rp	Keterangan														
156	Rumah Tahanan Negara Tapaktuan	-	24.984.000,00	-	-	-	-	-	-	-	142.211.009,00	-	-	-	-	-	-	-	167.195.009,00
157	Cabang Rumah Tahanan Negara Singkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.797.450,00	-	-	-	-	-	-	-	41.797.450,00
158	Cabang Rumah Tahanan Negara Sinabang	-	3.198.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.384.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.582.000,00
159	Rutan Kelas Iib Bener Meriah Provinsi Aceh	-	79.836.000,00	-	-	-	-	-	-	-	49.810.000,00	-	-	-	-	-	-	-	129.646.000,00
160	Rumah Tahanan Negara Janthoi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.782.771,00	-	-	-	-	-	-	-	79.782.771,00
161	Balai Pemasyarakatan Kutacane	-	109.824.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.824.000,00
162	Rumah Tahanan Kelas Iib Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.210.210,00	-	-	-	-	-	-	-	299.210.210,00
163	Lapas Narkotika Kelas Iii Langsa Propinsi Aceh	-	42.359.000,00	-	-	-	-	-	-	-	578.707.847,00	-	-	-	-	-	-	-	621.066.847,00
164	Lapas Kelas Iii Blangpidie	-	42.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	66.384.870,00	-	-	-	-	-	-	-	108.624.870,00
165	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.745.154,00	-	-	-	-	-	-	-	174.745.154,00
166	Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan	-	-	-	-	-	58.125.353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.125.353,00
167	Rumah Tahanan Negara Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721.904.076,00	-	-	-	-	-	-	-	721.904.076,00
168	Lembaga Pemasyarakatan Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588.955.853,00	-	-	-	-	-	-	-	588.955.853,00
169	Cabang Rumah Tahanan Negara Pancur Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.785.899,00	-	-	-	-	-	-	-	118.785.899,00
170	Lembaga Pemasyarakatan Binjai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489.038.195,00	-	-	-	-	-	-	-	489.038.195,00
171	Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura	-	-	-	-	-	96.940.254,00	-	-	-	41.050.956,00	-	-	-	-	-	-	-	137.991.210,00
172	Lapas Tanjung Balai Asahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.990.903,00	-	-	-	-	-	-	-	487.990.903,00
173	Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652.652.189,00	-	-	-	-	-	-	-	652.652.189,00
174	Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.759.000,00	-	-	-	-	-	-	-	408.759.000,00
175	Rumah Tahanan Negara Kabanjahe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.233.256,00	-	-	-	-	-	-	-	2.233.256,00
176	Cabang Rumah Tahanan Negara Kota Pinang	-	-	-	-	-	5.978.418,00	-	-	-	98.531.171,00	-	-	-	-	-	-	-	104.509.589,00
177	Rumah Tahanan Negara Labuhan Deli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.802.864,00	-	-	-	-	-	-	-	767.802.864,00
178	Lembaga Pemasyarakatan Tebingtinggi Deli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.811.491,00	-	-	-	-	-	-	-	245.811.491,00
179	Lapas Lubuk Pakam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.499.302,00	-	-	-	-	-	-	-	340.499.302,00
180	Rumah Tahanan Negara Sidikalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.479.546,00	-	-	-	-	-	-	-	277.479.546,00
181	Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955.671.594,00	-	-	-	-	-	-	-	955.671.594,00
182	Lembaga Pemasyarakatan Sibolga	-	-	-	-	31.939.590,00	13.679.582,00	-	-	-	911.791.144,00	-	-	-	-	-	-	-	957.410.316,00
183	Lapas Gunung Sitoli	-	-	-	-	-	7.254.363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.254.363,00
184	Cabang Rumah Tahanan Negara Pulau Telo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.051.158,00	-	-	-	-	-	-	-	55.051.158,00
185	Lapas Padang Sidempuan	-	-	-	-	-	21.751.065,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.751.065,00
186	Rumah Tahanan Negara Balige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.830.355,00	-	-	-	-	-	-	-	50.830.355,00
187	Cabang Rumah Tahanan Negara Sipirok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.416.255,00	-	-	-	-	-	-	-	108.416.255,00
188	Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan	-	32.716.000,00	-	-	-	-	-	-	-	194.416.253,00	-	-	-	-	-	-	-	227.132.253,00

NO	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																	JUMLAH UTANG
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar								Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga		
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpn (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Uang Paill	
Rp	Keterangan			Rp	Keterangan														
219	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.379.569,00	-	-	-	-	-	-	476.379.569,00	
220	Balai Pemasyarakatan Lahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.264.000,00	97.264.000,00	
221	Lapas Kelas Ili Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan	-	131.810.000,00	-	-	-	-	-	-	-	248.674.119,00	-	-	-	-	-	-	380.484.119,00	
222	Lapas Kelas Ili Kayu Agung Propinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.372.268,00	-	-	-	-	-	-	358.372.268,00	
223	Lapas Narkotika Kelas Ili Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.610.198,00	-	-	-	-	-	-	713.610.198,00	
224	Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung	-	-	-	-	-	2.652.482,00	-	1.400.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.053.242,00	
225	Lembaga Pemasyarakatan Metro	-	-	-	-	363.500,00	8.795.007,00	-	1.021.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.180.077,00	
226	Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475.166.861,00	-	-	-	-	-	882.869,00	476.049.730,00	
227	Lembaga Pemasyarakatan Anak Kotabumi	-	-	-	-	-	-	86.528,00	2.100.500,00	-	10.509.000,00	-	-	-	-	-	-	12.696.028,00	
228	Rumah Tahanan Negara Menggala	-	21.885.000,00	-	-	-	17.093.811,00	-	-	-	101.500.000,00	-	-	-	-	-	-	140.478.811,00	
229	Rumah Tahanan Negara Sakadana	-	-	-	-	-	7.233.821,00	-	-	-	17.180.532,00	-	-	-	-	-	-	24.414.353,00	
230	Rumah Tahanan Negara Krui	-	-	-	-	-	2.273.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.273.730,00	
231	Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.425.000,00	-	-	-	-	-	-	271.425.000,00	
232	Lembaga Pemasyarakatan Kalianda	-	-	-	-	-	21.314.915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.314.915,00	
233	Rumah Tahanan Negara Kotabumi	-	56.570.000,00	-	-	-	6.199.204,00	-	1.075.500,00	-	70.223.000,00	-	-	-	-	-	-	134.067.704,00	
234	Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	-	50.334.000,00	-	-	-	9.885.065,00	-	-	-	327.528.000,00	-	-	-	-	-	-	387.747.065,00	
235	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Lampung	-	-	-	-	-	5.837.129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.837.129,00	
236	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-	-	1.247.250,00	-	57.206.000,00	-	-	-	-	-	-	58.453.250,00	
237	Balai Pemasyarakatan Metro	-	-	-	-	-	1.801.366,00	931.453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.732.819,00	
238	Rumah Tahanan Negara Bandar Lampung	-	-	-	-	-	115.217.545,00	-	-	-	262.286.000,00	-	-	-	-	-	-	377.503.545,00	
239	Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ili Gunung Sugih	-	-	-	-	-	14.775.706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.775.706,00	
240	Rumah Tahanan Kelas Ili Kota Agung	-	-	-	-	-	7.840.600,00	-	-	-	206.640.000,00	-	-	-	-	-	-	214.480.600,00	
241	Lapas Anak Kelas Ili Bandar Lampung Propinsi Lampung	-	851.000,00	-	-	-	12.718.514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.569.514,00	
242	Lembaga Pemasyarakatan Pontianak	-	241.977.000,00	-	-	-	52.592.181,00	761.500,00	-	-	514.088.805,00	-	-	-	-	-	-	809.419.486,00	
243	Rumah Tahanan Negara Sanggau	-	84.106.650,00	-	-	1.424.500,00	-	51.320,00	528.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	86.110.970,00	
244	Lembaga Pemasyarakatan Singkawang	-	80.782.000,00	-	-	1.185.710,00	10.474.608,00	8.000,00	907.500,00	-	142.542.003,00	-	-	-	-	-	-	235.899.821,00	
245	Rumah Tahanan Negara Mempawah	-	-	-	-	6.527.000,00	7.054.379,00	904.500,00	-	-	273.159.134,00	-	-	-	-	-	-	287.645.013,00	
246	Rumah Tahanan Negara Sambas	-	-	-	-	-	11.480.195,00	-	-	-	264.765.176,00	-	-	-	-	-	-	276.245.371,00	
247	Lembaga Pemasyarakatan Sintang	-	205.839.000,00	-	-	-	12.992.961,00	988.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.820.421,00	
248	Lembaga Pemasyarakatan Ketapang	-	53.938.000,00	-	-	-	1.722.500,00	6.993.650,00	-	-	192.486.126,00	-	-	-	-	-	-	255.140.276,00	
249	Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara Sungai Raya	-	60.088.000,00	-	-	-	3.304.011,00	391.570,00	-	-	26.106.753,00	-	-	-	-	-	-	89.890.334,00	

NO	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA															JUMLAH UTANG	
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar								Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpon (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulgog	Lain-Lain		Rp	Keterangan		Rp
Rp	Keterangan			Rp	Keterangan													
250	Balai Pemasarakatan Pontianak	-	34.583.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.870.000,00	-	-	-	-	56.453.000,00
251	Rumah Tahanan Negara Landuk	-	27.717.000,00	-	-	-	3.878.217,00	737.500,00	-	-	-	185.040.421,00	-	-	-	-	-	217.373.138,00
252	Rumah Tahanan Negara Bengkayang	-	24.547.000,00	-	-	373.000,00	5.100.462,00	-	-	-	-	114.000.175,00	-	-	-	-	-	144.020.637,00
253	Rumah Tahanan Negara Patussibau	-	-	-	-	18.028.364,00	16.179.035,00	-	-	-	-	32.378.535,00	-	-	-	-	-	66.585.934,00
254	Rumah Tahanan Negara Pontianak	-	100.175.000,00	-	-	3.354.600,00	33.021.267,00	55.410,00	804.070,00	-	-	415.308.569,00	-	-	-	-	-	552.718.916,00
255	Balai Pemasarakatan Sintang	-	-	-	-	-	685.817,00	93.673,00	696.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.475.669,00
256	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pontianak	-	-	-	-	66.000,00	455.365,00	-	701.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.222.865,00
257	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Singkawang	-	-	-	-	-	1.050.068,00	159.494,00	511.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.721.062,00
258	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sanggau	-	7.110.700,00	-	-	-	-	-	605.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.716.200,00
259	Lpka Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	-	38.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.500.000,00
260	Lembaga Pemasarakatan Palangkaraya	-	86.221.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.119.450,00	-	-	-	-	-	113.340.450,00
261	Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas	-	46.930.000,00	-	-	20.290.200,00	-	-	1.083.000,00	-	-	193.470.848,00	-	-	-	-	-	261.774.048,00
262	Lembaga Pemasarakatan Muara Tewe	-	44.202.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.449.932,00	-	-	-	-	-	129.651.932,00
263	Lembaga Pemasarakatan Pangkalan Bun	-	58.009.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	116.744.970,00	-	-	-	-	-	174.753.970,00
264	Lapas Sampit	-	69.260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.880.834,00	-	-	-	-	-	75.140.834,00
265	Rumah Tahanan Negara Buntok	-	27.810.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.118.175,00	-	-	-	-	-	53.928.175,00
266	Lapas Kelas Iii Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah	-	286.290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.290.000,00
267	Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	1.451.985,00	-	-	103.065.491,00	-	-	-	-	-	104.517.476,00
268	Balai Pemasarakatan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah	-	4.339.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.339.000,00
269	Lapas Narkotika Kelas Iii Kasongan Propinsi Kalimantan Tengah	-	104.203.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.013.751,00	-	-	-	-	-	108.216.751,00
270	Rutan Kelas Iib Tamiyang Layang Propinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.973.228,00	-	-	-	-	-	112.973.228,00
271	Lembaga Pemasarakatan Banjarmasin	-	-	-	-	18.960.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.960.975,00
272	Lembaga Pemasarakatan Anak Martapura	-	-	-	-	-	23.500.368,00	31.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.531.938,00
273	Rumah Tahanan Negara Pelaihari	-	-	-	-	20.000,00	4.227.180,00	127.000,00	1.368.298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.742.478,00
274	Rumah Tahanan Negara Kandungan	-	-	-	-	232.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.500,00
275	Rumah Tahanan Negara Rantau	-	-	-	-	2.068.300,00	4.514.552,00	30.660,00	783.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.397.012,00
276	Lembaga Pemasarakatan Amuntai	-	-	-	-	2.872.000,00	-	-	1.477.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.349.000,00
277	Rumah Tahanan Negara Tanjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.235.807,00	-	-	-	-	-	1.235.807,00
278	Lembaga Pemasarakatan Kelas Iii Tanjung	-	60.947.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.776.602,00	-	-	-	-	-	139.723.602,00
279	Lapas Kelas Iii Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.917.647,00	-	-	-	-	-	235.917.647,00
280	Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot	-	-	-	-	49.409.200,00	-	-	-	-	-	642.179.815,00	-	-	-	-	-	691.589.015,00
281	Balai Pemasarakatan Balikpapan	-	-	-	-	416.075,00	1.932.604,00	34.570,00	1.233.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.616.249,00

NO	SATKER	UTANG PIHAK KETIGA																	JUMLAH UTANG
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar									Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga	
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpn (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Uang Paillit	
Rp	Keterangan			Rp	Keterangan														
282	Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan	-	-	-	-	2.093.842,00	-	34.570,00	1.011.570,00	-	474.093.134,00	-	-	-	-	-	-	477.233.116,00	
283	Rumah Tahanan Negara Tanjung Redep	-	-	-	-	9.268.000,00	-	-	-	-	153.282.227,00	-	-	-	-	-	-	162.550.227,00	
284	Lembaga Pemasyarakatan Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958.061.705,00	-	-	-	-	-	-	958.061.705,00	
285	Lapas Tomgarong	-	82.170.000,00	-	-	181.691.500,00	-	-	756.787,00	-	302.554.515,00	-	-	-	-	-	-	567.172.802,00	
286	Rumah Tahanan Negara Balikpapan	-	139.031.000,00	-	-	10.762.305,00	23.341.687,00	106.083,00	1.015.500,00	-	592.094.971,00	-	-	-	-	-	-	766.351.546,00	
287	Balai Pemasyarakatan Samarinda, Kot.Samarinda, Kalimantan Timur	-	-	-	-	260.944,00	2.406.536,00	34.570,00	446.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.148.050,00	
288	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Samarinda	-	-	-	-	213.559,00	1.880.012,00	-	1.166.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.260.371,00	
289	Rumah Tahanan Negara Samarinda	-	-	-	-	7.030.060,00	29.037.602,00	902.000,00	-	-	473.240.605,00	-	-	-	-	-	-	510.210.267,00	
290	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda	-	78.200.150,00	-	-	6.611.210,00	34.428.389,00	99.300,00	2.194.500,00	-	1.701.267.000,00	-	-	-	-	-	-	1.822.800.549,00	
291	Lapas Kelas Ili Bontang Propinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	322.542.500,00	28.576.876,00	55.000,00	776.000,00	480.000,00	992.318.000,00	-	-	-	-	-	-	1.344.748.376,00	
292	Cabang Rumah Tahanan Negara Amurang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.314.838,00	-	-	-	-	-	-	8.314.838,00	
293	Lembaga Pemasyarakatan Tondano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.695.787,00	-	-	-	-	-	-	125.695.787,00	
294	Cabang Rumah Tahanan Negara Tomako	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.338.438,00	-	-	-	-	-	-	7.338.438,00	
295	Lapas Perempuan Kelas IIB Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.156.022,00	-	-	-	-	-	-	49.156.022,00	
296	Lembaga Pemasyarakatan Bitung	-	-	-	-	41.070.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.070.000,00	
297	Balai Pemasyarakatan Palu	-	-	-	-	-	1.682.408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.682.408,00	
298	Lembaga Pemasyarakatan Palu	-	-	-	-	-	24.668.304,00	-	-	-	411.800.612,00	-	-	-	-	-	-	436.468.916,00	
299	Rumah Tahanan Negara Donggala	-	-	-	-	-	274.152,00	-	-	-	528.116.266,00	-	-	-	-	-	-	528.390.418,00	
300	Cabang Rumah Tahanan Negara Parigi	-	15.868.000,00	-	-	-	3.647.789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.515.789,00	
301	Lembaga Pemasyarakatan Toli-Toli	-	-	-	-	-	2.989.962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.989.962,00	
302	Cabang Rumah Tahanan Negara Lele	-	-	-	-	-	3.566.664,00	-	-	-	46.244.600,00	-	-	-	-	-	-	49.811.264,00	
303	Lembaga Pemasyarakatan Luvuk	-	-	-	-	-	11.062.658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.062.658,00	
304	Cabang Rumah Tahanan Negara Kolonedale	-	-	-	-	-	3.952.549,00	-	-	-	44.095.682,00	-	-	-	-	-	-	48.048.231,00	
305	Rumah Tahanan Negara Poso	-	-	-	-	-	5.894.064,00	-	-	-	607.432,00	-	-	-	-	-	-	6.501.496,00	
306	Lembaga Pemasyarakatan Ampara	-	-	-	-	-	5.776.681,00	-	-	-	349.248.135,00	-	-	-	-	-	-	355.024.816,00	
307	Rumah Tahanan Negara Palu	-	-	-	-	-	7.032.804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.032.804,00	
308	Balai Pemasyarakatan Luwu, Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	1.102.607,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.102.607,00	
309	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Palu	-	-	-	-	-	2.223.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.223.060,00	
310	Balai Pemasyarakatan Watampone	-	29.641.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.641.000,00	
311	Lembaga Pemasyarakatan Maros	-	64.660.000,00	-	-	1.976.100,00	10.277.219,00	-	1.208.026,00	-	70.289.697,00	-	-	-	-	-	-	148.411.042,00	
312	Lapas Takalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.339.510,00	-	-	-	-	-	-	139.339.510,00	
313	Rumah Tahanan Negara Jeneponto	-	35.535.000,00	-	-	3.882.000,00	-	-	-	-	21.847.812,00	-	-	-	-	-	-	61.264.812,00	
314	Rumah Tahanan Negara Selayar	-	645.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.435.140,00	

NO	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																JUMLAH UTANG
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar								Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga	
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpn (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	
Rp	Keterangan			Rp	Keterangan													
315	Rumah Tahanan Negara Banta Eng	-	-	-	-	434.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.000,00
316	Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba	2.373.360,00	70.401.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.774.360,00
317	Rumah Tahanan Negara Malino	-	-	-	-	-	-	-	-	39.162.893,00	-	-	-	-	-	-	-	39.162.893,00
318	Rumah Tahanan Negara Sinjai	-	40.291.000,00	-	-	-	-	-	-	67.090.601,00	-	-	-	-	-	-	-	107.381.601,00
319	Lembaga Pemasyarakatan Palopo	-	-	-	-	21.656.000,00	-	-	-	406.074.885,00	-	-	-	-	-	-	-	427.730.885,00
320	Rumah Tahanan Negara Makale	-	32.230.000,00	-	-	391.000,00	1.490.500,00	34.000,00	1.685.000,00	39.929.000,00	-	-	-	-	-	-	-	75.759.500,00
321	Rumah Tahanan Negara Masamba	-	-	-	-	512.700,00	-	-	-	118.736.695,00	-	-	-	-	-	-	-	119.249.395,00
322	Lapas Anak Pare-Pare	172.881,00	-	-	-	-	-	-	-	11.661.590,00	-	-	-	-	-	-	-	11.834.471,00
323	Rumah Tahanan Negara Pinrang	-	-	-	-	-	9.917.542,00	-	-	50.248.776,00	-	-	-	-	-	-	-	60.166.318,00
324	Rumah Tahanan Negara Rappang	-	6.826.000,00	-	-	-	-	-	-	106.847.570,00	-	-	-	-	-	-	-	113.673.570,00
325	Rumah Tahanan Negara Barru	-	29.446.000,00	-	-	-	-	-	-	395.791.066,00	-	-	-	-	-	-	-	425.237.066,00
326	Rumah Tahanan Negara Sengkang	-	-	-	-	-	-	-	-	88.133.268,00	-	-	-	-	-	-	-	88.133.268,00
327	Rumah Tahanan Negara Watansopeng	-	30.291.000,00	-	-	-	-	-	-	47.697.040,00	-	-	-	-	-	-	-	77.988.040,00
328	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sungguminasa	-	12.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.740.000,00
329	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Ujung Pandang, Kot.Ujung Pandang, Sulawesi Selatan	-	-	-	-	2.788.275,00	2.206.735,00	63.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.058.150,00
330	Lembaga Pemasyarakatan Kendari	-	-	-	-	-	36.588.095,00	-	-	240.215.600,00	-	-	-	-	-	-	-	276.803.695,00
331	Rumah Tahanan Negara Raha	-	-	-	-	-	3.485.538,00	227.390,00	-	230.113.950,00	-	-	-	-	-	-	-	233.826.878,00
332	Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau	-	-	-	-	-	11.778.000,00	800.800,00	-	90.505.893,00	-	-	-	-	-	-	-	103.084.693,00
333	Rumah Tahanan Negara Kolaka	-	-	-	-	-	-	-	-	44.617.464,00	-	-	-	-	-	-	-	44.617.464,00
334	Rumah Tahanan Negara Unaaha	-	-	-	-	-	-	-	-	462.978.271,00	-	-	-	-	-	-	-	462.978.271,00
335	Rumah Tahanan Negara Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	83.777.333,00	-	-	-	-	-	-	-	83.777.333,00
336	Balai Pemasyarakatan Bau-Bau	-	-	-	-	-	1.379.000,00	844.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.223.800,00
337	Balai Pemasyarakatan Ambon	-	18.781.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.781.700,00
338	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Ambon	-	-	-	-	-	1.209.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.170,00
339	Lembaga Pemasyarakatan Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	115.326.119,00	-	-	-	-	-	-	-	115.326.119,00
340	Lembaga Pemasyarakatan Pitu	-	-	-	-	-	4.627.791,00	-	319.000,00	51.643.325,00	-	-	-	-	-	-	-	56.590.116,00
341	Lembaga Pemasyarakatan Tual	-	8.085.000,00	-	-	3.008.000,00	2.875.000,00	138.000,00	1.513.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.619.000,00
342	Rumah Tahanan Negara Ambon	-	59.544.000,00	-	-	-	6.192.052,00	1.983.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.719.852,00
343	Rumah Tahanan Negara Masohi	-	-	-	-	-	-	-	-	28.734.695,00	-	-	-	-	-	-	-	28.734.695,00
344	Cabang Rumah Tahanan Negara Saparua	-	-	-	-	-	1.340.359,00	3.170.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.511.089,00
345	Cabang Rumah Tahanan Negara Dobo	-	13.514.000,00	-	-	-	-	-	-	25.454.000,00	-	-	-	-	-	-	-	38.968.000,00
346	Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	-	-	-	-	-	2.055.790,00	-	-	43.568.838,00	-	-	-	-	-	-	-	45.624.628,00
347	Cabang Rumah Tahanan Negera Bandanaira	-	-	-	-	210.000,00	824.836,00	605.000,00	-	4.575.600,00	-	-	-	-	-	-	-	6.215.436,00
348	Cabang Rumah Tahanan Negara Wahi	-	-	-	-	-	206.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.592,00

NO	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																	JUMLAH UTANG
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar									Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga	
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpn (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan	
				Rp	Keterangan								Rp	Keterangan					
378	Lembaga Pemasyarakatan Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	233.396.788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	233.396.788,00
379	Lembaga Pemasyarakatan Ende	-	-	-	-	-	-	-	-	139.991.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	139.991.390,00
380	Rumah Tahanan Negara Maumere	-	-	-	-	-	-	-	-	3.921.742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.921.742,00
381	Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lpa) Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	261.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	261.067,00
382	Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Lembata	-	-	-	-	-	-	-	-	11.917.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.917.156,00
383	Balai Pemasyarakatan Jayapura	-	15.388.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.388.000,00
384	Lembaga Pemasyarakatan Abepura	-	-	-	-	-	-	-	-	109.730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	109.730.000,00
385	Lembaga Pemasyarakatan Wamena	-	30.489.000,00	-	-	-	-	-	-	498.416.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	528.905.000,00
386	Lembaga Pemasyarakatan Biak	-	-	-	-	-	-	-	-	98.879.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	98.879.844,00
387	Lembaga Pemasyarakatan Serui	-	61.111.000,00	-	-	-	-	-	-	58.321.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	119.432.000,00
388	Lembaga Pemasyarakatan Merauke	-	-	-	-	-	-	-	-	45.024.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.024.250,00
389	Lembaga Pemasyarakatan Timika	-	-	-	-	-	20.750.274,00	-	-	175.733.666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	196.483.940,00
390	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura	-	55.853.000,00	-	-	-	-	-	-	312.004.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	367.857.000,00
391	Lapas Argamakmur	-	-	-	-	76.561.172,00	-	-	-	135.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	211.795.172,00
392	Rumah Tahanan Negara Manna	-	-	-	-	-	-	-	-	136.550.493,00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.550.493,00
393	Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu	-	-	-	-	-	79.375.221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.375.221,00
394	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Arga Makmur	-	10.518.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.518.000,00
395	Rutan Kelas Ii B Bengkulu	-	-	-	-	-	52.908.424,00	-	-	365.564.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	418.472.495,00
396	Lembaga Pemasyarakatan Tobello	-	-	-	-	-	83.941.776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.941.776,00
397	Rumah Tahanan Negara Ternate	-	32.968.000,00	-	-	-	98.892.864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.860.864,00
398	Lembaga Pemasyarakatan Jailolo	-	-	-	-	-	12.189.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.189.540,00
399	Balai Pemasyarakatan Ternate, Maluku Utara	-	19.864.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.864.000,00
400	Balai Pemasyarakatan Serang	-	-	-	-	-	4.724.338,00	979.000,00	-	631.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.334.338,00
401	Lapas Kelas Iii Cilegon Propinsi Banten	-	48.729.000,00	-	-	-	-	-	-	552.719.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	601.448.400,00
402	Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang	-	-	-	-	4.664.375,00	14.288.304,00	38.668,00	-	40.549.964,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.541.311,00
403	Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	70.917.361,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.917.361,00
404	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang	-	-	-	-	13.465.500,00	8.793.671,00	73.860,00	-	40.365.194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	62.698.225,00
405	Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang	-	-	-	-	-	-	86.570,00	-	1.355.383.752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.355.470.322,00
406	Lembaga Pemasyarakatan Serang	-	-	-	-	-	19.269.300,00	59.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.328.450,00
407	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang	-	-	-	-	-	19.647.846,00	80.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.728.556,00
408	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Serang	-	12.017.000,00	-	-	-	-	351.645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.368.645,00
409	Rumah Tahanan Negara Pandeglang	-	-	-	-	5.063.750,00	10.308.272,00	45.070,00	-	23.002.625,00	-	1.593.570,00	-	-	-	-	-	-	40.013.287,00

[illegible]

NO	SATKER	RUTANG PIHAK KETIGA																	JUMLAH UTANG	
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar									Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga		
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpn (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Paus)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan		Rp
Rp	Keterangan			Rp	Keterangan															
440	Rumah Tahanan Negara Majene	167.100,00	-	20.115,00	Tunjangan anak PNS, suami/istri, dan pembulatan	38.515,00	5.318.445,00	1.562.000,00	-	372.008,00	72.435.457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	79.913.640,00
441	Lembaga Pemasyarakatan Polewali	1.363.014,00	65.496.000,00	-	-	1.031.200,00	8.947.169,00	68.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.905.523,00
442	Cabang Rumah Tahanan Negara Mamasa	881.400,00	-	105.786,00	Tunjangan anak PNS, suami/istri, dan pembulatan	-	1.944.136,00	1.489.207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.420.529,00
443	Rumah Tahanan Negara Mamuju	-	42.449.000,00	-	-	238.000,00	-	34.070,00	-	-	50.016.264,00	-	847.000,00	-	-	-	-	-	-	93.584.334,00
444	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Mamuju	-	-	-	-	532.982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532.982,00
445	Lapas Perempuan Kelas Iii Mamuju	-	9.535.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.535.000,00
446	Balai Pemasyarakatan Polewali	-	-	-	-	37.500,00	997.470,00	746.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781.540,00
447	Lembaga Pemasyarakatan Tarakan	-	38.848.000,00	-	-	-	-	-	-	-	139.929.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	178.777.994,00
448	Lembaga Pemasyarakatan Numukan	-	-	-	-	-	15.014.807,00	-	-	-	882.981.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	897.996.435,00
449	Cabang Rumah Tahanan Negara Bagan Siapi-API	-	-	-	-	-	-	43.071.885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.071.885,00
450	Lapas Perempuan Kelas Iib Jambi	-	55.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.875.000,00
451	Lembaga Pemasyarakatan Curup	-	-	-	-	6.956.390,00	50.164.023,00	-	-	-	228.757.013,00	-	-	-	-	-	-	-	-	285.877.426,00
452	Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo	-	65.701.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.701.000,00
453	Lpka Banda Aceh, Provinsi Aceh	-	-	-	-	1.398.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398.200,00
454	Rumah Tahanan Kelas Iib Pasang Kayu	-	25.918.000,00	-	-	-	3.908.965,00	-	-	1.356.000,00	1.560.606,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.743.571,00
455	Rumah Tahanan Negara Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.125.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	131.125.418,00
T O T A L		239.896.477,00	10.397.551.500,00	2.385.537,00	-	2.036.316.417,00	3.183.415.696,00	278.476.484,00	107.317.760,00	9.019.221,00	59.253.402.032,00	-	268.143.515,00	-	-	-	138.616.469,00	-	-	75.914.541.108,00
DITJEN IMIGRASI																				
1	Kantor Imigrasi Tanjung Karang	-	-	-	-	1.203.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.203.800,00
2	Kantor Imigrasi Kalianda	-	-	-	-	-	14.831.397,00	322.184,00	2.000.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.154.178,00
3	Kantor Imigrasi Kelas Iii Kotabumi	-	-	-	-	-	11.965.365,00	33.220,00	687.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686.085,00
4	Kantor Imigrasi Tangerang	-	-	-	-	1.347.380,00	56.347.493,00	229.216,00	482.197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.406.286,00
5	Kantor Imigrasi Kelas I Serang	-	-	-	-	-	13.712.717,00	142.306,00	-	-	-	-	19.800.000,00	HONOR PPNPM	-	-	-	-	-	33.655.023,00
6	Kantor Imigrasi Cilegon	-	-	-	-	-	13.154.688,00	125.065,00	1.886.500,00	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.426.253,00
7	Kantor Imigrasi Surabaya	-	-	-	-	2.719.400,00	32.865.301,00	43.132,00	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.627.833,00
8	Kantor Imigrasi Tanjung Perak	-	41.942.000,00	-	-	1.433.300,00	41.609.519,00	1.742.377,00	23.892.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.619.696,00
9	Kantor Imigrasi Malang	-	10.109.000,00	-	-	2.049.450,00	22.751.052,00	755.513,00	-	8.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.673.815,00
10	Kantor Imigrasi Jember	-	2.094.750,00	-	-	60.000,00	11.205.564,00	336.372,00	2.182.600,00	194.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.073.686,00
11	Kantor Imigrasi Blitar	-	-	-	-	-	17.007.222,00	782.162,00	1.860.705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.650.089,00
12	Kantor Imigrasi Madiun	-	-	-	-	458.000,00	16.584.362,00	589.370,00	2.352.400,00	297.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.281.132,00
13	Kantor Imigrasi Kelas Iii Pamekasan	-	-	-	-	706.640,00	11.760.380,00	2.724.202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.191.222,00
14	Kantor Imigrasi Kelas Iii Kediri	-	-	-	-	-	11.984.265,00	1.773.624,00	2.976.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.733.889,00
15	Kantor Imigrasi Kelas Iii Ponorogo	-	13.105.000,00	-	-	-	8.240.570,00	1.072.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.417.825,00
16	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	-	-	-	-	1.998.660,00	8.732.307,00	165.086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.896.053,00
17	Kantor Imigrasi Cilacap	-	27.669.000,00	-	-	65.000,00	18.846.668,00	166.230,00	3.759.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.506.398,00
18	Kantor Imigrasi Pati	-	-	-	-	-	16.719.352,00	360.098,00	2.976.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.056.020,00

NO	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																JUMLAH UTANG			
		Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar								Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga				
		Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpom (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp		Keterangan	Rp	Uang Pailit
				Rp	Keterangan								Rp	Keterangan							
52	Kantor Imigrasi Balikpapan	-	2.886.000,00	-	-	936.090,00	17.312.641,00	3.738.062,00	1.863.400,00	834.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.570.693,00	
53	Kantor Imigrasi Tanjung Redeb	-	-	-	-	274.000,00	8.709.818,00	52.000,00	1.202.740,00	-	-	-	5.633.628,00	Langganan Koran Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	15.872.186,00	
54	Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan	-	-	-	-	1.560.486,00	19.108.487,00	295.480,00	3.206.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.170.953,00	
55	Kantor Imigrasi Biak	-	17.057.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.057.000,00	
56	Kantor Imigrasi Tembagapura	-	-	-	-	-	14.053.304,00	202.335,00	2.028.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.284.239,00	
57	Kantor Imigrasi Ujung Pandang	-	66.247.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.247.000,00	
58	Kantor Imigrasi Klas Iii Bau-Bau	-	-	-	-	-	5.370.376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.370.376,00	
59	Kantor Imigrasi Klas Iii Wakatobi	-	-	-	-	74.000,00	3.950.114,00	-	-	1.132.687,00	440.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.597.301,00	
60	Kantor Imigrasi Pekanbaru	-	51.121.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.121.000,00	
61	Kantor Imigrasi Ambon	-	26.926.750,00	-	-	2.412.310,00	7.013.036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.352.096,00	
62	Kantor Imigrasi Kelas Iii Ketapang	-	22.582.000,00	-	-	-	9.973.391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.555.391,00	
63	Kantor Imigrasi Kelas Iii Palopo	-	23.127.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.127.000,00	
64	Rumah Detensi Imigrasi Makassar	-	15.556.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.556.000,00	
65	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Banjarmasin	-	16.942.300,00	-	-	-	945.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.887.300,00	
66	Kantor Imigrasi Singkawang	-	29.945.000,00	-	-	517.955,00	96.182,00	1.565.000,00	10.041.117,00	965.106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.130.360,00	
67	Kanim Sumbawa Besar	-	-	-	-	-	129.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.680,00	
68	Kanim Palu	-	-	-	-	-	3.512.669,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.512.669,00	
69	Kanim Gorontalo	-	-	-	-	-	12.930.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.930.248,00	
70	Kanim Tual	-	-	-	-	-	11.897.828,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.897.828,00	
71	Kanim Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	5.732.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.732.000,00	
72	Kantor Imigrasi Tanjung Pinang	-	-	-	-	3.584.300,00	185.500,00	14.066.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.835.800,00	
73	Kantor Imigrasi Klas Iii Putussibau	-	21.956.000,00	-	-	-	6.825.117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.781.117,00	
74	Kantor Imigrasi Kelas Iii Takengon Kabupaten Aceh Tengah	-	14.540.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.540.450,00	
75	Kantor Imigrasi Lhok Seumawe	-	-	157.664.231,00	Tunker Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.664.231,00	
TOTAL		4.380.400,00	2.019.602.500,00	176.370.231,00	-	50.566.537,00	870.711.666,00	50.452.919,00	153.702.191,00	3.858.806,00	12.042.000,00	-	40.467.488,00	-	-	-	-	-	-	3.382.154.738,00	
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL																					
1	Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelek Tual	-	-	-	-	-	10.646.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.646.000,00	
TOTAL		-	-	-	-	-	10.646.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.646.000,00	
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL																					
1	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.240.000,00	-	-	-	-	-	-	37.240.000,00	
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.410.000,00	-	-	-	-	-	-	153.410.000,00	
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.580.000,00	-	-	-	-	-	-	9.580.000,00	
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	
5	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	
6	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.616.000,00	-	-	-	-	-	-	74.616.000,00	
7	Badan Pembinaan Hukum Nasional	2.183.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.009.307,00	-	-	-	-	-	-	102.192.307,00	
8	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	
TOTAL		2.183.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409.855.307,00	-	-	-	-	-	-	412.038.307,00	
JUMLAH		256.459.877,00	12.483.225.000,00	179.755.768,00	-	2.098.370.360,00	4.682.952.278,00	343.837.297,00	261.792.451,00	17.983.527,00	59.265.444.032,00	-	10.704.401.860,00	-	379.186.966,00	-	138.616.469,00	14.406.595.599,00	105.218.621.484,00		



LAMPIRAN

**PENJELASAN ATAS
POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

ANALISA POS-POS LO dan LPE

1 PENDAPATAN PNBP LO

Pendapatan PNBP LO = Pendapatan PNBP LRA + ((Pendapatan YMHD Akhir - Pendapatan YMHD Awal) + (Piutang PNBP Akhir - Piutang PNBP Awal) + (Kas di Bendahara Penerimaan Akhir - Kas di Bendahara Penerimaan Awal)) - (Pendapatan Diterima Dimuka Awal - Pendapatan Diterima Dimuka Akhir) - Pendapatan TP/TGR - Pendapatan Pengembalian Belanja - Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan PNBP LO	3.528.582.438.941,00
Pendapatan PNBP LRA	3.563.546.496.086,00
Selisih Antara LO dan LRA	(34.964.057.145,00)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Akhir	6.258.866,00
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Awal	24.546.979,00
Kenaikan/Penurunan Pendapatan YMHD	(18.288.113,00)
Piutang PNBP Akhir	395.576.641.921,00
Piutang PNBP Awal	400.943.942.282,00
Kenaikan/Penurunan Piutang PNBP	(5.367.300.361,00)
Kas Di Bendahara Penerimaan Akhir	0,00
Kas Di Bendahara Penerimaan Awal	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas di Bend. Penerima	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Akhir	297.076.909.128,00
Pendapatan Diterima Dimuka Awal	293.567.777.306,00
Kenaikan/Penurunan Pend. Ditrn Dimuka (l - m)	(3.509.131.822,00)
Pendapatan Ganti Rugi Negara (42579x)	(440.623.105,00)
Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL (42591x)	(21.938.608.848,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan (425931)	(603.242.347,00)
PNBP yang membentuk Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO	(22.982.474.300,00)
Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN (42512x)	(4.344.573.336,00)
PNBP yang membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO	(4.344.573.336,00)
FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Jurnal Pencatatan Piutang PNBP atas Transaksi Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan	(2.370.000,00)
Jurnal Pembayaran Piutang PNBP atas Transaksi Penerimaan Kembali Belanja TAYL	2.619.630.589,00
Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan atau Penerimaan Kembali Belanja Yang Belum Disetor Ke Kas Negara	18.163.599.300,00
Jurnal Koreksi Lainnya atas Transaksi Piutang	4.944.197.790,00
Jurnal Koreksi Lainnya atas Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka	(1.620.000,00)
Jurnal Pencatatan Piutang PNBP atas Aset Belum Register	(23.798.294.860,00)
Jurnal Pencatatan Piutang PNBP atas Transaksi Kelebihan Pembayaran Belanja BAMA (52xxxx)	(667.588.066,00)
Jurnal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Pendapatan Jasa Giro	156.034,00
Total Pendapatan PNBP LO	3.528.582.438.941,00
Selisih	0,00

2 BEBAN PEGAWAI LO

Beban Pegawai LO = Belanja Pegawai LRA - Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu + Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan		
Beban Pegawai LO		6.304.961.550.122,00
Belanja Pegawai LRA		6.306.574.297.290,00
Selisih Antara LO dan LRA		(1.612.747.168,00)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		
Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL		(14.314.141.401,00)
Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan		12.728.011.414,00
FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI		
Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Pengembalian Belanja Pegawai		(370.000,00)
Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pengembalian Belanja Yang Belum Disetor Ke Kas Negara		(26.247.181,00)
Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan		0,00
Total Beban Pegawai		6.304.961.550.122,00
Selisih (a - h)		0,00

3 BEBAN PERSEDIAAN LO

Beban Persediaan LO = Belanja Barang Persediaan LRA + Persediaan Awal - Persediaan Akhir		
Beban Persediaan LO		636.996.764.306,00
Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218xx)		463.043.461.060,00
Selisih Antara LO dan LRA		173.953.303.246,00
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		
Persediaan Awal		547.645.750.308,00
Persediaan Akhir		411.488.366.832,00
Persediaan Belum diregister		0,00
Kenaikan/Penurunan Persediaan		136.157.383.476,00
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan		1.480.260.402,00
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin		2.158.365.675,00
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi		0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan		1.000.000,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya		5.613.800,00
Belanja Barang Persediaan Akun 523xxx		3.645.239.877,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		(28.020.186.707,00)
Beban Persediaan Suku Cadang		(1.984.034.947,00)
Beban Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO		(30.004.221.654,00)
Beban Peralatan dan Mesin Utk Diserahkan Kpd Masy.		(5.145.000,00)
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Utk Diserahkan Kpd Masy.		0,00
Beban Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.		(700.616.061,00)
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masy.		(923.545.028,00)
Beban Persediaan ATL Untuk Diserahkan Kpd Masy.		0,00
Beban Brg Persed. Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.		0,00
Beban Yang Membentuk Beban untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO		(1.629.306.089,00)

FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI		
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan		500.132.376,00
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan		0,00
Transfer Keluar Barang Persediaan		(744.980.041.135,00)
Transfer Masuk Barang Persediaan		707.901.857.349,00
Saldo Awal Persediaan Hasil Reklasifikasi Aset		0,00
Koreksi Nilai Persediaan (Kurang)		0,00
Koreksi Nilai Persediaan (Tambah)		21.090.031.820,00
Pendapatan Penyesuain Nilai Persediaan		770.392.672.043,00
Beban Penyesuain Nilai Persediaan		(685.280.365.506,00)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang		(2.615.188.918,00)
Penghapusan Barang Persediaan		0,00
Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Persediaan		0,00
Jurnal Manual Koreksi Nilai Persediaan (Karena Selisih Kurs)		(2.421.160,00)
Hibah Barang Persediaan		205.689.554,00
Persediaan yang didapat dari Perolehan Lainnya		81.265.294,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset		(1.625.706.831,00)
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan (53)		116.282.750,00
Total Beban Persediaan		636.996.764.306,00
Selisih		0,00
Penjelasan Selisih:		

4 BEBAN BARANG DAN JASA LO

Beban Barang dan Jasa LO = Belanja Barang dan Jasa LRA - Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun		
Beban Barang dan Jasa LO		2.929.889.611.316,00
Belanja Barang dan Jasa LRA		3.009.554.357.317,00
Selisih Antara LO dan LRA		(79.664.746.001,00)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		
Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL		(104.823.363.666,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan		19.299.066.199,00
FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI		
Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis		(141.214.293,00)
Beban yang membentuk Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO		(141.214.293,00)
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan		0,00
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun menggunakan Akun Non Persediaan		(500.132.376,00)
Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang membentuk Aset		1.554.165.440,00
Jurnal Manual Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)		3.010.021.545,00

Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	(5.034,00)
Beban Ekstrakomptable	2.587.200.492,00
Jurnal Transfer Masuk Utang Belanja Barang	0,00
Jurnal Transfer Keluar Utang Belanja Barang	0,00
Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Kelebihan Pembayaran Belanja BAMA (52xxxx)	(667.588.066,00)
Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang	(2.000.000,00)
Hibah Barang Persediaan	19.103.758,00
Total Beban Barang dan Jasa	2.929.889.611.316,00
Selisih	0,00
Penjelasan Selisih:	

5 BEBAN PEMELIHARAAN LO

Beban Pemeliharaan LO = Belanja Pemeliharaan LRA	
Beban Pemeliharaan LO	410.670.100.817,00
Belanja Pemeliharaan LRA (Akun 523xxx)	384.108.466.090,00
Selisih Antara LO dan LRA	26.561.634.727,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	28.020.186.707,00
Beban Persediaan Suku Cadang	1.984.034.947,00
Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO	30.004.221.654,00
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	(1.480.260.402,00)
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	(2.158.365.675,00)
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	(1.000.000,00)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	(5.613.800,00)
Belanja Akun 523xxx yang membentuk Barang Persediaan	(3.645.239.877,00)
Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Aset	(792.637.000,00)
Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Persediaan	0,00
Jurnal Manual Belanja Barang yang masih harus dibayar dengan menggunakan Akun 523	0,00
Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan TAYL	0,00
Beban Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	110.974.900,00
Hibah Barang Persediaan Pemeliharaan	884.315.050,00
Total Beban Pemeliharaan	410.670.100.817,00
Selisih	0,00
Penjelasan Selisih:	

6 BEBAN PERJALANAN DINAS LO

Beban Perjalanan Dinas LO = Belanja Perjalanan Dinas LRA - Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun	
Beban Perjalanan Dinas LO	625.199.086.404,00
Belanja Perjalanan Dinas LRA	632.654.237.299,00
Selisih Antara LO dan LRA	(7.455.150.895,00)

	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
	Pembayaran Utang Blj. Perjadin TAYL	(17.455.060.243,00)
	Utang Belanja Perjadin Tahun Anggaran Berjalan	9.999.909.348,00
	FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
	Jurnal Pencatatan Piutang PNBP atas Transaksi Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	0,00
	Total Beban Perjalanan Dinas	625.199.086.404,00
	Selisih	0,00
Penjelasan Selisih:		

7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT LO

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO = Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		
	Beban Barang Utk Diserahkan ke Masy. LO	1.629.306.089,00
	Belanja Barang Utk Diserahkan ke Masy. LRA	0,00
	Selisih Antara LO dan LRA	1.629.306.089,00
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
	Beban Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00
	Beban Peralatan dan Mesin Utk Diserahkan Kpd Masy.	5.145.000,00
	Beban Jalan, Irigasi, Jaringan Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00
	Beban Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	700.616.061,00
	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masy.	923.545.028,00
	Beban Persediaan ATL Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0,00
	Beban Brg Persed. Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00
	Beban Yang Membentuk Beban Utk Diserahkan Kpd Masyarakat LO	1.629.306.089,00
	Total Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.629.306.089,00
	Selisih	0,00
Penjelasan Selisih:		

8 BEBAN BANTUAN SOSIAL LO

	Beban Bantuan Sosial LO	0,00
BEBAN INI TIDAK SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENKUMHAM		

9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi LO = Akumulasi Penyusutan Awal - Akumulasi Penyusutan Akhir + Akumulasi		
	Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	1.159.729.402.684,00
	Akumulasi Penyusutan Awal	(6.432.500.955.345,00)
	Akumulasi Penyusutan Akhir	(7.452.672.172.607,00)
	Akumulasi Penyusutan --- Saldo Awal	0,00
	Akumulasi Penyusutan --- Transfer Masuk	(167.682.029.326,00)
	Akumulasi Penyusutan --- Koreksi Tambah	(33.061.965.730,00)
	Akumulasi Penyusutan --- Reklas Masuk	(73.137.832.399,00)
	Akumulasi Penyusutan --- Hibah Masuk	0,00
	Akumulasi Amortisasi --- Penyusutan Pertama Kali	0,00
	Akumulasi Amortisasi --- Koreksi Tambah	0,00
	Akum. Penyusutan Transaksional (Masuk)	(273.881.827.455,00)
	Akumulasi Amortisasi --- Koreksi Kurang	0,00

Akumulasi Penyusutan --- Transfer Keluar	168.846.247.527,00
Akumulasi Penyusutan --- Koreksi Kurang	102.655.464.923,00
Akumulasi Penyusutan --- Reklas Keluar	79.980.488.640,00
Akumulasi Penyusutan --- Hibah Keluar	0,00
Akumulasi Penyusutan --- Penghapusan BMN	0,00
Akumulasi Penyusutan --- Transaksi Normalisasi Aset Tetap	0,00
Akum. Penyusutan Transaksional (Keluar)	351.482.201.090,00
Akumulasi Penyusutan Penghapusan Aset	61.957.811.787,00
Jurnal Manual atas Beban Penyusutan	0,00
Total Beban Penyusutan	1.159.729.402.684,00
Selisih	0,00
Penjelasan Selisih:	

10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LO

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO = Penyisihan Piutang Akhir - Penyisihan Piutang Awal - Penghapusan	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO	10.594.819.272,00
Penyisihan Piutang Akhir	(348.117.845.484,00)
Penyisihan Piutang Awal	(359.918.163.517,00)
Penghapusan Piutang	0,00
Koreksi Lainnya Penyisihan Piutang	1.205.498.761,00
Total Beban Penyisihan Piutang	10.594.819.272,00
Selisih	0,00
Penjelasan Selisih:	

11 BEBAN LAIN-LAIN LO

Beban Lain- Lain LO	0,00
BEBAN INI TIDAK SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENKUMHAM	

12 PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR LO

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO = Pendapatan Pelepasan Aset LRA	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO	4.344.573.336,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN LRA	4.344.573.336,00
Selisih	0,00
Penjelasan Selisih:	

13 BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR LO

Beban Pelepasan Aset Non lancar LO = Beban Kerugian Pelepasan Aset Neraca Percobaan Akrua	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar LO	(39.785.242.316,00)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	39.785.242.316,00
Selisih	0,00
Penjelasan Selisih:	

14 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA LO

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO = Pendapatan TP/TGR LRA + Pendapatan Pengembalian	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LO	798.343.795.611,00
Pendapatan Ganti Rugi Negara (42579x)	440.623.105,00

Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL (42591x)	21.938.608.848,00
Selisih Antara LO dan LRA	775.964.563.658,00
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	4.057.929,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	10.819.490.258,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	770.392.672.043,00
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	603.242.347,00
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	1.101.118.364,00
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	672.266,00
FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pengembalian Belanja TAYL	(4.349.882.744,00)
Jurnal (Pencatatan Baru) Piutang Jangka Panjang TP/TGR	(26.893.105,00)
Jurnal Pembayaran Piutang PNBPN dengan menggunakan Akun 42591x	(2.579.913.700,00)
Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	798.343.795.611,00
Selisih	0,00
Penjelasan Selisih:	

15 BEBAN DARI KEGIATAN OPERASIONAL LAINNYA LO

Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya LO	689.182.033.242,00
Beban Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan	141.214.293,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	685.280.365.506,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	2.615.188.918,00
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	44.146.161,00
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.101.118.364,00
Selisih	0,00

16 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit LO = Surplus/Defisit LPE	
Surplus/Defisit LO	(8.376.606.985.504,00)
Surplus/Defisit LPE	(8.376.606.985.504,00)
Selisih	0,00

17 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal LPE = Ekuitas Awal Neraca	
Ekuitas Awal LPE	24.482.912.484.963,00
Ekuitas Awal Neraca	24.482.912.484.963,00
Selisih	0,00

18 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir LPE = Ekuitas Akhir Neraca	
Ekuitas Akhir LPE	24.168.855.611.305,00
Ekuitas Akhir Neraca	24.168.855.611.305,00
Selisih	0,00

19 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS LPE

Transaksi Antar Entitas = Belanja - Pendapatan + Transfer Masuk - Transfer Keluar + Pengesahan Hibah-	
Transaksi Antar Entitas LPE	9.127.691.712.422,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.640.163.039.531,00

	Diterima dari Entitas Lain	(3.563.546.496.086,00)
	Transfer Masuk	1.596.630.355.060,00
	Transfer Keluar	(1.633.983.515.275,00)
	Pengesahan Hibah Tahun Berjalan + TAYL	88.428.349.196,00
	Pengembalian Pengesahan Hibah	(20.004,00)
	Selisih DKEL dan LRA karena penerimaan Hibah Uang	0,00
	Total Transfer Antar Entitas	9.127.691.712.422,00
	Selisih	0,00
Penjelasan Selisih:		



LAMPIRAN

PENJELASAN ATAS
POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018

JENIS KOREKSI		NILAI KOREKSI	KETERANGAN
KAS LAINNYA DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DARI HIBAH			
	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	(92.073.597,00)	Koreksi atas sisa hibah yang telah disetorkan pada TA 2016
SubTotal		(92.073.597,00)	
BELANJA BARANG YANG DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)			
	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	(191.657,00)	Koreksi atas Kurang Catat Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka (Prepaid)
	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SAMARINDA	(19.667.956,00)	
SubTotal		(19.859.613,00)	
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
	LAPAS ANAK KELAS III BANDAR LAMPUNG PROPINSI LAMPUNG	5.702.210,00	Koreksi atas Kurang Catat Piutang PNB
	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	100.000,00	
	KANTOR IMIGRASI NGURAH RAI	(4.950.000.000,00)	Koreksi atas Lebih Catat Piutang PNB
SubTotal		(4.944.197.790,00)	
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(500,00)	Koreksi atas kesalahan pencatatan/perhitungan penyisihan piutang PNB pada TAYL
	LAPAS ANAK KELAS III BANDAR LAMPUNG PROPINSI LAMPUNG	(28.511,00)	
	KANTOR IMIGRASI NGURAH RAI	1.275.750.000,00	Koreksi atas Lebih Catat Penyisihan Piutang PNB
SubTotal		1.275.720.989,00	
PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI			
	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(42.800.002,00)	Koreksi atas Lebih Catat atau Kurang Catat Piutang PNB
	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	1.750.000,00	
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	1.200.000,00	
	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	3.512.252,00	
	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(8,00)	
SubTotal		(36.337.758,00)	
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI			
	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(70.443.362,00)	Koreksi atas kesalahan pencatatan/perhitungan penyisihan piutang TP/TGR pada TAYL
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	(6.000,00)	
	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	100.000,00	

JENIS KOREKSI		NILAI KOREKSI	KETERANGAN
	KANTOR IMIGRASI TERNATE	120.000,00	
SubTotal		(70.229.362,00)	
DANA LAINNYA			
	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	14.478.828.000,00	Pencatatan atas dana yang ditempatkan di Department of Justice Hongkong terkait dengan kasus Century senilai HKD7.800.000 dengan kurs Rp1.856,26 sesuai KMK No.53 Tahun 2018
SubTotal		14.478.828.000,00	
BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SANGGAU	(296.000,00)	Koreksi atas Kurang Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar TAYL
	BALAI PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	(131.350,00)	
SubTotal		(427.350,00)	
BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(1,00)	Koreksi atas Lebih Catat atau Kurang Catat Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Yang Terjadi pada Tahun Anggaran Sebelumnya
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	12.650.000,00	
	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBOLGA	25.626.307,00	
	LAPAS BATAM	77.974,00	
	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SANGGAU	(8.250,00)	
	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	4.067.000,00	
	RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	3.059.675,00	
	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	1,00	
	LAPAS TENGGARONG	(57.250,00)	
	BALAI PEMASYARAKATAN LUWU, SULAWESI TENGAH	6.925.871,00	
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	911.212,00	
	KANTOR IMIGRASI MADIUN	270.650,00	
SubTotal		53.523.189,00	
PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA			
	KANTOR IMIGRASI JAKARTA TIMUR	1.620.000,00	Koreksi atas Lebih Catat Pendapatan Diterima Dimuka/ Kesalahan Penjurnalan
SubTotal		1.620.000,00	
BEBAN LANGGANAN TELEPON			
	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	(5.000,00)	Kesalahan penjurnalan

JENIS KOREKSI		NILAI KOREKSI	KETERANGAN
SubTotal		(5.000,00)	
BEBAN LANGGANAN LISTRIK			
	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	(10,00)	Kesalahan penjurnalan
	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	(24,00)	
SubTotal		(34,00)	
BEBAN KERUGIAN PELEPASAN ASET			
	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG	23.958.000,00	Koreksi atas penyusutan transaksional tahun lalu yang tidak terbentuk
	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	377.231.742,00	
	KANTOR IMIGRASI BAGAN SIAPI-API	73.000.000,00	
	KANTOR IMIGRASI DEPOK	700.066.450,00	
SubTotal		1.174.256.192,00	
TOTAL KOREKSI		11.820.817.866,00	

Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar per 31 Desember 2018

URAIAN	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK	SELISIH			KETERANGAN
	Dari BA 013	Tujuan ke BA 013	dari/ke BA 013	TRANSFER KELUAR Dari Non BA 013	TRANSFER MASUK Ke Non BA 013	
BELANJA BARANG YANG DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)	(382.974.282,00)	382.974.282,00	0,00	0,00	0,00	
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	(13.715.201.501,00)	13.715.201.501,00	0,00	0,00	0,00	
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG PNPB	92.326.007,00	(92.326.007,00)	0,00	0,00	0,00	
BARANG KONSUMSI	(113.687.268.526,00)	113.687.268.526,00	0,00	0,00	0,00	
AMUNISI	(18.274.846.040,00)	18.274.846.040,00	0,00	0,00	0,00	
BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN	(17.141.025,00)	17.141.025,00	0,00	0,00	0,00	
PITA CUKAI, MATERAI DAN LEGES	(60.000,00)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
PERALATAN DAN MESIN UNTUK DIJUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	0,00	629.830.000,00	629.830.000,00	629.830.000,00	0,00	Selisih disebabkan Transfer Keluar sebesar Rp629.830.000,00 dari Non BA 013 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikirimkan untuk 5 satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan
ASET TETAP LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	(8.466.000,00)	8.466.000,00	0,00	0,00	0,00	
BARANG PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KE MASYARAKAT	(612.102.890.184,00)	574.394.876.398,00	(37.708.013.786,00)	526.156.000,00	38.234.169.786,00	Selisih disebabkan Transfer Keluar sebesar Rp526.156.000,00 dari Non BA 013 yaitu KONSULAT JENDERAL RI DI PENANG dan selisih Transfer Masuk sebesar Rp38.234.169.786,00 ke Non BA 013 untuk 71 Kedutaan/ Konsulat Jenderal di Luar Negeri
PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	(772.999.775,00)	772.999.775,00	0,00	0,00	0,00	
PERSEDIAAN LAINNYA	(116.369.585,00)	116.369.585,00	0,00	0,00	0,00	

URAIAN	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK	SELISIH			KETERANGAN
	Dari BA 013	Tujuan ke BA 013	dari/ke BA 013	TRANSFER KELUAR Dari Non BA 013	TRANSFER MASUK Ke Non BA 013	
TANAH	(44.776.788.171,00)	44.626.538.171,00	(150.250.000,00)	0,00	150.250.000,00	Selisih disebabkan Transfer masuk sebesar Rp150.250.000,00 ke Non BA 013 untuk Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar
PERALATAN DAN MESIN	(741.591.479.600,00)	741.660.039.070,00	68.559.470,00	69.509.875,00	4.698.405,00	Selisih disebabkan Transfer Keluar dari Non BA 013 yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp28.076.925,00, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali sebesar Rp18.717.950,00 dan Pusat Komunikasi sebesar Rp22.715.000,00. Selisih Transfer Masuk sebesar Rp4.698.875,00 ke Non BA 013 untuk Konsulat Jenderal RI di Jeddah sedangkan sebesar Rp3.748.000,00 disebabkan adanya transfer masuk barang dari kode satker lama Rutan Pandeglang dengan kondisi barang rusak
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	146.866.419.586,00	(146.905.700.887,00)	(39.281.301,00)	(41.274.538,00)	(1.993.237,00)	Selisih disebabkan Transfer Keluar dari Non BA 013 yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp21.057.693,00, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali sebesar Rp11.698.720,00 dan Pusat Komunikasi sebesar Rp8.518.125,00. Selisih Transfer Masuk sebesar Rp1.993.237,00 ke Non BA 013 untuk Konsulat Jenderal RI di Jeddah
GEDUNG DAN BANGUNAN	(246.682.637.032,00)	265.697.684.018,00	19.015.046.986,00	0,00	1.353.756.100,00	Selisih disebabkan adanya Transfer Masuk ke 10 satker Kemenkumham berupa Aset Tetap Renovasi yang perlakuan pencatatannya pada satker penerima sebagai Gedung dan Bangunan melalui penginputan tanpa adk sebesar Rp20.368.803.086,00 dan selisih Transfer masuk sebesar Rp1.353.756.100,00 ke Non BA 013 untuk Direktorat Bina Penataan Bangunan

URAIAN	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK	SELISIH			KETERANGAN
	Dari BA 013	Tujuan ke BA 013	dari/ke BA 013	TRANSFER KELUAR Dari Non BA 013	TRANSFER MASUK Ke Non BA 013	
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	18.556.518.593,00	(17.553.328.199)	1.003.190.394,00	0,00	(795.035.314,00)	Selisih disebabkan Transfer masuk sebesar Rp795.035.314,00 ke Non BA 013 untuk Direktorat Bina Penataan Bangunan dan Transfer Masuk sebesar Rp208.155.080,00 disebabkan adanya penyusutan transaksional dari Aset Tetap Renovasi
ASET TETAP RENOVASI	(20.368.803.086,00)	0,00	(20.368.803.086,00)	0,00	0,00	Selisih disebabkan adanya Transfer Keluar sebesar Rp20.368.803.086,00 dari 10 satker Kemenkumham berupa Aset Tetap Renovasi melalui adk sedangkan satker pencatatannya pada satker penerima melalui penginputan tanpa adk
ASET TETAP LAINNYA	(370.245.641,00)	370.245.641,00	0,00	0,00	0,00	
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	200.309.108,00	0,00	200.309.108,00	0,00	0,00	Selisih disebabkan Transfer Keluar sebesar Rp200.309.108,00 adanya penyusutan transaksional dari Aset Tetap Renovasi
PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI	(11.195.500,00)	11.195.500,00	0,00	0,00	0,00	
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI	55.977,00	(55.977,00)	0,00	0,00	0,00	
SOFTWARE	(3.030.841.000,00)	3.030.841.000,00	0,00	0,00	0,00	
AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE	378.855.126,00	(378.855.126,00)	0,00	0,00	0,00	
ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	(101.500.000,00)	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	(3.748.000,00)	0,00	(3.748.000,00)	0,00	0,00	Selisih sebesar Rp3.748.000,00 disebabkan adanya transfer keluar barang dengan kondisi rusak dari kode satker lama Rutan Pandeglang

URAIAN	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK	SELISIH			KETERANGAN
	Dari BA 013	Tujuan ke BA 013	dari/ke BA 013	TRANSFER KELUAR Dari Non BA 013	TRANSFER MASUK Ke Non BA 013	
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI	3.748.000,00	(3.748.000,00)	0,00	0,00	0,00	
BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR	65.932.000,00	(65.932.000,00)	0,00	0,00	0,00	
BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR	10.982.846.218,00	(10.982.846.218,00)	0,00	0,00	0,00	
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	(1.661.928.818,00)	1.661.928.818	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	(1.640.530.373.151,00)	1.603.177.212.936,00	(37.353.160.215,00)	1.184.221.337,00	38.945.845.740,00	

Rincian Pengesahan Hibah Langsung Per 31 Desember 2018

No.	SATKER PENERIMA	DONOR	BENTUK	NILAI HIBAH
SEKRETARIAT JENDERAL				47.594.912.000,00
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	Jakarta Intercultural School (JIS)	Peralatan dan Mesin (Laptop)	91.000.000,00
		Jakarta Intercultural School (JIS)	Aset Tetap Lainnya (Buku Lainnya)	
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	Pemprov Lampung	Kendaraan	1.009.639.000,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	Pemda MTB	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750.000.000,00
		Pemda Maluku	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.668.250.000,00
		Pemda MBD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	Pemda Muko-Muko	Tanah	764.541.000,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	Pemprov Sultra	Hibah Kas	400.000.000,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan	1.411.482.000,00
7	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	Pemprov Papua Barat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	37.500.000.000,00
DITJEN PEMASYARAKATAN				10.440.199.014,00
8	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL	BANK BPD DIY CABANG SENOPATI	Barang (Peralatan dan Mesin) berupa TV LED	2.050.000,00
		BANK BANTUL	Barang (Peralatan dan Mesin) berupa Loker	1.020.000,00
		BANK BRI KANCA BANTUL	Barang (Peralatan dan Mesin) berupa AC Split 2 PK	6.584.000,00
		WOORI BANK	Barang (Peralatan dan Mesin) berupa AC Split 1 PK	3.500.000,00
		KPPDK RUTAN BANTUL	Barang (Peralatan dan Mesin) berupa CCTV 1 set	6.702.000,00
9	LAPAS SUKABUMI	PEMDA KOTA SUKABUMI	Uang (Kas)	100.000.000,00
10	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	PEMDA KAB.SIKKA	Uang (Kas)	99.184.000,00
11	LAPAS BANGKO	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN	Barang (Tanah)	336.000.000,00
12	LAPAS SAMPIT	DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN	Barang (Peralatan dan Mesin) berupa Genset	199.415.000,00
13	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	BANK JABAR BANTEN	Barang (Peralatan dan Mesin) berupa 1 set PC & Printer	15.000.000,00
14	RUMAH TAHANAN NEGARA BATAM	PT. Fajar Basthi Sejahtera	Gedung Layanan Kunjungan Rutan Batam	418.880.000,00
15	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MANADO	Abram Lalolorang	A.C Window	3.450.000,00
		Edwin L. Metusala,SH	A.C Window	3.350.000,00
		Veysi Opit,SE	A.C Window	3.450.000,00
		Rizkiyanto Hatta,SH	A.C Window	3.450.000,00
		Mizrawaty Zakaria	A.C Window	3.350.000,00
		Linus CH Hamel	Televisi	2.500.000,00
16	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA KENDARI	Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara	Tanah	1.030.000.000,00
17	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK BASUNG	Pemda Agam	Tanah Bangunan Rumah LP	535.625.000,00

No.	SATKER PENERIMA	DONOR	BENTUK	NILAI HIBAH
			Generator Set	
18	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL	Perorangan a.n. Jaka Prasetya	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	271.700.000,00
			Sound system	
19	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERA	Wheel Chair	5.000.000,00
		PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERA	Gedung dan bangunan	180.000.000,00
20	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SUGIH	Pemda Lampung Tengah	Hibah Barang berupa Mobil Ambulance	217.808.800,00
21	LAPAS KELAS III BANJAR PROPINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH KOTA BANJAR JAWA BARAT	Pompa	40.000.000,00
22	RUTAN KELAS II B DEPOK	Hibah Uang		500.000.000,00
		PT. Anugerah Vata Abadi	Gedung pertokoan / Koperasi /Pasar Permanen (blok A)	359.271.000,00
			Gedung pertokoan / Koperasi /Pasar Permanen (blok B)	
			Gedung pertokoan / Koperasi /Pasar Permanen (blok C)	
			Bangunan Parkir Terbuka Semi permanen	
			Bangunan Parkir Terbuka Semi permanen	
			Bangunan Terbuka Lainnya (gazebo dalam)	
			Bangunan Terbuka Lainnya (gazebo dalam)	
			Pagar lainnya	
			Pagar lainnya	
		Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kota Depok	P.C. Unit	39.229.700,00
		Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kota Depok	Printer	
		Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kota Depok	Rak besi	
		Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kota Depok	Buku	
23	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	ICITAP	Sabuk Tugas Pengamanan/Kopel 100 buah	82.212.000,00
			HT Bergagang Motorola dan Baterai Cadangan 200 unit	71.347.100,00
				583.000.000,00
24	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI	Pemkab Muaro Jambi	Tanah Bangunan Rumah LP	707.199.000,00
25	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	PT.Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Cibinong	Alat Pengolahan Air	188.000.000,00
26	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTABARU			170.000.000,00
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO		Hibah Uang	100.000.000,00
28	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO		Hibah Uang	200.041.747,00
29	LAPAS MUARA ENIM	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Tanah	130.066.255,00
30	RUMAH TAHANAN NEGARA BATURAJA	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Tanah	288.562.612,00
			Kendaraan Dinas da CCTV	186.900.000,00
				196.500.000,00

No.	SATKER PENERIMA	DONOR	BENTUK	NILAI HIBAH
31	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK NEGARA SUNGAI RAYA	Keuskuban Agung Pontianak	Kapel Santa Katarina dari Siena	135.000.000,00
32	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN		Hibah Uang	200.000.000,00
33	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG	Yayasan Al-Ishlah Kota Cilegon	(3020105001) Mobil Ambulace	187.500.000,00
34	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	BPD DIY Cabang Wates	LCD Projector/Infocus	5.000.000,00
35	LAPAS BREBES	Pemerintah Kabupaten Brebes	Sound System	50.000.000,00
36	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWÉ	Bank Indonesia Perwakilan Lhokseumawe	Mesin Jahit	4.150.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	Buku Lainnya	177.722.000,00
37	LAPAS LUBUK PAKAM	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pagar Permanen	428.357.000,00
38	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	Pemerintah Kota Metro	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	103.000.000,00
39	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	Pemkab Muaro Jambi	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.229.445.000,00
40	LPKA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO		Hibah Uang	100.000.000,00
41	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWODADI	Pemkab Grobogan	Penataan Sarana Air Bersih	193.870.000,00
42	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATAM	Pemprov Kepulauan Riau	Rak Roti Stainless, Meja Stainless, Spiral Mixer HS20HL, Oven 3 Loyang 1 Tingkat, dan Pembagi Adonan Roti	149.600.000,00
43	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NUNUKAN	Pemkab Nunukan	Lapangan Futsal	79.784.000,00
44	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA MUARA DUA	Pemkab OKU Selatan	Kamera CCTV	34.922.800,00
45	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	Pemkab Sragen	Gitar IBANEZ GRX55, GITAR CORT X6, EFFECT BEHRINGER X VAMP, EFFECT ZOOM G3XN, BASS GILMORE, KONTROL BAS HARKE HD150, KONTROL GITAR FENDER CHAMPION 100, dan MAPEX TORNADO	71.500.000,00
DITJEN IMIGRASI				26.862.305.202,00
46	KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN		Barang (Tanah)	1.500.000.000,00
			Barang (Gedung dan Bangunan)	313.162.000,00
			Barang (Peralatan dan Mesin) berupa PC, Laptop, Printer, Kamera, Sofa, Meja Pimpinan dan Staf serta Kursi Pimpinan	151.929.750,00
			Barang berupa Kursi Staf dan Kursi Lipat	6.187.500,00
47	KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN		Hibah mushola	396.202.000,00
48	KANTOR IMIGRASI TG. BALAI ASAHAN		Gedung Kantor	2.121.841.240,00
49	KANTOR IMIGRASI BANDA ACEH		Bangunan untuk pos jaga lainnya (pos satpam)	25.000.000,00
	KANTOR IMIGRASI MANADO	Yayasan Kornelius International	AC FLOOR STANDING (TCL)	10.998.000,00
		PT. Meares Soputan Mining	LAPTOP (LENOVO)	11.184.000,00
			INFOCUS (EPSON)	
			PRINTER (HP)	
		PT. Sumber Energi Jaya	AC SPLIT 1 PK (TCL)	14.850.000,00
			AC SPLIT 1.5 PK (AKARI)	

No.	SATKER PENERIMA	DONOR	BENTUK	NILAI HIBAH
			AC SPLIT 0.5 PK (AKARI)	
			AC SPLIT 1 PK (PANASONIC)	
			AC SPLIT 1 PK (SHARP)	
50	KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI	Pemerintah kabupaten Kerinci	Hibah berupa Tanah, Bangunan & Barang	1.638.689.900,00
51	KANTOR IMIGRASI KLAS II MUARA ENIM	Pemerintah kab.Musi Rawas	Tanah	224.000.000,00
			Peralatan dan Mesin (kamera, Printer, AC 1 PK, Router dan Firewall)	157.520.000,00
52	RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN	IOM (International Organization for Migration)	Penyerahan berupa Fasilitas Tambahan sebagai Sarana Pendukung Rumah Detensi Imigrasi Medan	68.105.000,00
53	RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU	IOM (International Organization for Migration)	Peralatan dan Mesin, Belanja Penambahan Nilai PM	121.720.000,00
54	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	IOM (International Organization for Migration)	Pompa Air	156.693.890,00
			Alat Ukur Universal Lainnya	
			Kipas Angin	
			Pulse Oximeter	
			Alat Kedokteran Umum Lainnya	
			Snellen Chard	
			Peralatan Komputer Lainnya	
			Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	
55	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	IOM (International Organization for Migration)	Peralatan dan Mesin	416.679.251,00
56	RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA	IOM (International Organization for Migration)	Peralatan dan mesin	37.765.000,00
			Gedung/Bangunan	882.880.060,00
57	RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK	IOM (International Organization for Migration)	Hibah Langsung dari International Organization for Migration	2.214.287.354,00
58	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	IOM (International Organization for Migration)	Peralatan dan Mesin	49.432.500,00
59	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	IOM (International Organization for Migration)	Peralatan dan Mesin	95.261.000,00
			Gedung / Bangunan	2.633.432.925,00
60	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	IOM (International Organization for Migration)	Gedung Bangunan	1.231.521.000,00
			Peralatan dan Mesin	330.130.000,00
			Penambahan Nilai Gedung	1.121.144.365,00
61	RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR	IOM (International Organization for Migration)	Dispenser	3.026.111.549,00
			Televisi	
			Televisi	
			Alat Pemadam Kebakaran	
			CCTV (camera)	

No.	SATKER PENERIMA	DONOR	BENTUK	NILAI HIBAH
			CCTV (monitor)	
			CCTV (UPS)	
			CCTV (DVR 16 Ch)	
			CCTV (Drying Rack + Cable)	
			Wall Fan	
			Kursi Besi (Dokter)	
			Kursi Besi (Pasien)	
			Lemari Locker	
			Mesin Pompa Air	
			Lemari Besi	
			Lemari Kaca	
			Hard Disk DVR	
			Kursi Belajar	
			Meja Kayu	
			Pos Jaga	
			Pagar Besi	
			Penambahan Daya Listrik dari 5 KvA menjadi 105 KvA	
			Pemasangan Teralis Besi pada Jendela da pintu Dapur	
			Pekerjaan Perbaikan	
			Pekerjaan Perbaikan	
			Pekerjaan Perbaikan	
			Atap kanopi polycarbonate (pekerjaan tambahan)	
			Pekerjaan Perbaikan	
			Perbaikan ruang kunjungan, ruang penyimpanan, dan ruang migran	
			Pembuatan jalur pipa air kotor	
			Pembuatan jalur pipa air kotor	
			Pembuatan jaringan instalasi pipa air bersih	
			Perbaikan pipa toilet	
			Pipa, kabel, pemasangan dll	
			Pengujian	
			Pembangunan Septik tank dan pemipaan	
			Perbaikan sistem kabel	
			Perbaikan Gedung Kosong	
			Perapian Lapangan	
			Pemangan paving block dan taman	
			Pengecatan Ulang	
62	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	IOM (International Organization for Migration)	Stationary Water Pump	2.280.124.761,00

[illegible]

No.	SATKER PENERIMA	DONOR	BENTUK	NILAI HIBAH
			Kursi Zeis (Kursi belajar)	
			Kompor Gas (alat dapur)	
			Kompor Gas (alat dapur)	
			Kompor Gas (alat dapur)	
			Meja Kerja Kayu	
			Meja Kerja Kayu	
			Meja Kerja Kayu	
			Meja Kerja Kayu	
			Lemari Es	
			Kursi Dorong	
			Kursi Dorong	
			Kursi Dorong	
			Kursi Dorong	
			Kursi Dorong	
			Kursi Dorong	
			Reach In Freezer	
			A.C. Split	
			Alat kesehatan umum lainnya (Troli Instrumen)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Troli Instrumen dua susun)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Negathoscope Single)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Oxygen silinder 1m3 + Regulator)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Minor Set)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Hecting Set)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Lampu kepala)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Diagnostic Set)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Lampu baca Rontgen)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Termometer Kuping)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Sterilizator UV)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Termometer Air Raksa)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Sirkum Set)	
			Alat kesehatan umum lainnya (Stetoskop)	
			Timbangan Digital	
64	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT DI TANJUNG PINANG	IOM (International Organization for Migration)	HIBAH BARANG	5.564.342.157,00
65	KANTOR IMIGRASI TANJUNG REDEB	PT. Berau Coal	Hibah brupa Barang untuk kantor	8.050.000,00
JUMLAH				84.897.416.216,00

Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Per 31 Desember 2018

No.	SATKER PENERIMA	DONOR	BENTUK	NILAI HIBAH
DITJEN PEMASYARAKATAN				
1	RUTAN KELAS II B DEPOK	Pemerintah Kota Depok	Uang	20.004,00
JUMLAH				20.004,00

Rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu Per 31 Desember 2018

No.	SATKER PENERIMA	DONOR	BENTUK	NILAI HIBAH
SEKRETARIAT JENDERAL				
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	Pemerintahan Provinsi Kalsel	Barang (Tanah)	151.560.000,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	Pemerintah Kota Bima	Barang (Tanah)	55.000.000,00
DITJEN PEMASYARAKATAN				
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	Marsha Soul Foundation	Barang (Peralatan olah raga)	24.600.000,00
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	Pemerintah Kabupaten Badung	Barang (1 unit Ambulance dan kelengkapannya)	316.358.400,00
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	Dinas Pertambangan dan energi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Barang (1 (satu) unit sumur bor)	119.820.000,00
6	LAPAS PEREMPUAN KELAS II DENPASAR	Pemerintah Daerah Tingkat II Badung	Barang (Statsion Wagon, Sice (sofa), Laptop, P.C. Unit (Komputer), Printer (Peralatan Personal Komputer)	401.152.000,00
7	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	Haji Dedeh	Barang (Pembangunan Kantin)	44.689.000,00
DITJEN IMIGRASI				
8	KANTOR IMIGRASI KLAS II MUARA ENIM	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	Barang (Peralatan dan Mesin kegiatan Operasional Pelayanan Permohonan SPRI dan E-Office Pada Unit Kerja Keimigrasian)	2.417.753.580,00
JUMLAH				3.530.932.980,00



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK:
NERACA

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 06/05/2019 11:48 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,473,362,985	1,294,724,415	1,178,638,570	91.03
Kas Lainnya dan Setara Kas	32,906,472,664	36,289,582,072	(3,383,109,408)	(9.32)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	11,586,621,509	14,616,502,667	(3,029,881,158)	(20.73)
Uang Muka Belanja (prepayment)	0	75,516,187,188	(75,516,187,188)	(100.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	6,258,866	24,546,979	(18,288,113)	(74.50)
Piutang Bukan Pajak	386,127,641,921	389,792,042,282	(3,664,400,361)	(0.94)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(347,983,315,237)	(359,843,265,606)	11,859,950,369	(3.30)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	38,144,326,684	29,948,776,676	8,195,550,008	27.37
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	337,616,858	594,027,312	(256,410,454)	(43.16)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,688,082)	(2,970,136)	1,282,054	(43.16)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	335,928,776	591,057,176	(255,128,400)	(43.16)
Persediaan	411,488,366,832	547,645,750,308	(136,157,383,476)	(24.86)
JUMLAH ASET LANCAR	496,941,338,316	705,927,127,481	(208,985,789,165)	(29.60)
ASET TETAP				
Tanah	12,625,444,631,053	12,672,489,520,638	(47,044,889,585)	(0.37)
Peralatan dan Mesin	6,680,447,076,850	5,714,938,492,900	965,508,583,950	16.89
Gedung dan Bangunan	10,457,963,798,623	11,135,467,855,672	(677,504,057,049)	(6.08)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	74,628,773,346	75,128,078,754	(499,305,408)	(0.66)
Aset Tetap Lainnya	68,218,739,768	70,832,527,797	(2,613,788,029)	(3.69)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	722,754,577,352	288,538,742,791	434,215,834,561	150.49
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,786,047,821,180)	(5,869,138,308,659)	(916,909,512,521)	15.62
JUMLAH ASET TETAP	23,843,409,775,812	24,088,256,909,893	(244,847,134,081)	(1.02)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,097,460,531	901,155,492	196,305,039	21.78
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(85,597,165)	(16,168,275)	(69,428,890)	429.41
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	1,011,863,366	884,987,217	126,876,149	14.34
Piutang Jangka Panjang lainnya	9,449,000,000	11,151,900,000	(1,702,900,000)	(15.27)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(47,245,000)	(55,759,500)	8,514,500	(15.27)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	9,401,755,000	11,096,140,500	(1,694,385,500)	(15.27)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	10,413,618,366	11,981,127,717	(1,567,509,351)	(13.08)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	526,019,128,257	486,690,695,488	39,328,432,769	8.08
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	14,478,828,000	0	14,478,828,000	0.00
Aset Lain-lain	349,586,548,982	271,241,635,576	78,344,913,406	28.88
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(611,529,694,834)	(563,362,646,686)	(48,167,048,148)	8.55
JUMLAH ASET LAINNYA	278,554,810,405	194,569,684,378	83,985,126,027	43.16
JUMLAH ASET	24,629,319,542,899	25,000,734,849,469	(371,415,306,570)	(1.49)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 06/05/2019 11:48 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	105,218,621,484	222,697,385,108	(117,478,763,624)	(52.75)
Hibah Yang Belum Disahkan	57,545,454	220,849,000	(163,303,546)	(73.94)
Pendapatan Diterima Dimuka	297,076,909,128	293,567,777,306	3,509,131,822	1.20
Uang Muka dari KPPN	2,473,362,985	1,294,724,415	1,178,638,570	91.03
Utang Jangka Pendek Lainnya	893,850	41,628,677	(40,734,827)	(97.85)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	404,827,332,901	517,822,364,506	(112,995,031,605)	(21.82)
JUMLAH KEWAJIBAN	404,827,332,901	517,822,364,506	(112,995,031,605)	(21.82)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,224,492,209,998	24,482,912,484,963	(258,420,274,965)	(1.06)
JUMLAH EKUITAS	24,224,492,209,998	24,482,912,484,963	(258,420,274,965)	(1.06)
JUMLAH EKUITAS	24,224,492,209,998	24,482,912,484,963	(258,420,274,965)	(1.06)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,629,319,542,899	25,000,734,849,469	(371,415,306,570)	(1.49)



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK: NERACA PERCOBAAN SALDO AWAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2018 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	794,832,966	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	499,891,449	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25,387,110,032	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	92,073,597	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	10,810,398,443	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	14,616,502,667	0
0.0	114213	Uang Muka Belanja Modal (prepayment)	75,516,187,188	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	24,546,979	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	389,665,823,477	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	126,218,805	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	100,129,169	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	493,898,143	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	359,842,742,160
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	523,446
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	1,834,706
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	1,135,430
0.0	117111	Barang Konsumsi	83,593,052,279	0
0.0	117112	Amunisi	22,875,548,823	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	89,828,901,429	0
0.0	117114	Suku Cadang	467,039,191	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	112,096,782	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,312,750,000	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	400,000	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	764,119,473	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	46,045,750	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	320,954,065,589	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	3,772,250,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	1,281,079,113	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	16,834,428,564	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	4,803,973,315	0
0.0	131111	Tanah	12,672,489,520,638	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,714,938,492,900	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,135,467,855,672	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	28,611,914,969	0
0.0	134112	Irigasi	16,934,509,459	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2018 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	134113	Jaringan	29,581,654,326	0
0.0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	46,803,522,444	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	24,029,005,353	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	288,538,742,791	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,602,514,871,035
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,214,457,972,033
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	18,702,394,702
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	3,594,542,775
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	24,081,233,212
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	5,787,294,902
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	901,155,492	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	11,151,900,000	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	16,168,275
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	55,759,500
0.0	162151	Software	334,379,570,940	0
0.0	162161	Lisensi	67,036,738,012	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	92,950,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	85,181,436,536	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	246,794,929,858	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	24,446,705,718	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	234,938,144,439
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	288,923,253,661
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	15,086,742,868
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	24,414,505,718
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	25,680,291,017
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	170,407,753,356
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	6,099,571,340
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	9,699,370,952
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	10,810,398,443
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	220,849,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	694,668,994
0.0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	292,873,108,312
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,294,724,415
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	41,628,677
0.0	391111	Ekuitas	0	24,482,912,484,963
JUMLAH			31,793,153,968,331	31,793,153,968,331



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK: NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	459,527,418,473	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	313,237,766,086	0
2.0	423141	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	34,230,000	0
2.0	423216	Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi,	0	0
2.0	423291	Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan	0	0
2.0	425112	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan,	650,000	0
2.0	425119	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	18,050,000	0
2.0	425122	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Yang	36,880,000	0
2.0	425129	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2,377,321,000	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,131,859,000	0
2.0	425132	Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Yang	219,969,000	0
2.0	425138	Estimasi Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG) Yang	2,800,000	0
2.0	425139	Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Yang	862,470,000	0
2.0	425211	Estimasi Pendapatan Paspor Yang Dialokasikan	1,908,097,000,000	0
2.0	425215	Estimasi Pendapatan Pelayanan Fidusia Yang Dialokasikan	497,388,650,000	0
2.0	425216	Estimasi Pendapatan Pelayanan Badan Hukum Yang	193,531,550,000	0
2.0	425217	Estimasi Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya Yang	179,340,525,000	0
2.0	425218	Estimasi Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual Yang	461,654,000,000	0
2.0	425219	Estimasi Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	18,600,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,251,500,000	0
2.0	425692	Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	70,700,000	0
2.0	425699	Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan	152,955,000	0
2.0	425764	Estimasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Yang	1,831,000	0
2.0	425791	Estimasi Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	24,000,000	0
2.0	425911	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun	56,001,000	0
2.0	425912	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran	36,000,000	0
2.0	425918	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun	89,000	0
2.0	425999	Estimasi Pendapatan Anggaran Lain-lain Yang Dialokasikan	1,100,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	2,229,605,677,857
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	44,518,678
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	140,913,159,870
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	40,661,160,310
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	72,456,409,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	103,148,586,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	4,880,817,225
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	120,669,204,560
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	517,769,728,000
2.0	511135	Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil	0	444,505,000
2.0	511137	Allotment Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa	0	70,000,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	6,747,758,000
2.0	511145	Allotment Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home	0	1,032,024,000
2.0	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	8,425,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	63,681,732,000
2.0	511153	Allotment Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	11,930,000
2.0	511192	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	105,630,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	28,294,904,500
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	3,093,512,385,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	193,207,167,008
2.0	521112	Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	1,384,417,059,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	31,370,741,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	7,569,835,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	83,977,600,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	69,083,330,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	252,682,249,400
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	54,176,832,000
2.0	521214	Allotment Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker	0	208,527,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	287,834,909,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	435,233,348,000
2.0	521812	Allotment Belanja Barang Persediaan Amunisi	0	60,000,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan	0	337,071,000
2.0	521821	Allotment Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	15,000,000
2.0	521831	Allotment Belanja Barang Persediaan untuk tujuan	0	113,904,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	41,463,890,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	157,410,577,992
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	8,742,138,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	15,872,473,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	76,239,909,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	287,257,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	48,158,400,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	293,277,340,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	88,372,564,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	103,434,787,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	166,528,903,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung	0	1,562,202,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,874,122,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	225,543,538,000
2.0	523122	Allotment Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan	0	522,943,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan	0	2,458,732,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1,378,741,000
2.0	523131	Allotment Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	1,251,000,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	227,058,000
2.0	523136	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	1,000,000
2.0	523191	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	5,614,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	1,054,671,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	361,949,098,000
2.0	524112	Allotment Belanja Perjalanan Tetap	0	683,700,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	69,339,981,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	86,073,446,600
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	103,838,103,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	78,301,289,000
2.0	524212	Allotment Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri	0	2,000,532,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	23,080,159,000
2.0	531111	Allotment Belanja Modal Tanah	0	50,000,000
2.0	531112	Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	10,000,000
2.0	531114	Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	6,000,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	919,356,740,000
2.0	532112	Allotment Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	766,346,000
2.0	532113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	105,910,000
2.0	532115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	7,680,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	32,436,270,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	804,996,304,000
2.0	533113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	66,940,000
2.0	533114	Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan	0	1,680,734,000
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	8,219,943,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	70,462,582,000
2.0	534111	Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	767,483,000
2.0	534131	Allotment Belanja Modal Jaringan	0	2,321,703,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	55,810,175,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	18,871,816,000
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	290,545,536
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	37,766,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	793,888,793
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,512,918,543
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	12,828,696,381
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	551,309	0
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	8,160,000
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	554,120,782
3.0	425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara	0	14,400,000
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	1,097,623,900,000
3.0	425212	Pendapatan Visa	0	222,629,046,105
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-	0	521,175,000,000
3.1	425213	Pengembalian Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk	43,900,000	0
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	284,920,400,000
3.1	425214	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	6,955,000	0
3.0	425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	0	740,195,750,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	425215	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Fidusia	15,800,000	0
3.0	425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	0	116,565,648,967
3.1	425216	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	20,500,000	0
3.0	425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	0	26,696,652,424
3.1	425217	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	3,500,000	0
3.0	425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	0	498,327,615,005
3.1	425218	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	33,400,000	0
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	118,735,738
3.0	425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	0	436,659,488
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	39,730,800
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	2,251,500,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	333,748,656
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,222,364,589
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	324,918,273
3.1	425791	Pengembalian Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian	3,457,868	0
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	114,537,252
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	4,625,448
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,128,709,007
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	563,453,100
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	5,867,432,869
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	3,890,682,321
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,180,493,658
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	603,242,347
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	119,984,831
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	312,083,350
3.1	425999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	12,850,000	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,161,201,857,478	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	699,215,074
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39,910,871	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	842,485
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	139,147,167,069	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	41,773,501
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	39,901,726,500	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	6,324,716
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	71,046,510,728	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	62,907,666
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	101,545,743,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	112,306,312
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,680,188,537	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	530,000
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	118,719,879,480	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	34,592,616

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	500,646,815,412	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	148,484,940
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	422,375,000	0
3.1	511135	Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat	0	125,000
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	6,681,795,000	0
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	9,455,000
3.0	511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	1,032,024,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	62,170,052,760	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	267,938,955
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	25,624,952,350	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,078,622,913,294	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	1,525,117,924
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	190,019,219,585	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	18,741,700
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1,369,642,333,361	0
3.1	521112	Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	376,566,838
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30,444,866,667	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,359,199,250	0
3.1	521114	Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,045,000
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82,213,302,531	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	23,797,000
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	65,289,197,382	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	10,964,940
3.0	521211	Belanja Bahan	230,909,464,492	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	144,894,305
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	48,786,362,928	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	80,198,250
3.0	521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	141,214,293	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	267,751,072,509	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	391,888,881
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	421,639,299,115	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	6,804,000
3.0	521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi	58,380,500	0
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	313,381,000	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	9,930,000	0
3.0	521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-	111,770,500	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	40,952,428,945	0
3.1	521832	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	34,925,000
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	152,340,357,720	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	63,289,379
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,660,577,784	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	14,474,450,814	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	73,210,347,133	0
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,840,000
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	167,032,986	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	37,717,545,693	0
3.0	522141	Belanja Sewa	277,704,698,993	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	514,372,790
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	80,150,700,093	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	268,637,500
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	77,468,649,686	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	164,455,565,075	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	29,614,446
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	1,480,260,402	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,811,630,643	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210,219,830,880	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	4,162,000
3.0	523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	501,882,535	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,158,365,675	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,355,693,796	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,220,645,700	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	226,707,650	0
3.0	523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	1,000,000	0
3.0	523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	5,613,800	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	705,046,380	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	338,276,868,712	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	9,760,317,441
3.0	524112	Belanja Perjalanan Tetap	676,300,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61,192,535,831	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	203,507,140
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78,393,256,383	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	648,386,392
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	96,930,001,830	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	3,577,032,256
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	58,135,340,078	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	9,399,825,650
3.0	524212	Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri	1,999,450,480	0
3.1	524212	Pengembalian Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri	0	20,756,046
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	21,108,918,171	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	448,609,261
3.0	531111	Belanja Modal Tanah	42,174,000	0
3.0	531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	5,650,000	0
3.0	531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	5,664,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	897,209,131,708	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,000,000
3.0	532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	746,643,000	0
3.0	532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	44,150,000	0
3.0	532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan	7,670,000	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	32,405,781,600	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	793,708,742,914	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	108,401,667
3.0	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	52,098,200	0
3.0	533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	1,470,733,440	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	8,120,595,717	0
3.1	533115	Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	45,673,000
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	47,926,527,984	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	741,840,910	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	2,241,334,192	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	44,917,066,591	0
3.1	536111	Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	8,581,000
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	16,272,535,882	0
JUMLAH			16,694,007,778,334	16,694,007,778,334



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK: NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,086,022,988	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	387,339,997	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	323,577,765	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	12,700,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	32,570,194,899	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	11,586,621,509	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	6,258,866	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	362,189,910,210	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	23,937,731,711	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	81,925,008	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	255,691,850	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	347,842,204,698
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	141,110,539
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	563,375
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	1,124,707
0.0	117111	Barang Konsumsi	364,667,077,931	0
0.0	117112	Amunisi	34,570,912,054	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,936,457,724	0
0.0	117114	Suku Cadang	359,369,392	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	911,500,000	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	41,584,625	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	742,218,657	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	562,444,277	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1,690,402,429	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	5,006,399,743	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	12,625,444,631,053	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,680,447,076,850	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,457,963,798,623	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	27,053,244,336	0
0.0	134112	Irigasi	14,712,398,057	0
0.0	134113	Jaringan	32,863,130,953	0
0.0	134212	Irigasi Belum Diregister	0	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	45,188,314,404	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	23,030,425,364	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	722,754,577,352	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,407,498,695,412
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,323,816,547,094
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	19,922,444,800
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	4,215,213,219
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	24,551,206,938
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	6,043,713,717
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	1,097,460,531	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	9,449,000,000	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan	0	85,597,165
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	47,245,000
0.0	162151	Software	365,999,789,149	0
0.0	162161	Lisensi	69,961,715,122	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	92,950,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	89,964,673,986	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	163119	Dana Lainnya	14,478,828,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	318,379,510,023	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	31,207,038,959	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	256,677,527,937
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	299,196,496,040
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	21,898,296,731
0.0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	2,609,225,500
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	31,148,148,626
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	12,919,440,645
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	77,374,781,805
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	379,186,966
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	138,616,469
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	14,406,595,599
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	57,545,454
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	1,875,541,229
0.0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	295,201,367,899
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	2,473,362,985
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	893,850
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	12,640,163,039,531
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,563,546,496,086	0
0.0	313211	Transfer Keluar	1,640,530,373,151	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,603,177,212,936
0.0	391111	Ekuitas	0	24,482,912,484,963
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	21,090,031,820
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,021,258,742,015	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	101,462,700
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	11,820,817,866
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	84,897,416,216
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	20,004	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	3,530,932,980
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	290,545,536
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	37,766,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	793,888,793
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,512,918,543
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,291,897,428
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	551,309	0
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	8,160,000
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	562,368,691
3.0	425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara	0	14,400,000
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	1,097,623,900,000
3.0	425212	Pendapatan Visa	0	222,629,046,105
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-	0	521,175,000,000
3.1	425213	Pengembalian Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk	43,900,000	0
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	274,970,400,000
3.1	425214	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	6,955,000	0
3.0	425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	0	740,180,600,000
3.1	425215	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Fidusia	15,800,000	0
3.0	425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	0	145,000,496,707
3.1	425216	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	20,500,000	0
3.0	425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	0	20,244,356,749
3.1	425217	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	3,500,000	0
3.0	425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	0	481,370,137,398
3.1	425218	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	33,400,000	0
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	118,735,738
3.0	425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	0	436,659,488
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	39,730,800
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	2,251,500,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	332,838,093
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,222,520,623
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	413,730,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,189,934,113

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	334,599,600
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	1,558,828,392
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	3,577,810,127
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,873,973,885
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	601,442,347
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	119,984,831
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	312,083,350
3.1	425999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	12,850,000	0
3.0	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	1,101,118,364
3.0	491311	Pendapatan Penyesuaian Lainnya	0	672,266
3.0	491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	0	4,057,929
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	10,819,490,258
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	770,392,672,043
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,160,905,886,744	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	699,215,074
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	39,862,518	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	842,485
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	139,142,619,555	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	41,773,501
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	39,900,666,773	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	6,324,716
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	71,014,045,728	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	62,907,666
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	101,542,573,784	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	112,306,312
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,681,117,027	0
3.1	511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0	530,000
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	118,719,155,280	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	34,592,616
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	499,489,102,628	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	148,484,940
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	422,375,000	0
3.1	511135	Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil	0	125,000
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	6,681,795,000	0
3.1	511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	9,455,000
3.0	511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	1,032,024,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	62,169,607,760	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	267,938,955
3.0	512211	Beban Uang Lembur	25,624,952,350	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,078,505,380,164	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	1,525,117,924
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	190,032,451,634	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	18,741,700
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	1,281,835,896,731	0
3.1	521112	Pengembalian Beban Pengadaan Bahan Makanan	0	376,566,838
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	30,444,866,667	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,344,660,311	0
3.1	521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,045,000
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	82,213,302,531	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	23,797,000
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	65,289,677,382	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	10,964,940
3.0	521211	Beban Bahan	230,359,258,760	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	144,894,305
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	48,786,362,928	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	80,198,250
3.0	521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	141,214,293	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	267,802,590,149	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	391,888,881
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	152,360,736,325	0
3.1	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	63,289,379
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	6,643,564,706	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	15,929,235,600	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	73,252,536,692	0
3.1	522119	Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,840,000
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	167,998,092	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	37,813,377,693	0
3.0	522141	Beban Sewa	282,173,383,846	0
3.1	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	514,372,790
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	80,150,700,093	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	268,637,500
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	77,598,047,267	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	164,564,018,125	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	29,614,446
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,811,630,643	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210,203,055,880	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	4,162,000
3.0	523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	501,882,535	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,355,693,796	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,220,645,700	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	226,707,650	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	705,046,380	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	330,799,847,817	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	9,760,317,441

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524112	Beban Perjalanan Tetap	676,300,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61,214,405,831	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	203,507,140
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78,393,256,383	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	648,386,392
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	96,930,001,830	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	3,577,032,256
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	58,135,340,078	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	9,399,825,650
3.0	524212	Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	1,999,450,480	0
3.1	524212	Pengembalian Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	0	20,756,046
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	21,108,918,171	0
3.1	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	448,609,261
3.0	526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	5,145,000	0
3.0	526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	700,616,061	0
3.0	526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	923,545,028	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	852,310,922,146	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	239,114,136,815	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,216,713,050	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	596,504,406	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	658,611,349	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	532,475,289	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	17,917,856,120	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	6,811,553,863	0
3.0	592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	2,609,225,500	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	19,166,667	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	3,563,127,933	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	605,045,441,811	0
3.0	593112	Beban Persediaan amunisi	4,115,457,328	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	28,020,186,707	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	1,984,034,947	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	301,152,624	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	4,960,295,924	0
3.0	593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	5,323,579,795	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	17,250,836,824	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	685,280,365,506	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	0	10,724,701,691
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	140,479,445	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	0	340,420
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	0	1,742,106
3.0	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	0	8,514,500
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2,565,300,492	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 07/05/2019 10:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	110,974,900	0
3.0	595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	21,900,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	14,852,439,484	0
3.0	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	2,615,188,918	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1,101,118,364	0
3.0	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	44,146,161	0
JUMLAH			51,369,257,717,729	51,369,257,717,729



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK : LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 07/05/19 10:48 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lo_kl --rekon17

Tgl Data : 07/05/19 6:00 AM

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,528,582,438,941	3,109,727,638,461	418,854,800,480	13.469
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,528,582,438,941	3,109,727,638,461	418,854,800,480	13.469
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,528,582,438,941	3,109,727,638,461	418,854,800,480	13.469
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,304,961,550,122	4,899,079,271,131	1,405,882,278,991	28.697
Beban Persediaan	636,996,764,306	162,533,989,438	474,462,774,868	291.916
Beban Barang dan Jasa	2,929,889,611,316	2,525,821,583,416	404,068,027,900	15.997
Beban Pemeliharaan	410,670,100,817	370,981,577,432	39,688,523,385	10.698
Beban Perjalanan Dinas	625,199,086,404	554,089,018,108	71,110,068,296	12.834
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1,629,306,089	307,668,046,124	(306,038,740,035)	(99.47)
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 07/05/19 10:48 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lo_kl --rekon17

Tgl Data : 07/05/19 6:00 AM

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,126,350,293,138	1,008,619,969,690	117,730,323,448	11.672
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(10,594,819,272)	(10,803,663,474)	208,844,202	(1.933)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	12,025,101,892,920	9,817,989,791,865	2,207,112,101,055	22.48
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,496,519,453,979)	(6,708,262,153,404)	(1,788,257,300,575)	26.658
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(10,507,866,148)	(20,397,881,863)	9,890,015,715	(48.486)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4,344,573,336	3,593,027,533	751,545,803	20.917
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	14,852,439,484	23,990,909,396	(9,138,469,912)	(38.091)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	109,161,762,369	63,678,249,015	45,483,513,354	71.427
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	798,343,795,611	473,815,158,469	324,528,637,142	68.493
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	689,182,033,242	410,136,909,454	279,045,123,788	68.037
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	98,653,896,221	43,280,367,152	55,373,529,069	127.941
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,397,865,557,758)	(6,664,981,786,252)	(1,732,883,771,506)	26
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,397,865,557,758)	(6,664,981,786,252)	(1,732,883,771,506)	26



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 07/05/19 10:53

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,482,912,484,963	23,088,519,377,924	1,394,393,107,039	6.039
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,397,865,557,758)	(6,664,981,786,252)	(1,732,883,771,506)	26
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(988,246,429,629)	859,122,012,324	(1,847,368,441,953)	(215.03)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	21,090,031,820	32,556,943,218	(11,466,911,398)	(35.221)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,021,157,279,315)	824,349,720,214	(1,845,506,999,529)	(223.87 4)
LAIN-LAIN	11,820,817,866	2,215,348,892	9,605,468,974	433.587
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,127,691,712,422	7,200,252,880,967	1,927,438,831,455	26.769
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(258,420,274,965)	1,394,393,107,039	(1,652,813,382,004)	(118.53 3)
EKUITAS AKHIR	24,224,492,209,998	24,482,912,484,963	(258,420,274,965)	(1.056)



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK : LRA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 06/05/19 11:48 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2018				2017			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3,250,308,730,000	3,563,546,496,086	(313,237,766,086)	110	2,875,709,734,001	3,222,827,045,677	(347,117,311,676)	112
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	3,250,308,730,000	3,563,546,496,086	(313,237,766,086)	110	2,875,709,734,001	3,222,827,045,677	(347,117,311,676)	112
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	6,424,058,555,000	6,306,574,297,290	117,484,257,710	98	4,901,745,114,000	4,892,271,875,697	9,473,238,303	100
	BELANJA BARANG	4,761,221,741,000	4,489,360,521,766	271,861,219,234	94	4,138,013,336,785	3,910,053,634,074	227,959,702,711	94
	BELANJA MODAL	1,915,936,626,000	1,845,754,684,471	70,181,941,529	96	2,576,987,198,215	1,615,700,834,081	961,286,364,134	63
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	13,101,216,922,000	12,641,689,503,527	459,527,418,473	96	11,616,745,649,000	10,418,026,343,852	1,198,719,305,148	90
C	PEMBIAYAAN				0				0



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA-BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA/AKUN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 06/05/19 11:48
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,681,803,803,000	2,229,605,677,857	2,161,201,857,478	699,215,074	2,160,502,642,404	96.93	69,103,035,453
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	287,410,000	44,518,678	39,910,871	842,485	39,068,386	89.65	5,450,292
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	125,535,879,000	140,913,159,870	139,147,167,069	41,773,501	139,105,393,568	98.75	1,807,766,302
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36,526,713,000	40,661,160,310	39,901,726,500	6,324,716	39,895,401,784	98.13	765,758,526
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	66,522,908,000	72,456,409,000	71,046,510,728	62,907,666	70,983,603,062	98.05	1,472,805,938
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	89,167,116,000	103,148,586,000	101,545,743,000	112,306,312	101,433,436,688	98.45	1,715,149,312
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,223,314,000	4,880,817,225	2,680,188,537	530,000	2,679,658,537	54.91	2,201,158,688
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	110,476,978,000	120,669,204,560	118,719,879,480	34,592,616	118,685,286,864	98.38	1,983,917,696
511129	Belanja Uang Makan PNS	442,685,446,000	517,769,728,000	500,646,815,412	148,484,940	500,498,330,472	96.69	17,271,397,528
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	412,575,000	444,505,000	422,375,000	125,000	422,250,000	95.02	22,255,000
511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	5,651,711,000	6,747,758,000	6,681,795,000	9,455,000	6,672,340,000	99.02	75,418,000
511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	958,308,000	1,032,024,000	1,032,024,000	0	1,032,024,000	100	0
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan	317,500,000	8,425,000	0	0	0	0	8,425,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	36,906,022,000	63,681,732,000	62,170,052,760	267,938,955	61,902,113,805	97.63	1,779,618,195
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2,100,381,000	11,930,000	0	0	0	0	11,930,000
511192	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	197,666,000	105,630,000	0	0	0	0	105,630,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,609,773,730,000	3,302,251,265,500	3,205,236,045,835	1,384,496,265	3,203,851,549,570	97.06	98,399,715,930
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	31,710,789,000	28,294,904,500	25,624,952,350	0	25,624,952,350	90.56	2,669,952,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	31,710,789,000	28,294,904,500	25,624,952,350	0	25,624,952,350	90.56	2,669,952,150
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,011,944,549,000	3,093,512,385,000	3,078,622,913,294	1,525,117,924	3,077,097,795,370	99.52	16,414,589,630
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	2,011,944,549,000	3,093,512,385,000	3,078,622,913,294	1,525,117,924	3,077,097,795,370	99.52	16,414,589,630
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,653,429,068,000	6,424,058,555,000	6,309,483,911,479	2,909,614,189	6,306,574,297,290	98.22	117,484,257,710
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	185,754,453,000	193,207,167,008	190,019,219,585	18,741,700	190,000,477,885	98.35	3,206,689,123
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1,177,713,675,000	1,384,417,059,000	1,369,642,333,361	376,566,838	1,369,265,766,523	98.93	15,151,292,477
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	33,942,415,000	31,370,741,000	30,444,866,667	0	30,444,866,667	97.05	925,874,333
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,658,204,000	7,569,835,000	6,359,199,250	1,045,000	6,358,154,250	84.01	1,211,680,750
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	85,541,626,000	83,977,600,000	82,213,302,531	23,797,000	82,189,505,531	97.9	1,788,094,469
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	63,128,803,000	69,083,330,000	65,289,197,382	10,964,940	65,278,232,442	94.51	3,805,097,558

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 06/05/19 11:48
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,549,739,176,000	1,769,625,732,008	1,743,968,118,776	431,115,478	1,743,537,003,298	98.55	26,088,728,710
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	205,277,223,400	252,682,249,400	230,909,464,492	144,894,305	230,764,570,187	91.38	21,917,679,213
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	49,392,469,000	54,176,832,000	48,786,362,928	80,198,250	48,706,164,678	90.05	5,470,667,322
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	274,484,000	208,527,000	141,214,293	0	141,214,293	67.72	67,312,707
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	213,368,272,000	287,834,909,000	267,751,072,509	391,888,881	267,359,183,628	93.02	20,475,725,372
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	468,312,448,400	594,902,517,400	547,588,114,222	616,981,436	546,971,132,786	92.05	47,931,384,614
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	196,267,341,000	435,233,348,000	421,639,299,115	6,804,000	421,632,495,115	96.88	13,600,852,885
521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi	0	60,000,000	58,380,500	0	58,380,500	97.3	1,619,500
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	433,028,000	337,071,000	313,381,000	0	313,381,000	92.97	23,690,000
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	1,673,675,000	15,000,000	9,930,000	0	9,930,000	66.2	5,070,000
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	113,904,000	113,904,000	111,770,500	0	111,770,500	98.13	2,133,500
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	272,611,974,000	41,463,890,000	40,952,428,945	34,925,000	40,917,503,945	98.77	546,386,055
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	471,099,922,000	477,223,213,000	463,085,190,060	41,729,000	463,043,461,060	97.04	14,179,751,940
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	166,116,572,000	157,410,577,992	152,340,357,720	63,289,379	152,277,068,341	96.78	5,133,509,651
522112	Belanja Langganan Telepon	11,093,877,000	8,742,138,000	6,660,577,784	0	6,660,577,784	76.19	2,081,560,216
522113	Belanja Langganan Air	16,366,046,000	15,872,473,000	14,474,450,814	0	14,474,450,814	91.19	1,398,022,186
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	102,179,950,000	76,239,909,000	73,210,347,133	1,840,000	73,208,507,133	96.03	3,031,401,867
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	5,043,010,000	287,257,000	167,032,986	0	167,032,986	58.15	120,224,014
522131	Belanja Jasa Konsultan	81,437,336,000	48,158,400,000	37,717,545,693	0	37,717,545,693	78.32	10,440,854,307
522141	Belanja Sewa	306,790,370,000	293,277,340,000	277,704,698,993	514,372,790	277,190,326,203	94.69	16,087,013,797
522151	Belanja Jasa Profesi	63,734,734,000	88,372,564,000	80,150,700,093	268,637,500	79,882,062,593	90.7	8,490,501,407
522191	Belanja Jasa Lainnya	93,597,223,000	103,434,787,000	77,468,649,686	0	77,468,649,686	74.9	25,966,137,314
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	846,359,118,000	791,795,445,992	719,894,360,902	848,139,669	719,046,221,233	90.92	72,749,224,759
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149,983,070,000	166,528,903,000	164,455,565,075	29,614,446	164,425,950,629	98.75	2,102,952,371
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	1,598,663,000	1,562,202,000	1,480,260,402	0	1,480,260,402	94.75	81,941,598
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,714,048,000	1,874,122,000	1,811,630,643	0	1,811,630,643	96.67	62,491,357
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	215,924,159,000	225,543,538,000	210,219,830,880	4,162,000	210,215,668,880	93.21	15,327,869,120
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	572,520,000	522,943,000	501,882,535	0	501,882,535	95.97	21,060,465
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,817,881,000	2,458,732,000	2,158,365,675	0	2,158,365,675	87.78	300,366,325
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,463,628,000	1,378,741,000	1,355,693,796	0	1,355,693,796	98.33	23,047,204
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,251,000,000	1,251,000,000	1,220,645,700	0	1,220,645,700	97.57	30,354,300

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 06/05/19 11:48
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	262,500,000	227,058,000	226,707,650	0	226,707,650	99.85	350,350
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	10,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	5,614,000	5,614,000	5,613,800	0	5,613,800	100	200
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,076,404,000	1,054,671,000	705,046,380	0	705,046,380	66.85	349,624,620
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	376,679,487,000	402,408,524,000	384,142,242,536	33,776,446	384,108,466,090	95.46	18,300,057,910
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	323,501,434,000	361,949,098,000	338,276,868,712	9,760,317,441	328,516,551,271	93.46	33,432,546,729
524112	Belanja Perjalanan Tetap	590,400,000	683,700,000	676,300,000	0	676,300,000	98.92	7,400,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	71,294,964,000	69,339,981,000	61,192,535,831	203,507,140	60,989,028,691	88.25	8,350,952,309
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71,212,580,600	86,073,446,600	78,393,256,383	648,386,392	77,744,869,991	91.08	8,328,576,609
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87,977,735,000	103,838,103,000	96,930,001,830	3,577,032,256	93,352,969,574	93.35	10,485,133,426
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	554,577,113,600	621,884,328,600	575,468,962,756	14,189,243,229	561,279,719,527	92.54	60,604,609,073
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	86,920,773,000	78,301,289,000	58,135,340,078	9,399,825,650	48,735,514,428	74.25	29,565,774,572
524212	Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri	1,649,917,000	2,000,532,000	1,999,450,480	20,756,046	1,978,694,434	99.95	21,837,566
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	28,475,952,000	23,080,159,000	21,108,918,171	448,609,261	20,660,308,910	91.46	2,419,850,090
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	117,046,642,000	103,381,980,000	81,243,708,729	9,869,190,957	71,374,517,772	78.59	32,007,462,228
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,383,813,907,000	4,761,221,741,000	4,515,390,697,981	26,030,176,215	4,489,360,521,766	94.84	271,861,219,234
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	50,000,000	50,000,000	42,174,000	0	42,174,000	84.35	7,826,000
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	40,000,000	10,000,000	5,650,000	0	5,650,000	56.5	4,350,000
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	6,000,000	5,664,000	0	5,664,000	94.4	336,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	90,000,000	66,000,000	53,488,000	0	53,488,000	81.04	12,512,000
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	828,855,733,000	919,356,740,000	897,209,131,708	1,000,000	897,208,131,708	97.59	22,148,608,292
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	766,346,000	746,643,000	0	746,643,000	97.43	19,703,000
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	105,910,000	44,150,000	0	44,150,000	41.69	61,760,000
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan	0	7,680,000	7,670,000	0	7,670,000	99.87	10,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	77,913,405,000	32,436,270,000	32,405,781,600	0	32,405,781,600	99.91	30,488,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	906,769,138,000	952,672,946,000	930,413,376,308	1,000,000	930,412,376,308	97.66	22,260,569,692
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	609,869,358,000	804,996,304,000	793,708,742,914	108,401,667	793,600,341,247	98.6	11,395,962,753
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	66,940,000	52,098,200	0	52,098,200	77.83	14,841,800
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	0	1,680,734,000	1,470,733,440	0	1,470,733,440	87.51	210,000,560

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 06/05/19 11:48
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	9,560,842,000	8,219,943,000	8,120,595,717	45,673,000	8,074,922,717	98.79	145,020,283
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	56,900,666,000	70,462,582,000	47,926,527,984	0	47,926,527,984	68.02	22,536,054,016
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	676,330,866,000	885,426,503,000	851,278,698,255	154,074,667	851,124,623,588	96.14	34,301,879,412
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	767,483,000	767,483,000	741,840,910	0	741,840,910	96.66	25,642,090
534131	Belanja Modal Jaringan	230,701,000	2,321,703,000	2,241,334,192	0	2,241,334,192	96.54	80,368,808
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	998,184,000	3,089,186,000	2,983,175,102	0	2,983,175,102	96.57	106,010,898
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	34,738,836,000	55,810,175,000	44,917,066,591	8,581,000	44,908,485,591	80.48	10,901,689,409
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	848,240,000	18,871,816,000	16,272,535,882	0	16,272,535,882	86.23	2,599,280,118
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	35,587,076,000	74,681,991,000	61,189,602,473	8,581,000	61,181,021,473	81.93	13,500,969,527
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,619,775,264,000	1,915,936,626,000	1,845,918,340,138	163,655,667	1,845,754,684,471	96.35	70,181,941,529
	JUMLAH BELANJA	10,657,018,239,000	13,101,216,922,000	12,670,792,949,598	29,103,446,071	12,641,689,503,527	96.71	459,527,418,473



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA-BELANJA
MENURUT
ESELON I/JENIS BELANJA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/19 10:53
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	2,305,408,490,000	3,470,939,597,000	3,397,016,855,948	1,659,982,166	3,395,356,873,782	97.82	75,582,723,218
52	BELANJA BARANG	256,272,896,000	274,954,164,000	267,992,799,289	389,900,056	267,602,899,233	97.33	7,351,264,767
53	BELANJA MODAL	201,800,000,000	232,171,527,000	230,313,876,035	0	230,313,876,035	99.2	1,857,650,965
	JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL	2,763,481,386,000	3,978,065,288,000	3,895,323,531,272	2,049,882,222	3,893,273,649,050	97.92	84,791,638,950
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	13,236,724,000	13,880,184,000	13,628,563,265	1,506	13,628,561,759	98.19	251,622,241
52	BELANJA BARANG	18,778,858,000	18,778,858,000	18,335,819,186	336,375,174	17,999,444,012	95.85	779,413,988
53	BELANJA MODAL	207,865,000	207,865,000	203,949,970	0	203,949,970	98.12	3,915,030
	JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL	32,223,447,000	32,866,907,000	32,168,332,421	336,376,680	31,831,955,741	97.87	1,034,951,259
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM							
51	BELANJA PEGAWAI	30,997,149,000	33,777,457,000	33,110,697,929	11,314,469	33,099,383,460	97.99	678,073,540
52	BELANJA BARANG	524,775,892,000	499,864,558,000	418,089,632,124	13,970,720,422	404,118,911,702	80.85	95,745,646,298
53	BELANJA MODAL	124,717,908,000	149,629,242,000	114,814,026,487	0	114,814,026,487	76.73	34,815,215,513
	JUMLAH BELANJA (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	680,490,949,000	683,271,257,000	566,014,356,540	13,982,034,891	552,032,321,649	82.84	131,238,935,351
05	DITJEN PEMASYARAKATAN							
51	BELANJA PEGAWAI	1,800,084,388,000	2,271,943,399,000	2,252,409,117,860	938,604,115	2,251,470,513,745	99.1	20,472,885,255
52	BELANJA BARANG	1,887,839,062,000	2,086,325,469,000	2,052,183,146,435	806,562,266	2,051,376,584,169	98.32	34,948,884,831
53	BELANJA MODAL	643,231,546,000	837,295,461,000	830,733,399,917	153,064,667	830,580,335,250	99.2	6,715,125,750
	JUMLAH BELANJA (05) DITJEN PEMASYARAKATAN	4,331,154,996,000	5,195,564,329,000	5,135,325,664,212	1,898,231,048	5,133,427,433,164	98.84	62,136,895,836
06	DITJEN IMIGRASI							
51	BELANJA PEGAWAI	389,570,883,000	509,535,021,000	495,140,471,465	259,263,379	494,881,208,086	97.12	14,653,812,914
52	BELANJA BARANG	1,297,750,506,000	1,292,172,984,000	1,204,427,310,766	7,697,917,609	1,196,729,393,157	92.61	95,443,590,843
53	BELANJA MODAL	556,356,731,000	565,020,132,000	548,765,290,697	2,010,000	548,763,280,697	97.12	16,256,851,303
	JUMLAH BELANJA (06) DITJEN IMIGRASI	2,243,678,120,000	2,366,728,137,000	2,248,333,072,928	7,959,190,988	2,240,373,881,940	95	126,354,255,060
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL							
51	BELANJA PEGAWAI	34,067,496,000	40,568,511,000	39,217,457,979	10,500,390	39,206,957,589	96.64	1,361,553,411
52	BELANJA BARANG	133,767,654,000	157,286,257,000	139,182,521,366	1,119,786,522	138,062,734,844	87.78	19,223,522,156
53	BELANJA MODAL	25,888,841,000	63,990,238,000	57,807,838,087	8,581,000	57,799,257,087	90.33	6,190,980,913
	JUMLAH BELANJA (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	193,723,991,000	261,845,006,000	236,207,817,432	1,138,867,912	235,068,949,520	90.21	26,776,056,480
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							
51	BELANJA PEGAWAI	13,569,635,000	15,651,199,000	15,096,472,519	3,377,676	15,093,094,843	96.43	558,104,157
52	BELANJA BARANG	27,557,671,000	27,557,671,000	25,943,333,507	57,232,681	25,886,100,826	93.93	1,671,570,174
53	BELANJA MODAL	292,201,000	292,201,000	284,082,000	0	284,082,000	97.22	8,119,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/19 10:53
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-	41,419,507,000	43,501,071,000	41,323,888,026	60,610,357	41,263,277,669	95	2,237,793,331
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA							
51	BELANJA PEGAWAI	11,568,138,000	13,348,153,000	12,740,077,988	2,008,632	12,738,069,356	95.43	610,083,644
52	BELANJA BARANG	22,555,545,000	24,127,545,000	23,533,708,083	77,531,868	23,456,176,215	97.22	671,368,785
53	BELANJA MODAL	160,000,000	188,000,000	186,240,000	0	186,240,000	99.06	1,760,000
	JUMLAH BELANJA (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA	34,283,683,000	37,663,698,000	36,460,026,071	79,540,500	36,380,485,571	96.8	1,283,212,429
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL							
51	BELANJA PEGAWAI	14,463,542,000	14,601,542,000	14,495,766,096	10,650,093	14,485,116,003	99.2	116,425,997
52	BELANJA BARANG	88,198,584,000	90,017,801,000	84,973,921,545	104,293,769	84,869,627,776	94.28	5,148,173,224
53	BELANJA MODAL	4,147,981,000	3,951,327,000	3,692,490,451	0	3,692,490,451	93.45	258,836,549
	JUMLAH BELANJA (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	106,810,107,000	108,570,670,000	103,162,178,092	114,943,862	103,047,234,230	95.02	5,523,435,770
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM							
51	BELANJA PEGAWAI	14,082,251,000	14,082,251,000	13,909,680,877	5,055,642	13,904,625,235	98.74	177,625,765
52	BELANJA BARANG	15,544,907,000	15,544,907,000	15,184,446,420	32,639,800	15,151,806,620	97.47	393,100,380
53	BELANJA MODAL	273,000,000	273,000,000	260,221,854	0	260,221,854	95.32	12,778,146
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	29,900,158,000	29,900,158,000	29,354,349,151	37,695,442	29,316,653,709	98.17	583,504,291
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN							
51	BELANJA PEGAWAI	26,380,372,000	25,731,241,000	22,718,749,553	8,856,121	22,709,893,432	88.26	3,021,347,568
52	BELANJA BARANG	110,772,332,000	274,591,527,000	265,544,059,260	1,437,216,048	264,106,843,212	96.18	10,484,683,788
53	BELANJA MODAL	62,699,191,000	62,917,633,000	58,856,924,640	0	58,856,924,640	93.55	4,060,708,360
	JUMLAH BELANJA (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	199,851,895,000	363,240,401,000	347,119,733,453	1,446,072,169	345,673,661,284	95.56	17,566,739,716
	JUMLAH BELANJA	10,657,018,239,000	13,101,216,922,000	12,670,792,949,598	29,103,446,071	12,641,689,503,527	96.71	459,527,418,473



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA-PENDAPATAN
MENURUT
KELOMPOK PENDAPATAN/AKUN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 07/05/19 10:49 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan					
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	34,230,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4231	34,230,000	0	0	0	0
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	650,000	0	0	0	0
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	18,050,000	290,545,536	0	290,545,536	1,609.67
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	37,766,000	0	37,766,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	36,880,000	793,888,793	0	793,888,793	2,152.63
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2,377,321,000	3,512,918,543	0	3,512,918,543	147.77
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,131,859,000	12,828,696,381	551,309	12,828,145,072	310.47
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	219,969,000	8,160,000	0	8,160,000	3.71
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)	2,800,000	0	0	0	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	862,470,000	554,120,782	0	554,120,782	64.25
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari	0	14,400,000	0	14,400,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	7,649,999,000	18,040,496,035	551,309	18,039,944,726	235.82
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425211	Pendapatan Paspor	1,908,097,000,000	1,097,623,900,000	0	1,097,623,900,000	57.52
425212	Pendapatan Visa	0	222,629,046,105	0	222,629,046,105	0
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	521,175,000,000	43,900,000	521,131,100,000	0
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	284,920,400,000	6,955,000	284,913,445,000	0
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	497,388,650,000	740,195,750,000	15,800,000	740,179,950,000	148.81
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	193,531,550,000	116,565,648,967	20,500,000	116,545,148,967	60.22
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	179,340,525,000	26,696,652,424	3,500,000	26,693,152,424	14.88

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 07/05/19 10:49 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	461,654,000,000	498,327,615,005	33,400,000	498,294,215,005	107.94
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	18,600,000	118,735,738	0	118,735,738	638.36
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	3,240,030,325,000	3,508,252,748,239	124,055,000	3,508,128,693,239	108.27
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	0	436,659,488	0	436,659,488	0
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	39,730,800	0	39,730,800	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	0	476,390,288	0	476,390,288	0
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,251,500,000	2,251,500,000	0	2,251,500,000	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	2,251,500,000	2,251,500,000	0	2,251,500,000	100
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	70,700,000	0	0	0	0
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	152,955,000	333,748,656	0	333,748,656	218.2
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	223,655,000	333,748,656	0	333,748,656	149.22
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1,831,000	1,222,364,589	0	1,222,364,589	66,759.4
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	24,000,000	324,918,273	3,457,868	321,460,405	1,339.42
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	114,537,252	0	114,537,252	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	4,625,448	0	4,625,448	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	25,831,000	1,666,445,562	3,457,868	1,662,987,694	6,437.95
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,128,709,007	0	9,128,709,007	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	563,453,100	0	563,453,100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	9,692,162,107	0	9,692,162,107	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 07/05/19 10:49 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	56,001,000	5,867,432,869	0	5,867,432,869	10,477.37
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	36,000,000	3,890,682,321	0	3,890,682,321	10,807.45
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,180,493,658	0	12,180,493,658	0
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	89,000	0	0	0	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	603,242,347	0	603,242,347	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	119,984,831	0	119,984,831	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,100,000	312,083,350	12,850,000	299,233,350	27,203.03
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	93,190,000	22,973,919,376	12,850,000	22,961,069,376	24,638.98
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,250,308,730,000	3,563,687,410,263	140,914,177	3,563,546,496,086	109.64
	JUMLAH PENDAPATAN	3,250,308,730,000	3,563,687,410,263	140,914,177	3,563,546,496,086	109.64



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA-PENDAPATAN
MENURUT
ESELON I/AKUN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/19 10:50 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,778,000	0	5,778,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	125,760,000	0	125,760,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	649,421,510	0	649,421,510	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,400,786,000	4,528,272,539	0	4,528,272,539	133.15
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	209,969,000	0	0	0	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	847,920,000	0	0	0	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	17,986,528	702,868	17,283,660	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	23,520,000	0	23,520,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	13,370,055	0	13,370,055	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	563,453,100	0	563,453,100	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,132,871,690	0	5,132,871,690	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	229,962,551	0	229,962,551	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	603,242,347	0	603,242,347	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	17,374,928	0	17,374,928	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	495	0	495	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	4,458,675,000	11,911,013,743	702,868	11,910,310,875	267.14
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	17,509,400	0	17,509,400	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,000,000	6,214,312	0	6,214,312	207.14
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	633	0	633	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	72,009,300	0	72,009,300	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	3,000,000	95,733,645	0	95,733,645	3,191.12
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/19 10:50 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	500,000	0	500,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,205,000	0	1,205,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	107,789,089	0	107,789,089	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	200,000	11,836,565	0	11,836,565	5918.28
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	497,388,650,000	740,195,750,000	15,800,000	740,179,950,000	148.81
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	193,531,550,000	116,565,648,967	20,500,000	116,545,148,967	60.22
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	179,340,525,000	26,696,652,424	3,500,000	26,693,152,424	14.88
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	5,005	0	5,005	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	75,000	1,213,326,625	0	1,213,326,625	1617768.83
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	53,625,008	0	53,625,008	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	26,988,117	0	26,988,117	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	171,644	0	171,644	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,591,641,480	0	1,591,641,480	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	3,394,082	0	3,394,082	0
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	870,261,000,000	886,468,534,006	39,800,000	886,428,734,006	101.86
05	DITJEN PEMASYARAKATAN					
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	34,230,000	0	0	0	0
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	650,000	0	0	0	0
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	18,050,000	290,545,536	0	290,545,536	1609.67
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	27,988,000	0	27,988,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	36,880,000	265,724,910	0	265,724,910	720.51
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2,377,321,000	684,168,924	0	684,168,924	28.78
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	703,152,000	5,669,114,722	551,309	5,668,563,413	806.16
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	10,000,000	8,160,000	0	8,160,000	81.6

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/19 10:50 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)	2,800,000	0	0	0	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	14,550,000	484,405,582	0	484,405,582	3329.25
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari	0	14,400,000	0	14,400,000	0
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	18,600,000	118,735,738	0	118,735,738	638.36
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	0	436,659,488	0	436,659,488	0
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	39,730,800	0	39,730,800	0
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	70,700,000	0	0	0	0
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	122,955,000	332,943,651	0	332,943,651	270.78
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1,756,000	8,860,481	0	8,860,481	504.58
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	24,000,000	132,018,575	0	132,018,575	550.08
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	6,512,252	0	6,512,252	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,505,827,031	0	2,505,827,031	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	56,001,000	572,870,133	0	572,870,133	1022.96
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	36,000,000	998,222,085	0	998,222,085	2772.84
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,909,993,335	0	7,909,993,335	0
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	89,000	0	0	0	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	101,571,063	0	101,571,063	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,100,000	17,662,545	0	17,662,545	1605.69
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN PEMASYARAKATAN	3,528,834,000	20,626,114,851	551,309	20,625,563,542	584.5
06	DITJEN IMIGRASI					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,500,000	0	3,500,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	321,416,500	0	321,416,500	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,678,249,477	0	1,678,249,477	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,553,643,919	0	2,553,643,919	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/19 10:50 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	38,965,200	0	38,965,200	0
425211	Pendapatan Paspor	1,908,097,000,000	1,097,623,900,000	0	1,097,623,900,000	57.52
425212	Pendapatan Visa	0	222,629,046,105	0	222,629,046,105	0
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	521,175,000,000	43,900,000	521,131,100,000	0
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	284,920,400,000	6,955,000	284,913,445,000	0
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	800,000	0	800,000	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	172,897	0	172,897	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	93,444,162	2,755,000	90,689,162	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	84,505,000	0	84,505,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	1,500,000	0	1,500,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	6,450,348,835	0	6,450,348,835	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	93,163,669	0	93,163,669	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	726,030,966	0	726,030,966	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,270,500,323	0	4,270,500,323	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,038,840	0	1,038,840	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	86,613,878	0	86,613,878	0
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN IMIGRASI	1,908,097,000,000	2,142,752,239,771	53,610,000	2,142,698,629,771	112.3
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	199,564,543	0	199,564,543	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,028,077	0	8,028,077	0
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	461,654,000,000	498,327,615,005	33,400,000	498,294,215,005	107.94
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	100,577,885	0	100,577,885	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,134	0	6,134	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	254,477,730	0	254,477,730	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/19 10:50 AM

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	201,375,450	12,850,000	188,525,450	0
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN	461,654,000,000	499,091,644,824	46,250,000	499,045,394,824	108.11
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,888,888	0	6,888,888	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	15,225,000	0	15,225,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,321,000	3,592,800	0	3,592,800	49.08
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	2,500,000	0	2,500,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	3,125,448	0	3,125,448	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	24,757,471	0	24,757,471	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,049,209	0	7,049,209	0
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-	7,321,000	63,138,816	0	63,138,816	862.43
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	9,500,000	0	9,500,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,500,000	3,187,212	0	3,187,212	91.06
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	30,750,000	0	30,750,000	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	22,344,000	0	22,344,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,655,807	0	10,655,807	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,815,000	0	8,815,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	3,018,000	0	3,018,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA	3,500,000	88,270,019	0	88,270,019	2,522
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9,400,000	1,537,302	0	1,537,302	16.35
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,565,101	0	18,565,101	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,474,000	0	2,474,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/19 10:50 AM

Halaman : 6

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	9,400,000	22,576,403	0	22,576,403	240.17
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	55,384,095	0	55,384,095	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,500,000	0	0	0	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	3,000,000	0	3,000,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	186,420	0	186,420	0
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN PENELITIAN DAN	4,500,000	58,570,515	0	58,570,515	1,301.57
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	169,000,000	0	169,000,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	43,268,933	0	43,268,933	0
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,251,500,000	2,251,500,000	0	2,251,500,000	100
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	30,000,000	0	0	0	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	4,586	0	4,586	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	31,597,084	0	31,597,084	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,184,167	0	14,184,167	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	18,900	0	18,900	0
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	2,281,500,000	2,509,573,670	0	2,509,573,670	110
	JUMLAH PENDAPATAN	3,250,308,730,000	3,563,687,410,263	140,914,177	3,563,546,496,086	109.64

